BERTAHAN
dalam impunitas
Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan

Bertahan dalam Impunitas

Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan

BERTAHAN DALAM IMPUNITAS
Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan

Cetakan
Pertama, Oktober 2015

Tim Penulis
Galuh Wandita, Agustina Amtaran, Ani Sipa, Baihajar Tualeka, Christina Sumarmiyati, Indah Radja, Karen Campbell-Nelson, Matheos Viktor Messakh, Mohammad Noor Romadlon, Nurjamaliah, Paoina Ngefak Bara Pa, Pipit Ambarmirah, Radhiah, Samsidar, Sorang Saragih, Sudarsini, Tati Krisnawaty, Tegan Molony, dan Zandra Mambrasar

Editor
Dodi Yuniar dan Matt Easton

Foto Isi
Anne-Cécile Esteve, dan Selviana Yolanda

Foto Sampul
Anne-Cécile Esteve
Ibu Hartiti berdiri di Gedung Jefferson, sebuah tempat penyiksaan di Yogyakarta. Ini adalah lokasi dimana ia terakhir kali bertemu dengan suaminya pada tahun 1965 sebelum suaminya dihilangkan.

Desain
Ellena Ekarahendy

Infografis
John Patrick Kelleher

Ukuran Buku
14 x 21 cm

ISBN
978-602-72951-6-2

Tentang Asia Justice and Rights
Asia Justice and Rights (AJAR) adalah organisasi non-profit yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, AJAR juga memiliki kantor di Dili, Timor-Leste, dan di Yangon, Myanmar, serta memiliki sebuah pusat pelatihan di Bali, Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, lihat http://asia-ajar.org/.

Tentang Komnas Perempuan
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan HAM perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Info lebih lanjut, kunjungi http://www.komnasperempuan.or.id/.

Bertahan dalam Impunitas

Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan

Diterbitkan oleh Asia Justice and Rights (AJAR) dan Komnas Perempuan atas kerjasama dengan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) NTT, Kiprah Perempuan (KIPPER) Yogyakarta, Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku, LBH Apik Aceh, serta Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM Papua).

Hal yang paling otentik
tentang kita adalah kemampuan
kita untuk menciptakan, untuk
mengatasi, untuk bertahan, untuk
bertransformasi,
untuk mencintai, dan untuk menjadi
lebih besar dari penderitaan kita.

– BEN OKRI

Kata Pengantar

Di tengah semakin berkurangnya perhatian pemerintah terhadap penyelesaian sejumlah persoalan yang disisakan oleh berbagai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan melemahnya gerakan sipil dalam menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM, kehadiran buku "Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan" ini memberi cara baru untuk menyuarakan persoalan bangsa yang belum terselesaikan. Inisiatif 8 perempuan pendamping korban melahirkan sebuah manual penelitian partisipatif, menggunakannya bersama 60 perempuan penyintas, dan menyajikan hasilnya dalam sebuah buku yang ada di hadapan kita semua, adalah upaya yang patut diapresiasi. Buku ini tidak hanya menjadi ruang bagi perempuan korban untuk membagikan pengalaman dan harapannya, tetapi juga pengetahuan baru bagi gerakan perempuan tentang bagaimana perempuan korban kekerasan mengalami impunitas, dan bagaimana kita semua menemukan cara untuk melepas belenggu impunitas tersebut. Selain itu, kesaksian 60 perempuan korban yang terdokumentasikan dalam buku ini juga memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua bagaimana keterkaitan kekerasan dengan pemiskinan serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.

Sebagai mekanisme nasional HAM dengan mandat spesifik penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia, Komnas Perempuan memandang penting mendukung penerbitan buku ini agar dapat menjadi pengetahuan publik dan digunakan oleh gerakan masyarakat sipil sebagai cara baru berkomunikasi dengan korban dan juga pemerintah.

Secara sengaja, Komnas Perempuan menghubungkan para peneliti dan hasil penelitian ini dengan Forum Penyedia Layanan (FPL) yang juga telah bekerja panjang mendampingi perempuan-perempuan korban kekerasan, terutama dalam lingkup domestik. Melalui upaya ini Komnas Perempuan ingin mengkonsolidasi kekuatan gerakan perempuan di ranah isu kekerasan domestik dan politik, dan mengurai sekat pemisah kerja-kerja advokasi dan pemulihan.

Pelanggaran kemanusiaan yang dialami perempuan dalam konflik bukanlah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan dengan kerja-kerja taktis dan parsial. Dibutuhkan kekuatan yang terkonsolidasi dan konsistensi gerakan untuk mendorong negara memenuhi hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Jakarta 21 September 2015

AZRIANA
Ketua Komnas Perempuan

Sekapur Sirih

Sekelompok sahabat, teman seperjuangan yang terus bekerja menangani cedera kemanusiaan yang terjadi akibat konflik, bersepakat untuk menggagas sebuah pendekatan baru untuk bekerja bersama perempuan penyintas.

Kelompok ini beranggotakan delapan perempuan, saya sendiri (Galuh Wandita), Samsidar, Tati Krisnawaty, Manuela Pereira, Zandra Mambrasar, Bai Tualeka, Christina Sumarmiyati, dan Karen Campbell-Nelson. Perjalanan hidup kami telah terbentuk oleh gejolak konflik dari Aceh ke Timor-Timur, dari kasus 1965, Ambon sampai Papua. Persahabatan kami juga diwadahi oleh Komnas Perempuan, rumah kami bersama. Walaupun peran dan pergaulan kami dengan Komnas Perempuan dalam bentuk yang berbeda, nilai keberpihakan pada korban perempuan menjadi tali pengikat melintas periode yang panjang.

Kami menjalin persahabatan yang melintas wilayah konflik dan transisi politik. Dengan berbagai capaian dan banyak kekecewaaan, kadang kami hanya bermodalkan akal dan imajinasi untuk bisa terus bekerja dengan korban perempuan. Kami terus bekerja dengan para korban jauh setelah konflik mereda.

Kami mengenal mereka ketika mereka masih muda, dan kini hampir dua dekade kemudian, kami mengetahui perjuangan mereka di kala mereka memasuki usia senja, sama seperti kami yang juga semakin menua dan bijaksana.

Kami juga mengalami sebuah transisi yang lain. Dari sebuah situasi dimana kami ada di tengah konflik yang diliput oleh media nasional dan internasional (1999 adalah tahun kunci bagi kami) menjadi aktivitis yang dikatakan "terjebak" dalam masa lalu. Para korban perempuan nyaris tak terlihat, dan perjuangan mereka bukan lagi sesuatu yang menarik perhatian. Pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga bantuan internasional telah "berpindah hati". Namun, kami masih mempunyai hubungan dekat dengan para korban perempuan ini. Kami menyaksikan bagaimana beberapa dari mereka tergelincir dalam siklus kemiskinan dan diskriminasi.

Buku ini, dan buku pelengkapnya, "Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas", lahir dari sebuah komitmen untuk mencari cara baru untuk bekerja dengan para korban perempuan yang terlupakan ini. Dari persahabatan kami, kami tahu bahwa mereka memiliki daya juang, dan terus menemukan cara untuk menghadapi berbagai tantangan sulit. Sebagian dari mereka bertahan hidup lebih lama dibanding para pelaku, namun masyarakat telah meninggalkan mereka. Kami ingin menemukan sebuah cara untuk menghubungkan titik-titik antara masa lalu mereka dan masa depan kita bersama. Tak hanya berkutat dengan kisah-kisah pilu di masa lalu, tapi juga untuk mengakui sejarah mereka dan menemukan energi baru untuk perubahan. Sejak awal, kami ingin menciptakan sebuah proses yang partisipatif, yang menghasilkan produk-produk "visual". Termasuk sebuah buku yang bisa menjangkau beragam kelompok pembaca: perempuan tingkat akar rumput, pengambil kebijakan, akademisi, dan perempuan biasa yang selama hidupnya belum pernah bersentuhan dengan konflik.

Beberapa perempuan dan laki-laki dari generasi yang lebih muda serta korban perempuan dari Indonesia dan Timor-Leste bergabung bersama kami. Enam bulan kemudian, sepuluh perempuan dari wilayah konflik Myanmar dan mantan tahanan politik yang kebanyakan baru saja dibebaskan dari penjara, juga bergabung dalam upaya ini. Akhirnya, tim peneliti kami terdiri dari 38 perempuan dan 1 laki-laki.

Tim peneliti yang berasal dari Indonesia, Timor-Leste, dan Myanmar.

Catatan tentang "penulis"

Meskipun penelitian ini memiliki tim inti yang menginisiasi, mencari sumber daya dan menjalankan berbagai tahapan, termasuk mencari tenaga relawan yang mendukung penelitian ini, upaya kolektiflah yang akhirnya menghasilkan produk akhir. Para peneliti lapangan, semuanya berjumlah 39 orang, menghadapi medan yang sulit, cuaca yang buruk, serta ketidakpedulian dan penyangkalan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Tim peneliti di Kachin State, Myanmar harus berhadapan dengan kontak senjata yang muncul kembali ketika penelitian berlangsung. Di antara para mantan tahanan politik di Myanmar, beberapa

telah ditangkap kembali selama proses penelitian ini. Di Timor-Leste, kebanyakan korban perempuan yang menjadi fasilitator penelitian ini awalnya diejek oleh kelompok mereka, namun secara perlahan rasa percaya diri tumbuh kembali dalam diri mereka. Di Indonesia, salah satu korban perempuan dari tragedi 1965, harus naik ojek dengan kruk yang menggantung di sisinya untuk bisa menghadiri pertemuan-pertemuan kami.

Penelitian partisipatif ini menantang gagasan kepemilikan pengetahuan. Siapa yang berhak menjadi “pemilik” pengetahuan ini? Orang yang mengalami dan membagikan pengalaman mereka, orang yang memfasilitasi proses untuk berbagi, atau orang yang menulis buku ini? Kami berpandangan bahwa dibutuhkan orang sekampung untuk menulis buku ini, sehingga kepemilikan (*authorship*) buku ini bersifat kolektif.

Peneliti utama: Galuh Wandita, Samsidar, Tati Krisnawaty, Manuela Pereira, Zandra Mambrasar, Bai Tualeka, Christina Sumarmiyati, Karen Campbell-Nelson, Nuela Labranche dan Sorang Saragih. Tim peneliti lapangan di setiap wilayah menjadi barisan terdepan kami. Mereka menghadapi dan melalui berbagai tantangan. Di Indonesia: Radhiah, Nurjamaliah (Aceh); Pipit Ambarmirah, Mohammad Noor Romadlon (Yogyakarta); Paoina Ngefak Bara Pa, Agustina Amtaran, Indah Radja (Kupang); Sudarsini (Buru); Ani Sipa (Papua). Di Timor-Leste: Celestina de Almeida (ACbit), Natalia de Jesus, Felismina dos Santos da Conçeição, Maria de Fatima, Maria Imaculada, Ana Paula Soares Ximenes, Alda Baptista Barros, Margarida Pereira, dan Teresinha Soares Cardoso. Dan, di Myanmar: Hkawng Seng Pan (AJAR), Naw Khin Pyu, Myint Daw Thuzar Tin (WON); Mai Ja, Angela, Ah Hkam (KWAT); Naw Cynthia Win, Naw Hpaw Shee Wah, Naw Noe Lah (KWEG). Ketika semua penelitian selesai dilaksanakan, kami mengorganisir kembali tim kami untuk menyusuri gunung informasi dan menghasilkan sebuah narasi. Penulis utama: Galuh Wandita, Karen Campbell-

Nelson, Tegan Molony, Nuela Labranche, Angela Martin (versi bahasa Inggris); Samsidar, Tati Krisnawaty, Manuela Pereira, Zandra Mambrasar, Baihajar Tualeka, Mohammad Noor Romadlon, Sorang Saragih, dan Matheos Viktor Messakh (versi bahasa Indonesia).

Kami perlu berterima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung kami selama perjalanan ini. Terima kasih banyak kepada Rosalia Sciortino (dulu di IDRC) and Navsharan Singh (IDRC) yang telah menaruh kepercayaan pada kami! Komnas Perempuan yang telah mendukung dan memayungi kerja kami di Indonesia, menjembatani proses dan hasil penelitian ini dengan lembaga pemerintah dan forum penyedia layanan bagi para perempuan korban kekerasan. Kami juga menggandeng perempuan lain yang berbagi keahlian dan semangat mereka kepada kami. Ria Papermoon menciptakan sebuah proses bagi para korban untuk menceritakan kisah mereka melalui pementasan teater boneka. Anne-Cécile Esteve menangkap proses penelitian lewat foto dan video. Emily Harwell memberi masukan untuk merancang alat-alat penelitian untuk memahami dampak sosial ekonomi dari konflik, dan menghasilkan beberapa temuan awal tentang isu tersebut. Alex Scrivner membantu menyambung potongan-potongan kesaksian ke dalam draft awal. Dan terakhir, Matt Easton dan Dodi Yuniar membantu membentuk buku ini, dengan kesabaran mendampingi proses dan keahlian mereka menyunting kata-kata.

Khususnya, AJAR ingin mengucapkan terima kasih kepada IDRC, Uni Eropa, Kedutaan Inggris di Jakarta, dan Komnas Perempuan atas dukungan mereka untuk inisiatif ini. Tanpa kontribusi mereka, kami tidak akan mampu menjangkau 140 perempuan yang hidup dan perjuangan mereka terus menginspirasi kami. Sebuah edisi khusus tentang hasil penelitian yang terfokus pada konteks Indonesia Indonesia dengan 60 narasumber perempuan korban dan penyintas diterbitkan dalam rangka perayaan ulang tahun ke 17 Komnas Perempuan. Namun begitu, ucapan terima kasih yang terdalam kami ucapkan bagi para korban perempuan. Tanpa keberanian dan kemurahan hati mereka, yang akan ada hanyalah keheningan belaka.

GALUH WANDITA
Asia Justice and Rights

Daftar Isi

Daftar Singkatan dan Akronim

ABRI:
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

ACBIT:
Asosiasaun Chega! Ba Ita

ACWC:
ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children

AICHR:
ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

AJAR:
Asia Justice and Rights

ASEAN:
Association of Southeast Asian Nations

BABINSA:
Bintara Pembina Desa

BLT:
Bantuan Langsung Tunai

BTI:
Barisan Tani Indonesia

CAVR:
Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste atau Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste

CGMI:
Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia

CPM:
Corps Polisi Militer

DOM:
Daerah Operasi Militer

DPR:
Dewan Perwakilan Rakyat

ELSHAM PAPUA:
Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua

ET:
Eks Tapol

G30S:
Gerakan 30 September 1965

GAM:
Gerakan Aceh Merdeka

GERWANI:
Gerakan Wanita Indonesia

GPK:
Gerakan Pengacau Keamanan

HAM:
Hak Asasi Manusia

HSI:
Himpunan Sarjana Indonesia

IDRC:
International Development Research Centre

INREHAB:
Instalasi dan Rehabilitasi

IPPI:
Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia

JPIT:
Jaringan Perempuan Indonesia Timur

KIPPER:
Kiprah Perempuan

KKP:
Komisi Kebenaran dan Persahabatan

KKPK:
Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran

KKR:
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

KNPI:
Komite Nasional Pemuda Indonesia

KODAM:
Komando Daerah Militer

KODIM:
Komando Distrik Militer

KOMNAS HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

KOMNAS PEREMPUAN:
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

KOPASSANDHA:
Komando Pasukan Sandi Yudha

KORAMIL:
Komando Rayon Militer

KOREM:
Komando Resort Militer

KPTKA:
Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh

KTP:
Kartu Tanda Penduduk

KUA:
Kantor Urusan Agama

KWAT:
Kachin Women Association Thailand

KWEG:
Karen Women Empowerment Group

LAPPAN:
Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak

LBH APIK:
Lembaga Bantuan Hukum Apik

LEKRA:
Lembaga Kebudayaan Rakyat

LP:
Lembaga Pemasyarakatan

LPSK:
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LSM:
Lembaga Swadaya Masyarakat

MPR:
Majelis Permusyawaratan Rakyat

MRP:
Majelis Rakyat Papua

NASAKOM:
Nasionalisme, Agama, Komunis

NTT:
Nusa Tenggara Timur

OPM:
Organisasi Papua Merdeka

PBB:
Perserikatan Bangsa-Bangsa

PELITA:
Pembangunan Lima Tahun

PEPERA:
Penentuan Pendapat Rakyat

PJKA:
Perusahaan Jawatan Kereta Api

PKI:
Partai Komunis Indonesia

PKK:
Program Kesejahteraan Keluarga

PNS:
Pegawai Negeri Sipil

POLRI:
Kepolisian Negara Republik Indonesia

POM:
Polisi Militer

RESPEK:
Rencana Strategis Pembangunan Kampung

RPKAD:
Resimen Para Komando Angkatan Darat

RRI:
Radio Republik Indonesia

RT:
Rukun Tetangga

SB:
Serikat Buruh

SD:
Sekolah Dasar

SDN:
Sekolah Dasar Negeri

SGI:
Satuan Gabungan Intelijen

SK:
Surat Keputusan

SKPD:
Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SMA:
Sekolah Menengah Atas

SMEA:
Sekolah Menengah Ekonomi Atas

SMP:
Sekolah Menengah Pertama

SOBSI:
Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia

SR:
Sekolah Rakyat

SRPIT:
Sekolah Rakyat Perubahan Indonesia Tionghoa

TAPOL:
Tahanan Politik

TBC:
Tuberculosis

TBO:
Tenaga Bantuan Operasi

TK:
Taman Kanak-Kanak

TNI:
Tentara Nasional Indonesia

TTS:
Timor Tengah Selatan

UNHCR:
United Nations High Commissioner for Refugees

UGM:
Universitas Gadjah Mada

USIS:
United States Information Service

UU:
Undang-Undang

WON:
Women's Organizations Network of Myanmar

1

Pengantar

Angela, perempuan Timor yang menjadi korban penculikan dan pemerkosaan dalam konflik Timor-Timur tahun 1999.

Pengantar

Pada tahun 1999, Angela adalah seorang perempuan muda berusia 24 tahun yang penuh percaya diri dengan mata yang memancarkan semangat dan tekad sekalipun trauma masih membekas di dirinya. Ia telah memecah kebisuan tentang penculikan dan pemerkosaan yang dialaminya. Ia dan dua orang perempuan dari desa Lolotoe, Bobonaro menjadi korban dari kekerasan milisi yang berada di bawah kendali militer Indonesia menjelang jajak pendapat di Timor-Timur. Setelah kehadiran pasukan penjaga perdamaian PBB, keberaniannya mendorong PBB mengadakan penyelidikan tentang kasus kekerasan di Lolotoe. Pada tahun 2003, pengadilan kejahatan berat yang didirikan oleh PBB dan pemerintah Timor-Leste mengeluarkan sebuah putusan

bersejarah yang menyatakan bahwa telah terjadi pemerkosaan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun, kemenangan ini menyisakan kepahitan baginya. Pada akhirnya, kritikan dan ejekan lebih banyak mewarnai hidupnya dibanding kemenangan yang diperolehnya di pengadilan pada tahun 2003 lalu. Bahkan selama dua tahun, ia tidak diberitahu tentang putusan pengadilan itu. Angela hanya bisa pasrah ketika pelakunya, Johni Marques, diberi grasi dan dibebaskan pada tahun 2008.

Kini Angela tampak kelelahan, tubuhnya kurus kering dengan kulit yang terbakar matahari membalut tulang. Ia menderita sakit yang tidak diketahui dan membuat berat badannya turun. Ia terpaksa terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan, belum sanggup untuk naik ojek untuk menempuh tiga jam perjalanan ke kota terdekat untuk bisa berobat. Ia tampak jauh lebih tua dari yang seharusnya, namun ia tetap berwibawa dan memancarkan kecantikan alami ketika ia tersenyum.

Sebagai seorang penyintas perkosaan, peluangnya untuk menikah tidak baik. Pada tahun 2004, dia menikah dengan seseorang yang sudah beristri. Katanya, “Banyak orang membenci saya karena saya menikah dengannya. Istrinya melaporkan saya ke polisi.”

Namun, suaminya memperlakukan dia dengan baik. Suaminya selalu menghibur dia, memintanya untuk tidak usah memikirkan apa yang telah terjadi. Mereka hidup dengan sederhana.

"Sekarang saya hidup dari berkebun bersama suami saya. Kami menjual hasil kebun kami, jagung, untuk bisa membeli beras untuk makanan anak-anak... Kami mendorong anak-anak kami untuk bersekolah. Bila ada proyek buruh dari pemerintah yang bergaji 3 dollar [sehari], kami mengerjakan itu untuk bisa membeli makanan. Ada atau tidak perhatian negara [untuk saya] tidak ada bedanya buat saya. Saya hanya bersabar."

Kisah Angela seharusnya dirayakan sebagai sebuah kisah keberhasilan yang langka oleh gerakan perempuan di Asia karena ini adalah satu-satunya kasus yang putusan pengadilannya menyatakan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di kawasan Asia dalam satu dekade terakhir.[1] Namun pada akhirnya, putusan pengadilan itu ternyata tidak menguntungkan Angela karena persepsi negatif dari para tetangga dan komunitasnya terus membayangi kehidupannya. Impunitas menjelma sebagai bagian dari budaya yang menghukum dan membungkam orang-orang yang berani bersuara, sekaligus mengabaikan kebutuhan sosial dan ekonomi para korban.

Penelitian Aksi Partisipatif

Penelitian ini lahir dari kegelisahan panjang yang mendampingi Angela dan korban perempuan lainnya yang terus bernasib buruk dalam perjuangan untuk mendapatkan keadilan dalam konteks masyarakat pasca-konflik. Capaian di Indonesia masih sangat kecil sekalipun telah ada komitmen nasional dan global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Indonesia bahkan telah menerbitkan sebuah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, sebagai implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1325 (2000) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Indonesia juga mendukung Deklarasi untuk Menghentikan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada tahun 2013. Namun pada kenyataannya dari 60 perempuan yang terlibat penelitian ini tak satu pun bisa mengakses pengadilan.[2] Impunitas menjadi keseharian yang dialami para korban perempuan. Kebanyakan dari mereka telah dilupakan dan diabaikan oleh masyarakat dan negara.

Keenam puluh perempuan ini berasal dari 5 wilayah meliputi: Yogyakarta, Pulau Buru, Kupang, Aceh dan Papua. Kasus-

kasus yang dialami oleh para korban yang terlibat dalam penelitian ini termasuk tragedi kemanusiaan 1965 (Yogyakarta, Pulau Buru dan Kupang), konflik DOM (Daerah Operasi Militer) di Papua dan Aceh, serta perempuan pengungsi dari Timor-Timur yang masih hidup di kamp Tuapukan di Kupang, NTT. Perempuan yang paling tua berusia 71 tahun sedangkan yang paling muda berusia 22 tahun. Ada korban yang dibebaskan dari tahanan sekitar 45 tahun yang lalu, seperti para nenek korban 1965, ada yang dibebaskan 10 tahun lalu, seperti para ibu dari Aceh.

Buku ini berkisah tentang bagaimana para perempuan mengalami konflik, dan berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi konflik maupun setelah konflik usai dalam situasi di mana impunitas menjadi sebuah norma yang dominan dalam masyarakat.

Tiap perempuan yang mengambil bagian dalam penelitian ini memiliki kisah yang luar biasa, beririsan dengan sejarah kekerasan di Indonesia. Pada saat dikumpulkan menjadi satu, maka terlihat bahwa kita telah gagal untuk memfasilitasi proses transformasi dari korban menjadi warga pemegang hak dan keadilan. Dari pengalaman hidup para korban kita melihat bagaimana mereka menggunakan kekuatan dan tekad mereka sendiri untuk dapat bertahan dalam situasi yang mengerikan. Bahwa mereka ‘tak nampak’ di mata kebanyakan pembuat kebijakan dan pengemban negara adalah potret kegagalan kita sebagai bangsa. Kebanyakan program untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan tidak melihat kehadiran korban konflik, dan tidak menghubungkan kekerasan terhadap perempuan pada masa konflik dan kekerasan di masa damai.

Karena topik yang kami angkat adalah hal yang traumatis dan peka, kami merancang penelitian ini untuk memfasilitasi pembelajaran dan aksi dengan para korban perempuan. Kami mencoba untuk membawa sedikit perubahan dalam hidup para perempuan yang telah setuju untuk berbagi waktu dan kisah mereka dengan kami, tentunya dengan beberapa keberhasilan dan kegagalan. Terakhir, secara bersama-sama kami juga membuat sebuah panduan yang menjelaskan tentang bagaimana kami melakukan penelitian ini. Tak bisa dipungkiri, banyak kerja yang masih perlu kami lakukan; namun ini menjadi titik beranjak kami.

Kami memulai penelitian ini, dengan kesadaran terhadap tiga isu yang harus kami perhatikan: 1) bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan menekan mereka untuk tidak berbicara dan membatasi sumber daya mereka; 2) upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan tidak cukup memperhatikan struktur kekuasaan lokal yang menanamkan impunitas; 3) pelanggaran hak-hak sosial ekonomi yang hadir bersamaan dengan tindak kekerasan menjebak korban perempuan dalam kemiskinan yang merawat impunitas.

Dibisukan oleh Budaya, Diikat oleh Kemiskinan

Jenis pelanggaran yang dialami perempuan seringkali diselubungi oleh rasa malu yang kemudian membisukan korban perempuan, sehingga memperpanjang impunitas. Dua bentuk kekerasan yang mempunyai dampak panjang: kekerasan seksual dan pemindahan.

Dari awal, kami memahami bahwa kekerasan seksual adalah senjata yang umum digunakan untuk mengontrol dan menghancurkan martabat manusia, terutama terhadap perempuan yang memperlihatkan kekuatan. Pada saat konflik usai, ruang bicara untuk perempuan mengangkat pengalaman kekerasannya sangat kecil. Nilai sosial yang melekat pada seksualitas perempuan membentuk sebuah norma dimana kehormatan laki-laki dikaitkan pada "kesucian" perempuan. Akibatnya, pada saat perempuan berbicara tentang kekerasan seksual yang dialaminya, mereka berhadapan dengan resiko diskriminasi dan peminggiran. Mereka didorong untuk diam daripada mempermalukan keluarga. Apabila mereka berbicara, baik dalam proses peradilan maupun proses pengungkapan kebenaran, belum ada upaya yang cukup untuk mendukung mereka secara jangka panjang pada saat mereka menghadapi konsekuensi dari pengungkapan mereka.

Dalam konteks konflik, aparat keamanan juga telah menggunakan pemindahan paksa sebagai alat untuk memutuskan rantai dukungan bagi mereka yang dianggap sebagai pemberontak. Perempuan mendekam di kamp-kamp selama bertahun-tahun, dalam berbagai periode konflik. Mereka melakukan kerja paksa dalam kondisi yang sulit, tanpa papan yang memadai, pangan, dan pelayanan kesehatan yang serba minim. Perempuan tidak hanya mengalami pemindahan dalam skala besar, tetapi juga dalam

skala lokal. Sebagian dari mereka kehilangan tanah dan rumah pada saat mereka menjanda, pada saat dilepaskan dari penjara, atau mereka diceraikan karena menjadi korban kekerasan seksual. Dampak dari pemindahan paksa dan kehilangan sumber daya ekonomi dirasakan berpuluh tahun kemudian, seperti yang terlihat dari penelitian kami. Bahkan bagi aktivis yang sudah lama memperhatikan ketidakadilan, kami terkejut melihat kemiskinan yang dialami sebagian korban perempuan. Seorang perempuan tua di Pulau Buru harus hidup dari penghasilannya menanam kedelai. Seorang mantan tahanan politik di Yogyakarta kehilangan rumahnya dan harus hidup menggelandang setelah mendekam di penjara selama 14 tahun. Sebagian korban perempuan di Aceh baru bisa mendapatkan bantuan bila suami ataupun anak laki-laki mereka terbunuh dalam konflik; tidak ada kompensasi maupun pengakuan pemerintah atas penderitaan yang mereka alami sendiri. Sementara itu, "proyek-proyek" pembangunan pasca-konflik seringkali dimonopoli oleh laki-laki yang memiliki koneksi politik dan sosial. Di tingkat nasional, tidak ada lagi program khusus yang memperhatikan dampak konflik. Pendekatan pembangunan buta terhadap kerentaan korban, khususnya perempuan. Para korban menjadi tak nampak.

Impunitas yang Melembaga, Otot Keadilan yang Melemah

Pada tahun 2005, Komisi HAM PBB memperbaharui Prinsip-prinsip Impunitas yang kemudian mendefinisikan impunitas sebagai "kemustahilan untuk membawa pelaku kejahatan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara *de jure* maupun *de facto*."[3] Selain berfokus pada kegagalan untuk menegakkan keadilan, Prinsip-prinsip Impunitas juga menyediakan sebuah model tentang gambaran keadilan:

Impunitas muncul dari kegagalan Negara memenuhi kewajibannya untuk **menyelidiki pelanggaran**; untuk mengambil langkah-langkah yang penting atas

Tangan mana Imaculada yang bertuliskan tato tentang tempat dan waktu dia ditahan oleh tentara Indonesia.

pelaku, khususnya di bidang keadilan, dengan memastikan bahwa orang-orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan dituntut, diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya; untuk menyediakan **pemulihan yang efektif** bagi korban dan untuk memastikan bahwa mereka menerima reparasi atas luka-luka yang mereka derita; untuk memastikan bahwa **hak untuk mengetahui kebenaran** atas pelanggaran adalah hak korban yang mutlak; dan untuk mengambil langkah-langkah yang penting untuk **mencegah keberulangan** dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.[4]

Dalam situasi normal, pelanggaran atas hak seseorang memunculkan harapan bahwa korban pada akhirnya akan mendapatkan keadilan. Proses ini bisa saja membutuhkan waktu berpuluh tahun lamanya, namun janji akan keadilan tetap ada sebagai sebuah tempat bernaung dan berlindung.

Ada dua asumsi tentang model ini. Pertama, diasumsikan bahwa struktur kekuasaan yang melakukan kekerasan telah runtuh di akhir konflik sehingga memberi peluang bagi pihak yang tertindas untuk bersuara tentang pelanggaran yang dialami. Kedua, bila korban bisa berbicara tentang pelanggaran yang mereka alami, orang lain akan membantu mereka menghukum para pelaku dan mengatasi penderitaan akibat pelanggaran tersebut. Orang-orang yang mengasihi mereka akan memberikan kenyamanan bagi mereka, merangkul dan menolong mereka menghadapi luka yang mereka rasakan.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, asumsi-asumsi ini seringkali tidak berlaku.[5] Selama konflik, pihak-pihak yang memegang senjata seringkali berusaha untuk melibatkan para pemimpin lokal, seperti tokoh adat ataupun tokoh agama, untuk memperluas pengaruh dan kendali mereka. Para pemimpin lokal ini seringkali tetap berkuasa sekalipun konflik telah berakhir. Mereka bisa saja berganti kubu, berpihak pada pemenang di saat-saat terakhir, ataupun struktur kekuasaan baru bisa saja memandang mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Kami memahami bahwa impunitas dirawat dan direproduksi oleh kekuatan budaya, sosial dan ekonomi, khususnya untuk kekerasan terhadap perempuan. Karena itu kami menciptakan alat penelitian partisipatif, yang kami sebut Batu Bunga, untuk memahami impunitas dari pengalaman perempuan.

Alih-alih mendapatkan keadilan, korban malah seringkali diabaikan dan disalahkan. Sejak kami memulai penelitian ini, kami melihat para perempuan korban mengalami *penyusutan keadilan*. Ketika mereka atau anggota keluarga mereka menjadi korban pelanggaran, mimpi tentang perdamaian dan keadilan menjadi motivasi utama untuk bertahan hidup. Namun begitu, bagi banyak perempuan, desakan dan kapasitas untuk berjuang demi keadilan melemah seiring dengan berlalunya waktu dan berlakunya impunitas. Ketika ditanya mengenai keadilan, banyak perempuan yang terlibat dalam penelitian ini menurunkan konsep keadilan menjadi keadilan di dunia akhirat. Seperti sebuah otot yang melemah karena tidak digunakan, kekuatan mereka mencapai keadilan menyusut. Karena itu desain dari penelitian ini mementingkan sebuah aksi, yang bisa menangkap kreativitas dan kekuatan para korban untuk mendorong perubahan.

Titik Buta: Dampak Sosial dan Ekonomi yang Berkepanjangan

Keterangan foto: Sri Wahyuni atau yang akrab disapa ibu Nik, perempuan korban 1965 dari Yogyakarta

Sebagaimana Angela yang mendapat kemenangan di pengadilan namun tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman kemiskinan, para perempuan lain juga bernasib serupa. Di Indonesia, bahkan, para perempuan itu tidak mendapat kemenangan di kedua sisinya.

Walaupun korban laki-laki yang miskin juga mengalami peminggiran dan kehilangan kesempatan, perempuan dan anak-anak perempuan malah lebih rentan. Dalam kasus-kasus yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, kontribusi dan potensi perempuan, kepemimpinan, ekspresi kreatif dan intelektual, karier, dan aspirasi mereka seringkali dikorbankan demi ayah, suami, saudara laki-laki, maupun anak laki-laki mereka. Perempuan dan anak perempuan terpaksa mengorbankan pendidikan ataupun keinginan mereka untuk berkarier, didorong untuk masuk ke dalam pernikahan yang tidak bahagia, atau bahkan

menyerahkan tubuh mereka kepada pelaku demi melindungi keluarga mereka.

Di wilayah-wilayah dimana perempuan memiliki hak yang terbatas atas tanah, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga mengalami tantangan berat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan tempat tinggal, terutama ketika sumber mata pencaharian di luar pertanian sangat terbatas. Pilihan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas karena rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Akibatnya, banyak perempuan rentan ini yang menjadi buruh pabrik, buruh migran demi pekerjaan (yang sering memisahkan mereka dari anak-anak mereka dan menempatkan mereka ke dalam resiko yang lebih besar), ataupun berdagang kecil-kecilan yang hanya menghasilkan pendapatan yang kecil dan tidak pasti.

Perempuan belajar untuk bertahan hidup di belakang tembok impunitas, berjuang untuk bisa bertahan hidup. Meskipun berakhirnya konflik mungkin menandai perubahan politik yang drastis, perempuan korban tetap saja tidak memiliki suara, tetap dengan akses yang terbatas atas peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pengalaman kekerasan mereka dibayangi oleh rasa malu dan dianggap tidak penting, berbeda dengan laki-laki ataupun korban-korban lain.

Walaupun telah ada berbagai insiatif untuk melibatkan perempuan, upaya untuk menjangkau perempuan melalui komisi kebenaran, pengadilan, ataupun program pembangunan, seringkali tidak cukup memahami kedalaman dan keluasaan penderitaan perempuan. Diperhadapkan dengan kejahatan yang meluas, para pekerja HAM sering memprioritaskan sumber daya yang terbatas pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik. Akibatnya, penderitaan korban penahanan sewenang-wenang dan berkepanjangan, penyiksaan, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum menjadi hal yang sangat umum dijumpai dalam pemerintahan yang kejam dan konflik bersenjata.

Sebaliknya, pelanggaran yang meluas terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masih luput dari proses pertanggungjawaban terhadap konflik. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup kehilangan lahan dan mata pencaharian, perusakan rumah dan harta benda, pemindahan paksa

ke kamp-kamp kumuh, dan keterasingan dari pendidikan dan layanan kesehatan.

Aspek-aspek ini seringkali tidak diprioritaskan dalam penelitian karena dianggap tidak terlalu parah. Pelanggaran sosial dan ekonomi yang sangat meluas dan mengakar membuat kita kebal terhadap pentingnya memahami aspek sosial ekonomi sebagai hak. Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menaruh perhatian pada masalah ini dalam Konferensi Dunia Vienna pada tahun 1993:

> ... kenyataan mengejutkan bahwa Negara-negara dan masyarakat internasional secara keseluruhan terus membiarkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang jika terjadi memiliki kaitan dengan hak-hak sipil dan politik, akan memancing reaksi ketakutan dan kemarahan... Indikator-indikator statistik tentang keluasan dari deprivasi, atau pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya telah begitu sering disebut sehingga menjadi cenderung kehilangan dampaknya. Tingkat kekuatan, keparahan, dan keberlangsungan dari deprivasi ini telah membangkitkan sikap pasrah, putus asa, dan pesimis.[6]

Lebih jauh, semakin miskin seseorang, semakin parah dampak yang dirasakannya ketika ia kehilangan rumah, harta benda, dan ternak. Kehilangan-kehilangan ini akan semakin membuat kondisinya semakin parah ketika ia juga mengalami pelanggaran lain dan merasakan trauma, membuat proses pemulihannya menjadi jauh lebih sulit.

Korban sering menyuarakan harapan mereka untuk menerima bantuan ekonomi untuk membantu mengurangi beban kehidupan sehari-hari. Selama ini kita telah buta terhadap dampak berkepanjangan dan berlapis dari pelanggaran hak atas kehidupan korban dan generasi-generasi mendatang, serta menutup telinga atas tuntutan mereka atas pemulihan.

Dalam proses merancang penelitian, kami tidak hanya berfokus pada isu konflik dan impunitas dari pandangan perempuan, tapi juga mencoba menjembatani kesenjangan informasi antara pelanggaran sipil-politik dan sosial-ekonomi. Kami memberi perhatian khusus pada pelanggaran sosial-ekonomi yang telah membentuk konflik, serta dampak-dampak sosial ekonomi dari pelanggaran HAM yang dirasakan selama bertahun-tahun lamanya setelah konflik berakhir.

Mengorganisir Buku Ini

Setelah mempertimbangkan apakah kami akan mengorganisir penelitian ini berdasarkan tema atau studi kasus, kami memutuskan untuk menjaga integritas cerita-cerita yang telah dipercayakan melalui penelitian ini. Ada sebuah harapan dari para korban bahwa kisah kehidupan mereka akan ditulis dan diwartakan pada dunia. Pada saat yang sama, kami mendapat kesempatan unik untuk melihat sebuah gambar besar yang menunjukkan pola dan keunikan dari tiap-tiap konteks.

Bab 1 menjelaskan motivasi kami untuk melaksanakan penelitian ini, titik berangkat perjalanan kami yang berlandaskan persahabatan yang panjang dengan korban perempuan. Dalam Bab 2 kami menjabarkan siapa kami, kenapa dan bagaimana kami menjalakan penelitian ini. Bab 3 kami mengurai konteks kekerasan di Indonesia. Sedangkan dalam Bab 4 sampai dengan Bab 9 menghantar pokok utama dari penelitian ini, pengalaman kekerasan yang dialami perempuan dan upaya mereka bertahan hidup. Kami memilih untuk menggambarkan tiap konteks, dengan uraian singkat tentang latar belakang serta cuplikan dari kesaksian korban. Bab 10 adalah penjabaran temuan kunci, berdasarkan pola yang kami temukan, serta rekomendasi. Dalam laporan ini, istilah “korban” dan “penyintas” digunakan secara bergantian namun merujuk ke hal yang sama. Kami menggunakan istilah “korban” untuk menggambarkan definisi hukum yang dipakai dalam konvensi dan perjanjian HAM. Kami juga menggunakan kata “penyintas” untuk memperlihatkan kekuatan korban dan kemampuan mereka untuk pulih dan membantu korban-korban lain. Kami menyakini bahwa korban dan penyintas harus memiliki kebebasan untuk mengindentifikasikan diri mereka sendiri sebagai korban, penyintas, atau istilah lain yang mereka kehendaki.

Belajar Menolak Impunitas

2

Belum bisa hilang sama sekali, mungkin saya akan selalu ingat.

JUARIAH, PEREMPUAN KORBAN DARI ACEH

Keadilan Transisi: Jangan Bersifat "Tabrak-Lari"

Setelah sekian lama menggunakan kerangka keadilan transisi –yaitu "tindakan yudisial serta non-yudisial yang dilaksanakan di berbagai negara untuk menyelesaikan warisan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam skala masif"[7] kami mulai merasa letih. Sebagian dari kami telah bekerja bersama (ataupun di dalam) mekanisme komisi kebenaran atau mekanisme investigasi lainnya. Kami semakin tak puas bekerja dengan mekanisme yang *adhoc* yang bermasa tugas pendek. Di Indonesia, seperti di berbagai negara Asia lainnya, janji untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui proses keadilan transisi tak kunjung sampai.[8] Mekanisme keadilan transisi yang terbentuk, seperti Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia Timor-Leste, tidak bisa menghasilkan keadilan yang didambakan oleh korban. Tiga kasus yang diadili di pengadilan HAM permanen dan *adhoc* di Indonesia menghasilkan putusan bebas bagi semua pelaku, melalui proses banding.[9] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dijanjikan dalam Ketetapan MPR (2000) belum dibentuk, sehingga KKR untuk Papua dan Aceh yang dimandatkan dalam undang-undang akhirnya terbengkalai, tanpa ada dukungan politik yang cukup. Kalaupun sebuah mekanisme terbentuk maka mekanisme tersebut mencerminkan

Beberapa dokumentasi kehidupan keluarga tapol di masa-masa awal kedatangan mereka ke pulau Buru. Terlihat para istri tapol sedang berlatih menyanyi.

kelemahan dari sebuah transisi yang tak sempurna, dimana kekuatan lama dan kekuatan reformasi masih terus bertarung. Para "ahli" keadilan transisi terbang ke sana ke mari memberi nasihat namun mereka tak terikat pada sebuah proses pendampingan korban dan masyarakat yang jangka panjang. Untuk sebagian korban, periode kerja mekanisme keadilan transisi terasa seperti "tabrak-lari," sehingga mengecewakan korban yang membutuhkan proses panjang untuk dapat pulih dari trauma yang mendalam. Korban yang lain merasa ditinggalkan, setelah membuka diri tentang pengalaman kekerasan tanpa ada pendampingan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kami tetap percaya bahwa warisan dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam skala luas ini terus membentuk nasib bangsa ini, baik pada masa sekarang maupun masa depan. Impunitas terkait kejahatan berat dan penyalahgunaan kekuasaan cenderung mendorong lembaga negara untuk terus mempraktikkan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Contoh terburuk adalah pembiaran praktik penyiksaan, korupsi dan kekerasan terhadap perempuan. Kami ingin mencari jalan untuk membebaskan diri dari belenggu impunitas dalam konteks dimana mekanisme resmi untuk

pertanggjungjawaban tidak memungkinkan, dengan melibatkan korban perempuan, dan mengajak mereka mengambil tindakan bersama.

Terinspirasi dari ide untuk mendorong proses pemulihan yang transformatif bagi perempuan[10] kami merancang penelitian ini untuk mengenyahkan apatisme dan merayakan aktivisme.[11] Kami tahu bahwa para korban perempuan telah mengidentifikasi kebutuhan praktis (sumber nafkah, perumahan, akses kepada layanan kesehatan) dan juga kebutuhan strategis (pengakuan atas penderitaan, kesetaraan, mengubah situs kekerasan menjadi ruang publik untuk pendidikan).[12] Maka dari itu, kami mendesain proses penelitian yang melihat kebutuhan mendesak sekaligus aspirasi jangka panjang yang menuntut perubahan dalam hubungan kekuasaan. Mekanisme keadilan transisi yang hanya mendorong partisipasi korban (untuk menghukum pelaku atau untuk mengungkap kebenaran) tanpa memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis korban akhirnya tidak bisa berkontribusi untuk perubahan sosial yang transformatif.

Pengalaman kami telah menunjukkan bahwa bentuk impunitas yang paling sempurna dibentengi oleh norma sosial-budaya, dimana para korban menutup diri sendiri dan menyangkal harapan untuk mendapatkan keadilan. Proses mendokumentasi kesaksian korban tidak dapat mengatasi siklus impunitas. Kami semakin skeptis terhadap proses pendokumentasian yang menggunakan pewawancara (biasanya orang dari luar komunitas) yang mengajukan pertanyaan dan korban menjawabnya, secara pasif mengikuti sebuah formulir atau sistem pengkodean HAM. Kami mengadaptasi metode penelitian aksi partisipatif, membuka ruang untuk korban berbicara tentang kekerasan dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, untuk bercermin dan saling mendukung untuk perubahan.

Terakhir, kami menemukan bahwa negara sering menciptakan pemisahan semu dengan menyediakan pelayanan bagi korban kekerasan domestik tetapi tidak untuk korban konflik. Pola ini hadir di Indonesia, maupun Myanmar dan Timor-Leste. Penelitian kami menjadi cara untuk mempertanyakan pendekatan ahistoris dalam menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Sejak awal, kami sadar bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam konflik memiliki akar yang sama dengan kekerasan domestik.

Kami mengadaptasi penelitian partisipatif, dengan pendekatan pemulihan dan feminisme, dalam upaya mendokumentasi, memahami dan melepas belenggu impunitas secara bersama. Tindakan mendengar dan mendokumentasi seharusnya juga menjadi proses yang transformatif bagi para korban. Informasi yang dikumpulkan masih bisa dianalisa, dimasukkan kedalam sebuah database. Pada saat yang sama pendekatan yang dibangun bisa mendukung korban menjadi agen perubahan, tidak hanya subjek dari sebuah penelitian.

Lingkar Belajar, Ruang yang Aman

Walaupun tujuan kami adalah untuk mempelajari bagaimana perempuan mengalami impunitas, pada saat yang sama kami ingin belajar tentang bagaimana melepas belenggu impunitas. Kemarahan dan rasa ketidakadilan bisa menjadi motivasi untuk tetap bertahan. Tetapi setelah sekian lama

diabaikan, sebagian korban belajar untuk menerima impunitas. Bersama kami mencari cara untuk para korban perempuan bisa bercermin, berbagi cerita, membahasakan kebutuhan mereka dan membangun strategi untuk perubahan.

Berbicara tentang kekerasan, pengabaian dan kegagalan upaya untuk mengakses keadilan adalah topik-topik yang bisa meningkatkan rasa frustasi. Berangkat dari pemikiran ini, kami merancang cara untuk membuat proses ini lebih menarik dan memberi semangat hidup bagi korban. Pada bulan Juli 2013, kami mengumpulkan 28 perempuan dari Indonesia dan Timor-Leste untuk mengembangkan sebuah metodologi baru yang melibatkan perempuan penyintas dan mendorong mereka untuk berbagi cerita, tidak hanya tentang kekerasan yang mereka alami, tetapi juga strategi mereka untuk bertahan hidup menggunakan metode yang partisipatif. Metodenya dirancang sedemikian rupa untuk memasukkan unsur pemulihan, advokasi, dokumentasi, pemberdayaan, dan pembangunan solidaritas.

Kami mengembangkan metode penelitian yang dapat melibatkan para korban perempuan sebagai fasilitator untuk perubahan, tidak hanya sebagai penyintas kekerasan. Tim peneliti kami terdiri dari pekerja LSM, korban, dan anggota keluarga mereka. Kami mengembangkan

tujuh alat yang bertujuan untuk menguatkan korban, memfasilitasi proses pemulihan, membangun solidaritas dan jaringan. Tiap fasilitator ditugaskan untuk memfasilitasi proses diskusi dengan setidaknya 10 orang korban perempuan lainnya. Beberapa kelompok memilih untuk menjalankan serangkaian lokakarya di mana sejumlah alat digunakan dalam kurun waktu beberapa hari secara berurutan. Kelompok lain, di mana para perempuan penyintas tinggal berdekatan satu sama lain, diskusi digelar dalam pertemuan mingguan dalam rentang waktu tertentu.[13]

Alat penilitian yang kami gunakan meliputi:

BATU DAN BUNGA:
Menggunakan kerangka keadilan transisi, peserta diajak untuk memilih batu atau bunga untuk menggambarkan apakah hak atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan kehidupan yang bebas dari kekerasan, hadir dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan komunitas mereka. Alasan mereka memilih batu (jika tidak) atau bunga (jika ya) kemudian dibahas dalam kelompok.

ALUR WAKTU:
Sebuah alur waktu dibuat untuk memahami kekerasan yang dialami perempuan sebelum, selama, dan setelah konflik. Kami mampu membangun sejarah kolektif dengan perspektif yang lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh perseorangan.

PETA KOMUNITAS:
Perempuan korban diminta untuk menggambar peta yang memperlihatkan lokasi rumah mereka, tempat kekerasan terjadi, dan lokasi-lokasi penting lainnya dari kisah mereka.

PETA SUMBER DAYA:
Perempuan korban bersama-sama menjelaskan sumber-sumber penghidupan mereka sebelum dan setelah konflik. Proses ini memperdalam pengetahuan kami tentang siklus kemiskinan yang dialami para perempuan korban dalam situasi pasca-konflik.

PETA TUBUH:

Diadaptasi dari gerakan kesehatan reproduksi perempuan, kami menggunakan pemetaan tubuh sebagai sebuah peluang bagi perempuan korban untuk berbicara tentang bagaimana kekerasan yang mereka alami itu berdampak pada tubuh mereka. Selain rasa sakit, kami juga mendorong mereka untuk menandai area kebahagiaan di peta tubuh mereka.

MENGAMBIL FOTO, BERBAGI CERITA:

Para peneliti mengunjungi rumah para perempuan untuk membuat sebuah foto bercerita tentang kehidupan mereka, termasuk potret lokasi-lokasi dan benda-benda yang memiliki makna tertentu.

KOTAK MEMORI:
Korban diminta mengisi kotak dengan benda-benda yang memiliki kenangan manis atau pahit. Mereka juga diminta untuk menulis sebuah cerita tentang pengalaman hidup mereka dalam kartu pos yang kami bagikan. Pada sesi pertemuan terakhir, peserta menjelaskan isi kotak mereka kepada kelompoknya.

Pada bulan Januari 2014, kami menyelenggarakan lokakarya untuk berbagi temuan setelah enam bulan bekerja di lapangan. Setelah proses penulisan, kami melanjutkan tahap berikutnya untuk memetakan dan mendorong akses pelayanan bagi korban.

Tentang Kami

Tim peneliti dari Indonesia terdiri dari 16 perempuan dan 1 laki-laki. Dengan beragam latar belakang, kami dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: aktivis perempuan yang memiliki pengalaman bekerja dengan perempuan korban dalam situasi konflik selama lebih dari satu dekade; peneliti muda yang masih baru dengan isu ini, namun memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan para penyintas; dan terakhir, para perempuan penyintas.

Di Indonesia, penelitian ini dilakukan bersama-sama dengan lima organisasi lokal: Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) di Kupang, Kiprah Perempuan (KIPPER) di Yogyakarta, Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) di Pulau Buru, Lembaga Bantuan Hukum Perempuan (LBH Apik) di Aceh, dan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM-Papua) di Papua.

Banyaknya peneliti serta beragamnya penelitian, keterampilan fasilitasi dan menulis kami membawa banyak tantangan dalam proses ini. Banyak perempuan penyintas yang berperan sebagai peneliti tidak cakap dalam menulis, namun luar biasa dalam menjangkau dan memfasilitasi penyintas lainnya untuk berpartisipasi dalam penelitian. Beberapa peneliti muda membawa energi baru dan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam pekerjaan yang dipelopori oleh para pekerja HAM yang sudah lebih berpengalaman. Alat-alat baru memfasilitasi para penyintas untuk berpartisipasi dengan lebih aktif. Terakhir, kami memberi dan melatih para peneliti untuk menggunakan kamera digital untuk menangkap kehidupan para korban. Aspek visual dari penelitian ini semakin diperkuat ketika kami melibatkan juga seorang fotografer/videografer perempuan untuk bekerja bersama kami.

Pelibatan Generasi Muda

"Tentunya mereka lebih berubah ya. Jadi, dulunya cuma [bercerita pada] temannya satu angkatan sebaya tapi sekarang cerita ini jadi diturun-temurunkan ke saya, ke generasi yang lebih muda. Jadi, mereka ada supportnya. Jadi, sekarang ketemu ketawa-ketawa bisa, kalau dulu cuma menangis sedih, gitu, tapi kalau sekarang ada keceriaan tersendiri, gitu."

VIRANDA, PENELITI (DAN ANAK MANTAN TAHANAN POLITIK) YOGYAKARTA, INDONESIA.

Perempuan korban menemukan berbagai cara untuk mengatasi kisah pilu mereka, khususnya berkenaan dengan anak-anak mereka. Beberapa korban telah memilih untuk menceritakan pengalaman kekerasan mereka kepada anak-anaknya. Sementara yang lain merasa bahwa mereka harus melindungi anak-anak mereka dari rasa

sakit dan malu atas apa yang terjadi dengan tidak menceritakan kisah itu. Di beberapa tempat, penelitian kami memfasilitasi sebuah pertukaran antargenerasi yang memang perlu terjadi. Di Aceh, seorang penyintas perempuan meminta bantuan putrinya untuk menulis kartu pos kehidupannya untuk dimasukkan ke dalam kotak memorinya. Kegiatan ini membuka kesempatan bagi penyintas untuk membagikan pengalamannya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui putrinya. Hasilnya adalah perempuan tersebut merasa lebih dekat dengan putrinya, dan putrinya mulai lebih memahami dan menghormati ibunya setelah mendengar tentang pengalaman yang selama ini dirahasiakan ibunya karena rasa malu.

Suasana sebelum pertemuan reguler KIPPER dimulai. KIPPER adalah perkumpulan perempuan korban kekerasan tahun 1965 yang ada di Yogyakarta.

Dalam konteks di mana impunitas telah mengakar selama puluhan tahun, melibatkan generasi muda menjadi sangat penting. Rentang hidup manusia mungkin tidak cukup lama untuk menunggu pergeseran politik yang dibutuhkan untuk menegakkan keadilan. Dukungan dari generasi berikutnya juga penting bagi korban, terutama bagi mereka yang sudah menua. Perjuangan untuk kebenaran dan keadilan mungkin harus diturunkan ke generasi berikutnya. Hubungan antargenerasi yang kuat, serta sejarah dan identitas bersama, mampu memberdayakan penyintas dan anggota keluarga mereka. Seperti yang dijelaskan oleh

Christina Sumarmiyati, penyintas dari Yogyakarta (dan juga anggota tim inti penelitian ini), anak-anaknya juga terbentuk oleh pengalamannya. Kekuatannya untuk bertahan hidup dan kemandiriannya yang kuat menjadi sifat yang dia turunkan ke anak-anaknya.

"Mereka menghadapi tantangan hidup mereka dengan penuh perjuangan. Mereka sama seperti saya karena memang tekad hidup mandiri memang saya tanamkan... [Supaya mereka] jangan merasa dibatasi dengan segala stigma dan tetek bengek yang seharusnya kita harus hancurkan sendiri karena tidak mungkin [menunggu] pemerintah mengurai stigma itu...tapi harus kita perjuangkan sendiri. Maka dari itu, sejak kecil anak-anak saya kenalkan siapa bapaknya, siapa ibunya, mengapa kita harus hidup begini, dan bagaimana kita harus mencapai ke depannya buat mereka. Puji Tuhan, berkat Tuhan menguatkan saya dan anak-anak saya."

Kami diperkaya dengan kehadiran peneliti muda dalam tim kami.

Aturan Dasar tentang Etika

Berdasarkan pengalaman kerja kami dengan korban pelanggaran HAM dan masyarakat yang menanggung konsekuensi dari pelanggaran tersebut, kami tahu bahwa banyak korban masih menderita trauma dan rentan dalam aspek yang berbeda. Maka dari itu, kami mengembangkan aturan dasar etika untuk penelitian ini:

Teresa Freitas sedang memegang kotak memorinya. Teresa merupakan satu dari sekian banyak perempuan Timor yang hingga kini masih tinggal di kamp pengungsian di Tuapukan, kabupaten Kupang, NTT.

TIDAK MEMBAHAYAKAN

Pertimbangan etika yang paling penting adalah untuk tidak merugikan subyek. Artinya, jika ada persoalan seputar keamanan, perasaan trauma kembali, atau bentuk lain dari resiko, ancaman, atau dampak negatif apapun yang dapat membahayakan subyek, maka penelitian tidak boleh dilanjutkan sebelum persoalan-persoalan itu selesai diatasi. Hal ini juga berkaitan dengan perilaku para peneliti selama kunjungan lapangan, di luar proses wawancara ataupun pengumpulan data.

PERSETUJUAN TERTULIS

Segala upaya harus dilakukan guna mendapatkan persetujuan dari mereka yang diwawancarai atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok terarah ataupun kegiatan pengumpulan data lainnya. Peneliti harus menjelaskan latar belakang, tujuan, dan proses proyek penelitian ini berjalan dengan cara yang dapat dipahami oleh subyek. Subyek memiliki kesempatan untuk secara sukarela menyatakan setuju atau tidak setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan mereka juga diberi kesempatan untuk mengubah karakter partisipasi mereka ataupun jenis informasi apa yang mereka setuju untuk dibagikan dalam penelitian. Sebisa mungkin, subyek akan menandatangani sebuah lembaran persetujuan tertulis. Dalam beberapa kasus, perjanjian lisan dapat direkam di awal wawancara ketika bekerja di masyarakat yang memiliki keterampilan melek huruf yang rendah.

MANFAAT BERSAMA

Sebisa mungkin, agenda penelitian kami itu harus memberikan manfaat bagi aktor-aktor lokal. Artinya, proses penelitian harus sebisa mungkin meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat sipil lokal/nasional dalam proses pembangunan pengetahuan, mengakui kepemilikan pengetahuan lokal, dan menghasilkan produk penelitian dalam bahasa yang dapat dipahami untuk memastikan bahwa mereka yang berpartisipasi dalam penelitian memiliki akses kepada produk-produk tersebut.

AKUNTABILITAS

Proses penelitian harus memastikan bahwa para peneliti akuntabel kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian, dan bahwa peneliti dipantau dan diawasi dengan benar untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap pedoman etika dan metodologi penelitian disepakati.

PARTISIPASI DAN DISEMINASI

Sebisa mungkin, kami akan berusaha mengembangkan dan menerapkan metode penelitian yang meningkatkan partisipasi komunitas yang mendapatkan manfaat dari penelitian. Ini juga berarti bahwa kami akan menghasilkan laporan dengan format beragam, termasuk dengan menggunakan multi-media, metode populer untuk menyebarluaskan temuan dan rekomendasi penelitian.

SENSITIVITAS BUDAYA DAN KELOMPOK RENTAN:

Para peneliti harus memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian peka terhadap norma-norma budaya dan memungkinkan subyek untuk diwawancarai dalam bahasa pilihan mereka. Kami berkomitmen untuk memastikan adanya partisipasi dari individu/kelompok yang paling rentan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Ini juga berarti bahwa kami akan mengembangkan metodologi penelitian yang memungkinkan suara mereka bisa didengar, memfasilitasi partisipasi mereka dalam cara yang bermakna, dan sebisa mungkin, menjawab persoalan seputar perlindungan atau dukungan yang muncul melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sesuai.

KERAHASIAAN:

Kami akan memastikan bahwa informasi yang dapat mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tidak akan tersedia untuk orang lain di luar lingkaran penelitian, dan tidak akan digunakan dalam publikasi apapun kecuali jika subyek dengan jelas menyatakan keinginannya atau persetujuannya bahwa namanya akan disebutkan.

PENYIMPANAN/PENGGUNAAN DATA:
Data akan disimpan dengan aman di server milik AJAR yang juga aman yang tidak dapat diakses oleh publik. Kami akan bekerja dengan para ahli untuk memastikan keamanan data. Para peneliti akan menyerahkan semua data ke AJAR di akhir penelitian. Jika ada kebutuhan untuk menggunakan data untuk tujuan yang berbeda dari penelitian awal, AJAR akan berusaha untuk menanyakan kembali persetujuan subyek mengenai itu.

NILAI REHABILITATIF
Karena penelitian kami bersinggungan dengan dampak pelanggaran yang masif, kami sangat sadar akan situasi korban yang terus berjuang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebisa mungkin, metodologi penelitian akan memasukkan pendekatan yang berkontribusi pada rehabilitasi korban.

Indonesia: Memetakan Konteks Kekerasan

3

Kisah Indonesia adalah salah satu kisah yang luar biasa. Sebuah bangsa yang didirikan pada tahun 1945 di atas impian kesetaraan dan keberagaman setelah lebih dari tiga abad lamanya dikuasai dan dijajah bangsa lain. Indonesia menjadi pemimpin koalisi negara baru Asia-Afrika pada akhir Perang Dunia II. Tak terpengaruh oleh ketegangan, kekerasan dan pergolakan antara negara-negara blok Timur dan Barat, Indonesia dan negara-negara non-sekutu mengambil jalan "tengah" untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Presiden Soekarno yang kharismatik menjauhkan demokrasi yang dibentuk oleh para pendiri Indonesia ketika berusaha menyeimbangkan blok kekuasaan militer, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi terbesar ketiga di dunia, dan kelompok agama Muslim. Dipengaruhi dan didorong oleh Perang Dingin, perebutan kekuasaan antarelit politik Indonesia membawa Indonesia pada titik krisis dengan adanya peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh pejabat tinggi militer pada tanggal 30 September 1965.

Dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S, insiden ini membuka pintu bagi pembunuhan semena-mena dan penangkapan massal terhadap golongan kiri, dipimpin oleh militer yang menyimpan dendam dan niat untuk menghancurkan musuh-musuh politiknya. Pada tahun 1965-1966, kelompok militer dan kelompok sipil bersenjata membunuh sekitar 500.000 hingga 1 juta orang. Ratusan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan, banyak yang terkatung-katung di penjara selama lebih dari satu dekade. Anggota organisasi-organisasi sayap kiri yang terdiri dari serikat buruh, serikat petani, seniman, guru, dan perempuan dijadikan sasaran utama.

Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden pada tahun 1966 dan pemerintahan Orde Barunya menanggapi perbedaan pendapat dengan kekerasan, paling parah terjadi di provinsi-provinsi yang letaknya jauh seperti Papua, Aceh, dan Timor-Timur, bekas koloni Portugis yang diinvasi Indonesia, serta terhadap orang-orang yang membela haknya di seluruh wilayah Indonesia. Soeharto tetap berkuasa hingga tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi Asia, kerusuhan sipil dan demonstrasi mahasiswa yang memaksa dia untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden.

Lasinem dengan suaminya, Senen, dan cucu mereka di rumah mereka di Pulau Buru. Senen adalah tapol yang dipenjara di Ngawi, Jawa Timur [pada tahun 1965]. Pada tahun 1969, ia dibawa ke Pulau Buru bersama tahanan laki-laki lain yang berjumlah lebih dari 10.000 orang. Tiga tahun kemudian, Lasinem dan anak-anak mereka juga dipindahkan secara paksa ke sana. Sebagian besar tahanan dibebaskan pada tahun 1979, namun Lasinem dan keluarganya adalah orang-orang yang memilih untuk tetap tinggal di sana dan menjadikan pulau penjara itu sebagai rumah mereka.

Pada awal reformasi tahun 1999-2000, aturan-aturan hukum baru membuka jalan bagi pencarian kebenaran dan keadilan. Pada tahun 2000, sebuah pengadilan HAM dengan yurisdiksi atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta sebuah mekanisme untuk menciptakan pengadilan *ad hoc* untuk kejahatan berat masa lalu berhasil dibentuk. Namun, pengadilan-pengadilan ini membebaskan semua terdakwa yang diadili dan saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Tidak ada kasus kejahatan berbasis gender yang pernah diproses di pengadilan. Pada tahun 2006, sebuah undang-undang yang menetapkan komisi kebenaran nasional dibatalkan sehingga menutup jalan bagi pembentukan komisi kebenaran di Aceh dan Papua yang sudah dimandatkan di bawah undang-undang otonomi khusus. Baru-

baru ini, kelompok masyarakat sipil sudah menyelesaikan proses pencarian kebenaran dan merilis sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa kekerasan gender yang sistematis dan meluas terjadi di wilayah-wilayah konflik antara tahun 1965-2005.[14]

Meskipun proses perdamaian telah dilakukan di wilayah-wilayah konflik yang ada di Aceh, Maluku dan Sulawesi Tengah, perempuan tidak mampu berpartisipasi secara signifikan. Pengecualian penting adalah perundingan damai Aceh di mana kelompok pemberontak memiliki seorang perempuan sebagai bagian dari tim negosiasi mereka.
Di Papua, kelompok masyarakat sipil berkampanye untuk sebuah dialog damai dengan pemerintah pusat, dengan keterlibatan para perempuan

pribumi, namun Jakarta belum juga memberikan respon positif hingga saat ini.[15]

Sebuah Keputusan Presiden (18/2014) baru-baru ini diberlakukan untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Keputusan ini berisikan komitmen Indonesia untuk mendukung penelitian dan program bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak konflik. Namun, pelaksanaannya masih harus dikawal.

1965 dan Setelahnya

Sejak awal permerintahan Orde Baru Soeharto, kekerasan yang melanda Indonesia menjadikan perempuan sebagai target. Dimulai pada tahun 1965, mereka yang mendalangi kekerasan memicu kebencian dengan menghembuskan desas-desus palsu bahwa perempuan, secara khusus anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), terlibat dalam pembunuhan para jenderal. Pola yang sama kemudian diulang di wilayah konflik Papua dan Aceh.

Gerwani didirikan pada tahun 1950 dalam periode yang penuh semangat revolusioner dengan tujuan untuk mewujudkan "hak-hak pekerja yang sama bagi perempuan dan... tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan sosialisme nasional yang seutuhnya."[16] Gerwani kemudian bersekutu dengan PKI pada tahun 1954 yang merupakan periode pengorganisasian dan pelatihan baca-tulis yang intens di kalangan perempuan di daerah perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 1960an, Gerwani menjadi salah satu organisasai perempuan terbesar di dunia, mengklaim bahwa keanggotaannya telah mencapai angka sejuta perempuan,[17] aktif berkampanye untuk kepemimpinan perempuan dalam politik dan reformasi agraria, termasuk "tindakan sepihak" di mana para petani yang tidak memiliki tanah mengambil tanah secara paksa dari para pemilik tanah.

Sri Wahyuni atau yang akrab disapa Ibu NIk, korban 1965 dari Yogyakarta.

Kemudian, dalam waktu enam bulan, lebih dari 500.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak dibunuh dengan tuduhan terlibat komunis atau kelompok kiri.[18] Selama kekerasan tahun 1965-1966, anggota Gerwani dan orang-orang yang terkait dengan mereka, menjadi sasaran pembunuhan, penahanan ilegal dan kekerasan seksual. Mereka juga menjadi korban kampanye fitnah yang menggambarkan mereka sebagai pelaku penyiksaan seksual. Meskipun ada laporan autopsi yang menunjukkan bahwa ketujuh Jenderal yang dibunuh pada tanggal 30 September itu meninggal dengan tubuh yang utuh akibat luka tembakan dan pemukulan benda tumpul, surat kabar melaporkan bahwa mata mereka dicungkil dan alat kelamin mereka dimutilasi. Salah satu artikel melaporkan bahwa anggota Gerwani "menyentuh alat kelamin para Jenderal dan memamerkan milik mereka sendiri, ... [kemudian] menari di depan para korban dalam keadaan telanjang."[19] Laporan-laporan tanpa dasar itu menyulut api kekerasan, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual yang diarahkan pada perempuan. Kekerasan seksual merupakan tindakan disengaja dan disadari oleh aparat keamanan sebagai sebuah serangan. Komnas Perempuan menemukan berbagai bentuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat seperti penelanjangan, perkosaan yang berlanjut, penyiksaan terhadap organ reproduksi, dan perbudakan seksual.[20]

Papua

Naomi Masa, korban kekerasan dari Papua.

Provinsi paling timur Indonesia, Papua dan Papua Barat, berbeda secara budaya dan historis dari provinsi-provinsi yang lain, dan memiliki sumber daya alam yang berharga seperti emas, kayu, dan minyak bumi. Kedua provinsi ini (dalam buku ini disebut dengan Papua) adalah wilayah konflik dan kekecewaan yang berkelanjutan. Perempuan pribumi mengalami kekerasan dalam konteks konflik politik dan militer, dimana mereka seringkali menjadi korban pemerkosaan, pelecehan, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya.

Kelompok Kerja Perempuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) bekerja sama dengan Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil merilis sebuah laporan terobosan berjudul "Stop Sudah" pada tahun 2010 yang mendokumentasikan ratusan kasus kekerasan oleh negara yang terjadi sejak tahun 1969. Laporan ini menemukan bahwa perempuan menjadi korban pembunuhan, penyiksaan, pengungsian, dan pemerkosaan. Sekalipun pembagian wilayah Papua menjadi dua provinsi pada tahun 1998 dan pemberian status otonomi khusus pada tahun 2001 pada awalnya membawa harapan untuk perubahan, namun ternyata, pola pelanggaran HAM malah terus berlanjut, termasuk pemerkosaan oleh anggota militer. Arus uang dana "otonomi khusus" yang masuk tampaknya telah menaikkan tingkat konsumsi alkohol, seks tanpa pengaman, dan insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Aceh

Ainun Mardiah, korban kekerasan dari Aceh.

Di Aceh, kesepakatan damai yang ditandatangani pada tahun 2005 kini sudah berusia 10 tahun. Konflik yang berkecamuk di Aceh berawal pada tahun 1976, ketika para pemimpin Aceh mendeklarasikan kemerdekaan sebagai bentuk reaksi terhadap penindasan brutal Orde Baru. Pada tahun 1989, militer mengintensifkan operasinya, secara resmi mendeklarasikan Aceh sebagai DOM. Pemantau HAM melaporkan bahwa ribuan warga sipil tewas, hilang, ditahan di kamp-kamp pelatihan, di mana penyiksaan dan pemerkosaan terjadi setiap hari.[21] Pada saat yang sama, GAM juga dikabarkan melakukan kekejaman terhadap orang-orang yang memberikan informasi yang melawan mereka, dan juga pekerja migran Jawa.[22] Reformasi di Indonesia menyediakan beberapa peluang untuk negosiasi perdamaian pada tahun 2000 dan 2002. Ketika upaya ini gagal, militer meningkatkan operasinya. Pada tahun 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyatakan status darurat militer, mengisolasi wilayah Aceh lebih lanjut, dan menjerumuskannya ke dalam lebih banyak lagi kekerasan.

Perempuan di Aceh mengalami dampak jangka panjang dari perang. Mereka tidak hanya menjadi satu-satunya pencari nafkah ketika orang-orang di keluarga mereka dibunuh, hilang, atau harus lari untuk menyelamatkan diri, tapi juga menjadi korban kekerasan perantara yang

ditahan, disiksa dan diperkosa sebagai pengganti atas kaum laki-laki yang tidak ada di tempat ketika militer datang.[23]

Ketiga konteks ini bukanlah satu-satunya waktu atau tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun begitu, untuk keperluan tujuan penelitian, kami memilih ketiga konteks ini untuk menyoroti dampak konflik. Kami juga memilih untuk berfokus pada tiga konteks ini karena kami percaya ada peluang bagi perubahan. Terakhir, seiring dengan selesainya penelitian kami, empat ibu di Paniai, Papua, menuntut keadilan atas pembunuhan atas anak-anak remaja mereka yang terjadi pada bulan Desember 2014.[24] Sebagai perempuan, ibu, kakak dan adik perempuan, kami mendedikasikan pikiran dan upaya kami untuk mereka. Kekerasan harus berhenti. Kita harus memulai perjalanan kita untuk membangun perdamaian dan memulihkan luka konflik.

Yogyakarta: Para Nenek yang Bersuara untuk Kebenaran dan Keadilan

4

"Cukup.
Cukup kami yang merasakan pahit getirnya,
tapi anak-anak yang tidak berdosa,
generasi yang akan datang, jangan sampai terulang kembali
kekejaman dari penguasa yang haus segala-galanya."

CHRISTINA SUMARMIYATI, KIPPER

Yogyakarta mengalami gema dari kekerasan yang terjadi di Jakarta.[25] Pada tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok tentara dipimpin Mayor Muljono menculik Kolonel Katamso dan Letnan Sugiono. Mereka membawa kedua perwira ini ke sebuah kota kecil di sebelah utara Yogyakarta dan menahan mereka di sebuah barak batalyon Angkatan Darat. Kedua perwira ini kemudian dibunuh. Keesokan harinya, anggota PKI dan organisasi massanya berdemonstrasi di depan markas militer, mengepung Keraton Yogyakarta tempat pemerintahan sipil berkantor, dan menduduki RRI. Mereka menyatakan dukungan terhadap gerakan 30 September 1965.[26]

Otoritas militer di sekitaran Yogyakarta dan Jawa Tengah segera bereaksi. Mereka membentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin oleh Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Komando ini beroperasi di Jawa Tengah dan wilayah lainnya yang dianggap mendukung PKI.

Situasi di Yogyakarta saat itu sangat membingungkan dan menegangkan. Proses belajar-mengajar terhenti. Sejumlah mahasiswa anggota CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) dan para pengajar anggota HSI (Himpunan Sarjana Indonesia) ditangkapi. Warga Yogyakarta menjadi ketakutan karena peristiwa-peristiwa mengerikan yang terjadi di sekitar mereka. Setiap hari terdengar berita tentang orang hilang, ditangkap, dan dibunuh. Ada juga berita tentang sejumlah sumur di desa tertentu yang digunakan sebagai kuburan massal.[27]

Kantor Corps Polisi Militer (CPM) dijadikan tempat penahanan sementara bagi tahanan yang baru ditangkap untuk menjalani pemeriksaan.[28] Biasanya pemeriksaan berlangsung antara 5 sampai 7 hari. Setelah itu tahanan dipindahkan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan yang lain, seperti penjara Wirogunan dan Cebongan, Gedung Jefferson (gedung bekas perpustakaan yang dikelola USIS, program pendidikan dibawah Kedutaan Amerika), Benteng Vredenburg ataupun gedung-gedung lainnya yang diambil alih pihak keamanan di Yogyakarta.

Ribuan laki-laki dan perempuan ditahan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sebagian dari mereka diambil paksa dari tempat penahanan dan tak pernah ditemukan lagi. Mereka yang lolos dari pembantaian dipindahkan dari penjara ke penjara. Sebagian tahanan laki-laki dibawa ke Ambarawa, dan kemudian ke pulau-pulau penjara di Nusakambangan dan Buru. Tahanan perempuan dipindahkan ke Bulu, Ambarawa dan Plantungan. Sampai dengan sekarang jumlah korban pembunuhan, penghilangan, penahanan dan penyiksaan dari Yogyakarta dan Jawa Tengah tidak diketahui. Walaupun mekanisme nasional HAM telah melakukan penyelidikan, baik laporan Komnas Perempuan (2007) yang mengumpulkan kesaksian 112 orang maupun penyelidikan Komnas HAM (2014) yang mengumpulkan kesaksian 349 orang, namun belum ada sebuah angka resmi yang dapat menunjukkan jumlah sebenarnya dari korban pembunuhan dan penahanan peristiwa 1965.

Sampai saat ini negara masih menyangkal untuk berdamai dengan masa lalu yang berdarah. Namun begitu, korban mulai berbicara tentang pengalaman mereka. Semenjak jatuhnya Soeharto, para korban bersama pekerja kemanusiaan, memanfaatkan ruang yang mulai terbuka dengan melakukan penelitian[29] dan mempublikasi kisah-kisah mereka.[30] Para perempuan korban di wilayah Yogyakarta mengadakan pertemuan, yang kemudian mendorong lahirnya KIPPER sebagai wadah para korban perempuan untuk saling mendukung satu sama lain dan berbicara tentang kondisi mereka di masa lalu dan kini. KIPPER rutin mengadakan pertemuan bulanan, membangun kelompok kredit mikro yang didanai sendiri, berkunjung ke anggota yang sakit, dan mendiskusikan isu politik dan sosial. Pada saat mereka bertemu, masing-masing anggota membawa "hadiah"–tidak ada yang melebihi beberapa ribu rupiah–yang kemudian diundi. Salah satu anggota mereka, seorang mahasiswa kedokteran UGM yang dipenjara selama empat tahun, membawa kotak medis untuk mengukur tekanan darah dan memberikan saran medis dasar.

Para anggota KIPPER juga turut berpartisipasi dalam Dengar Kesaksian yang diselenggarakan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) pada 2013 dan kemudian terlibat dalam penelitian ini. Mereka melihat bahwa dengan menjadi bagian dari penelitian ini maka mereka dapat menceritakan kembali kisah-kisah dan pengalaman mereka dengan menggunakan alat-alat yang telah kami kembangkan.

Beberapa anggota KIPPER yang terlibat dalam penelitian ini melakukan pementasan dalam acara Dengar Kesaksian yang diadakan di Perpustakaan Nasional, Jakarta pada bulan November 2013.

Menyasar Guru dan Siswa

CHRISTINA SUMARMIYATI: TIDAK BISA MENERUSKAN CITA-CITA

Christina Sumarmiyati atau Mamik baru saja menyelesaikan sekolah guru pada tahun 1965. Waktu itu dia berusia 20 tahun dan sedang tertarik pada upaya pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan, serta bermimpi untuk bergabung dengan upaya pemberantasan buta huruf. Ia juga aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan senang menari.

Pada bulan Desember 1965 ia ditangkap dan ditahan tanpa surat perintah penahanan. Ayah dan adiknya pun ditangkap dan ditahan. Ia dibebaskan pada bulan April 1966. Setelah bebas ia kembali menjalani cita-citanya, mengajar. Namun, pada tahun 1968 ia ditangkap lagi dan ia sebagai anggota Gerwani.

> *"Yang saya alami bahwa ada suatu petaka yang luar biasa. Ayah saya dipenjara, saya dipenjara. Adik-adik saya masih kecil, ibu saya harus membesarkan anak sendirian. Dan, yang lebih membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa adalah karena saya ditangkap dua kali. [Yang kedua kalinya] dengan penyiksaan yang luar biasa kejinya ... Kalau penjajahan masih bisa kita mengerti, tapi ini dilakukan oleh bangsa sendiri. Perbuatannya terhadap saya ... di luar [batas-batas] kemanusiaan."*

Penangkapan kedua terjadi di tempat kos Mamik pada pukul 2 pagi. Saat ditangkap, Mamik menunjukkan surat pelepasan dari penangkapan pertama, tapi para penangkap tidak menghiraukannya. Para penangkap bahkan menjadi marah ketika menemukan kartu keanggotaan IPPI (Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia) miliknya. Mamik dibawa ke markas CPM dan kemudian diinterogasi.

> *"Selama penyelidikan saya ditelanjangi di atas meja, mereka membakar rambut kemaluan saya dan rambut di kepala saya. Saya pingsan dan ketika saya bangun saya digiring ke penjara militer polisi di Yogyakarta pada pukul empat pagi. Saya dimasukkan ke dalam sel dan diborgol dengan seorang laki-laki yang ada di sana. Pada hari kedua kami diinterogasi bersama-sama; mereka mengatakan apakah kami mengaku atau tidak kami penghasut politik dan kami akan dipaksa untuk mengakui bahwa kami adalah PKI. Kami berdua dilucuti. Saya diperintahkan untuk duduk di pangkuan dia telanjang, atau mengaku. Kemudian mereka mengambil saya dan menempatkan saya di pangkuannya dalam posisi seksual. Mereka tertawa puas."*

Setelah diinterogasi di CPM, Mamik lalu ditahan di Penjara Wirogunan sampai tahun 1971, dan kemudian dipindahkan ke Plantungan.

> *"Pada tahun '71 saya dipindahkan ke kamp Plantungan dengan 500 perempuan dari Jawa. Di Plantungan tidak ada lagi penyiksaan fisik, tapi teror psikologis. Kami dianggap sebagai manusia tidak bermoral, pemberontak. Kami tidak suka pengawas kesehatan mental di Plantungan; dia menghamili salah satu tahanan sampai punya dua anak. Bagaimana kami bisa percaya seorang pengawas seperti itu? Ada begitu banyak hal yang tak tertahankan; akhirnya kami dilempar ke Penjara Bulu di Semarang, karena mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa diperintahkan."*

Ia dibebaskan pada tanggal 27 September 1978. Dua bulan setelah pembebasannya, Mamik menikah dengan seorang mantan tapol bernama Edi dan dikaruniai dua orang anak. Keluarga muda ini harus berjuang untuk dapat bertahan. Akibat penahanannya, Mamik tidak dapat melanjutkan cita-citanya sebagai guru. Ia kemudian hidup dari membuka kios yang menjual barang-barang rumah tangga, dan suaminya membuka bengkel.

> *"Menjadi orang mantan tapol dengan stigma yang lekat dan ruang gerak yang terbatas untuk hidup ... Saya jual semua perhiasan, sampai cincin kawin pun saya jual. Karena hanya inilah yang dapat saya tempuh. Dalam hati saya, cincin kawin memang suatu yang sakral, tapi berkat Tuhan mengalir melalui cincin kawin itu."*

Usaha kecil mereka cukup sukses. Mereka berhasil menyekolahkan anak mereka ke perguruan tinggi dan membangun rumah. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu dan sekarang kedua anaknya sudah menikah. Mamik merenungkan apa yang ia lakukan sekarang sebagai panggilannya, “Untuk mengisi kehidupan dengan semangat kebersamaan, untuk menuntut kembali hak-hak kami yang sekian lama dihilangkan oleh negara. Kami tetap menuntut nama baik untuk dikembalikan dan juga jaminan hidup di hari tua dari Negara.”

KADMIYATI:BERSEPEDA DEMI KELANGSUNGAN HIDUP

"... Saya malam kulakan sama suami sama anak saya. Saya yang gendong anak, suami saya bawa itu... terus, saya ke pasarnya cuma gendong dan jalan kaki sejauh 10 kilometer. Lama-lama, saya punya sepeda. Itu satu-satunya cara untuk bisa menghidupi saudara-saudara saya."

Seorang guru muda lain yang hidupnya berubah akibat peristiwa 1965 adalah Kadmiyati. Pada saat itu, ia seorang mahasiswi tingkat akhir di Sekolah Guru Taman Siswa Pusat di Mergangsan. Selama menjadi mahasiswi, Kadmi sering mengikuti kegiatan budaya yang diselenggarakan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dan ikut mengajar anak-anak di sebuah TK yang diorganisir oleh Gerwani.

Pada 10 Oktober 1965 Ia dibawa dari rumahnya bersama warga lainnya ke kantor desa. Mereka kemudian dipindah ke kantor kecamatan dan ke sebuah kamp di Bantul. Selama lebih dari satu tahun ditahan di sana, mereka tidak mendapatkan cukup makanan. Ayah dan kakaknya juga ditangkap, lalu ditahan di LP Wirogunan, kota Yogyakarta.

Kadmi dibebaskan dari penjara pada tahun 1966, tetapi karena ayahnya masih di penjara, ia harus membantu ibunya untuk membesarkan tujuh adik-adiknya, yang termuda baru berumur sekitar satu tahun. Tanpa ayahnya, mereka menghadapi kesulitan ekonomi yang besar. Ketika mereka ditangkap, rumah mereka dibuat porak poranda.

> *"Dengan sengsara segala yang kita punya ludes, dibawa kabur oleh penggeledah; [diobrak-abrik] apa yang dia mau, termasuk pusaka [keris] yang sarungnya itu terbuat dari emas juga mereka sikat habis. Uang dan juga gamelan juga diusung seenaknya sendiri."*

Mulai tahun 1967, Kadimyati dipanggil beberapa kali ke kamp Bantul. Ia kemudian mengalami penyiksaan.

> *"Waktu itu diambil, terus ya dipanggil di dalam kamp. Waktu itu mencari faktanya itu belum ada siksaan bagi saya. Itu panggilan yang pertama. Dan tahun '68 ...*

> *saya dipanggil dua kali. Waktu dipanggil kedua kali itu, saya menerima siksaan dari Kodim Bantul dan waktu itu yang meriksa dari Kejaksaan dan dari Kodim sendiri, orang-orang Kodim sendiri. Waktu itu, kita ditelanjangi, ya kita di... gitulah. Pokoknya saya malu untuk mengutarakan hal itu karena saya kira sama saja dari tapol perempuan yang menerima siksaan dan ada yang lebih kira-kira yang saya baca dari buku-buku itu... kesaksian dari perempuan yang sudah saya utarakan, 10 perempuan yang menerima penyiksaan, yang menerima pelecehan, yang dijadikan simpanan sampai mempunyai anak 3 yang dilempar begitu aja, ga diurusin. Kan cuma memuaskan nafsu belaka. Jadi, kita cuma bisanya.. 'Ya Tuhan, kok kayak gitu? Ampunilah mereka.'"*

Ketika dibebaskan, Kadmi dikucilkan oleh masyarakat. Kadmi harus menjadi pencari nafkah untuk keluarganya. Ia meninggalkan rumah setiap pagi pada pukul 3 pagi dan berjalan kaki 10 kilometer ke pasar untuk berjualan. Ia mengenang masa itu dengan sedih tapi ia menyadari bahwa itulah yang harus dilakukannya demi keluarganya. "Si mbok saya yang waktu itu tahun 1966 melahirkan adek yang terakhir... Jadi, yang ditujukan cuma saya untuk mencari biaya, untuk membiayai."

Kadmiyati menikah pada tahun 1972 dengan seorang pemuda yang bukan mantan tahanan politik. Mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka dengan membuat tepung ketan dan menjual sayuran di pasar. Setelah beberapa saat, ia mampu membeli sepeda yang ia gunakan sampai hari ini. Sejak saat itu Kadmi selalu menggunakan sepeda untuk ke pasar atau aktivitas lainnya. Pada tahun 1975, Kadmi memulai usaha menjahit untuk menambah pendapatan mereka sementara suaminya bekerja di sebuah toko roti.

Suami Kadmiyati meninggal beberapa tahun yang lalu dan saat ini ia tinggal bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Ia masih menjalani hidup yang produktif dan aktif, menjahit dan beternak ayam serta membantu

membesarkan cucu-cucunya. Ia menghadiri kegiatan di gerejanya, 10 menit naik sepeda. Kadmiyati, kini berusia 71 tahun tinggal di sebuah rumah kayu kecil dengan dua kamar. Ruang depannya adalah tempat ia bekerja, menjahit tas, gaun, topi, dan ikat pinggang.

Ia masih dihantui oleh apa yang terjadi padanya dan keluarganya. “Ada kekhawatiran sampai sekarang karena terus dimonitor.” Ia juga memendam rasa ketidakadilan yang dalam. Ketika diminta untuk membayangkan keadilan, ia mengatakan, “Sedikit keadilan itu... kalau dari pemerintah sendiri bisa menunjukkan kebenaran sejarah dari peristiwa ’65.” Ia bertanya kenapa PKI mendapat reputasi kekerasan dan kekejaman ketika justru merekalah yang disiksa dan dibunuh pada tahun 1965.

Isi kotak memori ibu Kadmiyati

> *"Aku pun juga menuntut dan berharap juga untuk Hukum Adil atas kekerasan yang menimpa para korban 1965. Saking sadisnya melakukan penganiayaan dan pembunuhan beberapa juta orang dan yang dihukum sampai 14 tahun lamanya. Kapan akan bertindak hukum yang adil?.... Siapa yang sadis dan kejam? Komuniskah? Atau pelaku-pelaku pembantaian? Cari tahu kebenaran itu."*

SUJIRAH: HANCURNYA MIMPI SEORANG KAKAK YANG BERBAKTI

Sujirah diapit oleh dua saudara laki-lakinya.

Mimpi Sujirah untuk menimba ilmu sebagai mahasiswi tingkat akhir di Ilmu Sosiatri UGM hancur saat dia menerima surat panggilan pada November 1965. Dia dipanggil ke Kemantren Wirobrajan, lalu bersama puluhan orang lain dibawa ke Benteng Vredeburg. Sejak itu hidupnya berpindah dari penjara ke penjara. Pada bulan Maret 1966 ia dikirim ke penjara Ambarawa dan ditahan sampai tahun 1969. Selama di penjara, Sujirah diinterogasi dan disiksa. Ia dipukuli, tangan dan kakinya diinjak-injak.

Penderitaannya tidak juga berhenti ketika ia keluar dari penjara. Ia masih harus melapor ke Kodim setiap minggu selama satu bulan. Ia juga mendapatkan stigma, orang berbisik-bisik bahwa ia terlibat pembunuhan di Jakarta. "Ini adalah salah satu dari orang-orang yang kembali dari Lubang Buaya," bisik orang-orang.

Ia pun harus segera mencari pekerjaan untuk menghidupi keenam orang adiknya. "Saya harus menyembunyikan identitas saya sebagai mantan tahanan politik. Jika ada yang tahu, saya akan dipecat dari pekerjaan saya." Pada tahun 1970, Sujirah pindah ke Jakarta di mana ia masih harus melapor secara rutin seminggu sekali. Ia membantu saudara-saudaranya menjual kue keranjang di pasar dan kemudian bekerja sebagai pengasuh. Pada tahun 1975, ia mendapat kesempatan baik ketika majikannya membawanya ke Jepang sebagai pengasuh bayi. Tapi tidak lama setelah itu, ia dipanggil pulang ke Yogyakarta karena ibunya sakit. Sebagai anak tertua dan satu-satunya putri, dia bertanggung jawab untuk merawat ibu dan adik-adiknya.

Sebagai tulang punggung keluarga, Sujirah membuka warung kelontong di samping rumahnya pada tahun 1968 namun kemudian harus menutup warungnya pada 2013 karena kehabisan modal. Ia dan dua adik laki-lakinya sekarang bergantung pada uang sewa dari dua rumah yang mereka warisi dari orang tua mereka. Karena ia memiliki rumah, Sujirah dikategorikan sebagai 'orang mampu.' Karena itu, Sujirah tidak pernah menerima bantuan pemerintah, padahal ia merasa sangat membutuhkannya. “Saya tidak pernah menerima bantuan pemerintah. Saya merasa itu tidak adil.”

Sujirah memilih untuk tidak menikah karena ia telah memberikan hidupnya untuk ibu dan adik-adiknya. Ia berharap bisa mendapatkan modal agar dapat membuka kembali warungnya sebagai sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarganya.

Ketika ditanya apakah ia merasa bisa pulih dari peristiwa tahun 1965, Sujirah mengatakan bahwa ia masih merasakan amarah tentang peluangnya yang hilang.

> *"Belum pulih, teringat saat itu ketika dibawa petugas, menjelang pendaftaran sarjana di UGM jurusan Sosiatri, juga kalau ada yang omong masa lalu, saya masih ingin marah... pada dasarnya diri sendirilah yang bisa menyembuhkan."*

ENDANG LESTARI:
KESEDIHAN YANG TAK BERUNJUNG

Endang Lestari adalah seorang mahasiswa MIPA, berusia 20 tahun, dan anggota CGMI. Pada 27 November 1965 ia dibawa dari rumahnya oleh Koramil dan dibawa ke markas Korem 72 untuk diinterogasi. Seperti yang lain, ia berbaris dalam keadaan telanjang untuk dicari cap Gerwani di tubuhnya. Kemudian dia dipindahkan ke Benteng Vredeburg dan dibawa ke Gedung Jefferson untuk interogasi.

> *"Waktu diperiksa itu, ditanya sama jaksanya, waktu itu jaksanya namanya W. 'Ibu mau menggulingkan pemerintahan Soekarno yang sah ya?' katanya begitu. 'Saya gak tahu....' Saya juga gak tahu kalau waktu itu ada kudeta 'kan. Terus, dilihat tangannya. 'Pernah megang senjata?' 'Belum pernah.'"*

Rentetan pertanyaan memberinya bayangan tentang seberapa berat hal yang dituduhkan kepada dirinya dan kawan-kawan senasibnya. Ia ditahan di Benteng Vredeburg lalu berpindah ke beberapa penjara termasuk Penjara Bulu Semarang selama tiga tahun dan akhirnya ke Kamp Plantungan.

Sampai saat ini, Endang tidak mengerti mengapa ia ditahan.

> *"Sebelumnya saya belum pernah ikut organisasi apapun, karena keluarga saya sangat miskin dan saya mempunyai perasaan minder. Saya anak pertama yang sekolah sampai perguruan tinggi. Waktu itu jarang sekali anak-anak yang sampai kuliah di kampung saya."*

Ia mengingat pengalamannya yang paling sulit adalah rasa lapar karena tidak pernah mendapat makanan yang cukup selama di penjara. Mereka mencoba untuk menambah gizi dengan makanan yang dibawa oleh keluarga mereka. Mereka juga merajut rambut sendiri menjadi harnet untuk dijual. Di Kamp Plantungan, Endang bergabung dengan unit menjahit sehingga bisa menghasilkan kerajinan tangan yang dapat dijual.

Ketika dibebaskan, ia pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan karena merasa tidak nyaman berada di desanya. “Setiap gerak saya seperti diikuti terus gitu loh. Jadi, saya pinginnya ke luar dari kampung itu.” Ia menemukan pekerjaan menjahit di Jakarta tapi terkendala oleh persyaratan lapor diri setiap bulannya ke pemerintahan desa di Yogyakarta. Suatu kali ia pernah dicari oleh pihak berwenang namun ia tidak ada di rumahnya. Akibatnya, ia harus melapor ke Koramil setiap hari selama satu bulan. Ia harus melakukan hal ini meskipun sudah punya surat jalan dan surat berkelakuan baik.

Pada tahun 1981, ia kembali ke Yogyakarta dan menikah dengan sesama penyintas, bernama Wahyudi. Suaminya bekerja di rumah sakit Bethesda. Mereka dikaruniai seorang anak pada tahun 1985. Kehidupannya kembali muram ketika Endang mengalami semacam depresi pada tahun 2000. “Sekolahnya anak lancar tapi menghadapi masuk SMA, saya terkena sakit stress. Saya merasa takut sendirian

takut, takut, dan takut." Ia menjadi sulit berjalan sendiri. Pada saat yang sama, ia tidak mempunyai sumber daya untuk meminta bantuan psikolog. "Pokoknya saya cuma berdoa saja, "Ya Tuhan, tolong Tuhan kembalikan saya supaya bisa bangkit, mandiri lagi seperti dulu.'"

Ia perlahan pulih. Namun keadaan semakin memburuk ketika suami dan anaknya mengalami kecelakaan sepeda motor. Suaminya harus dirawat selama satu bulan di rumah sakit karena mengalami stroke separuh. Situasi ini membuat ekonomi keluarga memburuk dan Endang terhanyut dalam kesedihan yang mendalam.

Suaminya meninggal pada tahun 2007. Penglihatan Endang mulai memburuk jadi ia membuka warung kelontong. Keinginan terakhir suaminya adalah agar anak mereka menyelesaikan tahun terakhir sekolahnya, namun sampai sekarang hal ini belum memungkinkan. Ibu Endang pun masih khawatir tentang pengakuan dan kebenaran. Ia ingin namanya dibersihkan dan kebenaran diungkap. "Dipulihkan nama saya dari peristiwa itu. Pelurusan sejarah untuk generasi mendatang."

Disasar karena Menari

SRI WAHYUNI:
RUMAHNYA DIAMBIL ORANG LAIN

Cucuku

Sengsara nenek menjaga cucu
Dalam peristiwa Gestapu
Tiap hari lari ke sana ke mari
Luputkan diri dari bahaya

Siang malam cucu memanggil-manggil
"Bapakku, Ibuku, dimana?"

Dengan sedih nenek menjawabnya
"Bapak, Ibumu, di penjara."

—
Lagu ciptaan Sri Wahyuningsih
ketika dia berada di penjara (1965-1969)

Ibu Sri Wahyuni sedang menyanyikan lagu ciptaannya di acara "Dengar Kesaksian" di Jakarta, November 2013.

Sri Wahyuni (dikenal sebagai Nik) adalah seorang penari ketoprak, penyanyi dan pemain drama yang tergabung dalam Lekra. Penderitaannya dimulai ketika sekelompok tentara mendobrak rumahnya pada September 1965. Ia diseret keluar dan dibawa ke gedung Jefferson. Ia diinterogasi sebentar di sana kemudian dibawa ke kantor CPM. Ia diperintahkan untuk duduk tegak sepanjang malam dan tetap terjaga. Jika tertidur, seorang petugas akan memukulinya. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya ia dibawa ke Benteng Vredeburg dan ditahan bersama dengan ratusan orang lain. Ia dituduh hadir di Lubang Buaya dan berpartisipasi dalam penyiksaan para jenderal sebelum membunuh mereka. Ia ingat bagaimana para interogator menanyainya.

"'Kamu kan di sumur, eh apa itu..., Lubang Buaya?' Saya kan diam saja, orang saya tidak tahu. Terus, saya dipopor sama bedil, sama senjata. Terus, dicecar terus, 'Orang berapa? Sudah berapa orang yang kamu masukkan di Lubang Buaya?' Saya diam saja."

Ia dibawa tiga kali ke Gedung Jefferson selalu mendapat penyiksaan. Wajah dan kepalanya dipukuli, ditendang, disetrum, dan dibakar dengan rokok. Ia ditelanjangi dan disuruh berputar supaya mereka bisa mencari tanda palu dan arit. Punggung dan pinggangnya dipukuli dengan popor senapan begitu banyaknya hingga ia sekarang memiliki cacat permanen dan kesulitan berjalan. Selama waktu tersebut, suaminya tidak pernah datang untuk mengunjunginya sampai akhirnya ia meninggalkannya.

Ia dikirim kembali ke Benteng Vredeburg dan ditahan di sana selama tiga bulan kemudian dikirim ke Penjara Wirogunan di Yogyakarta selama satu bulan, Penjara Ambarawa selama 7-8 bulan, dan terakhir ke Bulu Semarang, Jawa Tengah selama lima tahun.

"Haduh, di Wirogunan itu, saya nangis. Saya nangis begitu.. Kalau dihajar, saya tidak bisa nangis, tapi di Wirogunan itu saya nangis. Karena apa saya nangisnya? Kalau keluar dari pintu kamar yang untuk tidur semua yang ditahan, itu kan ada kaleng, ya ada parit, ya tapi paritnya itu penuh dengan kotoran, udah... Jadi, kalau ke luar begitu, udah tahu kotoran yang gak karuan itu, udah. Baunya juga kayak gitu ya. Itu saya bisa nangis."

Di Penjara Bulu dia bisa mendapat makasan sedikit lebih baik karena dia bertugas memasak di dapur. Lebih dari 1000 perempuan ditahan di situ dan mereka tinggal di ruang yang sempit sehingga susah mendapat tempat untuk tidur.

> *"Jadi, misalnya kalau tidur malam, itu kalau pada capek, itu ngomong sama teman-teman, 'Ayo membalik! Hitung 1,2,3 ya balik ke kiri.' Nanti, kalau sudah capek, ya balik ke kanan. Dengan kalau mau balik ya secara koordinasi."*

Pada tahun 1970 ia dibebaskan dan dikembalikan ke rumahnya di Gowongan. "Saya menyimpan surat pembebasan saya meskipun sudah rusak."

Saat kembali, Nik merasa terasing dari lingkungannya dan dia tidak dilibatkan dalam kegiatan desa. Dia tidak diizinkan oleh aparat untuk bergerak atau berkumpul dengan lebih dari dua orang. Ia pun harus menerima kenyataan bahwa rumah dari hasil kerja kerasnya sudah dihuni oleh orang lain. Keluarganya tidak cukup berani untuk meminta rumah itu. Pengalaman kehilangan rumahnya sangat memukulnya.

> *"Pertama, berdasarkan dari kenyataannya, ketika saya keluar dari penjara, dulu punya rumah—tempat tinggal sudah disita. Waktu itu yang namanya aparat di kampung; mulai dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Jetis tidak ada yang mau memperjuangkan. Ini rumah seisinya hilang. Saya hidup menjadi gelandangan. Tidur hanya di pinggiran rumah orang."*

Nik memprotes pengasingan tersebut dengan tidur di luar rumah-rumah penduduk dan memaksa bergabung dalam kegiatan sosial yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Kepala desa menyuruhnya untuk pergi dan mencari tempat tinggal lain. Atas bantuan seorang pastor Katolik, Nik menjadi juru masak untuk paroki. Nik berkelana dari satu kota ke kota lain sampai akhirnya kembali ke Yogyakarta pada tahun 1976 dan menjadi penjual gorengan.

Ibu Nik berdiri di depan rumah keponakan laki-lakinya, tempat ia kini tinggal.

Pada tahun 2011, ia harus berhenti berjualan ketika kakinya patah akibat kecelakaan sepeda motor. Ia harus menggunakan kruk untuk berjalan. Saat ini Ia tinggal bersama keponakan laki-lakinya. Ia masih membuat makanan ringan yang dijualnya ke teman-teman dan tetangganya. Ia juga dianggap sangat terampil dalam upacara pemakaman dan sering diminta untuk membantu. "Saya merasa baik pada saat saya bekerja, jika saya tidak bekerja, pikiran saya melayang ke mana-mana."

SUJILAH: DITAHAN DAN DISIKSA DALAM KEADAAN HAMIL

Pada tahun 1965 Sujilah adalah seorang siswi berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya di Sekolah Pendidikan Guru setingkat SMA. Di waktu senggangnya, ia suka menarikan dan melagukan *Genjer-Genjer*. Sujilah juga aktif dalam kegiatan budaya yang diselenggarakan Lekra. Ia ditangkap pada bulan November 1965 bersama-sama dengan beberapa tetangga di Nitipuran, yang dikenal sebagai basis PKI. Sujilah dibawa ke Kamp Bantul dan ditahan.

Sujilah di depan rumahnya.

Dalam penahanan dia mengalami penyiksaan. Siksaan yang ia terima membuat penglihatan dan pendengarannya terganggu secara permanen.

> *"Saya tetap dicecar, "Kamu ikut membunuh jenderal-jenderal itu?" Saya tetap jawab gak tahu, wong memang saya gak tahu. Terus, saya dipukul, disumeti rokok, tangan dirokok, terus dipukuli dengan knop dan ditelanjangi untuk dicari cap Gerwaninya."*

Selama berada di penjara, Sujilah dan para tahanan melakukan kerja paksa. Ia ditugasi melakukan pemotongan uang dan membawakan air minum untuk para tahanan politik laki-laki yang bekerja membangun tanggul di wilayah Kretek, dekat pantai Parangtritis. Ia dibebaskan pada tahun 1966 dan kembali ke rumah.

Sujilah kembali ke Nitipuran dan menikah dengan tetangganya. Ia melahirkan anak pertama dan kerja serabutan, menjahit dan berjualan kain di sekitar Yogyakarta. Selama itu ia sering dipantau oleh anggota intelijen.

Kali kedua ia ditahan tahun 1969 ketika ia sedang hamil tiga bulan dan harus meninggalkan anak pertamanya yang berusia dua tahun di rumah. Dia ditangkap karena melewati jam malam saat pulang dari menjenguk temannya yang sakit.[31] Ia dituduh sebagai PKI Malam dan diperintahkan untuk melapor ke rumah seorang pejabat di Bantul. Di sana ia dilecehkan secara seksual. Ia kemudian dibawa ke Kodim Bantul di mana ia mengalami pelecehan seksual lebih lanjut, dan penyiksaan.

> *"Aku diperintahkan untuk menanggalkan baju dan diberi aba-aba. Mereka berteriak, 'Miring, mlumah, mengkurep'. [Lantas aku] diraba-raba dengan ditelanjangi dalam keadaan hamil tiga bulan."*

Sujilah ditahan di Kamp Bantul selama dua bulan kemudian dipindahkan ke Penjara Wirogunan di Yogyakarta. Ia mengalami mual yang sangat berat dan muntah terus setiap pagi. Ia ditahan selama dua bulan lagi, kemudian dibiarkan pergi tanpa surat pembebasan. Selama sebulan ia dikenakan wajib lapor ke kantor Kelurahan Ngestiharjo selama sebulan.

> *"Terus, saya minta diperiksa di bidan Darsono. Ternyata, yang saya kandung gak normal. Saya disuruh berangkang supaya kepala [bayi]nya di atas. Terus, saya tiap pagi disuruh merangkak, diminta tidak usah kembali ke sana, jadi minta izin tahan luar. Terus, minta tahanan luar ya gak dipanggil diperiksa lagi."*

Pada tahun 1972 ia tidak diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilu. Ia juga menghadapi kesulitan dalam pengurusan surat-surat yang dibutuhkan untuk pendidikan anak-anaknya.

Ia melahirkan seorang anak lagi pada tahun 1973 dan kini punya tiga anak untuk dinafkahi. Suami Sujilah bekerja sebagai supir, sementara ia sendiri menjahit dan membuat makanan ringan untuk dijual di warung makanan dekat rumahnya. Pada tahun 2006 ia dan suaminya menderita pukulan lagi ketika rumah mereka hancur oleh gempa bumi. Sekarang, Sujilah berjualan peralatan rumah tangga. Hidupnya benar-benar

Isi kotak memori ibu Sujilah.

bergantung pada anak-anaknya yang sekarang sudah bekerja dan punya keluarga sendiri.

Kini Sujilah merasa bahagia karena ia punya anak dan cucu yang banyak dan mereka menjadi sumber kekuatan baginya. Hampir lima dekade sejak ia dibebaskan, Sujilah kini merasa diterima oleh komunitasnya. Ia bahkan terpilih menjadi pengurus cabang PKK setempat. "Secara umum semuanya baik-baik saja di lingkungan masyarakat. Tapi, saya masih ingat akan perlakuan tidak adil karena KTP ayah saya memiliki tanda ET (Eks Tapol)." Ia juga merasa bahwa tidak ada keadilan dari pemerintah. Ia masih belum bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis di bawah Jamkesmas tanpa ada alasan yang jelas.

ONI PONIRAH: 14 TAHUN DALAM PENJARA SEJAK SMA

Seperti perempuan muda lainnya pada masa itu, Oni Ponirah suka menarikan lagu Genjer-genjer. Pada tahun 1965, Oni baru berusia 17 tahun, dan masih bersekolah di kelas 1 SMA. Pada 25 November, seorang perwira CPM datang ke rumah Oni dan membawanya ke kantor CPM untuk diinterogasi. Saat ia tidak bisa menjawab pertanyaan penyidik, mereka menjambak rambutnya. "Aku sendiri diambil, katanya hanya dimintai keterangan ternyata sampai 14 tahun, dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1979 akhir Desember."

Dari CPM ia dibawa ke Jefferson untuk diinterogasi lebih lanjut. Di sana ia diperintahkan untuk telanjang. Namun, petugas kejaksaan yang kebetulan lewat merasa kasihan dan menghentikan hal tersebut. Dari Jefferson dia dibawa ke Benteng Vredeburg, lalu ke empat penjara lainnya, Penjara Wirogunan, Ambarawa, dan Bulu Semarang dan akhirnya ke Pusat Rehabilitasi Plantungan Kendal di Jawa Tengah. Ia tidak pernah didakwa atas kejahatan apapun dan dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain.

"Selama di Ambarawa, hati tidak pernah tenang. Mau pindah kemana lagi? Pada tanggal 8 Desember 1979 ia dibebaskan dan dikirim pulang. Saya gembira sekali walau melihat orang tua saya sudah kelihatan sepuh sekali karena saya tinggalkan mereka selama 14 tahun."

Kotak memori Ibu Oni yang berisikan artikel dan beberapa foto penahanannya.

Oni mendapat pekerjaan sebagai pengasuh anak. Beberapa bulan kemudian ia bertemu Leo Mulyono, seorang pelukis yang baru saja kembali dari Pulau Buru, dan kemudian menjadi suaminya pada tahun 1980.
Saat mereka pindah mereka sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sehingga selama dua bulan mereka harus secara rutin melapor ke kepala desa yang lama. Sementara itu, kesempatan mereka untuk mendapatkan penghidupan juga terhambat. Pada tahun 1985 suami Oni, yang saat itu sudah memiliki galeri dipaksa untuk menutup galeri oleh aparat. Saat ini mereka hidup dari penjualan pulsa serta bantuan dari anak-anak mereka. Ia berharap bahwa kebutuhan kesehatan dan ekonominya dapat dipenuhi di usia tua.

Anak-anak mereka terkena dampak dari sejarah orang tua mereka. Mereka pernah diejek oleh anak-anak tetangga. Oni dan suaminya mendorong mereka untuk belajar agar dapat meriah sukses dalam hidup. Semua kini sudah lulus dari perguruan tinggi tanpa bantuan apapun dari pemerintah. Oni merasa mereka tidak pernah mendapatkan keadilan dan menurutnya pemerintah harus meminta maaf kepada para korban. Namun ia Oni menilai, “Lebih mudah jadi bijaksana ketika pengalaman hidup anda panjang.”

Anak-anak yang Ditahan dan Ditinggalkan

SUMILAH:
DITAHAN KARENA NAMA YANG SAMA

Pada tahun 1965 Ibu Sumilah berusia 14 tahun. Ia tinggal bersama keluarganya di pasar Prambanan; pergi ke sekolah dan membantu mereka menjual makanan di kios pasar. Pada tanggal 19 November 1965, Sumilah dijemput dari rumahnya dan diperintahkan untuk berkumpul di Kelurahan Bokoharjo, Prambanan. Di tengah hari ia dibawa dengan truk ke Penjara Wirogunan bersama sekitar 50 orang lain dari desa-desa sekitarnya.

Ibu Sumilah berdiri di depan warung sate kambingnya.

"Jam 11 siang ada truk datang, tidak diberi tahu apa-apa, disuruh naik saja. Di dalam hati saya mengatakan, kalau truk ini ke arah timur dengan tujuan Kali Wedi,

saya pasti mati. Tetapi ternyata tidak, saya bersyukur kepada Tuhan.

Satu truk tersebut di bawa ke Wirogunan lalu semuanya begitu, di periksa satu persatu. Intinya, semua yang dikenakan misalnya uang juga diminta. Dia minta semua, anting-anting 4 diminta semua... Sampai masuk pun terus di periksa-periksa, semua diraba-raba begini atau masuk. Terus, saya dimasukkan ke kamar nomor empat."

Beberapa hari kemudian, ia dibawa ke Gedung Jefferson untuk diinterogasi. Sumilah ditelanjangi dan disiksa.

"Anggota CPM menanyai saya, 'Kamu Gerwani ya?', saya jawab, 'Bukan'. 'Iya gitu?' mereka memastikan. 'Bukan', saya jawab lagi. Saya dipukul kanan-kiri, 'Anu, saya ini hanya ikut tari-menari Pak, jadi bukan ikut Gerwani-Gerwani itu apa.' Mereka bertanya lagi, 'Kamu anu ya, buka-pasang senjata?', 'Tidak Pak, saya tidak mengerti hal demikian.'"

Sumilah di dalam rumahnya.

Setelah kembali ke Wirogunan, banyak dari tahanan termasuk Sumilah, sakit parah. Untungnya, tahanan lain yang kebetulan seorang dokter memberinya obat. Sumilah selamat, namun beberapa tahanan lain ada yang meninggal. Setelah 6 bulan, ia dipindahkan ke Penjara Bulu di Semarang pada tahun 1966 dan akhirnya ke penjara Plantungan di Kendal pada tahun 1971. Di Plantungan, Sumilah bergabung dengan kelompok tani dan ia mendapatkan jatah makanan yang lebih layak dibanding di LP Wirogunan. Di Plantungan juga ia jadi tahu bahwa ia ditahan secara tidak sengaja karena suatu kesalahan karena orang yang dicari adalah orang lain yang bernama sama.

Sumilah dibebaskan pada tanggal 27 April 1979 dan ia kembali ke keluarganya di Prambanan. Orangtuanya melakukan upacara larungan untuk merayakan pembebasannya. "Mereka mengambil bulus, dan meletakkan pakaian saya di atasnya, lalu melepasnya. Mereka mengatakan, anak saya meninggal, tapi dia sekarang hidup kembali." Ia menikah dengan seorang pedagang beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1990 Sumilah dan suaminya membuka warung soto dan gorengan dan beternak ayam untuk menghidupi kedua anak mereka. Suaminya meninggal pada tahun 2012. Sekarang Sumilah bertahan hidup dengan menjual sate kambing dan tongseng di pasar Prambanan dengan hasil yang minim.

"Supaya bisa makan, saya jualan sate, gulai, tongseng. Kalau laris, bisa buat membeli [bahan-bahannya] lagi karena modal saya gak banyak. Seharusnya kan punya modal supaya besok bisa beli lagi, tapi saya gak punya."

TRI ENDANG BATARI:
SEORANG AYAH YANG MENGHILANG

Tri Endang Batari sendiri tidak sampai ditahan namun masa kecilnya berubah secara dramatis ketika ayahnya, seorang pegawai negeri, ditangkap dan pada akhirnya menghilang.

> *"Bapak diambil saya tidak tahu. Saya waktu itu masih kelas 5 SD. Dengan adanya peristiwa itu, kami jadi tertumpas. Saya mengungsi ke tempat kakek dan nenek dengan ibu dan ketiga saudaraku."*

Satu bulan kemudian, mereka kembali ke rumah dan Endang bersama adik-adiknya bisa kembali bersekolah. Namun, harus menghadapai kehidupan yang penuh dengan hinaan, ejekan-ejekan dari tetangga, teman-teman, guru-guru. Teman-teman Endang membuat lagu tentang dirinya dan menggodanya sebagai anak PKI. Bahkan guru-gurunya pun mengatakan hal-hal yang pedas mengenai orangtuanya, bahwa ibunya adalah Gerwani atau orangtuanya pemberontak.

Endang tidak hanya harus menghadapi diskriminasi di sekolah tapi juga menghadapi hilangnya sumber ekonomi. Ibunya harus menjual sebagian tanah mereka untuk bertahan hidup dan kemudian membeli beberapa ekor kambing. Ibunya juga berjualan rempah-rempah namun tidak berhasil. Endang dan ibunya kemudian menjadi pengumpul batu di sungai Serang atau menjadi buruh tani.

> *"Waktu itu usia saya baru sebelas tahun seharusnya masih bermain-main, tetapi saya harus bekerja mencari batu kali untuk dijual. Di pinggir kali Serang batu dikumpulkan selanjutnya dipecah kecil-kecil, namanya batu split."*

Ketika ia mengunjungi ayahnya di markas militer di mana ia ditahan untuk memberitahu bahwa ia akan menikah, ia diberitahu bahwa ayahnya sudah tidak lagi ada di sana.

> *"Ketika saya mau menikah saya mencari bapak saya ke Kodim Wates untuk menjadi wali nikah, tetapi sudah tidak ada keterangan. Katanya bapak sudah dipindah—itu aja. Kemudian dikasih pengantar untuk ke KUA, yang intinya saya disuruh mencari wali hakim. Di buku nikah lantas tertulis: wali hakim karena orang tua tersangkut razia ABRI."*

Pada tahun 1973 Endang dan suaminya pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Pernikahannya tidak bertahan lama, mereka bercerai pada tahun 1991. Sebagai seorang ibu tunggal, ia menghadapi bentuk diskriminasi baru. Orang-orang selalu mengawasinya dan menghakimi dirinya.

> *"Saya kerap dicurigai orang. 'Janda bisa membiayai kuliah anak?' Kebetulan waktu itu—tahun 1996, anak saya yang kedua baru masuk kuliah. 'Tidak mungkin kalau tidak sambil mengerjakan yang lain—bisa memberi makan dua anaknya. Astagfirullah al adziim.' Setiap hari pergi—pergi pagi dan pulang sore. Mereka berprasangka buruk. Pantas perginya dengan laki-laki."*

Endang belajar untuk mengabaikan gosip semacam ini dan terus melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat di masjid dekat rumahnya. Stigma yang melekat padanya sebagai seorang anak dari PKI atheis mulai memudar.

> *"Saya bisa membawa diri dan baik dengan masyarakat. Misalnya, kalau di masjid ada lomba apa, saya ikut berpartisipasi; lomba menulis huruf Arab; lomba membaca Al-Quran, sehingga pelan-pelan masyarakat mulai berubah; ternyata tidak benar PKI itu atheis."*

Kotak memori Ibu Tri Endang Batari

Stigmanya yang memudar memungkinkan Endang lebih terlibat di komunitasnya. Ia mulai diterima dan mendapatkan kepercayaan masyarakat, menjadi bendahara di arisan setempat di komunitasnya, dan sebagai pengurus di kelompok perempuan setempat dan di PKK. Endang membuka salon kecantikan dengan keahlian khusus merias pengantin. Usahanya, yang kini ia jalankan bersama putri sulungnya, telah cukup berhasil. Ia juga bekerja sebagai pemeran ketoprak dan mengajar seni di sekolah dasar setempat.

Endang berharap bahwa sejarah akan diluruskan dan hak dikembalikan ke orang-orang yang telah dicabut haknya di masa lalu. Ia pernah diwawancarai di acara televisi nasional bersama korban tahun 1965 lainnya.[32] Pada tahun 2005 ia berbicara dalam satu sesi dengan DPR menuntut rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban.

SRI LESTARI:
INGATAN YANG MEMUDAR

Sulit bagi Sri Lestari untuk mengingat berbagai hal, terutama tentang tahun 1965. Tapi, Sri masih menyimpan surat pembebasannya. Meski ia kini berjalan perlahan dan terhenti-henti, ia tampak lebih muda dari usianya yang 73 tahun. Bisa jadi ingatannya yang memudar ini menjadi penangkal penuaan.

Sebelum tahun 1965, keluarga Sri hidup nyaman. Kedua orang tuanya, pemimpin PKI tingkat kecamatan, adalah pedagang batik yang sukses. Ketika kedua orangtuanya ditangkap pada tahun 1965, Sri berlindung di rumah neneknya di desa yang sama. Namun, tidak lama kemudian Sri pun dibawa ke Kantor CPM dan dipindahkan ke Penjara Wirogunan sampai 1968. Ia tidak bisa mengingat banyak, terutama tentang penyiksaan yang dialaminya saat ditahan. Ia dibebaskan dan dikenakan wajib lapor seminggu sekali di kantor kecamatan di Yogyakarta.

Sekitar sepuluh tahun kemudian pada bulan November 1978, ia menikah dengan mantan tahanan politik. Sri dan suaminya membuka beberapa usaha, antara lain warung makan, toko kelontong, penyewaan mobil, kos dan jasa binatu. Usaha kos mereka tutup setelah gempa bumi tahun 2006. Sekarang mereka mengandalkan jasa binatu mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Sri telah menemukan kebahagiaan melalui perkawinan, anak-anak, dan cucu-cucunya. Ia suka terlibat dalam kegiatan perempuan di desa dan di gereja.

HARTITI:
SUAMI YANG HILANG

Pada September 1965, Hartiti baru saja tiba dari Palembang bersama suami dan anak-anaknya. Suaminya, Hartanto Simin, baru mendapat promosi di PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Keluarga muda ini tiba dengan harapan akan sebuah awal baru. Namun pada 26 Oktober 1965 suaminya pergi bekerja dan tidak pernah pulang lagi. Sampai hari ini dia tidak tahu apa yang terjadi padanya dan tidak pernah ada jasad yang ditemukan. Hartiti baru saja melahirkan anak keempatnya ketika suaminya menghilang.

"Suamiku yang akan berangkat bekerja di DKA/PJKA suatu sore mengatakan, 'Kalau ini nanti akan ada keributan mungkin orang-orang PKI atau SB (Sarikat Buruh) mungkin ditangkap, mungkin tidak.' Mendengar pernyataan suami ini, aku koyo munyuk, ora karuan rasane [saya seperti monyet, rasanya tidak menentu]."

Suami Ibu Hartiti yang hilang sampai sekarang.

Beberapa minggu setelah menghilang ia mendengar bahwa suaminya berada di kantor CPM di Yogyakarta. Hartiti bergegas CPM untuk menjenguk suaminya, namun malah mendapat cibiran petugas dan dikatai, "Pelacur Aidit." Dari sini Hartiti mengetahui bahwa suaminya, seorang aktivis serikat pekerja, telah ditangkap karena dugaan keterlibatannya dengan PKI.

Di bulan Januari 1966, Hartiti yang juga adalah seorang anggota Gerwani, ditangkap oleh polisi dan ditahan selama beberapa bulan di kantor polisi. Ia dibebaskan namun dikenakan wajib lapor seminggu sekali. Hanya seminggu kemudian, ia ditangkap lagi. Selama empat tahun berikutnya, ia dipindah-pindahkan dari satu pusat penahanan ke yang lain: Benteng Vredeburg, Penjara Wirogunan, Ambarawa dan Bulu Semarang. Selama ditahan, anak-anaknya dititipkan pada orang tua Hartiti di Purworejo.

Pada tahun 1970 Hartiti dibebaskan dan kembali ke rumah. Ia sering diejek oleh kepala desa dan diwajibkan untuk melaporkan kegiatannya. Ia tinggal bersama kerabatnya namun mereka gelisah untuk menampung Hartiti. Mereka tidak selalu memperlakukannya dengan baik.

Walau tidak menderita siksaan fisik, kehilangan suami dan terpisah dari anak-anaknya sangat berat baginya. Anak pertamanya meninggal beberapa saat setelah Hartiti dibebaskan. Hartiti percaya hal itu berkaitan dengan peristiwa yang dialami keluarganya.

> *"Anak pertama saya ini sudah dapat berpikir tentang penderitaan ibunya dan terus memikirkan sampai meninggal. Dia juga sering mendengar kabar tentang ibunya. Anak saya yang satu ini meninggal karena sering mendengar suara-suara yang menyakitkan."*

Tiga tahun setelah dibebaskan, Hartiti menikah lagi dengan seorang kerabatnya. Hartiti menghidupi anak-anaknya sebagian besar melalui menjahit. Pada tahun 2012 rumahnya terbakar dan menghancurkan semua peralatan dan mengakhiri usahanya. Tahun berikutnya ia mulai membuat dan menjual sarung bantal dengan bordir dekoratif. Kadang-kadang ia membantu mahasiswa menemukan tempat kos.

Merenungkan hidupnya, Hartiti merasakan ketidakadilan yang terus berlangsung. Ia ingin mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada suaminya.

> *"Makanya saya sangat ingin mengetahui keberadaan suami saya. Kalau sudah meninggal, di mana dimakamkannya. Anak saya juga pernah bertanya, Mbak Rin dan Mas Dwi itu, kalau bapak masih ada, sekarang ada di mana? Kalau sudah meninggal, ada di mana jasadnya, mungkin akan saya pindahkan."*

Hartiti mendapatkan kekuatan untuk bertahan dari anak-anaknya yang masih hidup. Mereka telah berhasil dalam kehidupan mereka sendiri dan juga sangat dekat dengan Hartiti. Ia juga ditopang oleh pekerjaannya, kegiatan masyarakat dan gerejanya.

Pulau Buru: Berjuang dalam Lingkaran Kekerasan dan Trauma

5

Pengasingan tahanan politik 65 di Pulau Buru, Maluku, dirancang oleh Orde Baru sebagai cara untuk "mempekerjakan dan sekaligus merehabilitasi" para tahanan politik dalam satu upaya sekaligus. Sejak 1969 sampai 1979, penguasa mempraktikkan hal ini dengan sebutan Inrehab. Setelah semua tapol dibebaskan, tanah inrehab dialihfungsikan menjadi lahan transmigran. Berdasarkan laporan lembaga pemantau HAM, terdapat sifat sistematis dan meluas dari penahanan yang sewenang-wenang yang terjadi di periode ini, serta evolusi rencana pemerintah yang mendatangkan setidaknya sepuluh ribu tahanan ke Pulau Buru dalam proyek transmigrasi.[33]

Dalam laporan tersebut, diungkapkan pula bahwa penjara-penjara telah penuh dan para tahanan mengalami kekurangan gizi, disamping beratnya penyiksaan yang membuat kondisi para tahanan memburuk. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengirimkan para tahanan dalam jumlah besar ke wilayah-wilayah yang tidak terlalu padat penduduknya, kemungkinan di Kalimantan dan Maluku, dan memanfaatkan mereka untuk dipekerjakan dan direhabilitasi secara bertahap.[34]

Pada tahun 1969, dimulailah program tersebut dengan mengirim 2.500 tahanan laki-laki ke Pulau Buru. Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa tahanan kategori B, yaitu mereka yang diyakini memiliki

hubungan dengan Komunis, akan dikirimkan ke daerah di wilayah-wilayah terpencil di kepulauan untuk dipekerjakan di lahan pertanian.[35] Antara tahun 1969-1979, sebanyak 10.000-12.000 tahanan politik laki-laki diasingkan ke Pulau Buru. Mereka yang dikirim umumnya sudah dalam kondisi yang buruk karena mengalami kekurangan makanan dan sakit yang sangat parah. Sementara itu, sesampainya di pulau Buru, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai untuk bertahan hidup. Banyak tahanan yang meninggal karena kerja rodi, kekurangan makanan dan obat-obatan, serta hukuman berat. Dalam otobiografinya mengenai kisah hidupnya selama bertahun-tahun di pulau Buru, penulis Pramoedya Ananta Toer mencatat 320 nama orang yang tewas di Pulau Buru, memori yang menghantui kerasnya hidup di sana.[36]

Perlahan, para tahanan dapat menyediakan pangan untuk diri mereka sendiri. Mereka pun telah berhasil membangun barak, sistem irigasi, jalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pada tahun 1972, rezim Orde Baru mengundang, baik dengan cara persuasif maupun paksaan, istri dan anak-anak tapol untuk tinggal di Pulau Buru bersama para tapol. Kebijakan reuni keluarga yang digerakkan oleh militer ini sepertinya dilatarbelakangi oleh proyek transmigrasi yang sedang digalakkan pemerintah saat itu.

Para istri tapol yang baru sampai di Pulau Buru.

Foto anak dan istri tapol di masa-masa awal menetap di Pulau Buru.

> *"Mengingat kondisi tahanan/tawanan, kepadatan penduduk, lapangan kerdja jang terbatas dan kondisi2 sosial lainnja dipulau Djawa, pada prinsipnja pemanfaatan tahanan/tawanan dilaksanakan dengan djalan transmigrasi keluar Djawa ... Dalam rangka pemanfaatan tenaga tahanan/tawanan dalam projek2 perlu dipikirkan kemungkinan2 mengikut-sertakan keluarga [tahanan/ tawanan] jang bersangkutan dengan tetap memperhatikan segi2 pengamanan, pengawasan dan pembinaannja."*[37]

Program transmigrasi menjadi strategi yang dilancarkan pemerintah Indonesia saat itu untuk mengubah wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah produktif skala besar. Kebijakan ini berkorelasi erat dengan program swasembada pangan dan penyediaan tenaga kerja untuk industri kehutanan. Di bawah tekanan rejim Soeharto pada periode

1974-1979, masyarakat miskin dan yang tidak memiliki lahan di Jawa didorong dan dipaksa untuk pindah ke "pulau-pulau luar." Dengan berbekal transportasi gratis dan insentif, termasuk kepemilikan tanah, sekitar 2.959 orang menjadi transmigran. Pada Pelita III (1979-1984) jumlah transmigran yang diprogramkan meningkat drastis menjadi 500.000 orang dan pada implementasinya, jumlahnya menjadi 535.474 orang.[38]

Program transmigrasi sampai ke Savanajaya pada tahun 1980an. Para mantan tahanan politik yang memilih tetap tinggal di pulau itu diintegrasikan ke dalam program transmigrasi. Mereka menerima 2 hektar lahan pertanian dan sebidang tanah beserta rumah. Mereka juga menerima bantuan makanan dan dukungan pertanian.

Sekitar 632 perempuan dan anak-anak dikirim ke Pulau Buru antara tahun 1972-1974.[39] Para perempuan dan anak-anak ini bergabung dengan suami dan ayah mereka untuk tinggal di Pulau Buru. Sekitar 200 keluarga dipaksa untuk tetap tinggal di pulau itu dan mendapatkan tanah untuk membangun rumah dan sebagai lahan pertanian mereka. Banyak dari anak perempuan tapol yang masih muda menikahi teman ayah mereka, tapol yang masih lajang. Militer menyelenggarakan pernikahan massal untuk mereka. Setelah pernikahan massal itu, para pengantin baru dipaksa bersumpah untuk tidak akan pernah meninggalkan Pulau Buru.[40]

Pernikahan massal yang diorganisir oleh militer Indonesia antara tapol dan anak perempuan tapol lain sekitar tahun 1977. Direproduksi dari foto Hartini.

Perlahan-lahan Savanajaya berkembang menjadi sebuah desa yang hidup, jalan-jalan semakin lebar, anak-anak bersekolah bahkan sampai jenjang yang cukup tinggi, gedung kesenian sering digunakan untuk pertunjukan, anak-anak dapat bermain dengan riang; penduduk bersemangat mengelola sawah. Gereja dan masjid dipenuhi umatnya yang rukun, menumbuhkan solidaritas dan toleransi tinggi kepada sesama. Saat Natal tiba, makanan beredar, dihantarkan dari rumah ke rumah baik untuk keluarga Nasrani maupun Islam, demikian juga ketika hari Lebaran. Hidup di Savanajaya tidak mudah tapi penduduknya hidup bahagia karena keluarga lengkap, suami istri anak bisa kumpul.[41] Namun, hal ini berubah pada tahun 1999 ketika konflik antaragama melanda provinsi Maluku. Sekelompok orang yang tak dikenal menyerang Savanajaya dan membakar dua gereja. Bangunan bekas terbakar yang kini masih ada sebagai pengingat masa traumatis ini, tak tersentuh hingga kini. Serangan itu memaksa keluarga Kristen untuk meninggalkan Savanajaya, sementara para perempuan yang tinggal terpaksa memakai kerudung.

Gereja yang dibakar dalam konflik antar agama yang terjadi di Pulau Buru pada tahun 1999.

Pada tahun 2013, ketika kami memulai penelitian ini bersama LAPPAN, kami menemukan masih ada sekitar 52 mantan tahanan politik laki-laki yang tinggal di Pulau Buru dan Ambon. Dari jumlah tersebut, 4 orang tinggal di Ambon karena konflik dan 48 orang tersebar di Pulau Buru. Pada tahun 2014 dan 2015, ada 3 orang yang ada di Pulau Buru meninggal, sehingga saat ini tersisa 45 orang. Di desa Savanajaya, mantan tahanan politik dan anggota keluarga mereka sering disebut sebagai "eks-warga". Sebutan tersebut merupakan kependekan untuk "warga eks-tapol", yaitu warga negara yang merupakan mantan tahanan politik. Banyak dari mereka hidup dalam kondisi mengenaskan dan masih tinggal di rumah-rumah kayu yang dibangun oleh sesama tahanan tahun 1972. Di antara mereka, mantan tahanan politik memiliki sedikit akses dan informasi ke bantuan dan layanan publik.

Ibu dan Anak yang Mengikuti Suami

NGABINEM: MEMBULATKAN TEKAD UNTUK BERTEMU SUAMI

Ngabinem adalah seorang ibu muda, dengan tiga orang anak yang masih kecil ketika suaminya, Rabimin Siswopranoto, dan saudara laki-lakinya Sugito, ditangkap di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tahun 1965. Mereka tidak mendapat makan saat ditahan, sehingga Ngabinem dipaksa untuk memberikan bahan makanan, "Saya disuruh setor beras 10 kg satu orang setiap bulan, untuk Bapak dan adik saya." Selama 4 tahun Ngabinem rutin menjenguk suaminya di rumah tahanan. Pada masa itu, Ngabinem dua kali melahirkan anak yaitu pada tahun 1967 dan 1969.

Suami dan saudaranya kemudian dinyatakan sebagai tapol PKI golongan B dan dikirim ke Pulau Buru. Hal ini menjadi pukulan berat

bagi Ngabinem yang saat itu harus menghidupi lima orang anak, sementara lingkungan sekitar mencemooh dan mengucilkan mereka sebagai keluarga PKI. Suhartini, anak petama Ngabinem terpaksa berhenti sekolah karena tidak tahan terus menerus diejek oleh teman sekolah dan tetangganya. Untuk mengatasi kesulitan hidupnya, Ngabinem pindah ke rumah orang tuanya di Ponjong, Gunung Kidul Yogyakarta bersama 3 anak, yaitu anak pertama, anak keempat, dan anak kelima. Sementara dua anaknya yang lain tinggal bersama mertua di Prambanan untuk melanjutkan sekolah. Di Ponjong, Ngabinem bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan mereka sangat terbatas, tidak bisa menyekolahkan anak pertamanya. Ketika anaknya yang nomor empat berusia 5 tahun, aparat militer setempat menyuruh Ngabinem untuk ikut dalam program pindah ke Pulau Buru untuk "menyusul suami". Awalnya, Ngabinem merasa berat ke Pulau Buru karena memikirkan anak-anaknya.

Ngabinem dan ketiga anaknya, Hartini, Darsini, dan Suhartoyo. Foto diambil pada tahun 1972 untuk dikirimkan kepada suaminya yang ada di Pulau Buru. Beberapa bulan kemudian, mereka menyusul suaminya ke Pulau Buru.

"Saya sering tidak bisa tidur kalau malam, mikirkan anak anak saya yang numpang hidup di rumah neneknya di Prambanan. Hati ini was-was, pikiran tidak tenang ... apakah mereka nanti manut sama neneknya? Apakah mereka dapat makan? Apakah mereka nakal? Saya hanya bisa nyuwun pada yang di Atas, semoga memberi jalan keluar. Saya ingin hidup bersama anak-anak dan suami saya ... serumah lagi ... itu doa saya, tak putus-putus."

Kegundahan hati Ngabinem tersingkirkan oleh surat-surat suaminya dari pulau Buru yang meyakinkan dia bahwa lebih baik mereka menyusul ke Pulau Buru. Suaminya mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, anak-anak akan sekolah lagi, dan mereka akan memiliki rumah serta sebidang tanah. Surat suaminya juga ditujukan kepada anaknya yang tertua, Suhartini. Karena surat-surat itulah Ngabinem menjadi percaya diri untuk mengikuti program pemerintah “menyusul suami” dan tinggal di pulau Buru. Ia membawa serta ibunya yang telah tua dan tiga orang anaknya, Suhartini, Sudarsini, dan Suhartoyo. Dua anaknya yang lain ditinggal di Prambanan bersama ibu mertua. Suhartini, si anak sulung, masih ingat saat pertama kali sampai di Pulau Buru.

"Kami berangkat dari Yogyakarta, menginap di Semarang selama dua hari. Lalu malamnya berangkat ke Surabaya. Di sana, kami menginap dua hari, lalu malamnya berangkat ke pelabuhan dan naik kapal selama 6 hari hingga sampai Pantai Sanleko. Setelah sampai di Pantai Sanleko, kami jalan kaki sekitar 30 menit menuju ke Desa Savanajaya. Waktu kaki saya melangkah masuk ke areal perumahan Savanajaya, bau rawa-rawa masih tercium, alang-alang bukan cuma tumbuh liar di sekitar rumah tetapi juga di dalam rumah. Rumahku yang sangat sederhana, berlantai tanah basah, berair, tanpa perabot. Saya langsung bilang pada ibu, saya tidak mau tinggal di sini. Anehnya, adik-adik saya malah kelihatan senang, nenek dan ibu juga begitu. Akhirnya saya pasrah dan tidak minta pulang.[42] "

Ngabinem juga masih dapat mengenang perasaannya ketika pertama kali datang.

> *"Ketika sampai di Pulau Buru, saya merasa sedih, tapi juga senang, karena bisa berkumpul dengan suami dan anak-anak. Senang lihat Bapak masih hidup, karena saya dengar sebagian lainnya banyak yang mati. Ketika pertama kali bertemu Bapak di pantai Sanleko, saya langsung menangis. Saya bersyukur bisa kumpul, lumayan, ada sebidang tanah, ada sawah, dan ada alat-alat sekadarnya. Tangan bapak luka-luka karena tak cukup alat buat bekerja ... ya sabar saja, yang penting kumpul sama Bapak."*

Hidup di Pulau Buru memang tak mudah. Tidak mengherankan bahwa hanya 4% dari keseluruhan tapol yang membiarkan keluarganya datang ke pulau itu. Alih-alih mengajak keluarga datang, banyak tapol yang tidak tahan hidup di pulau Buru dan beberapa bahkan bunuh diri; ada yang menggantung diri, ada juga yang meminum racun hama. Menurut Ngabinem, banyak tapol khawatir jika keluarga mereka akan kesulitan dalam menghadapi hidup di Pulau Buru. Mereka juga tidak tahu bagaimana keluarga mereka bisa makan mereka dan apakah mereka akan bertahan hidup atau tidak.

Para tapol dan keluarga harus bekerja ekstra keras dan menyesuaikan diri dengan alam sekitar untuk bisa bertahan hidup. Ngabinem bersama anak-anaknya membantu suami bekerja di sawah. Mereka makan seadanya sesuai jatah bantuan yang diterima. Suaminya menerapkan disiplin tinggi dan kemandirian kepada anak-anaknya. Anak-anak dilarang meminta apapun kepada para tapol lain untuk menghindari hukuman terhadap para tapol dari pengawas tahanan.

Suaminya dibebaskan pada tahun 1977 bersama ribuan tahanan lainnya. Ketika dibebaskan, mereka diberi dua pilihan, yaitu pulang ke Jawa atau tetap tinggal di Savanajaya untuk menjadi transmigran lokal. Ngabinem dan suaminya memutuskan untuk tinggal, bersama sekitar 200 keluarga lainnya. Walaupun hidup di Buru tidak mudah, namun di Jawa mereka

hidup mereka akan lebih susah karena tidak mempunyai apa-apa. Mereka merasa bahwa di Savanajaya akan lebih baik karena ada modal untuk hidup dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka, dan memiliki kehidupan baru. Di bawah program transmigrasi, mereka kemudian mendapat lahan sebesar 2 hektar, satu hektar untuk sawah dan satu hektar lagi untuk berkebun serta jatah makanan selama satu tahun. Mereka juga mendapatkan rumah dan pekarangan yang selama ini telah mereka tempati.

Suami Ngabinem meninggal dunia pada tahun 2007. Semua anak-anaknya kini sudah menikah, dua tinggal di Prambanan, dan 3 tetap di Savanajaya. Di usia tuanya, Ngabinem masih aktif di komunitasnya.

Ngabinem, istri tapol 1965 yang ditahan di pulau Buru. Ngabinem kini tinggal di pulau Buru bersama anak-anaknya.

> *"Saya tetap aktif di pengajian, di Majelis Ta'lim, sebenarnya sudah dari dulu. Dulu namanya Al-Muhajjirin sekitar tahun 1970-an. Dulu nama ketua Majelis Ta'lim itu Bu Setyohadi; beliau juga eks-warga. Kalau mengikuti perkumpulan seperti itu, tidak dihukum karena mereka tahu ini kegiatan Majelis Ta'lim. Saya juga aktif di PKK, mungkin di sekitar tahun 1980-an. Selain dua kumpulan itu, tidak ada lagi yang saya ikuti karena tidak berani, nanti disangka Gerwani. Saya ikut kegiatan [riset aksi] ini,... bukan Gerwani, toh,... nanti tidak ditangkap, toh?"*

Darsini, Ngabinem, dan Hartini dulu (kiri) dan kini (kanan).

HARTINI:
MENIKAHI TAHANAN POLITIK

Hartini adalah putri tertua Ngabinem. Ia ingat saat ayahnya ditangkap.

> *"Saya berusia enam tahun ketika bapak ditangkap. Mereka mengatakan kalau bapak terlibat dalam G30S/PKI; saya tidak tahu itu apa-apa, dan setelah itu, hidup kami berubah drastis."*

Ketika ayahnya dikirim ke Pulau Buru, ibunya hanya menangis dan menangis karena tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya, kapan ia akan kembali, dan bagaimana mereka akan bertemu lagi. Di tengah kebingungan ini, para tetangga dan anggota keluarga justru menjauhkan diri dari keluarga Hartini karena takut akan terbawa-bawa.

> *"Sejak saat itu, kami dikucilkan, kami seperti sampah, seperti penyakit menular ... meskipun bapak adalah*

seorang guru sekolah, rasa hormat yang sebelumnya diberikan orang-orang desa kepada bapak sekarang telah hilang."

Hartini putus sekolah saat kelas tiga karena ia tidak kuat terus diolok-olok, sampai kemudian dia, waktu itu berusia 15, ikut bersama ibu dan adik-adiknya berangkat ke Pulau Buru.

"Awalnya saya menolak ikut ibu ke Pulau Buru karena takut naik kapal laut ... Bapak menyurati saya secara khusus ... saya jadi semangat... karena Bapak bilang di Pulau Buru saya akan disekolahkan lagi. Bapak rupanya tahu saya sangat ingin sekolah setelah terpaksa berhenti di kelas tiga waktu kami tinggal di Prambanan. Walaupun kami sempat kecewa dengan kondisi rumah di Savanajaya yang sepi ... lembab dan penuh dengan rumput liar di dalam rumah, saya akhirnya ya seneng juga karena dimasukkan sekolah, namanya SDN Savanajaya. Kami sangat senang karena di sini tidak ada lagi perbedaan-perbedaan diantara kami karena kami semua adalah anak tapol. Hari-hari kami isi dengan sekolah dan bekerja membantu bapak dan ibu di sawah maupun di ladang. Kami selalu diajari sopan santun kepada orang tua dan orang lain... juga pada om-om tapol. Tidak boleh meminta apapun dan tidak boleh menolak yang mereka berikan. Tanpa terasa aku sudah remaja dan aku jatuh cinta sama om-om tapi aku masih sekolah SD karena sekolahku terlambat. Setelah lulus kelas enam, kami menikah."

Hartini memiliki banyak foto dari masa mudanya, hari-hari ketika para tahanan menyelenggarakan kegiatan olahraga dan budaya untuk anak-anak. Salah satu foto kenangan dia adalah foto pernikahan. Sewaktu berusia 18 tahun, Hartini adalah salah satu dari belasan pengantin,

perempuan-perempuan muda yang menikah dengan tahanan politik. Waktu itu, tahun 1977, militer menyelenggarakan pernikahan masal di Savanajaya. Namun di hari penuh kebahagiaan itu, Hartini mendapatkan satu hal yang menjadi sesuatu yang paling menyakitkan dirinya, yaitu surat nikahnya.

Hartini bersama suami.

> *"Ada satu hal yang masih mengganjal di hati saya, yaitu di buku nikah tertulis pekerjaan suami saya dan saya sebagai tahahan G30SPKI ... kata-kata ini menjadi cap PKI abadi dalam hidup kami."*

Ia merasa bahwa keterangan pada surat nikahnya itu diskriminatif dan tidak adil.

> *"Saya merasa kasihan pada suami saya ... Ia hanya seorang PNS di Surabaya yang tidak tahu apa-apa ... Ia ditangkap, disiksa, dipenjara dan diasingkan ke Pulau Buru karena diduga terlibat dalam peristiwa G30S/PKI di Jakarta. Keterangan pekerjaannya sebagai seorang tahanan politik PKI mengingatkan saya pada*

Hartini menunjukkan foto dari kotak memorinya

hari-hari yang penuh ejekan, penderitaan dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa bapak saya, yang bekerja sebagai guru, dan suami saya, yang dulunya seorang seorang PNS, ditangkap, disiksa dan dibuang ke penjara."

Bersama LAPPAN, Hartini dan tiga perempuan istri mantan tapol Buru mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Namlea untuk menerbitkan kembali surat nikah dengan mengganti status pekerjaan suami sebagai tapol G30S PKI. Permintaan tersebut dikabulkan. Pada tanggal 7 Oktober 2014, pejabat KUA Kabupaten Namlea menyerahkan duplikat surat nikah kepada 4 pasangan, Ibu Hartini/Bpk Markis; Ibu Mada/Bpk Diro, Ibu Sutiah/Bpk. Harto, dan ibu Niin/Bapak Niin, dalam sebuah acara serah terima di kantor Desa Savanajaya. Sambil meneteskan air mata, pejabat KUA menyatakan permintaan maaf atas apa yang telah dialami oleh Hartini dan warga lainnya. Hal ini merupakan satu langkah kecil pengakuan hak terhadap korban, dan pengakuan atas kesalahan dari aparat/institusi negara. Langkah kecil yang berarti, yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh pejabat pemerintah. Langkah kecil namun signifikan yang lain adalah pendaftaran 17 orang dari mantan tapol dan keluarganya dalam layanan kesehatan pemerintah, sebagai bagian dari riset partisipatoris ini.

Lasinem: Menjadi Tua Tanpa Rasa Aman

Lasinem lahir di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ia tidak tahu kapan dia lahir. Kedua orangtuanya buta huruf dan mereka tinggal di sebuah dusun di tengah hutan jati yang hanya dihuni oleh sekitar 10 keluarga. Lasinem tidak pernah bersekolah. Setiap hari dia bekerja membantu orang tuanya mengumpulkan kayu untuk dijual demi mencukupi kebutuhan makan.

Sekitar tahun 1960, Lasinem menikah dengan seorang petani muda bernama Senen. Ia melahirkan seorang putri pada tahun 1963 dan seorang putra pada tahun 1969. Di tahun itu juga, suami Lasinem ditangkap dan dituduh terlibat kudeta yang mereka kenal dengan sebutan Gestapu. Tuduhan itu sangat mengagetkan dan menakutkan. Lasinem mengingat peristiwa itu dengan mata berkaca-kaca dan suara lirih.

> *"Dia diambil tentara, teman suami saya sendiri, dan dibawa ke Kelurahan. Di sana dia dipukuli, disuruh duduk tegak, dikasih kursi terus dipukuli, disuruh tidur ... lalu punggungnya diinjak-injak, dipukulin, sampai luka-luka semua."*

Sejak penangkapan itu, Lasinem tidak mendapatkan kabar tentang suaminya, sampai suatu hari seseorang berseragam militer memberitahu dia bahwa suaminya sudah dibawa ke Surabaya. Lasinem tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak ada pula orang yang mau menolongnya. Para tetangga menutup pintu mereka karena ketakutan. Beberapa hari kemudian Lasinem mendapat kabar lagi bahwa suaminya dipindahkan Nusakambangan. Lalu akhirnya Lasinem pun mendengar kabar dari petugas bahwa suaminya dikirim ke pulau Buru.

> *"Lengkap sudah penderitaanku, mula-mula aku bingung dan takut, takut luar biasa, lalu aku sadar, aku telah kehilangan pelindungku, pencari nafkahku. Mana anak-anak yang masih pada kecil ... mereka butuh makan."*

Lasinem ditinggalkan suami dengan tanggung jawab membesarkan dua anak yang masih kecil dan orangtuanya yang sudah tua.

> *"Tidak ada jalan lain, mulai dari situ, aku menjadi pencari nafkah utama. Mulanya aku bingung harus bagaimana. Tak ada yang bisa kulakukan, anak-anakku masih kecil, yang satu tiga tahun, baru bisa jalan ke luar rumah, sedang nakal-nakalnya, sedang butuh pengawasanku. Yang satu lagi masih bayi, masih nyusu. Tapi yah aku harus cari makan."*

Sejak suaminya ditangkap, Lasinem berusaha untuk bekerja lebih keras dan mengumpulkan lebih banyak kayu di hutan agar ia dan keluarganya bisa bertahan hidup. Walaupun begitu, penghasilan dari menjual kayu tetap tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Saat ia pergi ke hutan dan pasar, anak-anaknya diasuh oleh ibunya. Sementara itu anak sulungnya, Sumini, lebih sering membantu Lasinem mengumpulkan kayu di hutan, atau mengambil sayuran. Sumini tidak pernah sekolah karena jauh dari rumah mereka dan Lasinem masih trauma dengan penangkapan suaminya.

Selama tiga tahun Lasinem bekerja untuk menghidupi keluarganya tanpa berita apapun mengenai suaminya. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa banyak orang yang dituduh Gestapu dibunuh di tepi sungai. Namun Lasinem mencoba untuk tetap percaya bahwa suaminya akan kembali. Pada tahun 1972, Lasinem akhirnya mendapat berita. Ia diperintahkan untuk membawa keluarganya dan pergi ke Pulau Buru menyusul suaminya. Lasinem membawa anak laki-lakinya, sementara putrinya tinggal dengan kakak laki-lakinya.

Bertemu dengan suami, dan melihat anak berjumpa dengan bapaknya, merupakan momen terindah dalam hidup Lasinem. Di pulau ini, Lasinem pun melahirkan dua anak lagi yaitu pada tahun 1973 dan 1975. Namun begitu, hidup di Pulau Buru tidak dijalani dengan mudah. Lasinem merasa hidup di Pulau Buru sama kerasnya dengan hidup di desa asalnya.

> *"Saya merasakan penderitaan yang pernah saya alami dahulu, kerja keras. Saya selalu berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak saya meskipun saya harus berkorban jiwa dan raga."*

Mereka memang menerima jatah beras sebesar 1,5 ons per hari untuk tiga orang. Meskipun mereka diberi lahan besar untuk sawah, mereka harus menyerahkan hasil panen mereka kepada pemerintah. Demikian pula dengan sayuran, semuanya harus diserahkan ke gudang pemerintah.

> *"Luas sawah yang digarap oleh suamiku bersama konco-koncone, hasile akeh, aku ya suka ikut bantu panen, tapi hasil panen ndak dibawa pulang, hasil panen itu dibawa ke gudang, diberikan kepada petugas, pada pemerintah. Dikumpulin di lumbung di seberang jalan itu. Semua hasil kebun juga masuk gudang itu: ya sayuran, ya jagung, ya singkong semua masuk. Kami tunggu pembagian. Kalau pagi dibagi sayur, sayur kacang limang ler, terong sak iris, singkong mung kagem bapak e."*

Setelah 7 tahun hidup di Savanajaya, Pulau Buru, suami Lasinem dan tahanan lainnya akhirnya dibebaskan. Sebagian besar tahanan memilih pulang ke Pulau Jawa, sementara Lasinem dan suaminya memilih untuk tetap tinggal di Savanajaya dan menjadi bagian dari program transmigrasi lokal. Mereka mendapat 1 hektar sawah, sebidang tanah untuk kebun mereka, dan sebuah rumah. Lasinem bersama suami bekerja keras untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Lasinem kini berusia sekitar 70 tahun, tinggal di rumah yang sama ketika ia pertama kali tiba di Pulau Buru dan memutuskan hidup bersama suami. Kondisi kesehatan fisiknya masih bisa dibilang baik, terutaman jika dibandingkan dengan suaminya yang mulai rabun, dan sakit-sakitan seperti batuk-batuk. Mereka tidak lagi menggarap sawah seperti di masa muda dulu, namun disewakan kepada orang lain. Untuk menghidupkan roda ekonomi, mereka menanam dan menjual tauge. Usaha ini tidak menentu penghasilannya, kadang laku, kadang juga tidak laku, bahkan kadang-kadang rusak sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Di rumah mereka memelihara ayam dan sapi. Lasinemlah yang rutin memberi mereka makanan setiap sore. Maka, selain menjual kacang tumbuh, Lasinem sesekali juga menjual ayamnya dan berjualan beras.

> *"Aku terus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anakku dengan usaha sebisa-sebisanya; aku usaha bikin tempe, bikin tauge, bikin telur asin untuk menambah penghasilan keluarga.*
>
> *Aku punya banyak teman [di pasar]... Kami ibu-ibu Savanajaya, biasa usaha... walaupun kecil-kecil."*

Kerja keras Lasinem sepanjang hidupnya telah memberikan hasil yang baik. "Aku bahagia anak-anakku sudah berkeluarga dan mandiri. Lengkap sudah kebahagiaanku karena aku sekarang mempunyai 13 cucu." Walaupun bahagia di usia tuanya, ia masih terpengaruh oleh masa lalu. "Rasanya masih sakit itu kalau teringat hal-hal yang dulu terjadi, belum hilang juga." Dia juga lama merindukan anak perempuannya yang ditinggalkan di Jawa. "Selama bertahun-tahun saya di Savanajaya, saya tidak mendapatkan berita tentang putri saya yang tinggal dengan pamannya.. Lama... sampai akhirnya pada suatu hari, saya dengar bahwa putri saya bertransmigrasi ke Kalimantan."

Anak-Anak Perempuan yang Berbakti

RODIAH: PUTUS SEKOLAH UNTUK MENJAGA ADIK

Seperti banyak keluarga lainnya, ketika ayah Rodiah ditangkap, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Sebelumnya, ayahnya bekerja sebagai paramedis dan kehidupan mereka cukup nyaman. Ketika ayahnya dibawa, hidup mereka berubah secara dramatis. Saat itu Ibunya tengah hamil sembilan bulan dan sakit-sakitan, dan harus menghidupi lima orang anak. Rodiah mengingat masa itu sebagai masa yang sulit ketika makanan pun sulit didapat.

"Saya selalu makan pucuk lamtoro, siang hari jam 12 saya lapar, mau makan mamak sakit ayah tidak ada, kakak laki-laki saya juga belum mengerti. Saya ambil itu pucuk lamtoro lalu saya makan, mentah; ambil di teras orang. saya takut dimarahi mamak karena mungkin takut sakit perut. Lalu biji salak yang masih muda juga saya makan."

Rodiah kemudian berhenti sekolah karena tidak memiliki biaya. Dia juga sering diolok-olok oleh teman-temannya sebagai “anak PKI.”

Pada tahun 1972, Rodiah ikut bersama ibunya ke Pulau Buru. Saat itu dia berusia 13 tahun, datang bersama gelombang pertama keluarga yang dikirim untuk tinggal di sana. Awalnya Rodiah membayangkan bahwa kehidupan di Pulau Buru akan jauh lebih nyaman, tetapi kenyataan yang dia hadapi justru sebaliknya.

"Merasa suka, karena ketemu Bapak lagi. Sedangkan merasa duka, karena melihat situasi di sini ... Dulu datang ke sini dikira akan hidup enak, saya sudah membayangkan hidup lebih enak. Ternyata datang di sini masuk hutan... Pertama kali pindah ke rumah ini, masuk ke rumah ada alang-alang tumbuh tinggi sekali di dalam rumah."

Rodiah tinggal di rumah tersebut dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1979. Waktu itu Rodiah harus rela untuk tidak sekolah karena harus membantu kedua orang tuanya dengan menjaga kedua adiknya.

> *"Saya hanya sekolah sampai kelas tiga SD, itu saat saya masih di Jawa. Kalau di sini, saya masuk kelas 3 SD juga. Saat mau naik kelas 4 SD, saya tidak bisa naik kelas karena seminggu saya hanya bisa masuk sekolah tiga hari saja karena harus menjaga adik. Kata mamak, saya tidak perlu sekolah karena beliau kerepotan mengurus rumah."*

Selain persoalan ekonomi, Rodiah juga ingat bahwa saat itu dia harus menghadapi ketakutan lain. Ketakutan yang dirasakan banyak perempuan dan anak perempuan di Pulau Buru. Mereka harus menghindar dari gangguan para petugas. Rodiah mengatakan bahwa saat itu terjadi pemerkosaan, tapi tidak ada yang berbicara mengenai hal itu karena orang-orang takut. Ada juga perempuan yang hamil, termasuk salah satu teman Rodiah. Beberapa dari mereka bahkan melahirkan anak dari laki-laki yang berbeda-beda. “Nanti kalau menolak bisa dihukum ... Lalu perempuan yang hamil itu ya diam saja, mau bagaimana lagi juga tidak bisa. Karena yang menghamili petugas tentara.”

Rodiah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Sulit baginya untuk menceritakan kisahnya. Baru sekarang ia mulai merasa cukup berani untuk berbicara tentang apa yang terjadi padanya.

> *"Selama itu saya tertutup, tidak berani terbuka. Nah, sekarang saya berani terbuka, baru ini saya berani terbuka menyampaikan uneg-uneg di dalam hati berpuluh-puluh tahun di dada ini. Jangankan dengan orang lain, dengan keluarga atau orang tua saya juga takut untuk cerita."*

Kesehatan Rodiah menurun dalam lima tahun terakhir. Ia mengeluhkan badannya yang lemas, sakit kepala dan keringat dingin yang terus keluar. Kondisi ini membuat dia harus berhenti berjualan nasi kuning, dan membuat kondisi ekonomi keluarganya kembali memburuk. Suaminya hanya buruh bangunan serabutan. Namun meski sakit, Rodiah selalu aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Jika ia merasa sulit untuk berjalan, ia akan didampingi suaminya.

Ketika ditanya tentang harapannya untuk masa depan, Rodiah ingin agar nama baik keluarganya dibersihkan. Selain itu, Rodiah juga ingin agar pemerintah melaukan peningkatan perekonomian masyarakat di Pulau Buru dengan menjaga harga kebutuhan pokok dan mendukung perdagangan beras lokal.

JUARIAH DAN SUBIYANTI: SEDIH ATAS PENDERITAAN BAPAK

Ayah Juariah dan Subiayanti (biasa dipanggil Subi) ditangkap dan dipenjarakan di Nusakambangan ketika mereka masih kanak-kanak. Ayah mereka, yang berprofesi sebagai karyawan perkebunan, kemudian dikirim ke Pulau Buru. Pemenjaraan ayahnya membuat Juariah sangat kehilangan sosok seorang Bapak, dan membuat mereka bekerja keras di usia muda. Mereka pun terpaksa keluar dari sekolah untuk membantu orang tua dan sekaligus menghindari ejekan teman-temannya.

Pada tahun 1974, Juariah, Subi, dan dua adiknya ikut bersama ibunya menyusul ayah mereka di Pulau Buru. Bagi adik bungsu mereka yang waktu itu berusia sekitar 9 tahun, ini adalah kali pertama melihat ayah setelah terpisahkan dari ayahnya sejak bayi. Pertemuan itu sangat mengharukan. Adik mereka terlihat kaget melihat ayahnya yang terlihat jauh lebih tua dari umurnya, wajahnya bukan saja penuh dengan gurat-gurat kelelahan tetapi juga nampak menderita.

Hidup di pengasingan Pulau Buru adalah hidup dalam lingkaran kekerasan, kerja paksa seperti perbudakan, kurang makan, kurang

istirahat, dan hukuman-hukuman fisik yang merendahkan kemanusiaan. Juariah dan Subi mengetahui hal ini dari cerita-cerita tapol yang mereka temui. Ayah mereka tidak menceritakan semuanya secara utuh, tetapi tampilan fisikn yang lunglai dan menderita telah berbicara banyak.

Subi merasa pedih bila mengingat pemukulan yang diterima ayahnya.

> *"Kalau ingat cerita Bapak itu, saya merasa sedih dan sakit sekali. Katanya, saat itu Bapak diminta membawa bambu. Tetapi, Bapak hanya bawa satu bambu, padahal petugas meminta masing-masing tapol untuk bawa dua bambu dalam setiap angkut. Mungkin Bapak saat itu fisiknya tidak kuat, maksudnya nanti lagi dibawa ulang bambunya. Semua tapol jatahnya untuk membawa bambu kan tetap sama, tetapi mungkin itu dianggap melakukan kesalahan. Akhirnya, lengan Bapak saya dipukul dengan senjata oleh petugas. Sampai lebam di lengannya lama sekali sembuh."*

Subi di depan salon miliknya.

Karena kondisi ayah mereka yang lemah, Juariah dan Subi terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya. Mereka bekerja di sawah membantu ayahnya. Ketika itu Juariah dan Subi memasuki usia remaja sekitar 14 tahun dan 12 tahun. Seingat Juariah hanya merekalah anak-anak perempuan yang mencangkul di sawah, teman-teman perempuan seusianya sibuk sekolah atau melakukan pekerjaan di dalam rumah. Ternyata, hidup bersama ayah di Pulau Buru hanya berlangsung 4 tahun saja. Ayah mereka tak sanggup bertahan dan meninggal dunia di tahun 1978. Juariah bahagia karena ayahnya masih sempat memberikan restu perkawinan dia dengan Abdul Muid, tapol teman ayahnya yang berasal dari Surabaya. Mereka menikah dalam acara perkawinan masal 16 pasangan pengantin yang diselenggarakan oleh militer pada bulan Desember 1977.

Hidup perkawinan Juariah berjalan penuh kebahagiaan dan perjuangan. Usia suami terpaut sekitar 20 tahun. Juariah melahirkan dua anak perempuan yang membuat mereka merasa hidup perkawinannya lengkap meski tinggal di rumah yang sederhana, tanpa listrik, dan berlantai tanah. Bersama suami, Juariah bekerja keras di sawah dan kebun, serta membuat minyak kelapa. Mereka berusaha keras untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, bahkan hingga harus menjual rumah mereka demi pendidikan. Juariah berkata, "Saya terus bekerja keras demi anak-anak saya agar dapat meneruskan sekolah sampai ke perguruan tinggi."

Juariah berdiri di dapur rumahnya.

Kerja keras dan pengorbanan mereka tidak sia-sia, kedua anak perempuan mereka melanjutkan pendidikan di Jawa dan satu lulus sebagai seorang arsitek.

> *"Waktu itu semua harta saya jual karena kehabisan biaya untuk biaya sekolah anak pertama yang hendak menyelesaikan skripsi di jurusan arsitek. Ladang sudah terjual, sawah juga sudah terjual, hanya tinggal rumah papan peninggalan jatah inrehab yang saya tempati."*

Usahanya terbayar. Sekarang ia tinggal di sebuah rumah baru yang dibeli untuknya oleh anak-anaknya. Namun pada tahun 2004, suami Juariah meninggal karena sakit, hanya tiga minggu setelah menikahkan putri pertama mereka.

Sementara itu, pernikahan Subi memiliki warna yang berbeda dengan Juariah. Subi mengakhiri perkawinan dengan suami pertamanya karena mereka tidak berhasil mendapatkan anak.

> *"Di usia pernikahan saya yang sudah berlanjut 7 tahun, ternyata saya mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Rumah tangga yang selama ini saya bina, akhirnya tidak bisa saya pertahankan dan akhirnya saya harus hidup sendirian ... sampai saat itu belum diberikan keturunan"*

Subi menikah lagi tapi tetap tidak bisa hamil. Belakangan, Subi dan suaminya mengadopsi Taufik, kemenakannya yang tinggal di Jawa. Mereka menyekolahkan anak adopsinya hingga SMA di Savanajaya. Setelah lulus SMA, ia dikirim ke Jawa untuk mengambil kursus mekanik motor dan mengemudi. Ia sekarang telah kembali ke Savanajaya dan bekerja sebagai sopir.

Sumber kebahagiaan Ibu Subi adalah anak laki-lakinya, apalagi setalah suaminya yang kedua memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Savanajaya dan kembali ke Jawa setelah terjadi kerusuhan Desember 1999.

"Kami hanya berpisah karena saya tidak mau ikut Pak Leo pulang ke Jawa. Jadi dia pergi berpisah dengan saya begitu saja. Tapi, saya mendapat dukungan keluarga lebih besar saya rasakan di Pulau Buru ini."

Juariah, Subiyanti, dan saudara laki-laki mereka.

Sekarang Subi sudah menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang supir. Tetapi, setelah menikah dengan Subi, suami ketiganya ini tidak bekerja lagi sebagai supir. Tentang hal ini, Subi berkata:

"Mungkin karena suami saya itu punya masalah fisik yang sudah tidak kuat untuk bekerja ... Jadi, ya hanya saya dan anak ... Sekarang saya lebih tenang dan mulai bertahan lagi karena anak saya sudah bekerja."

Subiayanti menggantungkan hidupnya dari salon kecantikan yang dia kelola. Pendapatan biasanya bagus jika ada kesibukan di tambang emas di Gunung Botak, tapi ada hari-hari di mana pendapatan begitu minim.

Subi berharap suatu hari bisa membuka salon dekat jalan utama jika ia bisa memperoleh kredit dari pemerintah. Selama ini, ia belum pernah menerima bantuan langsung apapun dari pemerintah.

Subi merasa bahwa dari waktu ke waktu beberapa hal telah membaik bagi keturunan tahanan politik.

> *"Mungkin juga karena Taufik itu sudah masuk ke cucu ya, bukan anak tapol seperti kami ini. Sekarang ini juga suami saya bukan tapol atau eks-warga, jadi sedikit-sedikit sudah hilang ejekan PKI itu."*

Berbeda halnya dengan Juariah. Dia masih belum dapat keluar dari perasaan sakit terkait masa lalunya. Setelah suaminya meninggal, atas desakan anaknya, Juariah menikah dengan seorang tentara dari Makassar. Pernikahan tersebut hanya berlangsung selama dua tahun karena tidak tahan dengan perilaku kasar suaminya, termasuk hinaan yang dia terima.

"Dia tidak pernah memukul saya, tetapi kalau terhadap masyarakat itu.. ia selalu mengolok-olok tentang PKI.

Ketika kami pergi ke suatu tempat, lalu ada pembicaraan terkait masa lalu, kami rasanya masih seperti tertusuk. Kalau ada suara-suara yang menyebut tentang G30S/PKI, itu timbul emosi lagi dalam hati saya ... Belum bisa hilang sama sekali, mungkin saya akan selalu ingat."

Kekerasan Baru atas Nama Agama

SRI KUSWANTURI: MENJUAL SAWAH DAN TANAH KARENA TRAUMA

Sri Kuswanturi, biasa dipanggil ibu Sri, adalah salah satu saksi mata peristiwa kerusuhan beragama di Savanajaya pada bulan Desember tahun 1999. Dia adalah bagian dari gelombang pertama keluarga tapol yang didatangkan ke Pulau Buru pada tahun 1972 bersama ibu dan tiga orang adiknya. Adik bungsu Sri lahir di Savanajaya pada tahun 1973. Semua adik-adiknya kini hidup berpencar, ada yang tinggal di Papua, dan ada yang menjadi guru di Makasar.

Sama seperti keluarga lainnya, keluarga Sri juga dilecehkan oleh tentara setelah ayah mereka ditangkap.

"Setelah bapak ditangkap, rumah kami digeledah petugas beberapa kali sampai naik-naik ke atas plafon, entah apa yang mereka cari. Lemari dibongkar-bongkar, isinya diudal-udal. Kami sangat terganggu, jengkel, marah,

bingung, dan lama-lama takut. Rumah kami jadi tak tentram lagi. Kami takut berada di rumah saat mereka datang terus-terusan."

Ibu Sri bersama suaminya.

Sebagai anak tertua dari tiga bersaudara, Sri ikut bertanggung jawab menjaga adik dan membantu orangtuanya. Sejak tiba di Desa Savanajaya, setiap hari ia membantu mencari nafkah untuk menambah bahan makanan bagi adik-adiknya. Dia biasa meminta kasbi dan jagung pada tapol-tapol lain, ketika mereka berada di kebun-kebun. Berkilo kilo dia bawa kasbi atau jagung dari kebun ke rumahnya. Jika ketahuan petugas, dia akan sembunyikan kasbi atau jagung itu dalam parit-parit, setelah petugas pergi dia akan membawanya pulang meskipun menjadi sangat berat karena basah. Umur Sri waktu itu baru 15 tahun.

Bertahun-tahun kerja berat membuat tulang belakang Sri bermasalah sehingga sering merasa sakit.

"Saya anak tertua... sejak bapak ditangkap, terpaksa membantu ibu menjadi tulang punggung keluarga. Sekarang tulang belakang saya bengkok, sakitnya luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana memulihkannya. Saya sudah berobat kesana kemari, tetapi tulang punggung saya sudah terlanjur bengkok, tak bisa dipulihkan lagi. Ini pengorbanan saya sebagai anak tertua karena bapak saya ditangkap dan ditahan dan kami tinggal di sini dengan segala keterbatasan."

Pada tahun 1977, bersama dengan 15 pasangan lainnya, Sri menikah dengan salah satu tapol, teman ayahnya. Rumah tangganya berjalan harmonis. Ia dikaruniai tiga anak yang satu diantaranya sudah lulus universitas, dan satu lagi lulus SMA. Demi pendidikan anak, bu Sri dan suaminya rela menjual sawah yang selama ini mereka kelola.

Selain mengolah sawah yang kini telah dijual, Sri mengembangkan usaha rumahan membuat tempe dan roti agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semua berjalan baik-baik saja, sampai situasi berubah pada kerusuhan 1999.

Kerusuhan 1999 ini menyisakan pengalaman traumatis bagi Sri. Hari ketika kerusuhan dimulai Sri baru saja selesai memanggang kue.

> *"Tiba-tiba terdengar suara orang ramai. Saya bilang sama suami untuk mematikan lampu saja. Kemudian saya ke luar, tiba-tiba dari luar rumah dilempar pot bunga yang besar itu. Ada orang-orang yang berteriak, "Keluar! Keluar!" ke arah rumah saya. Nah, saya bingung, mau keluar ke mana. Saat itu kejadiannya 23 Desember 1999. Saat itu, banyak rumah yang terbakar. Katanya rumah yang rusak tetapi tidak hancur, katanya dapat bantuan ini itu. Tetapi, nyatanya tidak ada."*

Kerusuhan tersebut tidak hanya merusak rumahnya, tapi juga memicu kembali ketakutan dan trauma dari pengalaman masa lalunya. Sri menjual tanahnya setelah kerusuhan tahun 1999 karena takut.

> *"Rasa takut sejak dari menjadi tapol sampai kerusuhan, hingga akhirnya saya jual saja sawah dan tanah milik saya, lalu pulang ke Jawa. Tetapi, ketika di Jawa tidak lama; saya seperti orang bingung karena tidak ada yang bisa dikerjakan. Lalu, kembali lagi ke Pulau Buru di sini dan tinggal di rumah ini."*

Trauma yang ia alami telah berdampak pada kesehatannya. Ketika ia terlalu banyak berpikir atau mengalami banyak masalah, ia merasa lebih buruk. Sampai saat ini, ia belum menerima bantuan apapun untuk memperbaiki rumahnya.

MADA:
TERPISAH DARI KELUARGA

Mada bersama suaminya, Diro Utomo.

Mada, anak kedua dari empat bersaudara, lahir di salah satu desa di Pulau Buru yang dikenal dengan nama desa Kayeli pada tahun 1955. Keluarganya termasuk miskin, sehingga Mada bersekolah dan hari-harinya dilalui dengan membantu pekerjaan keluarga. Pada tahun 1965, banjir besar melanda desanya, rumah keluarga Mada hancur tak terselamatkan. Pemerintah setempat memberi keluarga Mada tanah di Namlea yang masih ditumbuhi oleh rumput liar yang padat nyaris seperti hutan. Mereka sekeluarga harus membersihkan tanah tersebut untuk membangun rumah tinggal yang baru.

Pada 1975, Mada bekerja sebagai tukang masak di pastoran yang dikelola oleh seorang biarawati. Mada memasak untuk anak-anak eks-tapol yang sekolah di Savanajaya. Di sanlah dia berkenalan dengan Diro Utomo, salah satu tahanan politik. Mereka memutuskan untuk menikah, namun keputusan mendapat banyak hambatan karena selain calon suaminya adalah tahanan politik, mereka pun berlainan agama. Dengan usaha yang gigih, akhirnya mereka mendapat surat izin menikah dari Kodam. Mereka disyaratkan untuk wajib lapor selama 6 bulan.

Perkawinan mereka berlangsung pada tanggal 25 Juli 1978. Saat itu baik Mada yang berusia 23 tahun, dan Diro Utomo yang berusia 36 tahun tetap memeluk agama masing-masing. Setalh Diro dibebaskan, mereka memilih tinggal di Savanajaya. Diro bekerja di sawah, sementara Mada berkeliling menjual tahu dan tempe. Pasangan ini memiliki empat orang anak perempuan. Dua puluh tahun perkawinan berlangsung penuh dengan sukacita. Orang tua Mada pun tinggal bersama mereka di Savanajaya. Anak pertamanya menikah dan memberinya seorang cucu.

Kebahagiaan hidup Mada bersama keluarga tiba tiba saja terkoyak, dua hari menjelang Natal pada tahun 1999.

> *"Waktu itu keluarga saya sedang kumpul. Kedua orang tua saya ada di sini karena mau natalan bersama. Seperti biasalah kami menyiapkan makanan ...*
> *Tiba-tiba saya dikagetkan oleh keributan di luar rumah ... Ada segerombolan orang yang tak dikenal bersenjata parang dan kayu pemukul ... mereka berteriak-teriak ... menakutkan, membuat orang-orang panik. Mereka membakar dua buah gereja yang ada di Savanajaya ... mereka juga membakar rumah-rumah penduduk yang non-Muslim. Mereka tidak membakar rumah kami, mungkin karena suami saya Muslim ... Hari itu sungguh menakutkan, membuat saya, orang tua saya, dan anak-anak saya gemetar ketakutan.*
>
> *Saya ingat, kami warga Kristiani dikumpulkan di Mako oleh pendeta untuk diamankan. Kami disarankan untuk mengungsi. Banyak keluarga Kristen yang pergi mengungsi ke Ambon dan tak pernah kembali lagi; tanah mereka di Savanajaya dijual, mereka tak mau lagi tinggal di sini. Saya sebenarnya juga mau pergi bersama orang tua dan anak-anak saya, dan tetangga yang sudah saya kenal baik. Tetapi, Pak Diro tidak mengizinkan saya pergi, terutama karena anak saya yang tertua itu*

> *baru saja melahirkan, bayinya baru berusia dua bulan. Jadi, dari keluarga kami, yang mengungsi hanya orang tua saya dan dua orang anak saya... Waktu itu orang tua saya telah berusia 80an... sungguh menyedihkan di usia senjanya harus mengalami hal ini. Mereka pergi dan tinggal di Ambon. Mereka tak mau kembali ke Savanajaya karena trauma.... karena ada perasaan ngeri dan takut yang tidak bisa hilang dari ingatan."*

Perlahan-lahan hidup di Savanajaya kembali normal. Kerusuhan itu seperti sudah mulai dilupakan. Tetapi sebenarnya bagi bu Mada kerusuhan itu menyisakan rasa sakit dan trauma yang dalam. Keluarganya tercerai berai. Pemerintah daerah tidak memberi perhatian atau penjelasan apapun tentang apa yang terjadi, apalagi kompensasi, meski rumah Mada habis hangus dibakar oleh kerusuhan yang tak jelas ujung pangkalnya.

> *"Kerusuhan itu ... membuat kita kehilangan rasa damai... kehilangan tetangga yang selama ini rukun ... kehilangan hak kita atas barang barang kita yang hangus terbakar... dan yang sulit dikembalikan hingga sekarang adalah keterpisahan ... cerai berai."*

Kedua anaknya yang telah bermukim di Ambon tak mau kembali. Waktu terus berjalan dan banyak hal terjadi. Kedua orang tua Mada meninggal di Jayapura dan putri sulungnya bercerai lalu menikah lagi dan memberi satu lagi cucu lagi. Malang tak bisa ditolak, suami kedua putri sulungnya meninggal dunia. Mada memandang peristiwa ini dengan lapang dada. “Saya bahagia punya dua cucu dan tinggal bersama anak anak saya.” ia melanjutkan kehidupannya dengan berjualan di pasar seminggu sekali dan membuka warung kecil di rumahnya. Jika ada waktu luang dia membantu suami di ladang. Sambil menjaga warung dan berjualan di pasar, Mada mengasuh cucu keduanya yang masih kecil.

Nusa Tenggara Timur: Kekerasan yang Masih Dirahasiakan

Di Kupang, Timor Barat, sebuah wilayah dari kepulauan NTT, kekejaman tahun 1965 merupakan cerita yang tersimpan rapi dalam waktu yang lama. Cerita tersebut baru mulai sedikit demi sedikit terbuka dalam beberapa tahun ini, saat para penyintas atau keluarga korban pembunuhan dan penghilangan paksa mulai berani berbicara mengenai pengalamannya. Adalah sekelompok pendeta perempuan di NTT yang tergabung dalam JPIT yang melakukan penelitian tentang penyintas perempuan dari peristiwa 1965 di Kupang, yang menjadi pemicu munculnya cerita itu. Hasil penelitian tersebut kemudian dituliskan dalam sebuah buku dalam tahun 2012.[43]

Foto tangan Ibu Frankina sedang memegang kartu pos kehidupannya.

Aktivitas PKI baru berkembang di Timor Barat pada awal 1960an. Besarnya pengaruh PKI, terutama di kalangan terpelajar, pada saat itu disebabkan oleh ketertarikan mereka terhadap kampanye tentang konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis) dan filosofi nasionalis Pancasila yang diperkenalkan oleh Soekarno.[44] Di awal tahun 1961, Ketua PKI wilayah Timor dan pulau-pulau sekitarnya, Thobias (As) Paulus Rissi, terpilih sebagai salah satu dari tiga perwakilan Timor di MPR. Lalu pada tahun 1965, 15 anggota PKI duduk dalam parlemen lokal.[45]

Beberapa anggota PKI juga ada di Angkatan Darat dan menjadi pejabat tinggi di pemerintahan, dan banyak lagi yang bekerja sebagai guru atau pendeta. Sejumlah organisasi afiliasi PKI juga menarik perhatian banyak penduduk di Timor dan berhasil menghimpun banyak anggota, seperti organisasi buruh (SOBSI), organisasi para petani (BTI), dan Gerwani.

Banyak pendeta yang melakukan pelayanan di pedesaan juga tertarik dengan gagasan PKI tentang reformasi agraria dan keadilan sosial. Gagasan tersebut dinilai tepat untuk mengatasi kemiskinan yang melanda wilayah pedesaan, di saat gereja sendiri tidak mempunyai program kesejahteraan sosial yang kuat. Masuknya gagasan ini bersamaan dengan terjadinya kekeringan dan gagal panen di NTT pada tahun 1964 dan 1965 yang mengakibatkan kelaparan bagi hampir semua penduduk. Penduduk semakin terdorong untuk bergabung ketika PKI juga memberikan bantuan kepada petani miskin dalam bentuk alat pertanian, bibit, uang, dan sembako.[46] Banyak petani yang tak berpendidikan bergabung dengan PKI atas ajakan pendeta mereka atau guru-guru mereka di kampung. Pada tahun 1963, anggota BTI di NTT tercatat telah mencapai lebih dari 16.000 orang.[47] Namun patut dicatat bahwa keikutsertaan para petani yang tak berpendidikan dalam keanggotaan PKI, tidak selalu berdasarkan pemahaman mereka akan ideologi. Bahkan banyak diantara mereka bergabung karena diberi janji akan mendapat bantuan oleh pihak lain atau salah sangka dengan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang oleh masyarakat juga disingkat PKI.[48]

Stadion Merdeka, lokasi penahanan korban 1965 di Kupang, NTT.

Pada tahun 1965, tidak lama setelah peristiwa G30S di Jakarta, banyak pendeta dan guru yang hilang termasuk ratusan anggota dan simpatisan PKI di berbagai wilayah di Timor Barat. Di Kota Kupang, militer bersama milisi dan ketua RT mulai memburu dan menangkap anggota PKI dan Gerwani sekitar Desember 1965 sampai akhir 1966. Penangkapan kadang disertai penyiksaan di depan umum yang bertujuan sebagai "pembelajaran" bagi masyarakat lain.[49] Kebanyakan korban pembunuhan adalah laki-laki, namun para perempuan juga mengalami penangkapan secara sewenang-wenang, penahanan, dan penyiksaan.

Banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa orang tua, suami, atau anak, telah dibunuh. Anggota Gerwani atau mereka yang dicurigai sebagai anggota Gerwani, yang umumnya bekerja sebagai guru dan PNS, diberhentikan tanpa penjelasan. Mereka yang dibebaskan setelah penahanan dikenakan wajib lapor selama bertahun-tahun, bahkan beberapa diantaranya ditangkap kembali beberapa tahun kemudian.

Walau kekerasan telah lewat, banyak dari para perempuan yang menjadi korban harus menghadapi masalah baru. Mereka terhimpit kesulitan ekonomi karena kehilangan sumber penghidupan, sementara mereka harus menghidupi keluarga tanpa kehadiran suami atau dukungan anggota keluarga lainnya. Mereka juga mengalami trauma berkepanjangan akibat kekerasan, intimidasi, dan pengucilan, serta diskriminasi lewat berbagai kebijakan negara.[50]

MARSA: TIDAK SEMPAT BERCERITA KEPADA ANAK-ANAKNYA

Marsa lahir tahun 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Orang tuanya kembali ke Kupang pada tahun 1950 dan Marsa bersekolah di Kupang sampai lulus dari perguruan tinggi guru pada tahun 1956. Marsa kemudian mengajar di Sekolah Rakyat Perubahan Indonesia Tionghoa (SRPIT) di Kota Kupang, sampai tahun 1957. Dia juga aktif di gereja mengajar anak yatim untuk menjahit dan berpartisipasi dalam paduan suara. Dia menikah pada tahun 1960 dan dalam waktu enam tahun dia memiliki tiga putra dan seorang putri.

Dia bergabung dengan Gerwani pada tahun 1962 dan menjadi kepala cabang pada tahun 1963. Pada tahun 1966 dia dipecat sebagai guru sekolah dasar tanpa pensiun.

"Waktu saya diberhentikan, saya tanya kepada kepala sekolah, "Apa salah saya sampai saya diberhentikan sebagai guru?" Kepala sekolah mengatakan ini perintah dari atasan."

Pada tahun yang sama Marsa ditangkap tanpa surat penangkapan dan dibawa ke Kodim untuk diinterogasi. Dia tidak diberi makan dan minum selama sehari, kemudian disuruh pulang. Tidak lama setelah itu dia dibawa lagi oleh aparat militer ke Stadion Merdeka dan ditahan selama dua minggu tanpa diberi makanan. Marsa hanya mendapatkan makanan dari kiriman anak-anaknya. Dia kemudian dibawa ke Wirasakti, ditelanjangi aparat dengan alasan mencari cap palu arit di tubuhnya. Dia kembali ke rumah, tetapi ia wajib lapor ke Kodim. Pengalaman ini membuat dia tertekan selama bertahun-tahun.

Pada tahun 1975 Marsa ditangkap lagi dan kali ini dibawa ke Denpasar, Bali. Pada saat ditangkap, anak bungsunya yang berusia delapan bulan ditinggal karena tidak diizinkan untuk dibawa oleh aparat militer.

Stadion Merdeka tempat Ibu Maria dulu ditahan.

> *"Waktu itu teman paduan suara saya di gereja menangis karena saya dibawa. Mereka bawa saya waktu itu jam 8 pagi. Saya juga tidak sempat bawa apa-apa waktu itu—hanya pakaian di badan saja—dan harus meninggalkan anak saya yang masih kecil dengan kakaknya yang berumur 14 tahun. Saya tidak tahu mereka kasih minum apa karena waktu itu . . . saya masih menyusui. Yang saya tahu ada dua orang tentara yang datang jemput saya dan waktu kami ditahan kami dijaga ketat oleh tentara-tentara sampai di Denpasar. Mereka pikir kami Ketua Gerwani ini ada bawa bom atau penjahat berbahaya."*

Meskipun Marsa tidak disiksa, dia sangat menderita memikirkan bayinya yang terpaksa harus dia tinggalkan.

> *"Kami hanya ditahan saja. Tapi saya sangat menderita karena memikirkan anak saya yang masih menyusui. Jadi ibu-ibu di Bali itu yang menolong saya ketika saya sakit karena waktu untuk menyusui, tapi saya tidak bisa menyusui."*

Dia ditahan di penjara Pekambingan di Denpasar, Bali selama tiga tahun. Pada bulan Desember 1977 dia bersama dua orang lainnya dipulangkan ke Kupang dan menjalani tahanan rumah. Karena dia telah kehilangan pekerjaannya dan tidak mendapatkan tunjangan, maka dia harus mencari pekerjaan lain untuk menutupi kebutuhan hidup. Dia mulai menjahit, membuat dan menjual kue untuk menghidupi anak-anaknya. Dia cukup beruntung karena dapat membawa uang yang dia dapatkan dari penjualan bordir yang dia lakukan dengan sesama tahanan di Pekambingan di Bali.[51]

Dari tahun 1977 sampai tahun 1996 Marsa bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Dia tidak diterima kembali menjadi pegawai negeri.

> *"Saya tidak dikembalikan untuk bekerja lagi; sejak saya diberhentikan saya tidak pernah dipanggil lagi. Keluarga sangat menyayangkan saya. Mengapa [kalau] saya tidak salah, tapi saya dipecat?"*

Seiring berjalannya waktu, kesehatan Mama Marsa terus memburuk, menderita katarak, penyakit jantungnya, rematik di lututnya, dan sakit perut. Anak-anaknya merawat dia dengan telaten. Marsa terus mengalami trauma akibat pengalamannya pada tahun 1965 sampai dia meninggal. “Pengalaman kekerasan 1965 terus menghantui hidup saya. Sampai saat ini secara psikis saya trauma, dan merasa takut dan minder.” Ketakutannya terlihat nyata ketika dia menolak untuk menyimpan Memori-Memori Terlarang, sebuah buku hasil penelitian JPIT tentang pelanggaran terhadap perempuan pada tahun 1965.

"Kalau tiba-tiba orang geledah rumah saya dan menemukan buku ini, bagaimana?"

Marsa meninggal dalam tidurnya di rumah putrinya pada tanggal 14 Oktober 2014, tanpa sempat bercerita secara lengkap kepada anak-anaknya mengenai pengalaman dia terkait peristiwa 1965. Marsa meninggal tanpa sempat memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anaknya mengenai akar dari trauma yang dialaminya.

ANTONETHA KITU MIRA: TIDAK MENDAPAT DANA PENSIUN

Antonetha lahir pada tahun 1940 sebagai anak ke-10 dari 11 orang bersaudara. Ia adalah anak petani. Ayahnya meninggal saat Antonetha berusia sembilan tahun. Dia menikah pada usia 19 tahun dan hidup bahagia. Namun pada tahun 1965, dia dituduh sebagai anggota Gerwani dan suaminya sebagai anggota PKI. Suaminya dipecat dari pekerjaan mengajar tanpa alasan.

> *"Tiba-tiba saja ada siaran suami saya dipecat dari guru—entah salah apa, saya tidak tahu—dengan tidak diberi gaji lagi. Anak saya yang pertama berumur 6 tahun, anak kedua 4 tahun, anak ketiga berumur 1 tahun 8 bulan, dan anak keempat [baru] lahir."*

Pada bulan November 1965 suami Antonetha ditahan dan beberapa bulan kemudian, Antonetha sendiri juga ditahan.

> *"Pada bulan Januari 1966 saya dipanggil menghadap tim interogasi [yang terdiri] dari berbagai unsur masyarakat di Sabu seperti pendeta, camat, ketua-ketua partai non-PKI, polisi, dan kepala sekolah untuk dicari tahu keterangan tentang Gerakan 30 September 1965 ... Saya ditinju di hidung, malah saya tidak tahu; malah saya sangat benci tentang gerakan itu karena sangat merugikan hidup saya dan suami serta anak-anak saya."*

Pada bulan Maret 1966 anggota militer dari Kupang tiba di Sabu. Suami Antonetha dan tahanan lainnya dipindahkan ke penjara. Pada suatu malam mereka ditembak dan dikubur.

> *"Paginya saya dengar kabar dari tim interogasi dan dari kepala polisi bahwa suami saya sudah tidak ada lagi. Mendengar pemberitahuan itu hati saya terlalu sakit. Mau menangis, tidak bisa menangis, hanya berserah kepada Tuhan."*

Dua hari setelah suaminya ditangkap secara sewenang-wenang, Antonetha dipanggil ke rumah sakit, lalu rambutnya dicukur. Dalam adatnya, rambut yang dicukur adalah hukuman bagi perempuan yang melakukan perzinahan. Baginya, ini adalah sebuah penghinaan yang sangat melukai dirinya. Laki-laki yang memotong rambutnya adalah murid suaminya.

> *"Saya masih ingat orang yang gunting rambut saya adalah anak sekolah dari suami saya sendiri, sekaligus dia juga yang membawa suami saya ke tempat eksekusi. Melalui mantan muridnya, suami saya menitipkan selimut yang dia pakai sampai ke kuburan untuk dikembalikan kepada saya dengan pesan: "Bawa ini selimut kepada ibumu untuk dia cari hidup sebab tak ada gunanya saya bawa selimut ini.""*

Setelah rambutnya dicukur, Antonetha dibariskan dan dibawa dengan yang lainnya ke kantor tim interogasi di mana sudah ada sepuluh laki-laki yang menunggu mereka. Mereka mengejek dan mengolok-olok para perempuan itu sebagai “anjing Gerwani”. Mereka juga mengancam secara verbal dengan sindiran. Camat Sabu Barat berkata, “Wah! Sudah cantik-cantik. Pilih sudah. Suami tidak ada lagi!”

Keempat anak Antonetha, termasuk si bungsu yang baru berumur sepuluh hari, turut dibawa dan ditahan bersamanya selama sepuluh hari. Ketika dibebaskan, Antonetha diperintahkan untuk melapor secara rutin kepada pihak berwenang. Antonetha sangat terpukul.

> *"Saya hanya menangis dalam hati. Biarlah Tuhan yang mengetahui segala-galanya. Aduh, sedih sekali pada waktu itu, apalagi kesulitan bahan makanan. Sepuluh hari saya ditahan; langsung mereka kasih keluar dan suruh pulang ke rumah."*

Antonetha menghadapi kesulitan besar setelah ia dibebaskan. Dia tidak mendapatkan dana pensiun dan hanya bisa mengikat dan mencelup benang untuk ditenun orang lain, bekerja di kebun, dan membantu orang untuk menanam di sawah mereka.

"Aduh menderita sekali. Suami sudah tidak ada, tidak ada tempat bergantung hidup buat kami. Terus hidup kami dibuat lagi seperti binatang-binatang."

Dia tidak mampu menyokong anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Anak pertamanya hanya tamat SD, satu lagi selesai Sekolah Menengah Teknik (SMEA), dan anak keempatnya menghentikan studi universitasnya setelah empat semester. Namun semua anak-anaknya telah menikah dan sekarang menyokongnya. Dia pindah dari Sabu pada tahun 1997 dan sekarang tinggal di Kupang, di rumah yang telah dibangun anak-anaknya untuknya. Dia juga mendapat sedikit bantuan kecil dari gereja.

Sekarang Antonetha sering merasa sakit dan pusing, sakit perut, dan sulit berjalan akibat lututnya yang sakit. Namun dia mendapatkan kekuatan besar dan kebahagiaan dari anak dan cucunya.

Antonetha bersama cucunya.

"Saya sudah punya cucu 23 orang dan cece 3 orang. Sekarang saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan benar-benar sudah memberikan jawaban atas doa-doa saya; sudah menolong dan memperhatikan hidup saya melalui anak dan cucu saya. Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan. Puji Tuhan; Tuhan selalu memberkati semua jalan hidup saya. Inilah kesan-kesan hidup saya di umur 73 tahun ini."

MIGELINA A. MARCUS: KEYAKINAN YANG TEGUH

Migelina Marcus, yang disapa Oma Net, pernah memberikan kesaksian di depan publik pada April 2013 tentang pengalaman yang dialaminya. Dia berbicara dengan keyakinan teguh.[52]

> *"Saya mau bersaksi supaya orang tahu apa sesungguhnya peristiwa yang kami alami. Adik-adik saya takut dan anggap [itu] sudah selesai karena sudah berdoa dan serahkan pada Tuhan. Saya bilang, "Dengan Tuhan memang sudah selesai, tapi manusia belum tahu kebenaran ini." Supaya mereka tidak membuat sejarah yang palsu untuk kita, maka saya perlu luruskan hal itu dengan berbagi cerita ... Tugas saya bersaksi pada mereka supaya sejarah pahit tidak berulang lagi."*

Oma Net lahir pada tahun 1935 di sebuah desa kecil bernama Pisan, di bagian utara TTS. Dia berasal dari keluarga besar dan mempunyai dua kakak laki-laki, lima adik perempuan, dan seorang adik laki-laki. Dia masih ingat Perang Dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia.

Waktu Net di Kelas 1 SR, ayahnya ditahan selama dua tahun oleh Jepang karena dituduh sebagai mata-mata bagi Belanda. Pada tahun 1945 ayahnya dibebaskan, tetapi ketika dia pernah menaikkan bendera merah putih, orang Belanda bereaksi. Oma Net berkisah:

> *"Ia kemudian kasi naik bendera merah putih sehingga Belanda mau pancung kepala Papa saya dan dipotong pada bagian leher. Tapi puji Tuhan tidak putus, hanya luka dalam yang membekas pada leher Papa."*

Waktu berumur 24 tahun, Net pindah dari TTS ke Kupang.

> *"Saya ... ke Kupang, ... melamar dan bekerja di RRI ... sebagai tenaga honor dan menyiar juga sebagai operator. Tahun 1964, saya minta berhenti karena sudah punya anak dan tidak ada yang mengurusnya. Namun mengingat tenaga penyiar dan operator masih sangat kurang, maka saya diberikan SK pemberhentian sementara. Saya mulai tidak masuk kerja, [tetapi] gaji saya tetap terima selama satu tahun."*

Peristiwa tahun 1965 mengakibatkan lebih banyak kekerasan dan kerugian bagi keluarganya. Ayah, ibu, dan sebagian saudara Oma Net ditahan. Ayah dan adik laki-lakinya masih hilang hingga kini. Adik perempuannya yang dituduh sebagai anggota PKI, diambil dari kampus di mana dia mengajar, dibawa ke Bali, dan ditahan di sana selama tiga tahun. Gaji Net dari RRI juga dihentikan.

Waktu Net hamil dengan anaknya yang keempat, ibunya ditahan di Kodim Kupang. Net sendiri yang pergi ke rumah Komandan Kodim dan menuntut agar ibunya dibebaskan. Ia menawarkan diri untuk dimasukkan tahanan asal ibunya dibebaskan. Permintaan Net dipenuhi tanpa Net masuk penjara. Ibunya dibebaskan, tetapi dengan syarat bahwa ibunya wajib lapor.

Rumah Net juga pernah dikepung oleh pemuda Ansor, sayap pemuda Nahdlatul Ulama.

Foto ibunya menjadi salah satu isi dari kotak memori Oma Net.

"Waktu rumah saya diserang oleh pemuda Ansor saya katakan, “Buktikan apa kesalahan saya!” sehingga mereka pergi.

Tragedi ’65 membuat kami harus kehilangan orang tua, kakak, dan ada begitu banyak kehilangan tanpa sebuah peradilan dan bukti-bukti [yang menunjukkan] bahwa mereka telah berkhianat kepada negara atau bangsa."

Net terus mengalami kesulitan setelah tragedi 1965. Pada usia 40an dan 50an dia tidak punya pekerjaan atau pendapatan, tapi bertahan atas dukungan dari orang lain. Dia telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya walaupun makanan tidak selalu cukup dan harus menghadapi tantangan ekonomi besar. Anaknya juga harus berhadapan dengan masalah kesehatan.

"Waktu rumah saya diserang oleh pemuda Ansor saya katakan, “Buktikan apa kesalahan saya!” sehingga mereka pergi.

Tragedi ’65 membuat kami harus kehilangan orang tua, kakak, dan ada begitu banyak kehilangan tanpa sebuah

peradilan dan bukti-bukti [yang menunjukkan] bahwa mereka telah berkhianat kepada negara atau bangsa."

Net terus mengalami kesulitan setelah tragedi 1965. Pada usia 40an dan 50an dia tidak punya pekerjaan atau pendapatan, tapi bertahan atas dukungan dari orang lain. Dia telah berhasil menyekolahkan anak-anaknya walaupun makanan tidak selalu cukup dan harus menghadapi tantangan ekonomi besar. Anaknya juga harus berhadapan dengan masalah kesehatan.

"Saat saya dalam usia ke-50, anak saya yang satu [anak sulung] operasi besar dengan 23 jahitan oleh karena ususnya melingkar dan perutnya dibalik ... Sampai saat ini tidak ada gangguan. Anak saya yang bungsu [anak ke delapan] klep jantungnya bocor dan harus dioperasi di Jakarta, memakan biaya yang cukup besar. Dokter mengatakan usianya tidak akan panjang, tapi Tuhan pun buat perkara melalui teman-teman doa ... setelah diperiksa kembali [anak bungsu] sudah pulih dan sampai hari ini dia mempunyai anak lima orang."

Oma Net tinggal di rumah warisan dari orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia bertahan dengan cara menjahit dan berjualan kue. Ia juga memperoleh 10 kg beras setiap bulan dari jemaatnya. Namun sumber utama kekuatannya adalah doa. Oma Net percaya bahwa Tuhan telah memberinya umur panjang supaya dia bisa bersaksi bahwa tragedi 1965 mengakibatkan kematian dan kehilangan banyak orang yang tidak bersalah. Dia berharap film G30S dan buku-buku yang tidak didasarkan pada bukti dimusnahkan.

"Usul kami supaya film G30S, yang tidak ada bukti, dan buku-buku yang bersangkut paut dengan G30S, dimusnahkan jadi abu. Sesungguhnya semuanya itu tidak benar, tapi muslihat belaka yang dibuat oleh orang-orang yang mau mencari nama dan kekayaan...
Mana buktinya?"

SARLOTHA KOPI LEDE: GURU YANG MENJADI SASARAN

Sarlotha dan suaminya bekerja sebagai guru SD di Pulau Sabu. Suaminya diambil pada tahun 1965 dan ditahan sebelum dibawa ke Pulau Rote. Dia masih hilang hingga kini. Sebelum suaminya dibawa, seorang polisi mengizinkan Sarlotha dan suaminya untuk bertemu. Suaminya mengatakan padanya untuk tidak takut dan merawat anak-anak mereka. Sejak itu, Sarlotha bertanggung jawab membesarkan tiga orang anak, termasuk seorang bayi yang baru lahir. “Menangis saya menjadi janda dalam usia 24 tahun.“

Sarlotha dituduh sebagai anggota Gerwani dan ditahan sekitar empat bulan bersama anak bungsunya. Dia tidak diberikan makanan dan, sama seperti Antonetha, dihina dengan cara dicukur rambutnya. Dia diberhentikan dari posisinya sebagai guru dan setelah pembebasannya, ia harus mengikuti apel setiap hari Senin di lapangan Kantor Polisi Seba, Sabu mulai dari April 1966 sampai dengan sekitar 1970an.

Pada tahun 1977 Sarlotha diangkat kembali dan mulai bekerja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sabu Barat dengan gaji kecil. “Uang 20 ribu [per bulan] saya doakan dan syukuri.” Untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga mudanya, Sarlotha harus bekerja keras dengan bekerja di sawah, memelihara hewan, menenun, dan bertani. Setiap hari dia pulang dari kantor dan langsung pergi ke sawah untuk bekerja sampai larut malam. “Saya terlalu kerja keras, rendam badan di sawah sampai tengah malam untuk tanam padi. Mungkin karena itu saya reumatik.“

Pada tahun 1995 Mama Sarlotha pensiun dini karena sakit dan pindah ke Kupang. Ketika anak sulungnya mengambil S2 di Bandung, dia ikut bersama keluarganya untuk menjaga cucunya, kemudian kembali ke Kupang pada tahun 1998. Dia sering menderita sakit di perut, lutut, dan tulang duduk. Dia menjalani operasi katarak pada akhir 2013 di Bandung.

Mendidik anak-anaknya merupakan hal sangat penting untuk Mama Sarlotha. Dua anaknya bekerja sebagai PNS dan satu di sektor swasta. Namun keberhasilan anak-anaknya tidaklah ditempuh dengan mudah. Anak-anaknya harus melalui diskriminasi panjang terkait sejarah keluarga mereka. Salah satu anak laki-laki Mama Sarlotha harus melihat namanya dilingkari dengan pena merah ketika melamar menjadi pegawai negeri. Setelah ditolak beberapa kali, akhirnya ia berhasil bekerja sebagai pegawai honor di Universitas Cendana (Undana) Kupang, universitas almamater dia. Sebelumnya, saat ia mahasiswa di Undana, ia sering diolok-olok di kampus. Ternyata, olok-olok itu berlanjut ketika ia bekerja di sana. Dia tidak bisa menghadapi keadaan ini sehingga akhirnya meninggalkan pekerjaannya.

Mama Sarlotha sedang mengerjakan alur waktu kehidupannya.

> *"Akhirnya [ia] belajar dari keadaan dan berusaha untuk bekerja sebagai tukang. Dia juga jual ikan. Jadi saya bilang, "Tidak apa-apa; yang penting tidak mencuri." Saya dan istrinya membantu [dia] dengan buat ikan kering."*

Mama Sarlotha juga mengajarkan anak-anaknya tentang pengampunan.

> *"Anak-anak diajarkan agar tidak boleh marah dan dendam pada keluarga yang sangat jahat pada kami, bahkan tolong mereka [sebab itu adalah] hak Tuhan untuk membalas. Jangan simpan kepahitan di hati. Sekarang ada banyak anak-anak saudara yang dulu jahat dibantu anak [pertama] saya sebagai dosen di kampus."*

Dia saat ini tinggal di Kupang dengan anak-anaknya, berpindah di antara tiga rumah mereka dan membantu mereka ketika dibutuhkan. Ia tetap penuh semangat dan produktif. Dia bangga akan anak-anaknya dan senang bahwa mereka telah lulus dan memiliki keluarga mereka sendiri. "Sekarang Tuhan telah mengganti air mataku dengan permata. Awan hitam diubah jadi bintang gemerlap ... Kitab Mazmur dan Amsal menjadi guru yang mengajar saya bertahan dalam penderitaan."

SUSANA THERFENA BULI TAKA: AYAH DAN ADIK YANG HILANG

Pada tahun 1965, Susana (biasa disapa Vena) tinggal di Kupang sehingga ketika kekerasan terjadi dia tidak tahu bahwa kakak dan ayahnya telah ditangkap di Kefamenanu yang pada waktu itu harus ditempuh selama satu hari perjalanan dari Kupang menggunakan bis atau mobil. Sebelumnya, pada awal tahun 1965, Vena dan tunangannya sempat mendatangi orang tuanya untuk membicarakan pernikahannya pada 1966.

Vena bersama cucu-cucunya.

> *"Ketika peristiwa itu terjadi di Kefa, saya lagi di Kupang. Saya tidak tahu papa dan adik saya ditahan, dibunuh di mana. Kuburannya juga tidak tahu. Setelah peristiwa itu, saya jemput mama dan adik-adik saya dan tinggal di Fontein [salah satu daerah di Kota Kupang], di rumah kos pacar saya."*

Saat itu tunangannya bekerja di Korem. Dia bisa saja terancam atau kehilangan pekerjaan jika diketahui bahwa dia bertunangan dengan seorang yang ayahnya dituduh PKI. Meskipun begitu, salah satu atasan tunangannya memerintahkan agar Vena beserta ibu dan keluarganya dilindungi. Sang atasan percaya bahwa ayah Vena tidak bersalah. Vena dan keluarganya tinggal di kos tunangan sampai kerabat ayahnya memberi mereka tanah untuk tempat tinggal dan tempat untuk mendirikan sebuah usaha kecil menjual kue dan menjahit.

> *"Tuhan kasih hikmat bagi kami, saya dan adik-adik, untuk membuat roti dan jual. Setelah itu, [dengan]*

> *hasilnya kami beli bahan-bahan untuk bikin rumah ini. Pertama ... kami beli alang-alang, kami ikat sendiri ... sendiri buat [atap rumah]."*

Setelah pernikahannya tertunda bertahun-tahun, Vena dan tunangannya akhirnya menikah pada tahun 1979. Suami Vena turut membantu memperbaiki rumahnya dengan membeli seng untuk menggantikan atap alang-alang.

Sekarang Oma Vena masih bekerja. Ia membuat dan menjual kue sebagai penghasilan tambahan dari uang pensiun suaminya. Ia belum berhasil memperoleh bantuan pemerintah untuk lansia karena persyaratan yang berbelit dan memberatkan. Ia berharap bahwa prosesnya dapat disederhanakan sehingga ia bisa memperoleh bantuan. Sampai sekarang Oma Vena tidak tahu jika ayahnya terlibat dengan PKI.

Foto pernikahan Vena Taka.

> *"Soalnya, saya ... tidak tahu apakah bapa memang terlibat atau tidak. Saya tidak pernah dengar itu. Mungkin di belakang—dong [mereka] omong [seperti itu]—tapi saya tidak pernah dengar langsung."*

FERDELINA BESSY SINLAE: TIDAK ADA KEBENARAN YANG DIBICARAKAN

Kisah Ferdelina Bessy yang biasa disebut Oma Bessy penuh dengan kisah hidup yang berat dan penuh penderitaan.

"Sejak kecil sampai sekarang saya tidak pernah rasakan hidup senang. Ibu saya sebagai janda memelihara kami dengan kekerasan. Saya pindah ke rumah saudara, juga alami kekerasan dan kerja berat mulai dari jual kue, pikul air, dan di sawah. Saya terpaksa kawin lari. Terlalu berat untuk diceritakan, pokoknya sonde [tidak] ada senang."

Sama dengan beberapa peserta yang lain, Oma Bessy juga menyebutkan kesulitan makanan pada tahun-tahun sekitar 1965. “Pada tahun-tahun itu ada kemarau panjang, jadi kami makan biji rumput.”

Oma Bessy dan suaminya dituduh sebagai anggota PKI. Mereka dipanggil ke kantor kepala desa untuk lari papan, yaitu berlari mengelilingi desa dengan berkalung papan selebar sekitar satu meter yang bertuliskan PKI. Mereka diharuskan berlari sambil bernyanyi lagu "Nasakom Bersatu".

> *"[Waktu itu] ... saya punya anak belum 40 hari. Saya dipanggil kades untuk lari papan. Papan itu tulis PKI, baru gantung di leher. Tapi saya tidak lari papan karena baru habis melahirkan, jadi yang lari hanya laki-laki saja. Yang tahan saya ini bilang [bahwa] saya sengaja pucat, tapi saya bilang [bahwa] saya baru habis melahirkan. [Mereka melanjutkan dengan cemooh], dong bilang ikut PKI, ko, dapat oto."*

Menurut Oma Bessy, masih belum ada pengungkapan kebenaran tentang peristiwa 1965. Bahkan sampai saat ini dia belum ada komunikasi dengan anggota keluarga yang masih menuduh dia dan suaminya sebagai PKI.

Oma Bessy dan suaminya bergantung pada pendapatan yang diperoleh dari kios kecilnya yang terletak di pinggir jalan raya. Waktu membuka kios mereka meminjam uang yang harus dilunasi dengan pembayaran sebesar Rp. 40.000 per hari. Kadang-kadang hasil jualannya tidak cukup untuk membeli makanan dan melunasi pinjaman tersebut. Sekarang kebutuhan ekonomi mereka dibantu oleh salah satu keponakan mereka.

Oma Bessy di depan kiosnya.

Kesehatan Oma Bessy pun saat ini tidak baik. Dia sering menderita sakit di telinga, tangan, kaki, dan perutnya. Dia juga menderita secara emosional. "Hati sakit kalau mengingat masa lalu."

HENNY LEBA DETHAN: STIGMA YANG DIRASAKAN OLEH ANAK-ANAK

Henny lahir di Oesao, sebuah wilayah persawahan yang terletak sekitar 40 km ke arah timur Kota Kupang, pada 22 Nopember 1965. Ia anak bungsu dari empat orang bersaudara. Pada usia tiga bulan ayahnya meninggal dan ibunya menikah lagi dengan seorang yang kemudian dituduh sebagai anggota PKI.

Waktu bapak tiri Henny ditahan dan dihilangkan, anak-anak dipisahkan dari ibunya. Henny dibesarkan oleh mama kecil (adik dari mamanya), sedangkan kakak laki-laki dan dua kakak perempuannya dipindahkan ke sebuah panti asuhan di Kupang. Sampai sekarang saudara-saudara Henny yang dipindahkan ke panti asuhan tetap terpisah dengan ibunya sebab mereka merasa bahwa ibunya membuang mereka.

Sejak peristiwa 1965, Henny dan saudara-saudaranya sangat menderita karena stigma dan diskriminasi sebagai “anak PKI”.

> *"Saya selalu pikiran ketika orang menyindir saya sebagai keturunan PKI. Saya tidak tahu apa-apa. Dalam kepala ini saya memikirkan banyak hal yang susah. Hidup ini begitu susah. Tangan ini sakit karena ada banyak*

> *pekerjaan yang harus dikerjakan. [Sejak] ... saya kecil, beban pekerjaan itu selalu melekat."*

Henny menikah pada usia 16 tahun. Ia dan suaminya memiliki tiga putra. Saat ini Henny mengandalkan hidup dari kios di rumahnya. Selain mendapat diskriminasi dari saudaranya, Henny juga mendapat hinaan dari suaminya saat suami marah.

> *"Hati ini merasa sakit ketika dilukai dengan kata-kata kasar ... oleh suami saya sendiri. Kadang kalau dia terlalu emosi, dia bilang, "Dasar keturunan PKI!" Saya tidak mau larut dalam pikiran yang membuat saya terbeban. Saya juga berusaha memikirkan hal-hal yang positif saja. Ketika saya sakit hati, saya berdoa kepada Tuhan dan ketika itu saya merasa lega. Saya tidak menyimpan dendam kepada siapapun."*

Henny berharap agar perasaan lega itu juga dapat dinikmati oleh saudara-saudara dan ibunya yang masih tertutup sekali mengenai pengalaman traumatis mereka.

Sekarang Henny menerima dukungan dari JPIT untuk mengatasi trauma yang masih dialaminya, antara lain melalui keterlibatannya secara aktif dalam kelompok Sahabat Doa Lansia. Dia berharap agar JPIT dapat memfasilitasi sebuah proses dukungan dan pemulihan yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi gereja dan komunitas yang lebih luas.

Henny memegang buku laporan KKPK yang berisi tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1965-2005.

FRANKINA HOTAN BOBOY: KEHILANGAN SEBIDANG TANAH

Ketika mengambil bagian dalam diskusi penelitian ini, Frankina Boboy yang biasa dipanggil Oma Kina, merefleksikan kembali hidupnya. Dia menuliskan kisah singkat di kartu pos yang telah kami siapkan. Kemudian, dia membagi kisah yang dia tuliskan bersama perempuan penyintas lainnya dari Kupang.

Kina dibesarkan dalam sebuah keluarga yang dirundung kekerasan. Ayahnya seringkali memukul ibunya, sampai suatu hari ibunya meninggalkan Kina dan kedua adiknya.

> *"Bapak pukul mama, dan mama akhirnya meninggalkan rumah sehingga kami ditinggal bersama bapa. Waktu itu saya yang menjaga adik-adik yang masih kecil. Tahun 1964 saya masih sekolah di SR ... Saya terpaksa putus sekolah karena tidak ada yang mengantar ke sekolah, sedangkan bapa harus kerja. Pada waktu itu marak orang [dibunuh] sehingga saya takut ... Saat malam hari kami tidak bisa tidur karena ada orang yang merayap di pinggir rumah,jadi kami takut sekali."*

Ayah Kina ditangkap pada bulan Oktober 1965 dan ditahan selama seminggu.

> *"Setelah ditahan satu minggu dan saat bapa kembali [ke rumah], mama [yang telah disatukan kembali dengan keluarganya waktu itu] berkata, "Ko' bilang kita PKI, tapi kita sonde tahu apa-apa." Semenjak itu bapa tidak boleh lagi bekerja di luar rumah. Kalau mereka lihat bapa, mereka bisa pukul bapa sampai mati. Mama sementara menyusui adik bungsu. Saya berumur 15 tahun. Karena itu saya bertindak sebagai bapa, kerja sawah dan buka lahan baru. Bayangkan saja kalau [pohon] gewang yang tinggi, [saya] harus sambung dua bambu dan saya bisa naik ke atas [untuk mengiris buah gewang]."*

Kina mengambil peran sebagai kepala keluarga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi keluarga atau urusan yang terkait dengan orang-orang di luar rumah, ditangani oleh Kina. Dia mulai memakai pakaian laki-laki agar lebih mudah dalam menjalani perannya yang baru.

> *"Saya bekerja mencari nafkah sebagai orang dewasa... Saya membawa pisang dan kayu api untuk dijual ke Kupang... Saya dengan perahu dari Pariti. Karena saya kerja begitu, saya biasa pakai celana pendek seperti anak laki-laki...*
>
> *Pada saat itu kelaparan luar biasa, tapi saya berusaha agar persediaan makanan kami cukup. Kita selalu dianggap PKI, saya merasa kita seperti orang yang tidak berdaya.."*

Masa itu tidak hanya sulit secara ekonomi, tetapi secara sosial mereka juga menghadapi kesulitan. Keluarganya dilarang hadir di gereja, namun Kina bertekad untuk hadir.

> *"Kami dilarang [ikut] gereja. Saya menghadap pendeta ... "Apa alasan kami dilarang gereja?" Dia menangis dan memberi jawaban, "Ini soal negara." [Kalau saya] pergi gereja juga orang bilang, "Anak PKI pi gereja untuk apa?" Sampai satu kali saya bertanya pada bapa, "Apa kita punya salah? PKI tuh apa?""*

Kina menikah pada usia 18 tahun. Baginya, pernikahan merupakan pelarian dari kenyataan pahit. Namun dia tidak bisa lepas dari diskriminasi sebagai anak dari seorang yang dituduh Komunis. Pada tahun 1973 suaminya jatuh sakit selama tiga bulan sehingga mereka mengalami masa ekonomi yang sulit. Bagi Kina penderitaan tahun 1965 muncul kembali.

Label PKI juga memengaruhi hak-hak Kina atas tanah ayahnya hampir 20 tahun setelah peristiwa-peristiwa terkait 1965.

> *"Di Lasiana ada tanah—Papa saya punya rumah dan sawah—tapi karena dituduh PKI, keluarga mengambilnya. Kami tidak punya apa-apa, malahan numpang di tanah orang yang sebenarnya milik orang tua kami ... Ketika bapa mau lapor, mereka [yang anggota*

Frankina berdiri di atas tanah papanya yang direbut oleh keluarganya.

> *keluarganya] bilang, "To'e [Jangan pusing] dengan itu PKI dong." ... [Tapi saya bertanya], "Orang itu tahu apa [tentang] PKI? Mereka hanya bilang-bilang saja dan tidak mengerti apa-apa juga." ... Ketika orang menuding begitu, bapa hanya diam dan pasrah saja."*

Oma Kina yang memasrahkan diri atas kehilangan tanah yang diambil telah menegaskan pengaruh patriarki yang memungkinkan mereka sebagai laki-laki untuk mengambil tanah.

> *"Saudara jauh yang semarga dengan ayah saya menganggap [bahwa] mereka yang berhak sebagai laki-laki. Kami [saudara perempuan saya dan saya] hanya perempuan semua. Padahal, mereka baru datang dari Rote ke tempat ini. Mereka sudah menjual tanah itu ... Kekerasan masih berlangsung di masyarakat. Saya rasa sampai pada waktu bapa dan mama meninggal tidak ada kekerasan lagi, tapi kami tidak punya hak atas apa yang kami miliki sendiri. Memang untuk menyebut kami PKI itu, tidak ada lagi, tapi semua yang kita miliki diambil orang ... Tidak apa-apa; saya masih punya kaki dan tangan untuk bekerja."*

Oma Kina, yang dukun beranak, terus menghadapi tantangan. Pada tahun 1986 ia menghadiri pelatihan dan sering diminta oleh tetangga untuk membantu dengan kelahiran. Namun, sejak tahun 2010 pemerintah melarang dukun beranak untuk bekerja. Dia sekarang bekerja sebagai buruh tani, namun pada akhirnya dia bergantung pada dukungan dari dua putranya yang mengirimkan kepadanya sedikit beras, sabun, dan uang setiap bulan. Bagi Oma Kina, "Mereka [para pelaku] dilepaskan begitu saja ... Jadi keadilan tidak ada sama sekali."

Namun, partisipasinya dalam penelitian aksi telah menjadi titik balik baginya.

"Ketika saya berbagi cerita tentang pengalaman pahit saya di masa lalu, apa yang terjadi di tahun ‘65, Ina [seorang peneliti JPIT] mengatakan, "Anda harus terlibat." Untuk melakukan apa? Dia menjelaskan bahwa kami ingin merangkul semua orang yang ditindas, yang menghadapi kesulitan pada tahun '65. Kami ingin merangkul satu sama lain untuk menemukan kebenaran ... Saya tersentuh dan saya pikir itulah yang harus saya lakukan. Saya ingin bergabung; saya ingin bebas dari cengkeraman masa lalu. Dan saya senang [karena] saya dapat bergabung dan memiliki banyak teman. Seperti yang kami sebut di Kupang, kami memiliki ruang bagi perempuan lanjut usia untuk bertemu. Meskipun kami terpisah jauh, kami merasa senang [karena] kami memiliki banyak teman. Kami bisa membuka hati kami untuk berbicara tentang kegelapan di masa lalu. Saya merasa lega. Apa yang terjadi dengan saya di masa lalu, sekarang saya bisa memperlakukannya sebagai badai yang telah berlalu. Saya merasa terhibur oleh banyak teman dan upaya kami untuk menyembuhkan diri kami sendiri ... Apapun yang terjadi, penyembuhan kami harus terus berjalan."

Papua: Konflik yang Tak Kunjung Padam

7

Foto noken mama Irene Sroyer yang diambil di rumahnya.

Ketika Indonesia dan Belanda menyepakati penyerahan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, wilayah Papua bagian barat masih berstatus sengketa. Saat itu, Soekarno menyatakan bahwa wilayah bekas koloni Belanda yang membentang "dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua)" merupakan wilayah negara Indonesia. Namun, Belanda menyatakan bahwa Papua bukan merupakan bagian dari Indonesia dengan alasan perbedaan etnis, agama dan budaya. Belanda juga sedang melakukan persiapan kemerdekaan Papua, termasuk mempersiapkan naskah kemerdekaan, lagu dan bendera kebangsaan Papua.[53]

Presiden Soekarno memainkan diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan Amerika Serikat dan memaksa Belanda membatalkan rencana memerdekakan Papua. Amerika Serikat kemudian memprakarsai kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda, dan mendorong ditandatanganinya Perjanjian New York pada Agustus 1962. Kedua pihak menyepakati bahwa pemerintahan di Papua akan

diserahkan kepada pemerintahan transisi PBB dan kemudian diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 untuk kemudian melakukan referendum.[54] Pada saat yang sama, Presiden Soekarno melancarkan aksi militer, baik secara terbuka maupun rahasia untuk menyusup ke Papua dalam misi pembebasan dalam Komando Mandala.

Referendum yang tercantum dalam Perjanjian New York merupakan langkah untuk menjamin adanya penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh rakyat Papua. Hal tersebut kemudian diwujudkan dalam pemungutan suara pada tahun 1969 dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Namun sebelum digelarnya Pepera, militer Indonesia mulai melakukan tekanan terhadap berbagai aksi politik di Papua. Para pemimpin Papua ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Alih-alih memberikan hak pilih kepada rakyat Papua, pemerintah Indonesia hanya menunjuk 1026 ketua suku yang yang dianggap mewakili Papua. Hasil Pepera suara bulat mendukung integrasi dengan Indonesia. Setelah pelaksanaan Pepera, represi militer Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ketidakpuasan di Papua. Represi yang justru membuahkan perlawanan lebih besar hingga akhirnya muncul deklarasi perlawanan bersenjata oleh kelompok yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM).[55]

Pasukan keamanan Indonesia tidak hanya menyasar OPM, tetapi juga warga sipil termasuk warga yang berdemostrasi secara damai. Pasukan keamanan Indonesia melakukan berbagai pelanggaran HAM termasuk penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pemerkosaan. Pos-pos militer didirikan di tingkat desa, kadang-kadang dilakukan dengan mengambil paksa rumah penduduk atau gedung fasilitas umum. Penduduk lokal dipantau dan dikontrol secara ketat.

Pada tahun 2000, Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi organisasi yang menyatukan faksi-faksi di Papua dalam membahas persoalan Papua. Langkah ini merupakan pergeseran taktik dari perlawanan bersenjata ke jalan damai yang bertujuan untuk membangun dialog tentang kedaulatan Papua. Saat ini, perhatian internasional pada persoalan di Papua meningkat, misalnya dari Forum Kepulauan Pasifik.[56]

Munculnya proses demokratisasi di Indonesia setelah Orde Baru runtuh, yang kemudian memungkinkan terjadinya proses kemerdekaan Timor Leste dan otonomi di Aceh, mendorong lahirnya UU Otonomi Khusus Papua pada Oktober 2001 sebagai respon atas kebutuhan untuk menangani sentimen separatis di Papua. UU ini memberi kewenangan besar kepada pemerintahan Papua untuk mengelola pendapatan mereka, menjaga kelangsungan tradisi, dan membentuk MRP.[57] UU tersebut juga memandatkan pemerintah Indonesia untuk membentuk KKR, pengadilan HAM, dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Sampai sekarang KKR dan pengadilan HAM belum diwujudkan. Sementara itu masyarakat adat Papua, merasa bahwa keberadaan, cara hidup, dan hubungan adat mereka dengan tanah mereka berada di bawah ancaman.

Konflik yang masih berlangsung hingga kini turut memengaruhi kehidupan sehari-hari perempuan Papua. Mereka mengalami penahanan tanpa pengadilan, interogasi dan penyiksaan, termasuk kekerasan seksual. Banyak perempuan yang kehilangan anggota keluarga mereka, sebagian dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, namun sebagian lainnya tidak dapat mengetahui nasib keluarganya dan masih hilang. Perempuan harus melarikan diri dari operasi militer, meninggalkan kebun dan rumah mereka, dan tinggal di hutan selama bertahun-tahun sehingga berpengaruh buruk pada kesehatan keluarga dan mata pencaharian mereka. Ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka harus menghadapi diskriminasi dan stigma dari warga sekitar karena dianggap sebagai bagian dari gerakan perlawanan.

Saat proses penelitian lapangan berakhir pada Desember 2014, empat pemuda Papua di distrik Paniai tewas saat pasukan militer Indonesia menembaki warga sipil tak bersenjata yang sedang demonstrasi tentang keributan antara beberapa pemuda dengan personil militer pada malam sebelumnya. Ibu dari para pemuda tersebut lalu membawa jasad anak-anak mereka di lapangan di depan Korem dan menolak untuk dipindahkan sebelum mereka mendapat keadilan. Pada hari keempat, mereka menguburkan jasad anak-anak mereka di lapangan tersebut.

Iman sebagai Sumber Kekuatan

NAOMI MASA: DITINGGAL PERGI OLEH SUAMI
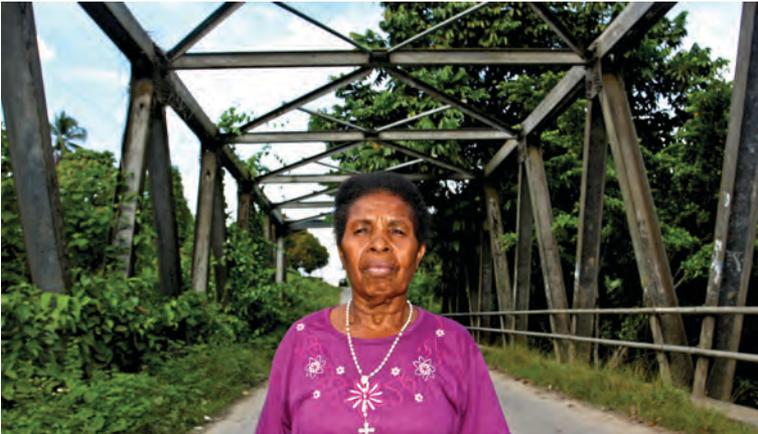
Suami Naomi Masa ditangkap, diinterogasi dan disiksa oleh militer Indonesia di pos kampung Besum karena dicurigai berafiliasi dengan OPM. Setelah dibebaskan ia melarikan diri ke hutan. Pada suatu malam di tahun 1983, tentara mengepung rumah Naomi, menangkap dan memaksanya naik ke truk untuk menunjukkan lokasi persembunyian suaminya. Naomi ditangkap sambil membawa anaknya yang masih berumur dua bulan.

Pada saat di dalam truk, Naomi mengalami penyiksaan sampai suatu ketika anaknya jatuh dari sarung dan masuk ke dalam rawa sagu. Naomi pingsan. Setelah itu, Naomi dibawa ke sebuah pos militer dan ditahan selama 10 jam dan dipukuli, disetrum, diikat, dan diperkosa oleh lima tentara. Pada saat itu, dia tidak sadarkan diri dan tidak ingat di mana anaknya. Untungnya, anaknya berhasil diselamatkan oleh saudara laki-laki Naomi.

Naomi menunjukkan lokasi di mana anaknya jatuh dari sarungnya ketika dia dipaksa tentara untuk menunjukkan lokasi persembunyian suaminya.

> *"Setelah dari rawa sagu Mama dibawa ke pos tentara. Di situ Mama diperkosa oleh lima anggota tentara yang bertugas secara bergantian. Mama tidak sadarkan diri. Mama punya luka robek di Mama punya kemaluan."*

Keesokan harinya, jam 5 pagi, dia dikirim pulang. Namun Naomi masih sulit untuk berjalan dan beberapa kali pingsan. Luka-lukanya memerlukan perawatan medis, termasuk 12 jahitan di vaginanya. Setelah pengobatan, dia dan suaminya dibawa ke Jayapura, diinterogasi dan disiksa lagi oleh anggota militer di sana. Setelah dilepaskan, mereka lari ke hutan lagi dan bersembunyi hingga tahun 1986, sampai Gereja Katolik membantu mereka untuk pulang. Kondisi sewaktu mereka di hutan sangatlah sulit, terutama dengan anak anak yang masih kecil, “Akibat dari tindakan ini Mama harus tinggal di hutan sehingga Mama [untuk anak] mengganti air susu dengan air rebus daun coklat dan kopi hitam.”

Berbagai kekerasan yang dialami Naomi sangat berpengaruh kepada kehidupannya di kemudian hari. Pada tahun 2005 suaminya meninggalkannya dan menikahi perempuan lain. Naomi percaya bahwa hal itu merupakan akibat dari kekerasaan yang dia alami.

> *"Mama sedih karena mengalami hal ini. Mama sudah mengalami kekerasan untuk menyelamatkan suami, tapi*

> *akhirnya Bapa [suaminya] meninggalkan Mama dan menikahi perempuan lain akibat apa yang telah Mama lalui."*

Dia mendapat stigma dari masyarakat dan merasa tidak mendapat pengakuan akan kebutuhannya atas keadilan.

> *"Karena masyarakat melihat bahwa Mama termasuk dalam OPM sehingga apa yang Mama alami itu sudah resiko ... Mama bertanya mengapa hak asasi manusia tidak diperhatikan. Mama telah menunjukkan bahwa militer bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Mama. Mama telah kehilangan martabat Mama."*

Beberapa tahun yang lalu, satu-satunya anak perempuan Naomi meninggal karena sakit paru-paru. Naomi menyatakan bahwa penyakit paru-paru itu merupakan dampak dari kekerasan yang dia alami pada saat ditangkap bersama Naomi. Saat ini Naomi mengasuh dua cucu dari anaknya yang telah meninggal. Sementara itu, bantuan dana Pembangunan Masyarakat untuk warga tidak pernah diperoleh Naomi. Dia percaya hal itu disebabkan oleh statusnya sebagai korban kekerasan militer. “Pemerintah kampung yang mempunyai dana RESPEK bisa bantu Mama, tapi karena Mama sudah begini, jadi mereka tidak mau bantu.”

Naomi berdiri di depan kuburan anak perempuannya yang meninggal karena sakit paru-paru.

Naomi pun tidak pernah tahu apakah kelima tentara yang memperkosanya telah dituntut di pengadilan atau tidak. Salah seorang dari laki-laki itu menikahi seorang perempuan setempat yang dia kenal, tapi dia dipindahkan ke lokasi lain. Naomi kini berusia 58 tahun dan kesulitan untuk bekerja di kebun, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menyokong kehidupan keluarganya. Dia ingin mendapat bantuan untuk berternak atau membuka warung agar dapat menyekolahkan cucunya. “Mama ingin saat ini berjualan minyak tanah atau buka usaha kios supaya Mama bisa urus cucu-cucu punya sekolah.”

Naomi sekarang tinggal di halaman Gereja Katolik di kampungnya bersama dua orang cucu perempuannya dan dia bekerja sebagai Kustor (petugas kebersihan di gereja). Dia menemukan pelipur lara dalam imannya. Dia mengatakan dia telah menemukan ketenangan dan kedamaian.

> *"Kalau Mama, LSM yang bisa membantu saya melupakan semua peristiwa ini. Selain itu gereja membantu Mama karena lewat gereja Mama selalu berdoa dan melibatkan diri dalam aktivitas gereja, dengan berdoa Mama bisa berbicara kepada Tuhan, saya berdoa, ‘Tuhan. saya tidak menuntut apa-apa.’.."*

HANA BANO:
PULIH KARENA AKTIF DI GEREJA

Seperti Naomi, bagi Hana Bano, gereja dan merupakan teman yang dapat memahami kekerasan yang dia alami.

Pada tahun 1981 sampai 1982 dia berulangkali ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada saat itu militer mengambil rumah-rumah penduduk secara paksa untuk digunakan sebagai markas. Banyak penduduk, termasuk Hana, ditahan di pos militer di desa mereka. Militer sangat mencurigai siapa saja yang bepergian ke hutan. Setiap orang harus menunjukkan surat jalan dan KTP setiap kali pergi ke hutan atau bahkan kebun mereka sendiri. Hana ditangkap karena diketahui pernah ke hutan dan dianggap mengetahui tempat persembunyian dan kegiatan OPM. Pada penangkapan kelima kalinya, dia mengalami penyiksaan.

> *"Jari- jari saya dipasang kabel telanjang [disetrum]. Sesudah bangun pagi saya dikasih setrum sebelum masuk dengan pertanyaan setiap hari. Saya ditahan selama dua minggu. Jadi, selama dua minggu itu di tahanan Besum sini. Saya disetrum sambil ditodong senapan dalam mulut."*

Hana Bano masih terluka oleh penderitaannya.

> *"Perasaan sakit hati karena saya sudah cukup menderita dari hutan sampai di kampung dan sampai di tahanan. Sampai keluar, baru masih disuruh lagi untuk cari orang-orang yang ada di hutan."*

Hana merasa bahwa dirinya belum mendapat keadilan karena kasus kekerasan yang menimpa dirinya belum ditangani dan para pelakunya belum dihukum. Bahkan, pembunuhan terhadap putranya pun tidak pernah diakui oleh militer. Anaknya diculik dan tewas karena tikaman pisau sangkur di perutnya. Namun, tentara menyatakan bahwa anak Hana tewas karena kecelakaan lalu lintas.

Gereja adalah sumber kekuatan bagi Mama Hana dan keterlibatannya dalam kegiatan gereja berperan besar dalam membantu pemulihannya.

"Dengan adanya saya ikut dipilih jadi majelis. Saya dipercayakan untuk bisa membawa jemaat, koordinir jemaat, atau paduan suara, kegiatan di klasis. Mama dipakai untuk mengatur sesuatu program misalnya paduan suara, keterampilan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti akhirnya Mama punya pikiran-pikiran yang tadinya ada benci, dendam kepada mereka [tentara] yang dulu memperlakukan Mama sudah mulai hilang."

Selain gereja, LSM juga menjadi sumber kekuatan Hana karena ikut mendukung dia dalam menceritakan kisahnya dan berbagi rasa sakit yang ada dalam hatinya.

Hana berdiri di depan rumahnya.

"Karena mereka datang mengajak Mama untuk berbagi atau menceritakan masalah Mama, mereka mendengar cerita Mama, mengajak Mama ikut dalam pelatihan-pelatihan. Sehingga saya diperhatikan oleh LSM. Sedangkan untuk pemerintah tidak pernah membantu Mama. Jadi, saya percayakan kepada LSM."

Hana merasa bahwa pemerintah harus menjalankan kewajibannya kepada para korban atas kekerasan yang mereka lakukan. Dia berharap mendapat bantuan untuk memulai usaha kecil karena tidak sanggup lagi bekerja di kebun.

MARTINCE:
MASIH TAKUT UNTUK BERSAKSI

Martince berdiri di depan rumahnya.

Martince masih menderita akibat kekerasan yang dia alami ketika masih kecil. Saat diminta untuk menggambarkan perasaan dia lewat warna di gambar tubuhnya, saat mengikuti metode Peta Tubuh, dia menjelaskan,

> *"Tangan dan kaki saya ada yang berwarna biru karena saya sering merasa sakit. Hati saya juga berwarna biru karena belum sembuh atas tindakan kekerasan yang saya alami. Tidak tahu kapan sembuh."*

Pada tahun 1968 ketika dia berusia sepuluh tahun, desanya dibakar tentara saat mereka melakukan pengejaran terhadap OPM. Semua orang melarikan diri ke hutan. Martince bersama kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya ikut ditangkap dan dibawa ke Korem. Martince dan adiknya harus menyaksikan bagaimana aparat militer menyiksa kedua orang tuanya. Kekerasan tersebut terus membayang dalam ingatan

Martince. Bapaknya, Leonard Anes, kemudian mati ditembak oleh tentara di sekitar Gunung Yopdi yang terletak di antara desa Wari dan desa Yopdi.

Martince kemudian menikah dengan seorang pria yang menjadi suami yang baik baginya. Mereka memiliki lima anak. Imannya kepada Tuhan dan cintanya terhadap keluarga memberikan kekuatan dan kebahagiaan terhadap dirinya.

Selain berkebun, Martince juga bekerja membuat anyaman tas untuk dijual guna menambah penghasilan..

Nyeri yang Tetap Ada

TR: SAKIT FISIK YANG DIDERITA SAMPAI SEKARANG

TR adalah salah satu saksi dan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh militer dan polisi saat mereka membubarkan demontrasi pengibaran Bintang Kejora di Biak, 5 Juli 1998. Rasa sakit dari pengalaman tersebut masih tertanam dalam hati dan ingatan TR, hingga sekarang.

Saat itu, pukul 6 pagi, TR bersama seorang temannya mendatangi lokasi demonstrasi sambil membawa kue dan kopi untuk para pengunjuk rasa. Tiba-tiba mereka disergap oleh lebih dari 10 tentara yang mengenakan pakaian kamuflase, wajah mereka dicoreti arang hitam, mengenakan syal merah di leher dan topi yang diberi daun. Para prajurit itu bukan orang Papua. Seorang tentara menendang kue dan meraih teko kopi dari TR, lalu menyiramkan kopi panas ke kepalanya. Mereka menyeret kedua perempuan itu ke jalan dan sambil dipukuli dengan popor senapan dari belakang. Mereka jatuh ke tanah lalu perut mereka ditendang. Para tentara terus menyeret TR dan temannya di atas aspal dengan menarik kaki mereka.

> *"Lalu seorang tentara menarik saya lagi, memukul saya di leher dan berkata, 'Ibu, saya akan menembak dan Ibu lari supaya selamat, kita beragama sama ... Saya berlari dan teman saya NB berlari juga dan kami bersembunyi di septic tank yang baru digali."*

Mereka lalu berganti baju yang mereka dapatkan dari jemuran di sekitar tempat persembunyian, dan kemudian berusaha lari ke desa Bouw. Namun, saat hampir sampai ke tujuan, sebuah truk kuning muncul dan TR tertangkap.

> *"Mata saya diikat dan saya dilempar ke atas truk. Itu saya rasa bahwa saya jatuh di atas orang, masih banyak yang berteriak-berteriak."*

Mereka semua dibawa ke sebuah ruangan, ditelanjangi, diborgol dan disiksa. TR bisa mendengar banyak orang berteriak dan meminta tolong.

> *"Saya dipukul pakai popor senjata, rasanya kepala saya sudah bocor dan ada darah keluar dari kepala."*

Seseorang melemparkan cairan di seluruh tubuhnya, yang berbau seperti alkohol.

"Saya menjerit dan menarik borgol saya untuk dapat lepas, setiap kali saya menarik, saya dibakar dengan api. Kemudian tentaranya berkata, 'Oh, jadi kamu tidak mau diperkosa? Oke, nanti saya akan memotong tali supaya kamu dapat bergerak bebas.'"

Namun, tentara itu tidak memotong talinya, dia malah mengiris bagian lengan dekat sikunya dengan pisau dan menaruh sejenis obat pada lukanya itu. TR merasa pusing dan pingsan. Bekas luka itu masih ada sampai sekarang.

Ketika dia siuman, penutup matanya sudah dilepas. Dia melihat orang lain di sekelilingnya yang mati atau terluka karena siksaan. Dia masih ingat jumlah orang di sekelilingnya, 8 perempuan dan 12 laki-laki. Ruang tempat mereka berada itu gelap tapi dia bisa melihat mayat ditumpuk. Dia merasa seperti sedang duduk di atas air tapi ternyata darah. Dia melihat seseorang yang dia kenal dengan bayonet di dadanya. Dia melihat seorang perempuan dengan payudara yang dimutilasi dan laki-laki yang masih hidup berdiri di sekelilingnya dalam keadaan telanjang. Tentara mengetahui bahwa TR sudah siuman dan melihat situasi di sekitarnya. Lalu tentara itu berbicara tentang keinginan untuk membunuhnya dan memperkosa dirinya.

"Saya rasa takut, saya pikir dalam hati, 'Aduh Tuhan! Selamat kitong supaya nyawa ini kitong bisa kasih tahu bahwa mereka dibunuh daripada tidak ada orang yang kasih tahu.'"

Para tentara menyalakan lilin dan menyiksa para tahanan. Tangan dan kaki mereka diikat sehingga mereka tidak bisa bergerak. Selama waktu itu TR ingat bahwa dia merasa seperti dia ingin mati. Tentara mengatakan, “Buka matamu dan lihat teman-teman kamu sudah mati, sebentar lagi kamu akan mati juga.”

TR mendengar banyak suara langkah kaki, barang yang dikemas dan kendaraan yang berjalan menjauh. Kemudian seorang tentara datang

kepada para tahanan, memberi air dan menyuruh mereka pergi. Para tahanan lalu pergi, sementara TR bersembunyi di hutan. Dihinggapi rasa takut, TR memutuskan untuk tidak pulang saat itu. Dia tinggal di dalam hutan selama hampir tiga bulan, dan baru kembali ke rumah pada bulan September 1998. TR diberitahu untuk melapor ke kantor polisi. Saat melapor polisi menginterogasi TR namun tidak sampai ditahan karena kondisi fisik TR yang buruk.

Masalah fisik TR berkepanjangan dan harus mendapat perawatan medis, termasuk fisioterapi sampai sekarang. TR pun masih dilanda rasa marah dan benci setiap kali melihat polisi atau tentara. “Jadi rasa takut itu sudah berubah ke rasa marah dan benci.” Kekerasan yang dialaminya juga mempengaruhi hubungannya dengan suaminya. TR mendapat stigma dan kekerasan dari suaminya, bahkan sempat terluka karena dipukuli dan mendapat enam jahitan.

> *"Dia sudah tidak suka dengan saya karena menurut orang Biak itu, hal-hal ini sudah buat suami sudah tidak punya harga diri, dan bikin malu keluarga. Dia pergi dengan perempuan lain, suka pukul saya. Tapi saya berusaha untuk keluar dari penderitaan yang saya alami."*

TR kemudian melarikan diri ke Jayapura dan ditampung oleh teman-temannya yang juga aktivis perempuan.

Saat ini TR mulai berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan korban yang didukung oleh LSM dan gereja. Pertemuan-pertemuan tersebut menyadarkan TR bahwa dia tidak sendirian dan ada banyak pihak yang mengupayakan keadilan bagi korban. Namun begitu, rasa takut dan malu untuk bercerita masih ada di benak TR.

> *"Harapan saya, pengalaman ini jangan terulang lagi terhadap perempuan secara umum dan perempuan di Papua khususnya. Sudah cukup kami dilahirkan untuk disembelih dan dibunuh seperti binatang. Kandungan kami tidak mampu untuk melahirkan anak yang akan terus dibunuh dan dibantai seperti binatang."*

IRENE SROYER:
ADIK YANG MASIH HILANG

Irene berdiri di depan pelabuhan laut tempat adik laki-lakinya ditahan polisi pada tahun 1997 dan hilang sejak saat itu hingga sekarang.

Irene juga hadir dalam peristiwa pengibaran Bintang Kejora di Biak. Dia ingat dengan jelas kekerasan yang terjadi ketika pasukan gabungan militer dan polisi tiba, menurunkan bendera Bintang Kejora dan kemudian membubarkan para demonstran.

Hingga sekarang, 15 tahun setelah kejadian tersebut, Irene masih tidak tahu nasib dan keberadaan adiknya Yuslin Sroyer, yang masih hilang.

> *"Banyak orang yang hilang, kami yang lainnya diseret ditahan di pelabuhan laut, jumlahnya 97 orang. Dijemur panas, kena hujan, kemudian kami disuruh foto seluruh badan, samping kiri kanan, dan cap jempol. Saya tidak tahu untuk jadi dokumen apa. Yang laki-laki itu dipukul, disuruh menghadap ke atas dan diinjak di perut, semua*

Angkatan datang. Mereka injak dari ujung sampe di ujung dengan sepatu tentara. Setelah jam 3 sore kami yang perempuan disuruh pulang, yang laki-laki dibawa ke tahanan di polisi ...Saya punya saudara laki-laki sampai sekarang tidak ketemu, [mungkin mereka] sudah mati!"

Walau masih dihantui trauma masa lalu, Irene melihat dirinya telah mendapat kekuatan besar untuk pulih dari anak-anaknya. Mereka adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya yang sanggup mendorong Irene untuk melalui penderitaan yang dia hadapi. Namun, Irene sadar bahwa melanjutkan kehidupan bukan berarti melupakan apa yang pernah terjadi. Dia percaya bahwa peristiwa kekerasan di Biak tersebut harus terus diperingati dan yang lebih penting, diakui oleh negara sebagai suatu kesalahan.

"Menurut saya penting untuk kita mengingat Peristiwa Biak Berdarah, karena peristiwa itu saya anggap sebagai sebuah perjuangan untuk menempuh kesejahteraan bangsa kami ... Pemerintah harus meminta maaf dan mengakui kesalahan yang mereka buat. Saya akan merasa puas jika orang-orang ini dihukum."

Irene berdiri di depan tower air yang merupakantempat terjadinya Peristiwa Biak Berdarah pada tahun 1997.

Saat ini, Irene beserta keluarganya hidup dengan berkebun dan berternak babi. Sampai saat ini dia masih teringat akan adiknya dan menyimpan baju milik adiknya. “Dia hilang, mungkin juga sudah meninggal. Jadi, kalau saya lihat baju ini mengingatkansaya kepada saudara saya.”

MARIONES YARONA: EMPAT TAHUN DIPENJARA

Pada tanggal 3 Agustus 1980, Mariones dan teman-temannya berkumpul di tiang bendera Kantor Gubernur Papua untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora. Tidak lama kemudian, polisi datang menurunkan bendera dan membawa Mariones dan kawan-kawannya yang berjumlah lima orang ke kantor polisi di Jayapura. Mereka ditahan dan diinterogasi selama satu malam. Mariones mendengar seorang polisi mengancam pemimpin kelompok mereka dengan parang di lehernya.

Hari berikutnya mereka pindah ke markas Kodam. Mariones dan temannya ditahan di sana selama sembilan bulan dalam kondisi yang tidak layak. Mereka ditahan di ruang sempit tanpa ada lampu atau alas tidur. Selama penahanan, Mariones menderita sakit karena tidak mendapat sinar matahari dan harus dirawat di Rumah Sakit Aryoko.

Setelah sembilan bulan Mariones dipindahkan ke sel tahanan di Markas Polisi Militer (POM) di Klofkamp dan ditahan selama satu tahun kemudian diadili dan dihukum. Dua orang dari kelompoknya mendapat hukuman ringan dan dibebaskan. Mariones dan dua lainnya mendapat

empat tahun penjara. Karena dia sudah ditahan selama dua tahun Mariones akhirnya dibebaskan pada tahun 1984. Dia masih ingat saat ia ditahan dan penderitaan yang dialaminya. “Waktu Mama di tahanan itu, cukup lama Mama ditahan. Tapi, tidak bikin apa-apa. Tapi, penderitaan di dalam tahanan, itu bisa Mama rasakan.”

Penderitaannya tidak berakhir dengan pembebasannya. Ketika dia kembali ke kampungnya dia tidak diperlakukan dengan baik oleh masyarakat. Dia selalu dicurigai dan dihina kemana pun dia pergi. “Orang-orang sinis dengan saya karena mereka pikir saya terlibat dalam politik.”

Mariones juga menderita secara ekonomi karena selama empat tahun dia ditahan, kebunnya terbengkalai dan rusak. Setelah dibebaskan, dia mulai merawat kebunnya kembali dan menjual hasilnya di pasar Jayapura.

Mariones merasa bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora adalah haknya sebagai orang Papua dan apa yang terjadi padanya adalah suatu ketidakadilan.

> *"Sebab apa yang mama lakukan itu hak kami orang Papua. Tapi, kenapa kami dilarang oleh Indonesia? Kenapa pemerintah Indonesia tutup-tutupi kebenaran mengenai kami bangsa Papua?"*

Mariones berharap bahwa di masa depan, apa yang dia perjuangkan akan meletakkan dasar untuk kebaikan bagi generasi mendatang. Dia bersyukur bahwa orang ingin tahu apa yang terjadi padanya dan mencari tahu mengenai pengalamannya secara langsung. “Apa yang Mama perjuangkan ini bukan untuk Mama sendiri tapi untuk Papua, orang bisa tahu apa yang terjadi.”

Mariones meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Juni 2015, di Sentani, Papua.

Kotak memori Mariones.

Pelarian dan Pengucilan:

MARTHA ADADIKAM: STIGMA DAN DISKRIMINASI YANG BERLANJUT

Martha menunjukkan lokasi di mana ayahnya dikubur.

Martha dari Biak menceritakan kisah ayahnya yang ditembak mati oleh militer Indonesia pada tahun 1970. Tubuh ayahnya dimutilasi dan dikubur bersama-sama dengan tiga laki-laki lainnya di Kampung Sarwa. Dia waktu itu berusia 19 tahun.

Pada saat militer mengejar ayahnya, rumah Martha digeledah dan dibakar sehingga Martha dan keluarganya kehilangan harta, mulai dari pakaian, perhiasan, piring porselen dan barang-barang berharga lainnya. Mereka secara mendadak menjadi miskin. Pada saat itu Martha bersama tiga sepupu dan ayahnya lari ke hutan dan terpaksa tinggal di sebuah gua sampai situasi cukup tenang untuk kembali.

> *"Waktu itu kami mengungsi hidup di hutan di Gua, kami makan sagu yang kami tanam di hutan. Kami bawa dan tokok sagu, masak dan kami makan."*

Setelah ayahnya mati, kehidupan Martha dan keluarga cukup sulit. Kematian ayahnya membuat Martha dituduh berafiliasi dengan OPM. Hal ini membuat Martha tidak bebas untuk bergerak. Martha terpaksa putus sekolah dan membuang harapan dan impiannya. Dia pernah mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan guna membantu kehidupan rumah tangganya, tetapi tidak diterima karena dikenal sebagai anak anggota OPM.

> *"Kami mau lanjut sekolah, pergi ke sekolah, ditolak karena orangtua sudah masuk OPM. Jadi, anak-anak sudah dicap anak OPM. Kerja juga tidak bisa itu dimatikan terus."*

Pada tahun 1980 situasi di kampung mereka cukup aman untuk membangun kembali kebun mereka dan menjual hasilnya.

Martha mendapatkan kekuatan dari imannya kepada Tuhan.

> *"Sumber kekuatan kami itu kami berdoa saja pada Tuhan. Tuhan yang jadi payung bagi hidup kami selama ini ... Dia yang jalan di depan dan tutup pintu di belakang, itu harapan saya."*

Martha berdiri di depan rumahnya.

MARTINA WORKRAR: LARI DAN HIDUP DI GUA

Martina Workrar ingat ketika dia duduk di kelas tiga Sekolah Dasar, militer Indonesia menghancurkan dan membakar kampungnya, Roidifu.

> *"Selain mereka bakar rumah, mereka juga menghancurkan harta benda kami, termasuk piring-piring mas kawin ini. Kalau lihat piring ini saya ingat saya punya orangtua. Saya sudah tidak pergi lihat dia punya tempat lagi."*

Pada saat peristiwa orang-orang melarikan diri ke hutan. Ayah Martina menyembunyikan keluarganya di sebuah gua kemudian kembali untuk memeriksa kampung. Kampung itu telah benar-benar hancur. Keluarganya tinggal di gua selama enam bulan. Ayah dan kakak laki-lakinya akhirnya dibunuh oleh TNI. Tubuh mereka tidak dikuburkan dan sampai sekarang mereka tidak tahu di mana sisa-sisa dari tubuh saudaranya itu berada.

> *"Mereka punya mayat tidak dikubur dibiarkan saja sampai sekarang. Tidak tahu tulang-tulangnya masih ada atau tidak, setelah penembakan itu saya dengan Mama juga adik tinggal di hutan saja tidak keluar selama satu bulan."*

Setelah kematian mereka, Martina dan Ibunya dan saudaranya tetap bersembunyi di gua selama satu bulan lagi. Martina menikah pada tahun 1973 dan punya anak setahun kemudian. Anaknya tidak dapat bertahan hidup karena kondisi yang sulit di hutan. Martina dan suaminya keluar dari hutan pada tahun 1980. Setelah keluar dari hutan mereka menuju ke Kampung Dwar, kemudian pindah ke kampung Sosmai. Di sana dia mengalami beberapa perlakuan buruk dari warga kampung karena dianggap terlibat dalam politik.

> *"Saya keluar dari hutan pada tahun 1980 dengan baik-baik, tapi saat ini saya tinggal di kampung ini dengan kata tidak baik dari orang lain."*

Martha berdiri di depan rumahnya.

Untuk masa depan, Martina berharap untuk membuka warung untuk dapat mendukung anak-anaknya masih di sekolah, tapi dia tidak punya modal.

ESTEFINA WONAR: LOLOS DARI PELURU TAPI KEHILANGAN SEMUANYA

Estefina Wonar di depan rumahnya.

Pada Maret 1968, Estefina berumur 13 tahun. Saat itu desanya hancur karena menjadi sasaran operasi militer TNI. Rumah penduduk dan sekolah dibakar dan binatang ternak dibunuh. Tentara mengambil alih gereja dan menggunakannya sebagai pos mereka.

> *"Pada tahun 1968 tentara masuk serang Kampung Wari, kami melarikan diri. Kami ditembak. Untuk menghindar peluru, saya terjatuh yang mengakibatkan luka sobek di tangan, sampai sekarang masih ada tandanya."*

Estefina ikut bersama ibunya melarikan diri ke hutan dan terus berpindah untuk menghindari kejaran tentara. Saat mereka berada di wilayah Wardum, Sungai Simarsdo pada 30 Juli 1969, tentara menemukan mereka. Tentara secara brutal memukul dan menembaki penduduk. Estefina berhasil sembunyi, namun dia harus menyaksikan kekerasan yang dialami oleh penduduk.

> *"Saat itu kami semua loncat dan lari masing masing cari jalan. Saya lari terus sembunyi dan melihat dengan mata, nona Beatriks yang ditembak tapi tidak mati lalu dia diperkosa sesudah itu dipukul sampai mati, termasuk Bapak Amos juga ditembak di kaki, masih hidup. Tapi, dia dipotong dengan parang di kepala sehingga mati. Jadi saat itu tiga orang yang ditembak mati."*

Dalam pelarian, saat itu ia berusia 15 tahun, Estefina kemudian menikah dan melahirkan seorang putri tiga tahun kemudian. Namun putrinya meninggal saat berumur 4 tahun. Dia pulang ke desa Wari pada tahun 1975. Namun pada 1980, militer Indonesia membom wilayah di dekat desanya yang membuat 3 orang meninggal dan 4 orang terluka.

Estefina bersama suami dan cucunya.

SARA AWENDU: PELURU MASIH BERSARANG DI TUBUHNYA

Sara lahir pada tahun 1952 di Desa Wouna, Biak Utara. Ketika ia berusia 16 tahun, Desa Wouna diserang oleh militer Indonesia yang menghancurkan semua rumah dan fasilitas umum. Aparat militer juga membunuh dan memperkosa warga desa. Orang-orang melarikan diri ke hutan untuk mencari selamat. Sara ingat bahwa dia harus berlari jauh ke dalam hutan untuk menghindari pengejaran aparat militer.

> *"Namun, pada saat kami tinggal di hutan kami mendengar informasi kalau tentara mau datang menyerang lagi. Akhirnya kami pindah lagi lebih jau ke dalam hutan."*

Sara dan keluarganya, bersama dengan warga dari desa-desa lain tinggal di hutan selama dua tahun hingga 1970. Pada saat desa mereka ditinggalkan, banyak pendatang yang menempati desa mereka dan membangun rumah di sana. Sehingga ketika warga desa keluar dari hutan pada tahun 1971, mereka terpaksa membangun rumah di lokasi yang baru. Tidak lama setelah itu Sara menikah dan melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat.

Tragisnya, pada tahun yang sama, militer Indonesia memasuki desa tempat tinggal Sara dan kembali menghancurkan rumah-rumah dan menembaki warga. Suami dan putrinya mati tertembak. Sara juga tertembak, namun dia berhasil melarikan diri ke hutan. Dia bertahan di dalam hutan sampai tahun 1972, ketika ada anggota keluarga yang datang untuk mencari dan membawanya ke tempat yang aman di desa Sor. Sampai saat ini peluru itu masih ada di dalam tubuh Sara, dan menjadi pengingat akan kepedihan yang dia alami.

Keluarga dan bantuan gereja Sara untuk menangani masa lalunya yang berat. Dia berkebun dan menjualnya menghasilkan untuk mendukung keluarganya.

Sara sedang berjualan pinang hasil kebunnya.

WELMINA RUMBRAWER-KARMA: PENGUCILAN DAN STIGMA

Welmina berdiri di depan rumahnya.

Suami Welmina Rumbrawer-Karma bergabung dengan OPM setelah mereka mulai mendeklarasikan diri di Biak Utara pada tahun 1967. Welmina melarikan diri ke hutan pada tahun 1968 untuk menghindari konflik dan tetap tinggal di hutan sampai tahun 1980. Selama di hutan dia hidup berpindah-pindah untuk menghindari serangan militer. Dia memiliki lima anak saat berada di hutan.

Pada tahun 1979 dia sedang berjalan dengan anak perempuannya yang berusia sembilan tahun ke sebuah desa pantai untuk mendapatkan informasi tentang gerakan militer ketika mereka ditembaki oleh TNI yang bersembunyi di sepanjang pinggir jalan. Anaknya terkena tembakan sehingga dia menggendongnya dan lari tapi dia kemudian meninggal. Welmina meninggalkan tubuhnya dan penduduk desa setempat menguburkannya.

"Tentara langsung tembak kena anak perempuan [saya] yang berdiri di depan saya. Saya gendong anak kecil, saya lari jauh. Tentara tembak saya juga, tapi pakaian yang putus, saya tidak mati ... Anak perempuan kena di punggung [dan meninggal dunia], dong [saya] buang di kebun... Orang pantai yang kubur dia."

Pada tahun 1980 ketika telah aman, dia dan suaminya kembali ke tempat itu untuk menggali tulang dan membawanya kembali ke desa mereka. Welmina bersikeras tidak mengubur tulangnya tetapi menyimpannya di kamarnya. Gereja setempat dan anggota keluarga lainnya terus meminta agar belulang anak Welmina dikubur. Welmina kemudian menempatkan tulang-tulang tersebut di dalam mangkuk porselen dan disimpan di gua di atas bukit kecil di belakang rumahnya. Lokasinya dekat dengan mata air yang mengalir. Welmina dan keluarganya masih berkomunikasi dengan roh putrinya ketika mereka datang untuk membersihkan daerah tersebut. Dengan cara ini, Welmina mampu menunjukkan cintanya pada putrinya dan dapat mengatasi kehilangan dan kesedihannya.

Suami Welmina di dalam gua tempat mereka menyimpan tulang belulang putrinya yang meninggal karena itembak tentara.

Pada akhir tahun 1980, suami Welmina dan kelompoknya keluar dari hutan dan menyerah kepada militer Indonesia. Suaminya pergi ke Merauke pada tahun 1990 karena lelah dikejar-kejar oleh militer. Selama 23 tahun sejak suaminya pergi, Welmina harus menghidupi keluarga sendirian. Mereka makan dari hasil kebun dan Welmina juga mendapatkan sedikit uang dari hasuil menjual kerajinan dari kerang. Dia terus bekerja sampai semua anak-anaknya lulus dari SMA. Ketika suaminya kembali pada tahun 2013 dalam keadaan sakit dan kondisi fisik yang buruk.

Selama berada di desa, Welmina juga mendapat kesulitan dalam kehidupan bersama masyarakat. Dia tidak bisa mengikuti kegiatan sosial di desa karena dia dicap OPM atau pemberontak. Dia berpikir ini adalah alasan mengapa mereka tidak menerima bantuan dari program pemerintah di desanya. Keluarganya juga terus dipantau oleh TNI dan POLRI. “Tidak ada orang yang bantu saya, orang takut sebab tong [kami] OPM.”

Stigma ini juga harus diterima oleh anak-anaknya. Anaknya lulus dari universitas di Jayapura dan mengikuti ujian pegawai negeri tetapi tidak pernah lolos seleksi.

> *"Anak-anak sulit sekolah. Anak-anak susah cari kerja. Sa [saya] pu [punya] anak menangis tuntut saya mungkin karena Mama [karena terlibat OPM] sa susah tes di banyak tempat. Sa pu anak ini laki-laki lulusan dari Jayapura, dia sarjana ... tapi sudah tes pegawai dan sudah dapat nama, tapi belum dapat SK [surat keputusan PNS] dia sudah meninggal."*

Aceh: Jalan Panjang Mencapai Rumah Keadilan

8

Aktivitas warga Banda Aceh yang sedang mencari kerang di sore hari.

Konflik panjang di Aceh berakar dari berbagai persoalan kompleks terkait identitas dan sejarah rakyat Aceh sebagai bagian dari Indonesia. Persoalan tersebut bertumpang tindih dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang kemudian mendorong munculnya ketidakpuasan dan rasa saling curiga. Identitas keislaman Aceh yang juga lekat dengan budaya perlawanan turut menyuburkan letupan konflik saat rejim Soeharto melaksanakan kebijakannya dengan kekerasan. Tak beda dengan beberapa daerah lainnya, kekayaan alam Aceh berubah menjadi kutukan bagi rakyat Aceh ketika pemerintahan pusat membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan para elit politik di Jakarta. Penemuan gas alam pada 1970an di Arun, Aceh Utara, dilanjutkan dengan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Mobil Oil, membangkitkan ketidakpuasan yang pada gilirannya menjadi pintu masuk bagi militer untuk datang ke Aceh dengan dalih perlindungan "industri strategis". Hingga kemudian pada tahun 1976, GAM mendeklarasikan diri untuk lepas dari Indonesia.

Pendirian GAM ditanggapi oleh militer Indonesia dengan melancarkan operasi militer bernama Jaring Merah yang menandai diberlakukannya DOM di Aceh. Operasi ini berakhir pada tahun 1989. Dalam periode ini, ribuan nyawa warga sipil hilang. Pasukan keamanan Indonesia juga melakukan berbagai tindakan penahanan, penyiksaan, penculikan, dan pemindahan warga secara paksa. Tidak hanya itu, warga sipil juga harus kehilangan harta benda, sumber penghidupan dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak. Dalam skala yang lebih kecil, anggota GAM juga melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang datang dari luar Aceh atau orang yang mereka anggap informan.

Tahun 1998, tidak lama setelah jatuhnya rejim Orde Baru, Presiden Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) yang bertugas untuk mengungkapkan tindak kekerasan yang telah terjadi di Aceh.[58] Dalam laporannya, Komisi tersebut menyimpulkan bahwa,

> *"Tindak kekerasan yang dilakukan oleh militer merupakan suatu jenis kekerasan Negara (state violence). Artinya, kekerasan yang terjadi dipersepsikan secara kuat oleh masyarakat sebagai "dipelihara" oleh Negara dalam rangka mengamankan proses eksplorasi kekayaan alam dari Aceh untuk kepentingan pusat, kepentingan elite pusat, maupun lokal."*[59]

Namun, temuan dan rekomendasi KPTKA tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pada tahun 2001, pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus bagi Aceh dengan harapan akan mendorong terjadinya perdamaian. Namun, situasi justru memburuk dan mencapai puncaknya ketika pada tahun 2003 pemerintah Megawati menyatakan status Darurat Militer di Aceh. Status ini secara drastis meningkatkan jumlah pasukan dan operasi militer di Aceh. Berbagai organisasi HAM melaporkan bahwa ribuan warga sipil menjadi korban pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan.[60]

Bencana tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi momentum kunci yang berhasil mendorong kedua pihak yang bertikai untuk melakukan negosiasi perdamaian. Pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya menyepakati perdamaian dan menghentikan konflik bersenjata dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki kemudian dituangkan menjadi UU Pemerintahan Aceh pada 2006, dan mencantumkan beberapa kesepakatan penting tentang penyelesaian kekerasan pada masa konflik termasuk membentuk pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Aceh.

Kesepakatan ini melengkapi berbagai terobosan lainnya, termasuk pembebasan dan pemberian amnesti kepada tahanan atau narapidana politik, penarikan pasukan militer dan demobilisasi kombatan GAM. Kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan reformasi sistem pemerintahan dan pemilihan umum di Aceh agar lebih mencerminkan kedaulatan rakyat Aceh.

Namun ternyata proses perdamaian ini belum membawa perubahan yang signifikan terhadap para korban, terutama perempuan dan perempuan mantan kombatan. Perempuan korban konflik, terutama yang mengalami kekerasan seksual, masih hidup dalam stigma dan diskriminasi, serta tidak tersentuh dalam berbagai program bantuan. Mereka tidak diakui secara formal sebagai penerima dana reintegrasi. Padahal para perempuan ini harus menjadi tulang punggung keluarga ketika sumber ekonomi mereka telah terampas dan kondisi kesehatan yang semakin ringkih.

Para perempuan tersebut berada dalam ketiadaan kepastian akan keadilan, kebenaran dan pemulihan atas dampak fisik dan psikis yang mereka terima. Mereka masih dihantui oleh kenangan dan pengalaman penistaan kemanusiaan yang mereka alami. Bagi banyak perempuan korban, peristiwa yang pahit di masa lalu itu tidak sekedar menorehkan luka tapi juga mengubah hidup dan masa depan mereka, termasuk anak-anak mereka.

Kekerasan dan Perjuangan yang Berlanjut bagi Perempuan Alue Rambe

SAUDAH: SUAMI YANG MENJADI KASAR

Selama kurun 1995 sampai 2005, Saudah bersama suaminya berulangkali ditangkap, diinterogasi dan disiksa oleh aparat militer. Mereka tinggal di desa Alue Rambe, Kecamatan Buloh Blang Ara, Kabupaten Aceh Utara. TNI memang menganggap Alue Rambe sebagai basis GAM sehingga sering menjadi sasaran operasi militer.

Pada tahun 1992, Saudah dan suaminya sempat mengungsi ke desa lain karena rumah mereka dirusak sepasukan tentara ketika menyerbu desa Alue Rambe. Mereka baru pulang 3 tahun kemudian. Namun, tidak lama

setelah itu suami Sudah ditangkap aparat militer saat berada di ladang. Suami Saudah dibawa ke Kantor SGI (Satuan Gabungan Intelijen) di Buloh Blang Ara. Saudah kemudian datang menyusul suaminya ke SGI, namun di sana Saudah justru mendapat kekerasan. Setelah peristiwa tersebut, Saudah dan suaminya beberapa kali dibawa ke markas Koramil dan mengalami penyiksaan.

> *"Saya mengalami kekerasan ketika suami saya mereka ambil dan membawa ke koramil, saya ikuti suami saya sampai di koramil dan di sana kami di siksa, saya di dudukkan di kursi dengan di ikat tangan ke belakang dan di todong senjata, dan saya dikontak listrik di kaki saya."*

Ketika mereka mencoba untuk kembali hidup normal, Aceh memasuki status Darurat Militer dan membuat mereka lebih sering didatangi oleh aparat militer. Mereka kembali harus menjalani interogasi, penahanan dan penyiksaan.

> *"Saya dipaksa untuk mengakui suami saya sebagai GAM, dan tentara itu mengatakan akan memberikan uang Rp. 500.000 jika saya mengakui suami saya GAM. Saya disiksa karena tidak mau mengakuinya."*

Walau Aceh telah memasuki masa damai sejak 2005, Saudah masih terus berjuang menghadapi kekerasan dalam bentuk lain. Suaminya mengalami trauma berat akibat siksaan yang dia alami. Dia berubah menjadi suami yang sangat kasar terhadap Saudah, bahkan seringkali tiba-tiba menjadi marah dan memukuli Saudah. Beberapa kali Saudah terpaksa lari dari rumah dan tinggal di ladang agar terhindar dari kekerasan suaminya. Namun Saudah memilih untuk tetap melanjutkan kehidupan bersama suaminya. Dia percaya bahwa perilaku suaminya adalah dampak dari pengalaman mengerikan karena penyiksaan yang dilakukan oleh TNI.

"Suami saya dulu sering disiksa diteteskan plastik ke kulit, dipukul dengan senjata. Sampai sekarang suami sering marah-marah tidak menentu. Saya juga sering dipukulnya. Setelah marah dan memukul saya barulah dia sadar. Mungkin ini adalah dampak dari penyiksaan, pemukulan yang dilakukan pada suami saya saat konflik dulu."

Saudah, saat ini berusia 57 tahun, tinggal bersama suami dan seorang cucu perempuan di sebuah rumah kecil dari kayu berlantai tanah. Sejak suaminya mengalami gangguan emosi dan fisik, Saudah menjadi tulang punggung keluarga. Tanggung jawab Saudah semakin berat karena kondisi fisik Saudah sendiri tidaklah baik akibat kekerasan yang dialaminya. Dia pun masih memendam luka di hatinya.

Saudah sedang bekerja mengupas pinang bersama suaminya di depan rumah anak mereka.

"Saya masih sering teringat kejadian lalu, setiap saya berbaring, mau tutup mata, selalu terbayang kejadiannya, bagaimana saat dipukul, mau ditembak. Hati saya masih sakit ... Saya perlu mengobati kondisi kesehatan saya karena saya menderita sakit sejak saat itu. Dua kali sehari saya harus minum susu dan minum obat untuk mengurangi rasa sakit. Saya tidak pernah menerima bantuan dari siapa pun."

Ketika ditanya tentang harapannya untuk masa depan, Ibu Saudah mengatakan dia berharap agar lebih banyak orang belajar dari kekerasan di Aceh sehingga hal serupa tidak akan terulang lagi.

> *"Kalau ada lebih banyak orang tahu, pasti ada pelajaran untuk ke depan, ribut-ribut itu bikin susah, bikin menderita orang yang tidak tahu apa-apa tentang politik … Saya berharap agar hal-hal ini tidak terulang lagi, saya telah mengalami bagaimana TNI memperlakukan saya, suami dengan kejam, seharusnya anak saya Suryadi dan anak-anak lainnya tidak akan pernah mengalaminya."*

MAIMUNAH: KHAWATIR ATAS KONDISI ANAK-ANAK

Maimunah adalah warga Alue Rambe lainnya yang juga harus menderita akibat konflik. Saat ini, Maimunah hidup menjanda bersama empat orang anaknya. Ayah, suami dan dua adik laki-laki Maimunah ditangkap oleh TNI pada tahun 1990. Ayah dan kedua adiknya tidak pernah diketahui nasibnya, sementara suaminya pulang ke rumah dalam kondisi yang buruk setelah dipenjara selama 2 tahun di Tanjung Gusta, Medan. Suaminya meninggal tidak lama kemudian.

Pada saat itu, ketika aparat militer bermaksud menangkap suami Maimunah, suaminya lari ke hutan. Mereka menangkap Maimunah yang sedang bekerja di ladang. Maimunah yang sedang hamil tua, dibawa ke Kantor Polsek Buloh Blang Ara bersama anaknya yang berusia dua tahun.

> *"Setiba di kantor polsek, saya dipertemukan dengan orang yang mereka tembak yang tak jauh dari kebun saya tadi siang. Saya disuruh mengakui laki-laki itu sebagai suami saya, tapi saya tetap mengatakan itu bukan suami saya. Laki-laki itu sedang disiksa dengan disiram air terus menerus ke tubuhnya dalam kondisi jongkok."*

Kemudian Maimunah dibawa ke Koramil untuk diinterogasi. Dia disiksa dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan suaminya. Dia juga dipaksa untuk mengakui bahwa ayahnya adalah komandan GAM. Dalam kondisi hamil tua, dia didudukan di kursi dengan tangan dan kaki terikat, ditodong pistol dan dipukuli.

> *"Saya disiksa pada jam 8 malam, dengan dimasukkan pistol ke telinga kiri dan kanan, dan di tengkuk juga. Diancam akan di tembak, didudukkan di kursi dan tangan diikat ke belakang dan kaki diikat. Punggung dipukul dengan gagang senjata dan ditumbuk dengan tangan. Mereka mengatakan agar jangan ada lagi lahir anak GPK karena waktu itu saya hamil 8 bulan. Saya disiksa selama 1 jam."*

Penyiksaan baru berhenti ketika ada anggota polisi yang mengenalinya dan meminta tentara menghentikan interogasi. Dia dan putrinya yang berusia dua tahun kemudian ditahan bersama 20 perempuan lainnya. Selama dalam tahanan dia diperlakukan dengan baik, mendapat alas tidur dan lampu, serta mendapat pemeriksaan kesehatan secara teratur dari paramedis Koramil.

> *"Selama di tahanan saya ada dikasi makan nasi bungkus sehari satu kali, untuk malam mereka memberi kami roti ATB. Makanan ini harus saya bagi dengan anak perempuan saya. Untungnya Pak Polisi yang kenal dengan ayah saya sering membawakan makanan untuk anak perempuan saya."*

Dia dan putrinya dibebaskan ketika suami Maimunah menyerahkan diri karena mendengar Mauminah mendapat siksaan. Maimunah melahirkan 15 hari kemudian di rumahnya. Dua tahun kemudian suaminya kembali dalam keadaan yang menyedihkan; tidak bisa berjalan, kurus dan sangat lemah. Setelah itu Maimunah harus merawat suaminya, ibunya yang sudah tua, dan tiga anak. Tanah milik keluarga akhirnya dijual untuk menutupi kebutuhan hidup.

Maimunah sedang memegang surat pembebasannya.

> *"Akhirnya saya harus berjuang sendiri untuk menjalani kehidupan, mengurus suami dan ibu yang sakit, menjaga dan merawat tiga anak, saya harus bisa membagi waktu antara mencari nafkah dengan merawat keluarga saya. Ketika akhirnya Ibu dan suami saya meninggal, saya merasa orang-orang terdekat saya habis, hanya tinggal saya dan anak-anak."*

Selain persoalan ekonomi, Maimunah cukup khawatir tentang keadaan psikologis anak-anaknya yang sejak kecil telah menyaksikan kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, dan hampir tidak mengenal ayah mereka.

> *Harapan saya agar anak-anak saya diperhatikan, anak yang putus sekolah agar ada biaya untuk dapat sekolah, anak-anak saya bisa melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan pekerjaan agar hidup lebih baik dan ada modal untuk usaha. karena selama ini tidak ada bantuan apapun dari Pemerintah untuk kami ... saya tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya saya harus sendirian membesarkan mereka, bukan sekedar ekonomi tapi banyak hal, saya dituntut lebih kuat dan lebih sabar.*

AINUN MARDIAH: MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL KARENA MELINDUNGI SUAMI

Ainun Mardiah lahir di Kuala Simpang pada tahun 1978, dan bersama orang tuanya pindah ke Alue Rambe sebagai transmigran lokal pada 1988. Menginjak 15 tahun, Ainun kemudian menikah dan menjalani kehidupannya dengan mengurus rumah, berladang, beternak kambing dan menjadi buruh.

Saat konflik di Aceh meningkat, suami Ainun pergi meninggalkan rumah dan bergabung dengan GAM. Tahun 2004, satu pasukan militer mendatangi Ainun untuk mencari informasi tentang suami Ainun. Rumah Ainun digeledah dan dihancurkan. Ainun lalu dibawa ke markas mereka di Simpang Limeng. Di sana Ainun diinterogasi dan disiksa selama hampir lima jam. Karena tidak puas dengan jawaban Ainun, tentara menaikkan Ainun ke atas mobil dengan mata tertutup dan tangan terikat. Ainun lalu diturunkan dan didudukkan di bawah pohon besar.

> *"Mereka mengatakan pada saya, ini malam Juma't dan saya akan ditembak dan dikuburkan dalam kuburan yang telah disiapkan. Lalu saya mendengar suara tembakan yang sangat keras dan sangat dekat dengan saya. Saya merasa mereka menembak saya lalu saya pingsan. Sesudah beberapa lama saya pingsan, saya di bangunkan, mereka suruh saya bangun tapi saya tidak sadar lalu mereka menyiram tubuh saya dengan air dan saya tersadar. Ketika saya sadar, saya melihat ada tumpukan batok kelapa dekat saya. Batok kelapa itulah yang mereka tembak rupanya."*

Kemudian dia dibawa kembali ke pos TNI, dan mengalami peristiwa yang sangat memalukan dan sulit diceritakan Ainun hingga kini. Sekitar 15 tentara, melakukan pelecehan dan kekerasan seksual kepadanya.

> *"Saya berkata kepada mereka, “Lebih baik kalian membunuh saya daripada memperkosa saya”. Lalu saya menjerit dan berteriak ke [komandan mereka] Pak Egi. Lalu Pak Egi datang dan mengatakan, “Alah kamu mau dikasih enak aja menjerit.” Lalu saya katakan, “Bapak orang berpendidikan tapi tidak punya harga diri, saya tidak punya pendidikan tapi saya punya harga diri.” Lalu komandan tentara itu memukul anak buahnya yang mengganggu saya. Sesudah komandan itu pergi, tentara yang kena pukul komandannya mendatangi saya dan mengancam akan membunuh saya jika mengadu lagi. Ada seorang TNI yang berkata, bagus kamu tidak diperkosa, kalau kamu diperkosa oleh satu orang, maka kami semua yang ada disini akan memperkosamu secara bergilir."*

Ainun lalu ditahan di markas SGI selama tiga hari. Di sana dia mendapat penyiksaan dan pelecehan kembali. Dia dibebaskan dan dipaksa untuk pindah ke Kuala Simpang. Dia pun diwajibkan untuk melapor secara teratur ke pos militer Simpang Limeng melalui telepon tentang semua aktivitasnya.

Setelah sempat berpindah-pindah, Ainun kembali Alue Rambe ketika Aceh memasuki masa damai. Saat pulang, dia menemukan rumah dan semua harta bendanya, termasuk ternak, telah hilang.

> *"Semua barang-barang saya hancur, saya harus memulai hidup dari nol, tapi itu tak menjadi masalah. Masalah yang selalu sulit terlupakan padahal ingin saya lupakan adalah peristiwa yang menghinakan harga diri saya ... Saya mendapat pukulan, tamparan, tendangan itu tak*

akan saya lupakan seumur hidup saya yang membuat mimpi-mimpi buruk saya yang selalu menghantui hidup saya."

Ainun berupaya menghilangkan traumanya dengan bekerja baik di kebun maupun dengan beternak kambing. Hal yang sering membuat Ainun marah dan sedih adalah terutama ketika suaminya bertanya apa yang terjadi di Pos TNI, apakah benar Ainun tidak jadi diperkosa.

"Hal yang yang membuatku bisa marah yaitu ketika sesekali suamiku mengajukan pertanyaan, "Apa betul kamu tidak sampai diperkosa oleh TNI-TNI itu ketika mereka menangkap dan menahanmu?" Pertanyaan ini membuat aku jengkel dan marah, lalu aku mengatakan ke suamiku, "Karena dirimulah aku mengalami semua itu, karena aku selalu merahasiakan keberadaanmu sebagai anggota GAM yang dicari-cari TNI." Kalau sudah begitu

dia akan diam dan kemudian aku tersadar, aku tak bisa begitu. Tapi setiap aku mengingat dan menceritakan kejadian itu, aku akan menangis."

Ainun sangat berharap akan datangnya keadilan. “Pelaku dituntut dan dihukum, bukan hanya meminta maaf.” Dia juga ingin adanya distribusi bantuan yang tersedia dan adil bagi korban konflik. “Tidak ada bantuan apapun yang pernah diterima, saya melihat banyak orang yang bukan korban justru yang menerima.”

Dihukum karena Bertanya atau Berkaitan dengan Keluarga Mereka

MUHARRAMAH: MENANTI KEPASTIAN NASIB KELUARGA YANG HILANG

Muharramah pertama kali bertemu dengan TNI, saat itu berusia 20 tahun, ketika kakak laki-lakinya ditangkap dan dibawa ke Koramil Grugok. Bersama dengan kakak iparnya, istri dari kakaknya, dia pergi ke Koramil untuk mengetahui nasib kakaknya. Namun dia justru mendapat pukulan, bahkan kakak iparnya tidak diperbolehkan pulang.

"Saat itu saya dengar suara abang saya yang minta tolong. Mungkin karena mendengar suara kami di luar. Saya tidak sabar dan ingin masuk ke ruangannya, tetapi saya langsung ditendang dan dipukul dengan senjata sampai terjatuh ... Akhirnya saya disuruh pulang oleh mereka, tetapi kakak ipar saya tidak boleh pulang."

Begitupun ketika dia datang keesokan harinya. Muharramah tidak diizinkan untuk melihat baik kakaknya maupun kakak ipar perempuannya.

> *"Ketika saya mendatangi kantor Koramil, saya tidak dikasih bertemu dengan abang dan kakak ipar saya, malah saya diancam, "Jika kamu juga GPK kamu tidak boleh hidup, kamu harus dieksekusi." Saat itu saya tidak mengerti apa arti eksekusi."*

Satu minggu kemudian dia mendapat kiriman paket yang berisi pakaian kakaknya yang berlumuran darah dan diperintahkan untuk melapor ke Koramil. Dia kemudian mendatangi Koramil sambil membawa pakaian tersebut.

> *"Lalu mereka menjawab, "Jangan tanya lagi orangnya karena saya sudah kirim bajunya ya ambil saja bajunya." Sejak saat itu abang dan kakak ipar saya tidak tahu lagi bagaimana kabarnya. Mereka tidak pernah pulang lagi."*

Suatu kali di tahun 2004, dia terperangkap dalam baku tembak antara GAM dan TNI. Anggota TNI memerintahkan dia untuk berbaring di tanah dan merangkak. Pada saat itu dia sedang hamil delapan bulan sehingga Muharramah mengatakan bahwa dia tidak bisa merangkak. Namun kondisi ini tidak dipedulikan oleh tentara.

> *"Mereka mengatakan, "Ibu tiarap aja, diam-diam saja". Tidak lama kemudian saya melahirkan, dan bidan yang membantu saya melahirkan melihat kaki anak saya sedikit cacat, dan dia mengatakan ini adalah cacat baru dan bukan cacat bawan lahir. Dengan pengobatan rutin akhirnya kaki anak saya sudah normal kembali. "*

Muharramah memegang baju yang dulu ia pakai sewaktu ia mengalami kekerasan dari tentara.

Muharramah lahir di Geureugok di Aceh Utara pada tahun 1966. Saat ini dia menghidupi empat anak dengan bekerja sebagai buruh mengupas buah pinang dan jengkol dengan upah lima ratus rupiah per kilogram. Muharramah berharap bahwa konflik tidak akan terjadi lagi, dan nasib kakak dan kakak iparnya dapat diketahui.

> *"Harapan saya agar kiranya konflik ini jangan terjadi lagi, dan kami bisa hidup tenang untuk mencari nafkah karena selama ini perhatian Pemerintah pada kami korban konflik sangat kurang ... Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan abang dan kakak ipar saya, bukan hanya untuk menerima kembali pakaian berlumuran darah."*

MARIANI: DISIKSA UNTUK MENUNJUKKAN KEBERADAAN KAKAK

Kekerasan dari militer dialami Mariani juga pada saat ia berusia 20 tahun. Saat itu rumahnya didatangi TNI untuk mencari kakak laki-lakinya karena dicurigai sebagai anggota GAM. Ketika anggota militer itu tidak bisa menemukan kakaknya, mereka bertanya kepada Mariani sambil menampar dan menyeret Mariani ke dapur, juga menendang perutnya.

> *"Saya ketakutan dan menarik Ibu saya, takut mereka akan menembak ibu saya. Lalu saya mengatakan, “Ini tidak benar, abang saya bukan anggota GAM.” Perkataan saya membuat mereka semakin marah, lalu mereka menedang dan menampar saya lagi. Di saat itu ibu saya takut saya dipukul lagi beliau mengatakan, “Anak saya sudah pergi ke Pusong Lhokseumawe.” Para TNI itu semakin marah dan menganggap saya berbohong dengan mengatakaan tidak tahu abang saya perginya ke mana. Lalu hanya dengan memakai baju tidur saya digiring mereka ke luar rumah, berjalan kaki dari rumah sampai ke Simpang Cot Sabong, kira-kira ada 800 meter. Saya digiring seperti penjahat saja."*

Mereka membawa Mariani ke Pusong Lhokseumawe. Di Pusong, mereka membawa Mariani ke rumah pamannya, namun tidak menemukan kakak Mariani. Dia kemudian dibawa ke pos militer. Mereka menyiksa dan mengancam akan memperkosa. Interogasi baru berhenti ketika kepala desa Blang Poroh tiba dan mengatakan bahwa perempuan yang dicari-cari aparat militer bukanlah Mariani.

Saat ini Mariani berdagang pisang goreng dan mencuci pakaian untuk menutupi biaya hidup keluarga. Mariani berharap bahwa konflik di Aceh tidak akan terulang dan Aceh bisa damai selamanya. Dia merasa dia belum menerima keadilan dan tidak tahu kepada siapa dia harus menuntut hal itu.

Mariani di reruntuhan bekas pos militer tempat ia dibawa tentara dulu.

Mariani bersama putrinya.

LISA FITRIANA: DIPUKUL KARENA BERTANYA

Lisa Fitriana lahir di Blang Poroh, Lhokseumawe pada tahun 1990. Dia belum menikah dan sedang melanjutkan sekolahnya di perguruan tinggi. Fitriana juga menjadi guru taman kanak-kanak sambil membuat dan menjual kue untuk membantu keluarga. Sejak kecil, Fitriana bersama ibu dan saudaranya mengalami kekerasan dari ayahnya. Fitriana menganggap kekerasan tersebut dilakukan ayahnya karena tertekan menghadapi kondisi yang tidak menentu karena konflik. “Binatang tidak memukul anak-anak mereka sampai mereka berdarah tapi ini adalah apa yang ayah saya lakukan.“

Tahun 1999, saat dia berusia 9 tahun, Fitriana secara tidak sengaja terbawa kelompok warga yang digiring oleh aparat militer melewati desanya menuju gedung KNPI Lhokseumawe. Dia menyaksikan penembakan brutal di gedung KNPI saat itu, namun dia selamat dan berhasil pulang ke rumah.

Lima tahun kemudian, Fitriana benar-benar bertemu langsung dengan aparat militer yang datang untuk menangkap pamannya. Aparat menggiring pamannya ke luar rumah sambil memukul dan menendang Ibunya. Siang harinya, aparat militer kembali ke rumah Fitriana. Saat itu Fitriana bertanya di mana pamannya berada, namun jawaban yang dia dapatkan adalah tendangan di perut dan ancaman akan ditembak. Dia percaya dia pasti sudah terbunuh jika bukan karena seorang wartawan yang tiba di sana. “Setelah kejadian itu sering saya merasakan sakit saat haid, kadang-kadang saya tidak bisa bangun sehingga saya harus berobat rutin selama beberapa waktu.”

Pamannya akhirnya kembali ke rumah tapi selalu bearada dalam pantauan aparat militer dan sering mengunjungi rumah mereka. Fitriana tidak pernah cukup berani untuk menanyakan sesuatu kepada mereka atau mendekati mereka lagi.

"Saya sedikit trauma dengan kejadian itu, hanya saja saya heran mengapa mereka marah dan menendang saya padahal saat itu saya hanya bertanya kemana Pakcik saya mereka bawa. Saya berharap konflik jangan terjadi lagi di Aceh karena akan berdampak tidak baik bagi generasi yang akan datang, biarlah kami saja yang mengalami kejadian ini."

Dalam Lingkaran Situs-situs Penyiksaan di Pidie

SAIDAH: HARUS MEMBAWA ANAK SAAT DITAHAN

Dalam rentang waktu tahun 1989 hingga tahun 2003, Saidah sering ditahan, diinterogasi dan disiksa oleh aparat militer Indonesia karena hubungan suaminya dengan GAM. Menghilangnya suami, membuat Saidah tidak punya pilihan selain membawa anak-anaknya ketika dibawa dan ditahan oleh TNI. Sepanjang periode ini pula ketiga anaknya ikut mengalami kekerasan baik secara langsung maupun dengan menyaksikan dirinya disiksa.

Saidah berulangkali mengalami penahanan dan penyiksaan di Rumoh Geudong antara tahun 1990 sampai 1998. Penahanan dan penyiksaan

juga dialami oleh ketiga anak Saidah. Pada tahun 1991, Saidah ditahan selama satu bulan di Rumoh Geudong. Pada saat itu aparat militer mempermalukan dia dengan memaksa dia menari diiringi musik dangdut dalam keadaan telanjang. Dalam masa penahan lain di Rumoh Geudong, dia pun dipaksa untuk berlaku seperti pasangan pengantin dengan tahanan laki-laki.

> *"Setiap saya mendengar lagu dangdut, saya merasa tersiksa dan teringat betapa saya dipermalukan oleh TNI di Rumoh Geudong. Saya disiksa dengan mengikat tangan dan kaki saya, lalu mereka menyetrum jempol kaki saya, dalam kondisi kesakitan mereka menelanjangi saya. Setelah saya dalam keadaan telanjang mereka memaksa saya menari dengan diiringi lagu dangdut yang mereka putar dari tape recorder dengan suara yang keras. Saya malu sekali karena banyak juga tahanan lain yang mereka paksa untuk menonton saya menari dalam keadaan telanjang. Setiap kali saya berhenti mereka akan memukul dan mengancam akan menyetrum, lalu mereka pun tertawa-tawa ketika saya menari.*
>
> *TNI di Rumoh Geudong itu membuat upacara pernikahan palsu, saya disuruh sebagai pengantin perempuan dan satu tahanan laki-laki lain sebagai pengantin laki-laki. Kami harus mengikuti upacara pernikahan, mengucapkan ijab qabul, setelah itu saya dan laki-laki itu didudukkan bersanding. TNI itu mengatur-atur bagaimana saya harus berperan dan berpose sebagai pengantin, mereka memaksa kami melakukan berbagai hal sesuka mereka. TNI itu senang sekali dan tertawa-tawa, kami para tahanan dijadikan penghibur."*

Sebelum ditahan dan disiksa di Rumoh Geudong, Saidah pernah ditangkap aparat militer pada tahun 1989 yang mencari suaminya yang telah pergi dan tidak pernah kembali. Saat itu dia ditahan di Pos TNI Cot Tunong Glumpang Tiga, Pidie bersama anaknya yang berusia 18 bulan. Selepas dari Cot Tunong, dia ditahan di penjara Lamlo Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie selama 6 bulan. Lalu pada tahun yang sama dia bersama anaknya yang berusia 7 tahun dibawa ke pos militer di Jim-Jiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie. Di berbagai penahanan ini, dia berulangkali mendapat siksaan, bahkan anaknya pun ikut mendapat siksaan.

> *"Pada saat interogasi itu posisi saya disuruh duduk di sebuah kursi, anak saya ada dalam pangkuan saya, kemudian saya dipukul dengan kabel listrik ukuran besar hingga mengenai anak saya juga."*

Demi melindungi putri sulungnya dari kekerasan aparat militer, Saidah terpaksa memutuskan untuk berpisah dengan putrinya dan menyerahkan putrinya untuk diasuh oleh adiknya. Lalu Saidah menyatakan bahwa putrinya adalah anak dari adiknya.

> *"Seorang anak perempuan saya, anak pertama saya, terpaksa tidak saya akui sebagai anak saya karena saya takut anak saya ini akan dibawa serta disakiti oleh aparat TNI, anak saya ini saya paksa mengaku sebagai anak adik saya."*

Keputusan yang diambil Saidah untuk menyangkal ini sangat membekas di benak anak sulungnya ketika dia diberitahu tentang siapa ibu kandung dia yang sebenarnya. Namun pada akhirnya, putri sulungnya dapat memahami alasan tindakan Saidah.

> *"Saya marah sekali ketika saya tahu bahwa Ibu Saidah adalah Ibu kandung saya, bayangkan saja dari kecil yang saya tahu Ibu adalah bibi saya. Saya baru tahu setelah saya sudah besar yaitu setelah konflik selesai. Saya*

marah dan sedih mengapa sampai hati Ibu mengingkari saya sebagai anaknya. Saya bertanya kepada Ibu, Ibu diam saja, tidak mau menjawab dan hanya mengatakan, yang penting sekarang kamu sudah tahu. Saya baru tahu alasannya beberapa minggu lalu kenapa Ibu mengingkari saya sebagai anaknya. Karena Ibu ingin melindungi saya, ibu tidak ingin saya diambil oleh TNI dan mengalami berbagai hal yang buruk. Saya juga baru mengetahui keseluruhan apa yang Ibu alami, ketika Ibu meminta saya menulis kisahnya di kartu-kartu Pos yang kalian kasih. Saya diminta Ibu membantu menuliskan kisah-kisahnya karena Ibu tidak bisa menulis dengan lancar. Saya pun merasa bersalah pernah menyangka Ibu sangat tega pada anaknya, padahal semua itu dilakukan Ibu agar saya selamat."

Saidah kini menyambung hidup dengan bekerja sebagai buruh tani.

SARANAH: BERULANGKALI TERPISAH DARI ANAK-ANAKNYA

Ketika suami Saranah meninggalkan rumah untuk bergabung dengan GAM, dia dipaksa bertahan dari penahanan, penyiksaan, dan kekerasan seksual yang dia alami berulang-ulang.

Pada tahun 1989, Saranah dipenjara selama sembilan bulan di Lamlo di Kabupaten Sakti Pidie. Saat itu dia masih menyusui anaknya, namun aparat militer menyiksanya dan tidak memberinya makan yang cukup. Lalu pada tahun 1990, Saranah di Rumoh Gedong bersama perempuan-perempuan lain yang merupakan istri atau keluarga orang-orang yang dituduh GPK. Selain disiksa, mereka pun dipaksa untuk memasak bagi aparat militer dan dijadikan penunjuk jalan dalam operasi militer untuk mencari anggota GAM.

> *"Hampir setiap hari kami dipaksa untuk ikut operasi mereka mencari markas GAM dan para suami kami di hutan dan di gunung-gunung. Sering kami naik truk dan*

kemudian dengan ditodong senjata disuruh berjalan di depan ... Kami juga tentunya ditanya-tanyai, dipukul dan disuruh masak. Kalau mereka menyiksa kami mereka menghidupkan tape recorder keras-keras ... agar kalau mereka menyiksa, suara jeritan dan tangisan kami tidak terdengar oleh penduduk yang ada di sekitar Rumoh Gedong."

Selama ditahan, Saranah dan para perempuan lainnya ditempatkan di rumah-rumah kosong yang berlokasi tidak jauh dari Rumoh Gedong. Mereka diasingkan dari keluarga dan penduduk sekitar. Rumah dan sumber penghidupan mereka juga dhancurkan aparat militer.

"Saya dan juga beberapa teman selama beberapa tahun diasingkan ke rumah-rumah kosong ... tentunya tidak ada juga penduduk yang berani mendatangi rumah kami karena beberapa anggota Kopassus ada bersama kami. Yang sangat menyedihkan saya adalah ketika mengingat anak-anak saya bersama neneknya hidup dan makan apa adanya. Saya sering tidak bisa tidur jika mengingat anak-anak saya. Mereka pasti hidup menderita tanpa Ayah dan Ibunya, padahal ayah dan Ibunya masih hidup.

Tidak puas rupanya mereka dengan apa yang telah mereka lakukan ke diri saya dan anak-anak saya ... Kopassus itu juga membayar dan menyuruh beberapa warga untuk membakar rumah saya, yang tersisa dari rumah saya hanya arang kayunya saja."

Semua perlakuan militer terhadap dirinya dirasakan Saranah sebagai tindakan yang mengoyak hidup dan martabatnya, terutama ketika mereka melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya.

Saranah berdiri di kebun di samping rumahnya.

> *"Hal yang paling menyakitkan dan yang sangat pahit adalah ketika Kopassus Rumoh Geudong menginterogasi, memaksa saya dengan kasar membuka baju saya, tapi saya tetap tidak mau, aparat itu merobek dengan kasar baju saya ... si Kopasus itu kemudian mengikat leher saya dengan tali jerat, kemudian saya yang tanpa berbaju diarak-arak di dalam rumah, serta ditarik-tarik seperti kerbau, sambil memaki saya dan mengatakan saya kerbau."*

Penyiksaan dan pelecehan terhadapnya baru berakhir ketika suaminya tewas ditembak militer Indonesia. Namun begitu, walau sudah tidak mengalami kekerasan, Saranah harus hidup sebagai orang tua tunggal dan menanggung semua kebutuhan keluarga. Dia pun harus menerima cibiran dari warga sekitar karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

> *"Dengan tenaga apapun yang tersisa, saya mengalihkan segala penderitaan yang saya alami untuk membesarkan anak-anak saya dan saya kembali ke pertanian seperti orang lain walaupun ada masyarakat yang mencibir saya."*

Saat ini, Saranah hidup menjanda bersama anak dan cucunya di Kampung Aron, Kecamatan Simpang Tiga Pidie. Anak sulungnya tinggal di Jakarta dan memutuskan untuk tidak kembali ke Aceh karena kejadian yang menimpa Ayah dan Ibunya membuat dia trauma. Kesehatan Saranah terus memburuk dan mulai sulit berjalan.

Saranah telah menerima uang kompensasi atas kematian suaminya tetapi hal itu dirasakan tidak seimbang dengan penderitaan yang dialaminya dan dampaknya yang harus dia tanggung hingga saat ini.

> *"Saya dan keluarga belum merasakan ada keadilan, anak saya memang ada pegawai karena saya korban DOM, tapi itu karena ada unsur kedekatan dengan pihak yang mengurusnya. Secara keseluruhan pemerintah tidak peduli dengan kami. Bantuan rumah yang saya dapatkan pun tidak sesuai dengan rumah yang dulu dibakar mereka. Saya mengalami sakit, tidak ada bantuan untuk pengobatan saya dan tidak ada juga diberi modal usaha padahal mereka menghancurkan usaha saya ketika masa konflik. Saat ini walaupun orang yang di atas adalah GAM tapi kami korban belum rasakan perbaikan kondisi yang menggembirakan bagi kami."*

RUKIAH: BEKERJA KERAS DEMI MASA DEPAN ANAK

Pada 25 September 1990, Rukiah dalam kondisi hamil delapan bulan, sedang bekerja di kebun bersama dua orang anaknya. Saat mendengar suara tembakan dia bergegas pulang. Dia kemudian dibawa ke Rumoh Gedong oleh aparat militer. Rukiah menitipkan kedua anaknya di rumah saudaranya yang berada tidak jauh dari Rumoh Gedong. Sesampai di Rumoh Gedong Rukiah melihat di halaman ada mayat yang ditutup oleh lembaran daun pisang.

> *"Saya dipaksa naik kerumah Gedong, sampai di dalam rumah TNI itu bertanya ke mana perginya suamimu dan apa yang saya ketahui tentang GPK. Saya mengatakan bahwa saya tidak tahu ke mana perginya suami. Suami ngga bilang-bilang kalau pergi, "Bapaklah yang lebih tahu, saya juga tidak ada urusan dengan GPK, mana saya tahu siapa mereka.""*

Jawaban Rukiyah yang tegas dan berani memancing kemarahan aparat. Rukiah kemudan ditelanjangi.

> *"Saya diberdirikan di depan sebuah cermin setelah itu mereka memakaikan topi cowboy jelek di atas kepala saya, dalam kondisi telanjang seperti itu saya disuruh melihat diri saya sendiri di cermin, mereka tertawa-tawa sebentar, lalu mereka mengambil pisau belati meletakan di kuping saya. Kata aparat itu, mereka mau memotong kuping saya. Lalu saya ditidurkan mereka, ditelentangkan mereka, moncong pistol yang pendek dimasukkan ke mulut saya dan moncong senjata laras panjang mereka masukkan ke dalam kemaluan saya, perbuatan itu disaksikan oleh banyak Kopassus lainnya, terus dalam kondisi saya yang masih telanjang, tentara itu memberitahukan bahwa suami saya sudah meninggal dan mayatnya di bawah Rumoh Geudong yang sebelumnya saya lihat ditutupi daun pisang."*

Para tentara menarik Rukiah agar berdiri, mereka memasang tali jerat di lehernya. Dia disuruh berjalan dengan menarik-nark tali jerat, ketika dirinya berjalan lambat tali ditarik ke depan dan ketika dirinya berjalan cepat tali ditarik ke belakang, begitu seterusnya sampai dirinya tiba di tempat gantungan. “Dengan kondisi telanjang dan dijerat leher, saya diarak-arak keliling ruangan, disaksikan para aparat Kopassus tersebut, sangat menyakitkan hati saya, sakitnya sampai sekarang karena saya diarak seperti kerbau liar.” Akhirnya dia diperintahkan untuk berpakaian dan diberitahu untuk berjalan pulang.

Setelah melahirkan, dia mulai bekerja sebagai buruh tani. Pekerjaannya itu hanya mencukupi untuk memberi makan bayinya, sedangkan untuk membayar biaya persalinan sekaligus untuk bertahan hidup, dia harus menggadaikan tanah suaminya. Seringkali dia harus berhutang untuk menutupi biaya hidup keluarganya. Sebagai janda korban konflik, Rukiah pernah mendapat dana diyat, namun jumlah uang diyat tidak mencukupi kebutuhannya, termasuk menebus tanahnya dan membayar hutang. Rukiah juga merasa bahwa pemberian diyat tersebut belum memenuhi mengatasi penderitaan yang dialami perempuan-perempuan seperti dirinya.

"Apa yang saya alami itu, tidak membuat pemerintah memberikan bantuan kepada saya. Program Diyat yang saya terima hanya karena suami saya meninggal karena dibunuh oleh TNI, bukan karena saya yang mengalami penyiksaan. Penyiksaan yang saya alami tidak masuk dalam penerima bantuan Diyat oleh Pemerintah Aceh ... Pemerintah belum memperhatikan kami, penderitaan kami tidak sebanding dengan yang diberikan pemerintah saat ini."

Rukiah bersama kedua anaknya di depan rumah mereka yang baru.

Salah satu sumber kekuatan besar bagi Rukiah adalah keluarganya yaitu anak-anaknya. Rukiah berupaya terus tetap tegar untuk terus melanjutkan hidup.

"Anak-anak dan cucu saya adalah harapan saya, mereka membutuhkan saya. Saya harus kuat kalau tidak bagaimana mereka bisa hidup. Saya bekerja, bekerja dengan keras, menjadi orang upahan, kalau saya kerja pikiran saya hanya untuk bekerja dan melanjutkan hidup saya dan anak-anak serta cucu."

Pencari Nafkah yang Dikoyak Perang

JAUHARI: MERANTAU KE NEGERI ORANG

Jauhari di dalam rumahnya.

Pada tahun 2001, TNI datang ke rumahnya untuk menangkap suaminya. Selain menangkap, aparat militer juga memukul, mengambil harta benda, serta merusak rumah dan warung Jauhari. Akibat dari kekerasan aparat militer, Jauhari sempat tidak bisa berhenti buang air kecil selama beberapa hari.

Suaminya kembali dalam kondisi mengenaskan. Suaminya tewas dengan tubuh penuh jejak penyiksaan, tangan dan kakin terikat, leher terpotong, dan tubuh penuh lubang peluru. Jauhari harus mengurus pemakaman suaminya dengan hanya dibantu tiga orang tetangga. Warga terlalu takut untuk membantu dirinya.

Setelah kejadian tersebut, Jauhari meninggalkan desa menuju rumah orang tuanya karena dia tidak lagi merasa aman. Namun kemudian dia mendapat kabar bahwa rumahnya telah dibakar militer. Setelah itu Jauhari hidup dalam kemiskinan dan kondisi fisik yang menurun. Dia menjadi buruh harian dengan penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehingga anak-anaknya mengalami kelaparan.

> *"Jangankan untuk membeli sepatu anak dan jajannya, sandal putus saja tidak bisa menggantinya dengan yang baru. Saya harus banting tulang untuk menghidupi ketiga orang anak saya, sampai anak-anak menderita, kadang punya lauk kadang untuk makan nasi saja tidak ada. Setiap hari saya harus mencari orang yang mau mempekerjakan saya, akan saya lakukan walau hanya membantu mereka membawa pulang pisang dari kebun."*

Dalam kondisi seperti ini, Jauhari sempat mengalami kekerasan lagi dari aparat militer ketika pada masa darurat militer, rumahnya didatangi tentara. Kehidupan Jauhari pun kembali terganggu.

> *"Saya mau menjual hasil kebun ke pasar. Saya hanya sampai setengah perjalanan saja. Saya dihadang oleh TNI yang memakai tank dan panser, mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh ke pasar. Saya disuruh menjagai tank dan truk mereka. Ini terjadi beberapa kali, sampai saya tidak bisa ke pasar untuk menjual kacang dan tidak bisa beli ikan."*

Sejak tahun 2003 Jauhari memutuskan untuk bekerja di Malaysia agar bisa membangun rumah dan menopang kehidupan dan pendidikan anak-anaknya. Dia merasa bahwa bekerja di luar negeri adalah satu-satunya cara untuk dia bisa keluar kesulitan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Walau selama di Malaysia dia harus bekerja dengan susah payah, dia terus mencoba bertahan.

"Majikan saya tidak membolehkan saya pakai sarung, saya harus pakai celana pendek ketika bekerja. Saya sangat malu dan tidak tahu mau bilang bagaimana, di kampung jangankan pakai celana pendek di depan orang lain, di kamar sendirianpun saya tidak memakai celana pendek. Walaupun begitu terpaksa saya jalani, saya harus bertahan agar anak-anak saya di kampung cukup makannya dan bisa melanjutkan sekolahnya."

Dia berhasil menabung uang hasil kerja kerasnya selama tiga tahun dan menggunakannya dengan bijak untuk menopang kehidupan keluarganya,

"Tiga tahun saya bertahan di Malaysia, akhirnya saya pulang, saya bisa membangun rumah baru, rumah gubuk saya yang lama sudah roboh, pemerintah tidak menggantikan rumah saya yang dibakar di Rimba Raya Aceh Tengah dulu. Setiap bulan saya mengirimkan uang ke kampung untuk biaya hidup anak-anak saya dan juga biaya anak-anak sekolah."

Jauhari sedang memasak di dapur rumahnya yang baru.

DARNI: MENGGADAIKAN SAWAH UNTUK MENGELUARKANNYA DARI PENJARA

Darni sedang berdiri di depan Penjara Sigli tempat ia pernah ditahan tahun 2004.

Pada tahun 2004, Darni ditangkap oleh aparat militer karena dituduh sebagai anggota Inong Bale. Selama perjalanan, Darni ditendang dan dipukul, serta dicecar pertanyaan tentang siapa saja warga yang menjadi Inong Balee.

> *"Dalam perjalanan ke Pos, di dalam Labi-labi saya terus diinterogasi, dibentak-bentak ditanyai siapa-siapa saja pasukan Inong Balee lain, saya katakan bahwa saya baru pulang dari medan dan disana saya menjadi pembantu rumah tangga, tapi mereka menuduh saya Inong Balee yang mencari uang untuk GAM di Medan."*

Pada saat berada di Pos Laggien, tanggannya diikat dan ditampar beberapa kali oleh Komandan pos. Mereka menuduhnya sebagai 'penari ular' untuk GAM di hutan. Mereka mengancam akan menelanjangi dan

mengikat dia ke pohon sehingga dia akan dimakan oleh semut. Mereka menggodanya dan mengatakan dia harus menjadi istri semua anggota Rajawali biar bisa melayani kebutuhan seks seluruh anggota TNI di Pos TNI itu.

> *"Pada malam harinya, komandan itu dengan hanya berpakaian mini yaitu bercelana pendek, berkata "Sekarang layani kami." Terus pistol ditodong ke kepala saya, sambil mengancam, "Nanti jam 4 pagi kamu akan mati, kami sekolahkan". Kemudian kedua jempol tangan saya diikat menjadi satu, dari jam 9 malam sampai jam 1 tengah malam, sampai kedua tangan saya memar dan biru. Kemudian mereka menidurkan saya di atas balai-balai bambu, saya sangat tidak nyaman karena dikelilingi oleh TNI tersebut."*

Setelah itu dia dipindah ke beberapa tempat dan mengalami penyiksaan lagi, termasuk dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan diri. Namun Darni menolak karena merasa dia tidak pernah menyerahkan diri, dia diambil dan ditahan secara paksa. Akhirnya Darni ditahan selama lima hari di Polres Pidie dan mengalami penghinaan dan pelecehan seksual dari anggota kepolisian yang memeriksanya. Darni kemudian diputus bersalah oleh pengadilan dan dihukum penjara selama dua setengah tahun.

Selama di penjara Banteng Sigli, Darni bergaul dengan sesama tahanan dan membantu mengasuh bayi dari seorang perempuan yang lengannya ditembak.

> *"Saya membantu seorang perempuan yang telah ditembak di lengannya untuk merawat dan mengasuh bayinya. Saya merasa kasihan karena perempuan itu tidak bisa menggendong si bayi. Saya juga membantu seorang perempuan tua yang telah ditahan karena dia dituduh membawa makanan untuk GAM padahal dia hanya menyediakan makanan bagi keluarganya."*

Sementara Darni ada di dalam penjara, keluarganya berupaya keras untuk menemukan cara mengurangi hukuman Darni. Darni akhirnya hanya menjalani penjara selama 10 bulan dan dibebaskan pada 25 Desember 2004, satu hari sebelum tsunami. Pembebasan Darni diperoleh setelah keluarganya menggadaikan sebidang sawah yang merupakan satu-satunya sumber pendapatan ekonomi keluarga Darni.

Kehilangan sawah membawa dampak luar biasa pada situasi keuangan keluarga. Sampai saat ini keluarga Darni belum sanggup menebus sawah mereka, dan bahkan mereka menjadi buruh tani di lahan mereka sendiri.

> *"Ternyata setelah 10 tahun pun kami belum mampu menebus sawah yang kami gadai, meskipun keluarga saya dan saya telah bekerja sangat keras. Saya bangun pagi-pagi untuk membuat kue untuk dijual di warung-warung setempat, bekerja sebagai buruh tani, mengajar anak-anak mengaji dan membantu di pos kesehatan dan dengan PKK, tapi kami tetap tidak mampu melunasi utang kami."*

Darni berpikir dia hanya akan merasakan keadilan jika dia mampu membayar utang keluarganya.

> *"Mungkin, jika saya sudah melunasi utang saya, Alhamdulillah, baru mungkin saya merasa semuanya sudah adil."*

Perempuan yang Hilang dalam Ruang dan Waktu

9

Pendudukan Indonesia di Timor-Leste selama 24 tahun memiliki dampak yang mendalam terhadap anak-anak. Menurut *Chega!*, laporan final CAVR (Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi) Timor-Leste, banyak anak laki-laki yang sebagian beranjak remaja direkrut secara paksa untuk menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi). Mereka dipaksa mengangkut barang-barang dan membantu berbagai keperluan aparat militer, baik di barak militer maupun di medan operasi, terutama pada awal konflik dari 1976-1981.[61] Kekerasan di Timor-Leste juga mengakibatkan terjadinya pemindahan paksa ribuan orang baik di dalam maupun di luar wilayah tinggal mereka. Pemindahan paksa terjadi pada saat berbeda-beda, tetapi kebanyakannya terjadi pada 1975 dan 1999.

Anak-anak turut mengalami pemindahan paksa. CAVR memperkirakan sekitar 4000 anak diambil dari keluarga mereka dan dikirim ke Indonesia sepanjang masa pendudukan. Pemindahan anak-anak ini, yang disetujui oleh otoritas militer dan sipil, difasilitasi baik oleh individu maupun lembaga (militer, agama, dan organisasi sipil lainnya).[62]

Banyak anak-anak yang pada waktu itu dipisahkan, sekarang sudah dewasa. Mereka tinggal di Indonesia dengan ingatan samar tentang jati dirinya sebagai orang Timor-Leste. Beberapa dari mereka cukup beruntung dirawat oleh keluarga yang penuh kasih, dibesarkan dan dididik sebagai orang Indonesia, dapat kembali ke Timor-Leste untuk mengunjungi sanak keluarga mereka. Namun sebagian besar dari mereka mengalami kekerasan dan eksploitasi. Mereka harus menempuh jalur hidup yang sulit dan berliku. Mereka memiliki trauma akan masa lalunya dan mengalami kesulitan untuk berdamai tentang identitas dirinya. Beberapa dari mereka masih terus dicari hingga kini oleh anggota keluarga mereka yang ada di Timor-Leste.

Pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat Timor-Leste memberikan suara dalam Jajak Pendapat untuk memilih kemerdekaan atau tetap menjadi bagian Indonesia dengan status otonomi. Hasil Jajak Pendapat diumumkan tanggal 4 September 1999 dengan 78% memilih kemerdekaan. Pengumuman ini segera disusul oleh kekerasan dan pembumihangusan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Timor-Leste. UNHCR memperkirakan bahwa sekitar 300,000 orang lari ke perbukitan dan hutan-hutan, dan 250,000 orang dideportasi ke Timor Barat, Indonesia. Selain militer Indonesia, milisi dan keluarga mereka, warga sipil yang pro otonomi dan pro kemerdekaan juga dipindahkan ke Timor Barat.

Di tengah tingginya kekerasan, banyak perempuan dan anak-anak berlari mencari perlindungan. Bersamaan dengan penghancuran 70-80% bangunan, ratusan ribu orang dikumpulkan oleh milisi dan TNI, digiring naik ke truk-truk dan dikapalkan menuju Timor Barat. Sebagian orang dengan sukarela dievakuasi ke Timor Barat untuk melarikan diri dari kekerasan atau karena mereka adalah para pendukung otonomi. Namun banyak dari mereka yang dipaksa untuk pergi.[63] Ribuan keluarga dipisahkan dan dicabut dari sumber kehidupan mereka.

Mulai 6 September 1999, arus pengungsi mulai berdatangan ke Timor Barat. Sebagian dari mereka tinggal di rumah kerabat mereka yang berdomisili di Timor Barat, sementara sebagian lain yang memiliki ekonomi cukup dapat menyewa atau mengontrak rumah tinggal. Namun sebagian besar dari mereka dibawa ke kamp-kamp yang disediakan

dengan fasilitas yang sangat minim dan tinggal dalam kelompok-kelompok berdasarkan tempat asal mereka di Timor Timur. Mereka dijaga di bawah pengawasan ketat milisi dari daerah mereka.[64]

Terdapat kurang lebih 200 kamp pengungsi di seluruh penjuru Timor Barat. Kehidupan di kamp-kamp itu sangat berat. Di beberapa kamp, barak-barak disusun berbaris-baris, tetapi tidak cukup untuk menampung semua pengungsi. Kebanyakan tempat tinggal hanya berupa lembaran-lembaran plastik atau apapun yang bisa didapat. Sebagian rumah juga dibangun asal-asalan di sekitar rumah-rumah penduduk lokal, di hutan-hutan, atau sepanjang pinggiran sungai. Tidak ada fasilitas air bersih atau MCK di kamp-kamp ini.[65]

Mariana berfoto bersama anggota keluarganya di kamp tempat mereka tinggal. Mereka adalah satu dari sekian banyak keluarga pengungsi Timor-Leste yang masih tinggal di kamp pengungsian di Tuapukan, kabupaten Kupang, NTT, hingga kini.

Di kamp-kamp pengungsi, perempuan menjadi rentan baik secara ekonomi maupun fisik. Pengungsi-pengungsi perempuan sangat bergantung kepada laki-laki karena tidak memiliki peluang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sementara para laki-laki justru dalam keadaan tertekan dan frustasi oleh situasi pasca konflik yang kacau dan tidak menentu. Perempuan juga sama sekali tidak terlindungi ketika berada dalam kamp yang tidak dapat dapat menampung jumlah pengungsi. Mereka tinggal berdesak-desakan di dalam kamp dan tidak memiliki ruang pribadi. Kondisi semakin buruk karena mereka hidup bersama milisi di kamp-kamp tersebut. Dalam kondisi ini, pengungsi perempuan menjadi sangat rentan terhadap berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.[66]

Pada akhir tahun 2002, sekitar 224.570 orang kembali ke Timor-Leste. Walaupun demikian, pada saat ini masih ada ribuan orang Timor-Leste di Timor Barat, baik di lokasi mereka dibawa dulu yaitu di bekas kamp pengungsian, di perumahan sederhana yang disediakan oleh pemerintah, atau tersebar di antara pemukiman penduduk.

> *"Pada 2005, UNHCR pernah menyebutkan sekitar 10 ribu orang masih tinggal di kamp pengungsian. Adapun 16 ribu orang lainnya telah membaur dengan warga Nusa Tenggara Timur melalui berbagai program bantuan. Namun, pada tahun yang sama, Pemerintah Provinsi NTT mengeluarkan data bahwa lebih dari 104 ribu jiwa masih tinggal di 12 kantong pengungsian."*[67]

Pada tahun 2002, status pengungsi bagi orang Timor-Leste yang tinggal di Timor Barat dicabut. Sejak saat itu pemerintah menyebut mereka sebagai warga baru Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan istilah pengungsi atau kamp pengungsi. Namun status baru ini membuat segala kebijakan negara yang terkait dengan bantuan untuk pengungsi Timor-Leste dihentikan. Langkah ini membuat para pengungsi berada dalam kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sementara itu, penduduk lokal di sekitar kamp masih menganggap dan memperlakukan orang-orang tersebut sebagai pengungsi. Penduduk lokal pun masih menyebut tempat tinggal mereka sebagai kamp pengungsi. Dengan alasan inilah, para peneliti membuat istilah “bekas kamp pengungsi” dengan perhitungan bahwa kata “bekas” bisa mendekatkan mereka pada akses pelayanan publik. Penggunaan istilah “kamp pengungsi” juga bermaksud untuk mengingatkan negara bahwa kehidupan orang-orang dari Timor-Leste tersebut masih sama seperti pengungsi yaitu, tinggal di rumah darurat, belum memiliki tanah atau kebun sendiri, dan akses pada pelayanan publik hampir nol.

Perempuan yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari wilayah Viqueque dan Baucau di Timor-Leste. Mereka melarikan diri dari kekerasan yang berkecamuk di Timor-Leste dengan iming-iming bahwa mereka akan disediakan perumahan. Begitu tiba di kamp pengungsi di Tuapukan, mereka tidak menemukan apapun. Mereka merasa telah ditipu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tak satu pun dari mereka mampu untuk membeli tanah, sementara sebagian besar dari mereka telah terpisah dari keluarga mereka.

Enam belas tahun kemudian mereka tetap tinggal di Tuapukan dengan kondisi yang tetap sulit. Mereka tinggal atau berkebun di atas lahan yang merupakan tanah milik pemerintah. Masa depan mereka tidak pasti karena mereka bisa saja tergusur kapan pun. Anggapan bahwa mereka tetap tinggal di sana karena pilihan mereka sendiri yang diambli secara bebas adalah salah. Karena hampir semua yang bertahan di bekas kamp tersebut tidak memiliki kemampuan untuk pulang atau mencari tempat lain yang lebih layak.

Sebagian besar perempuan ini adalah buruh tani dan/atau pedagang yang penghasilannya hanya cukup untuk sekedar makan hari itu. Sumber pendapatan mereka termasuk hasil dari kebun, peternakan skala kecil, dan penjualan tenaga kerja mereka. Sebagian dari mereka menjual sayur-sayuran dan kue, menenun, dan memilih dan membersihkan buah kapuk untuk membuat kasur. Pekerjaan musiman ini hanya menghasilkan sedikit tambahan. Itu pun sanagt tergantung pada kesehatan mereka.

Hubungan sosial antara mereka yang masih dianggap pengungsi dan penduduk lokal, baik di bekas kamp maupun di pemukiman baru, penuh dengan kecemburuan. Sesama pengungsi dan penduduk lokal bersaing untuk mendapatkan bantuan dan sumber daya. Warga setempat tidak menyukai para pengungsi karena mereka menjual kembali bantuan beras di bawah harga pasar. Perbedaan agama antara penduduk setempat yang kebanyakan orang Protestan dan orang dari Timor-Leste yang kebanyakan orang Katolik juga mempersulit mereka untuk berkomunikasi secara terbuka. Terakhir, masyarakat setempat awalnya meminjamkan tanah mereka secara bebas kepada orang Timor-Leste. Tapi sekarang, 16 tahun kemudian, petani setempat tidak sabar menunggu untuk tanah mereka dikembalikan. Mereka yang masih memperbolehkan orang Timor-Leste untuk bekerja di tanah mereka sekarang menuntut sebagian dari hasil panen mereka.

Melalui penelitian ini, banyak perempuan korban konflik Timor 1999 dapat kesempatan untuk menceritakan kisahnya. Sebagian adalah perempuan yang baru pertama kali bercerita. Para perempuan ini juga mendapatkan kekuatan dari dukungan keluarga dan dari agama mereka. Di setiap rumah terdapat sebuah altar kecil dan mereka menghadiri misa di gereja. Mereka juga mendapatkan kekuatan dari satu sama lain karena datang dari distrik yang sama dan berbagi pengalaman yang sama.

Para perempuan korban konflik Timor 1999 yang terlibat dalam penelitian ini.

Putri yang Dicuri: Isabelinha Pinto

Isabelinha (Lina) baru berumur enam tahun ketika pada tahun 1979 seorang tentara mengambil dirinya dari keluarganya. Pengambilan tersebut bukanlah proses “adopsi” sukarela. Orang tua Lina menolak untuk menandatangani “surat adopsi” yang telah ditandatangani oleh pimpinan militer sebagai izin bagi tentara yang ingin membawa Lina pergi.

Pengambilan dirinya dari keluarganya merupakan momen traumatis bagi Lina. Dia pun ingat bahwa dia sangat ketakutan ketika dibawa ke pelabuhan di Laga dan naik perahu kecil.

> *"Dalam perjalanan itu sampai di tengah laut tentara-tentara tersebut pindah [dari perahu kecil] ke kapal yang besar dan harus naik lewat tali. Saat itu saya ketakutan dan menangis sampai membuat tentara itu marah dan*

> *hampir membuang saya ke laut ... Tentara-tentara yang lain berteriak, "Jangan, pak, jangan dibuang. Kasihan anak kecil. Kalau hanya mau dibuang, jangan dibawa." Akhirnya saya dimasukkan lewat bulatan besar yang ada di kapal tersebut dalam keadaan pingsan. Beberapa jam kemudian saya sadar saya sudah di kamar tentara itu."*

Kapal angkatan laut itu berlabuh di Surabaya. Lina dan anak-anak lain, yang juga diambil dari Timor-Leste, dibawa pulang oleh para prajurit. Saat itu Lina dibawa ke Jakarta.

Sejak berada di Jakarta, Lina mengalami kekerasan dan penelantaran. Lina tidak pernah akan lupa masa-masa ketika dia mengalami kelaparan. Dia pun merasa sendirian, walau saat itu dia masih bisa berkomunikasi dengan keluarga dia di Timor Timur. Dia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga, disuruh mencuci pakaian seluruh anggota sekeluarga yang berjumlah lima orang sebelum pergi ke sekolah. Pulang sekolah pun diharuskan menjual es balok di sekitar perumahan. Seringkali dia tidak diberi makan jika dagangannya tidak habis.

> *"Istri laki-laki yang membawa saya tidak suka memiliki anak perempuan. Meskipun dalam dokumen formal dikatakan bahwa alasan untuk adopsi adalah memperlakukan saya seperti anak mereka sendiri, karena mereka tidak punya anak perempuan. Namun pada kenyataannya mereka tidak suka memiliki anak perempuan."*

Kekerasan dan kebencian si istri tentara terhadap Lina terus berlanjut. Sampai suatu ketika, saat Lina menginjak SMP, dia pindah ke tempat kerabat si tentara di Menado. Saat itu dia mendapat perlakukan lebih baik. Namun Lina harus menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Timor.

> *"Di keluarga ini saya baru merasakan kebahagiaan karena saya diperlakukan dengan baik dan disamakan dalam segala hal dengan kedua anak kandung mereka. Saya disekolahkan sampai SMA kelas 2."*

Ketika Lina menginjak kelas tiga SMA, dia dipanggil kembali ke Jakarta. Saat itu Lina mengalami pelecehan lebih berat.

> *"Ibu angkat saya dan anak-anaknya semakin membenci saya. Bapak angkat saya ... sayang sama saya karena punya niat lain; bukan layaknya orang tua terhadap anak.*
>
> *Saya memiliki tekad bahwa apapun yang terjadi, saya harus mendapatkan pendidikan. Saya harus membayar jalan saya sendiri. Laki-laki yang membawa saya, dia membayar biaya sekolah saya untuk beberapa waktu, tapi istrinya cemburu dengan saya. Ternyata orang yang membawa saya itu, dia punya motif lain. Dia ingin memperlakukan saya seperti seorang istri."*

Setelah lulus SMA, Lina pindah jauh dari rumah dan bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Pemilik perusahaan dan istrinya sangat baik terhadap Lina. Mereka mensponsori dia untuk berkunjung ke Jepang dan membayar biaya pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta.

Biar ia jauh, kenangan keluarganya di Timor-Leste tetap lekat bersama Lina.

> *"Saat itu saya sudah lupa keluarga saya. Saya hanya ingat bahwa nama ayah saya adalah Manuel Pinto dan nama kakak saya, yang saya ingat, adalah Fernando.*

Sekarang, saya mengetahui bahwa itu bukan Fernando, tapi terdengar agak seperti itu. Saya punya adik; saya ingat namanya sebagai Magdalena, tapi namanya adalah Filomena. Pada saat itu, saya memasrahkan diri. Jika saya bisa bertemu dengan kerabat, itu akan menjadi sebuah keajaiban."

Sewaktu kuliah Lina jatuh cinta dengan seorang pria Indonesia yang baik dan langsung memutuskan untuk menikah.

"Saya punya dua anak. Ketika saya hamil anak kedua saya, saya sedang hamil sekitar tiga bulan, saya mendapat perasaan bahwa saya akan bertemu dengan keluarga saya. Saya terus berdoa, saya melakukan Novena setiap malam selama tiga tahun. Saya tidak pernah melewatkannya satu hari pun. Saya punya harapan bahwa saya akan bertemu dengan mereka."

Suatu hari Lina bermimpi bahwa rumahnya terkena gelombang tsunami raksasa dari Laut Timor. Dalam mimpinya, dia memegang suami dan anak-anaknya dan berkata, “Jangan takut. Ini di Laga. Saya dulu di sini ketika saya masih kecil. Saya dibawa dari sini.”

Lina tidak menyangka bahwa mimpi tersebut membawa dia kepada sesuatu yang selama ini dia rindukan.

"Ternyata saudara-saudara laki-laki dan sepupu-sepupu saya sedang mencari saya. Saya telah tidak melihat mereka selama 30 tahun. Tiga hari kemudian, saya menerima telepon dari saudara angkatku, yang bungsu, yang paling baik kepada saya. Dia berkata, "Saudara-saudaramu mencarimu." Aku mencubit diriku sendiri:

“Apakah ini benar, ya Tuhan? Apakah ini yang saya dapatkan setelah semua penderitaan yang saya alami?”

Ketika saya masih kecil, ayah saya pernah mengatakan kepada saya, "Kalau kamu sampai terpisah dari saya, lihatlah langit. Jika langit biru dan anginnya sejuk, itu adalah tanda bahwa saudara-saudarimu merindukanmu.” Sore itu saya sedang memandangi langit di belakang rumah saya. Dili terasa dekat. Mudah-mudahan saya dapat memberitahu keluarga saya bahwa saya sudah memiliki dua orang anak.

Sepupu saya datang, dan saya menangis di kamar saya. “Tuhan, apakah ini benar?” Anak saya berlari ke kamar saya, mengatakan, "Ibu, saudaramu di sini. Wajahnya persis seperti ibu." Ketika saya melihatnya, dia benar-benar tampak seperti saya. Sepupu saya masuk ke dalam rumah dan langsung menelepon orang tua saya. Saya menceritakan kepada mereka seluruh perjalanan hidup saya. Mama saya menyuruh kakak saya untuk cek saya, “Dahinya menonjol dan dia memiliki tanda luka bakar di lengannya.” Semuanya cocok. Ketika saya berbicara dengan mama saya di telepon, dia bertanya, "Apa kamu masih ingat Tetum, tidak?”

Saya bilang, “Ya, saya hanya ingat kalimat ‘rou Dili seidauk mai’—perahu dari Dili belum tiba. Ayah saya sering menyanyikan lagu ini ketika dia sedang berburu: ‘Imi atu ba nebe ...’ Itu saja yang saya tahu.” “Nah itu saja,” kata ibu saya. “Namamu Isabelinha de Jesus Pinto. Kamu biasa dipanggil Nina.” Akhirnya saya bisa bertemu kembali dengan keluarga saya.

Lina sewaktu kecil bersama orang tua angkatnya dan sepupunya yang tidak jadi dibawa ke Indonesia. Foto ini diambil di Viqueque, sesaat sebelum dia naik ke kapal menuju Jakarta.

Sebelum saya dipisahkan dari ayah saya, dia berkata, "Kamu harus kuat, jujur, dan berani." Saya teringat kata-kata ini terus-menerus. Ketika orang-orang yang membawa saya kejam kepada saya, saya berpegang pada kata-kata tersebut. Saya berpegang pada kebenaran. Saya bukan diambil tidak jelas asalnya. Tapi karena dia [yang membawa saya ke Indonesia] seorang tentara, dia selalu benar. Saya hidup di bawah tekanan, kekerasan; saya mengalami itu semua. Tapi saya menjadi kuat."

Mengungsi dan Kemudian Dilupakan: Para Perempuan Pengungsi di Tuapukan

OLANDINA DA SILVA XIMENES: DIJANJIKAN MENDAPAT BANTUAN

"Saya mau bercerita biar dunia tahu dan ada perubahan yang bisa terjadi."

Ibunda Olandina meninggal ketika dia masih kecil sehingga Olandina tidak pernah ingat wajah ibunya. Ayahnya kemudian menikah lagi. Saat itu, karena pekerjaannya, ayah Olandina sering bepergian jauh dari rumah.

"Karena Bapa kerja dan tugas jauh, maka kami dititipkan di Opa ... Saya punya Bapa nikah lagi dan kalau Bapa pergi kerja kami dipukul di rumah. Saudara tiri ada lima orang, tapi ada yang mati ... dua orang ada di Mataram dan satu orang di Timor-Leste. Kami masih kecil ini menderita, tapi kalau Bapa ada itu kami tidak dipukul."

Pada tahun 1975, ketika Olandina berumur 13 atau 14 tahun, ayah Olandina meninggal. Ayahnya menjadi korban dari konflik senjata yang saat itu terjadi di Viqueque. Saat kontak senjata berlangsung, Olandina dan anggota keluarga lainnya lari ke hutan. Mereka harus menunggu pasukan Indonesia melewati Kota Viqueque agar mereka bisa keluar hutan dan mengubur tubuh ayah Olandina. Saat masih di hutan, ibu tiri Olandina juga meninggal. Sejak saat itu Olandina harus mengurus adik-adik tirinya di tengah sulitnya hidup di hutan. “Makanan tidak ada ... kita beli ubi, jagung ... uang [juga] tidak ada jadi pakaian ini yang kita jual.”

Saat Olandina keluar hutan untuk mencari makan, dia bertemu dengan militer Indonesia. Peristiwa itu merupakan hal yang cukup menakutkan bagi Olandina. “TNI galak sekali. Kita juga tidak tahu bahasa [Indonesia] jadi kita juga tidak mengerti.”

Rasa takut itu mendorong Olandina untuk melarikan diri lagi ke hutan. Dia kemudian menuju Gunung Matebian dan bergabung dengan kaum pejuang perlawanan. Kondisi di sana sangat sulit sehingga kelompok tersebut memutuskan untuk membubarkan diri. Olandina bersama saudara-saudaranya kembali ke rumahnya di kota asalnya, Ossu. Pada tahun 1988 Olandina menikah dengan anggota Babinsa dan mereka pindah ke sebuah asrama tentara di Dili. Mereka memiliki lima orang anak. Ketika suami Olandina ditugaskan ke Viqueque, dia dan anak-anaknya juga kembali ke sana.

Pada tahun 1997 suaminya dibunuh saat sedang bertugas. Menurut Olandina dia dibunuh oleh masyarakat sipil yang biasa makan di rumah mereka, bukan tentara.

"Semua anak marah dan dendam. Bapak itu orang baik, tapi kenapa malah di bunuh? Anak perempuan saya pernah bilang, "Kalau saya laki-laki, saya mau cari siapa yang bunuh bapak saya." Tapi saya bilang, "Sabar saja, karena Tuhan tidak tutup mata."

Olandina masih menyimpan foto-foto pemakaman suaminya setelah terbunuh. Selama beberapa bulan Olandina dan anak-anaknya tidur setiap malam di pos militer karena mereka terlalu takut untuk tidur di rumah mereka.

Olandina sedang memegang foto pemakaman suaminya.

Pada tahun 1999, saat situasi memanas usai Jajak Pendapat, Olandina dan anak-anak perempuannya diperintahkan oleh penguasa militer untuk pergi ke Timor Barat. Dari lima anaknya, dua anak perempuan termuda mengikuti Olandina ke Timor Barat, sedangkan tiga anak lain tetap tinggal di Dili. Anak perempuan paling tua yang sedang

bersekolah di Dili, tinggal bersama kerabat Olandina. Anak laki-laki, yang waktu itu berumur 12 tahun, tinggal dengan kerabat yang lain, tetapi menyusul beberapa tahun kemudian dan tinggal bersama Olandina. Setelah ia tamat dari SMA ia bekerja di Sulawesi. Sekarang ia telah kembali ke Dili dan bekerja di sana.

Sedangkan putri kedua Olandina tetap tinggal karena dia sedang belajar untuk menjadi seorang biarawati. Pada tahun 2002 Olandina mendengar bahwa anaknya ini telah meninggal dunia karena sakit.

> *"Waktu anak saya meninggal, saya berusaha untuk urus paspor dan visa, namun tidak berhasil. Saya sakit hati dan sedih karena saya tidak bisa menyaksikan dan menghadiri kematian anak kandung saya. Melihat kuburannya juga saya tidak pernah."*

Waktu Olandina dan kedua putrinya keluar dari Timor Timur, mereka mengungsi bersama salah satu kakak laki-laki Olandina, istrinya, dan lima anak-anaknya. Kakak Olandina dan istrinya meninggal sekitar tahun 200 dan 2004. Sejak itu, Olandina yang menjaga kelima anak mereka. Anak sulung dari kakak laki-lakinya sekarang telah menikah dan tinggal di Tuapukan. Anak kedua seorang pendeta yang melayani gereja di Papua. Anak ketiga, yang ada di Mataram ketika orang tuanya meninggal, telah kembali dan tinggal sendiri di Tuapukan. Kedua perempuan yang lebih kecil saat ini masih sekolah di salah satu SMA Katolik di Kupang.

Olandina merasa sedih karena kehilangan anggota keluarganya, mereka hidup tercerai-berai. Dia pun masih harus terus berjuang untuk bertahan hidup dan berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan membantunya di masa depan. Namun pilihan di Tuapukan, bekas kamp yang menjadi tempat tinggal dia hingga sekarang, sangatlah terbatas. Dia pernah menerima bantuan dari salah satu LSM, tapi hanya sampai tahun 2002. Meskipun dia pada awalnya dijanjikan sebuah rumah dan sebidang tanah oleh pemerintah Indonesia, namun bantuan yang dia terima sangat kecil. Dia akhirnya menggunakan tanah milik pemerintah untuk berkebun.

Pemerintah Indonesia memandang para ibu dan anak Timor-Leste yang mengungsi dan tinggal di Timor Barat sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan untuk para pengungsi. Sampai saat ini Olandina masih tinggal dalam rumah dengan tanah lantai, dan hanya mengandalkan air sumur yang digalinya sendiri.

> *"[Kehidupan] saya dan anak-anak sangat susah saat ini ... Dengan bercerita saya merasa lebih lega ... Saya berdoa kepada Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Pasti mereka bantu saya. Itu bukan secara langsung bantu, tapi [mereka bantu] supaya saya kuat."*

Dia ingat bahwa pada tahun 2008, seorang calon gubernur NTT datang berkunjung dan menjanjikan akan memberikan bantuan. Namun, si calon gubernur itu meminta agar Olandina dan orang-orang di sana memilih dia terlebih dahulu.

> *"Beliau meminta agar kami yang ada di kamp pengungsi mendukungnya dalam pemilu. Beliau berjanji kalau beliau terpilih beliau akan kembali dan memperhatikan kami. Kami pun warga di kamp mendukung saja. Namun ternyata beliau tidak pernah datang dan membawa bantuan."*

Kunjungan ini juga mengakibatkan kecemburuan dari orang lain dalam komunitasnya yang menuduhnya menerima bantuan dan tidak membaginya dengan yang lain. Desas-desus dan kecemburuan ini memuncak dalam serangan terhadap rumahnya.

> *"Mereka menghancurkan rumah saya. Saya kecewa, tapi saya tidak membalas dendam. Saya hanya pasrah kepada Tuhan. Saya berharap bahwa janji Gubernur akan dipenuhi."*

Olandina sedang menimba air dari sumur yang terletak di dekat kamp tempat tinggalnya di Tuapukan.

Sulitnya kehidupan di kampung bekas kamp tersebut tidak membuat Olandina berani untuk kembali ke Timor-Leste. “Baru-baru memang saya sempat ke Timor-Leste, namun saya tidak pergi ke kampung; saya hanya di Dili karena saya takut ke sana [ke kampung].”

JULMIRA SOARES: TIDAK ADA LAHAN UNTUK HIDUP

Julmira bersama suaminya yang kini buta di depan kamp tempat mereka tinggal.

Julmira Soares lahir sebagai anak tunggal di Ossu, Kabupaten Viqueque. Orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Julmira selanjutnya tinggal bersama kerabat yang merawatnya dan menyekolahkannya. Keluarga tersebut memiliki sawah dan dia membantu untuk menanam dan memanen. Dia memiliki masa kecil yang bahagia dan merasa dicintai.

> *"Saya sangat senang karena saya tinggal bersama keluarga yang begitu baik yang menyayangi saya meskipun saya bukanlah anak kandung."*

Julmira menikah dengan seorang laki-laki dari desanya sendiri dan mereka punya satu anak laki-laki. Mereka menghidupi keluarga dengan menjadi buruh tani dan berkebun. Namun, suaminya meninggal karena sakit, dan Julmira kemudian menikah lagi. Ketika pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur pada tahun 1975 Julmira dan keluarganya tidak lari ke hutan, tetapi tetap tinggal di desa mereka Beasu, bersembunyi di rumput alang-alang tinggi dekat rumah mereka.

Pasca Jajak Pendapat, kekerasan terjadi di desanya. Semua harta benda Julmira hancur. Hal ini membuat Julmira tidak memiliki pilihan lain selain ikut mengungsi bersama suami ke Kupang. Kehancuran dan kekerasan pada saat itu masih menghantui Julmira. Pada saat mengungsi, anak Julmira memutuskan untuk tinggal di Timor Timur bersama keluarga besarnya.

Sesampainya di Kupang, Julmira harus menghadapi kenyataan yang membuatnya sedih.

> *"Pertama kalinya kami tiba di Kupang kami tidak memiliki rumah. Bersama orang banyak, kami tinggal ... di kamp Tuapukan. Kami datang dan duduk di bawah pohon saja, lalu pemerintah datang dan bangun terpal untuk kami tinggal. Saya menangis karena telah berpisah dengan anak saya dan keluarga-keluarga saya.*

Saya dan suami saya membuat tempat untuk berteduh, yaitu dengan terpal yang dipasang seperti terpal kemah agar dapat tidur. Lewat beberapa hari kami mendapat bantuan. Akhirnya kami dapat makan juga. Bantuan ini bukan hanya beras saja, tapi terdapat banyak sekali peralatan dapur dan juga terdapat minyak, sabun mandi, sikat gigi, sampo, dan lain sebagainya. Setelah kami diterima oleh warga di kamp Tuapukan ini, kami lalu membangun sebuah rumah untuk dapat kami huni walaupun rumahnya sangat kecil."

Julmira berdiri di belakang kamp tempat ia tinggal.

Kehidupan kamp di Tuapukan dijalani mereka dengan penuh perjuangan. Kesulitan bertambah ketika suami Julmira mengalami kebutaan sehingga tidak dapat lagi bekerja. Hal ini membuat semua tanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka dipikul Julmira. Julmira harus berjalan jauh untuk mengambil air, sementara mereka tidak memiliki lahan. Walaupun begitu, Julmira berhasil berkebun dan menanam sayuran, pisang, singkong, dan jagung di lahan orang lain. Pada musim panen dia mengumpulkan sisa-sisa padi dari sawah orang lain. Seiring bertambahnya usia, pekerjaan menjadi lebih sulit, terutama karena tidak adanya keluarga yang dapat membantu. Mereka sedikit tertolong karena kadang-kadang ada tetangga yang memberi mereka makanan untuk membantu mereka.

Julmira sangat khawatir dengan kondisi mereka, dan tidak tahu bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Dia ingin melihat anaknya dan keluarga anaknya, tetapi takut kembali ke Timor.

> *"Saya sering mengalami sakit kepala, mata, hati, tangan, dan kaki. Sekalipun kaki sakit, saya tetap kerja kebun. Banyak hal yang saya pikirkan. Kami sudah tua, kerja sendiri, hidup di kamp, dan jauh dari keluarga. Saya rindu bertemu kembali keluarga di Timor-Leste. Saya terus berdoa dan mau pergi ke Timor-Leste ... Saya memang hanya pikir kami berdua dan anak satu-satu yang tinggal di sana [Timor-Leste]. Dia sudah ada istri dan anak, tapi kami belum pernah ketemu dia. Saya berharap dia datang melihat kami. Saya tidak ada uang untuk buat paspor. Makan minum saja susah. Kalau pemerintah mau bantu kami [sebaiknya urus paspor]. Juga kami harus ada uang."*

MARCELINA MONTEIRO:
TINGGAL SENDIRI

Marcelina Monteiro berasal dari Desa Osudesima di Viqueque. Pada tahun 1975 dia melarikan diri dari desanya bersama keluarganya ke Gunung Matebian. Mereka diteror oleh militer Indonesia yang menyerang tempat tinggal mereka dengan bom dan tembakan dari pesawat. Mereka kemudian pindah ke Ossu. Di sana Marcelina dan keluarganya memulai hidup dengan berkebun dan menjual hasilnya di pasar.

Dia sudah menikah, tapi kemudian bercerai sebelum mereka sempat memiliki anak.

> *"Saya cerai dengan suami waktu di Timor-Leste karena sifatnya tidak baik ... [Dia] selalu main judi dan kalau saya omong [tentang itu] kami selalu berkelahi ... Dia mau kawin lagi, jadi dia pukul saya. Lebih baik berpisah saja. Saya tidak mau [sama dia] lagi."*

Pada kekerasan tahun 1999 Marcelina mencoba menyelamatkan diri lagi bersama kakak laki-lakinya dan ibunya dengan lari ke hutan. Namun mereka dicegat militer Indonesia dan dikembalikan ke Ossu.

> *"Sampai di Ossu kami disuruh naik mobil tentara untuk diangkut ke Beaco dan diangkut [lagi] dengan kapal tentara nomor 503. Kami diturunkan di Pelabuhan Bolok [dekat Kupang]. Sampai di sana kami diangkut lagi dengan truk. Tentara yang suruh kami. Saya takut, jadi ikut saja. Kami diturunkan di Tuapukan yang menjadi tempat tinggal kami sampai sekarang."*

Dia ingat bahwa para pejabat pemerintah Indonesia datang dan mengumpulkan data mereka, tetapi tidak semua orang dari Timor Timur menerima bantuan.

> *"Hanya yang punya keluarga utuh yang dapat bantuan, tapi kami yang janda ini tidak dapat apa-apa. Pemerintah ini lupa [kami]. Kami mendapatkan rumah, tapi rumah itu tidak layak dihuni. Pemerintah mau bangun rumah, tapi terlalu banyak orang, jadi kami bangun rumah daun."*

Beberapa bulan setelah tiba di kamp, kakak laki-laki Marcelina meninggal. Pada tahun 2013 ibunya juga meninggal. Hal ini sangat menghancurkan Marcelina.

> *"Hati saya masih sakit karena kakak dan mama saya meninggal di kamp pengungsi. Saya tidak mau [kembali] ke Timor-Leste karena kakak dan mama saya meninggal dan kubur di sini ... Ada kakak, tapi dia tinggal dengan keluarganya. Saya cerai dengan suami dan tidak punya anak kandung. Anak [yang saya pelihara] ada satu orang, tapi itu juga anak kakak saya [yang] sudah pergi kerja kelapa sawit."*

Marselina dengan kain pemberian ibunya

Hidup bagi Marcelina sulit dan dia berjuang untuk bertahan hidup sendiri. Rumahnya hampir rubuh dan dia tidak punya uang untuk memperbaikinya. Dia menanam jagung, ubi, dan pisang, dan menjual sayuran di pasar.

> *"Saya tinggal di sini sendiri, tidak punya anak. Sumber penghidupan saya yakni berkebun [dekat rumah] dengan tanaman jagung, ubi, dan pisang. Saya juga punya kebun [lain], tapi jauh. Langgar kali [sungai] dulu baru sampai ke kebun [itu]. Saya jual sayur sejak tahun 2002. Saya pergi ke Oesao [pasar] ambil sayur jam 5 pagi ... [Jika] saya berjualan, sebentar laku, saya senang. Tapi kalau tidak laku, itu yang buat saya pikiran, mau makan apa? Saya berusaha saja untuk bisa makan dan minum sehari-hari. Lain dari itu saya tidak tahu mau*

berjuang apa. Orang tua sudah meninggal, jadi saya hanya perjuangkan diri sendiri ... Karena babi tidak ada lagi ... saya mau pelihara babi, dua ekor lagi ... Sumber penghidupan sekarang tidak beda dengan di Timor-Leste karena di sana pun saya kerja seperti sekarang ini."

Marselina di depan tempatnya berdagang sayuran

Marcelina memperoleh kekuatan dari jaringan teman-temannya. “Orang tidak bantu saya. Saya usaha sendiri. Kalau saya sudah sedih, saya kumpul dengan Mama Oland [Olandina] atau orang di dekat rumah saya.”

EDIANA MARIA S. AMARAL: RUMAH YANG TIDAK LAYAK

Ediana berasal dari Desa Dilor di Kabupaten Viqueque. Dia masih berusia 16 tahun ketika dia dan orang tuanya dibawa oleh militer Indonesia ke Timor Barat pada tahun 1999. Ediana masih merasakan kesedihan ketika harus meninggalkan anggota keluarga di Timor Timur.

Di Tuapukan Ediana bersama suaminya berjuang untuk bertahan hidup. Suaminya menjadi tukang ojek. Sementara Ediana bekerja sebagai buruh tani. Mereka juga berkebun di lahan milik pemerintah, menjual kue di depan rumahnya, dan beternak babi dan ayam.

Ediana bersama suami dan empat orang anak tinggal di rumah kecil dengan dua kamar. Sama seperti semua rumah lain di sana, rumah mereka berdinding bebak dan beratap alang-alang. Tuapukan yang terletak di dataran rendah rentan sekali terhadap kebanjiran dan kebocoran pada musim hujan dan kebakaran pada musim kemarau.

> *"Tahun 2004 terjadi kebakaran [akibat] anak kecil main api [pada] siang hari. Sekitar 60an rumah lebih, hampir satu kompleks ini, terbakar. 2005 baru [orang] bangun rumah kembali."*

Edianan bersama anak laki-lakinya.

Ediana dan suaminya berharap bahwa mereka akan diberikan tanah dan rumah oleh pemerintah Indonesia.

ANGELINA SOARES: TIDAK SANGGUP BAYAR BELIS

Pada umumnya, para pengungsi Timor Timur tidak mengenal siapa yang menjemput dan memaksa mereka pergi ke Timor Barat pada 1999. Tetapi, beda halnya dengan Angelina Soares yang dijemput oleh saudaranya yang bertugas sebagai tentara. Semua anggota keluarga ikut bersama ke Timor Barat.

Namun, setelah tinggal di Tuapukan, seperti warga lainnya, Angelina juga merasa tertipu dengan janji pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang layak ketika mereka tiba di Timor Barat.

> *"Dulu waktu diperintahkan untuk datang, kami dijanjikan untuk diberi rumah, padahal itu hanya tipuan. Akhirnya saya harus banting tulang untuk cari makan. Karena tidak ada tanah, tidak ada kebun, maka saya biasa bantu orang kerja di kebun mereka agar kami bisa makan. Saya datang dengan ketiga orang [anggota keluarga] ke Tuapukan sini. Kami sangat menderita. Beras raskin kadang kasi, kadang tidak. Mana yang dekat dengan kepala desa, itu yang dapat."*

Kehidupan di di bekas kamp Tuapukan benar-benar sulit sehingga Angelina harus berjuang sekedar untuk bertahan hidup. Bahkan Angelina tidak mampu membayar uang sekolah anaknya.

Sama seperti keluarga Ediana, Angelina tinggal di rumah kecil berdinding bebak, berlantai tanah, dan atap daun yang mudah bocor saat hujan. Sumur yang paling dekat dengan rumahnya digunakan juga oleh banyak orang lain sehingga sering kekeringan. Dia terpaksa pergi ke sumur pada jam 1 atau 2 malam agar dia bisa mendapatkan air.

Suami pertama Angelina bunuh diri sewaktu mereka masih tinggal di Timor-Leste. Dari suami pertama itu, Angelina mempunyai empat anak, tapi dua meninggal. Satu meninggal dalam kandungan dan satu lagi meninggal waktu anak itu mau masuk SMA. Angelina mengungsi ke Tuapukan bersama suami kedua dan dua orang anak pada tahun 1999.

Tetapi hanya dalam beberapa bulan, suami keduanya kembali ke Timor Timur dan membawa serta anak sulung mereka tanpa memberitahu Angelina. Walau terpukul dan ingin bertemu keluarganya, Angelina memutuskan untuk tidak kembali karena belis untuk anak keduanya belum dibayar.

Angelina bekerja di kebun milik orang lain untuk menghidupi keluarganya.

> *"Belis anak belum kasih 10 juta, jadi anak saya ikut tinggal dengan istri dan mama mantu. Jadi saya tinggal sendiri [sekarang]."*

Dalam keadaan yang sulit, Angelina tetap berharap pada Tuhan dan berdoa kepada Bunda Maria menurut keyakinan agama Katolik. Sebuah patung Bunda Maria, yang masih Angelina pelihara secara baik, termasuk di antara sedikit barang yang berhasil dibawanya ke Timor Barat. Patung tersebut dipakai sebagai tempat berdoa di rumah Angelina sampai sekarang.

ROSA SOARES LOPES: MENANTI LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI

Ketika hasil Jajak Pendapat tahun 1999 diumumkan, Rosa beserta suami dan anak-anaknya diperintahkan untuk mengungsi ke Timor Barat oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengatakan bahwa mereka sudah menyediakan rumah dan kunci sehingga para pengungsi tidak perlu membawa apa-apa. Rosa meninggalkan orang tua dan keluarga besar dengan harapan adanya kehidupan baru. Namun, saat dia bersama suami dan anak-anaknya sampai di Tuapukan, tidak ada rumah, tanah, atau kebun yang sebelumnya dijanjikan. Segala sesuatu harus diusahakan sendiri, bahkan dia sampai harus membeli daun dari orang untuk membangun rumah. “Muka saya gelap dan saya tidak tahu apa-apa lagi.” Bahkan suaminya, Bernadus Lopes, menderita sakit sampai pada 2007 karena mengalami beban berat ketika memikirkan nasib mereka.

Saat ini Rosa tinggal berlima bersama anak, menantu, dan dua orang cucu. Dua anak lain dari Rosa sudah meninggal sebelum Rosa mengungsi ke Tuapukan. Mereka tinggal di rumah sederhana dengan lantai tanah dan tiga kamar yang dipisahkan oleh beberapa potong kain tua dan hanya diterangi oleh satu bola lampu. Di rumah sebelah, tinggal

putri Rosa dan keempat anaknya. Keenam cucu Rosa menjadi sumber kegembiraan Rosa. Mereka memiliki akses ke sumur untuk menimba air, tetapi pada musim kemarau sering kering. Hanya satu dari putranya memiliki pekerjaan sebagai buruh tani. Mereka juga memiliki satu ekor babi, tetapi sulit bagi mereka untuk menemukan makanan babi.

Rosa dengan anak dan cucunya.

Kesehatan Rosa saat ini tidaklah baik. Dia mengalami retak tulang dan batu ginjal. Namun, Rosa sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Rumah sakit terdekat berada di Kupang yang berjarak 20 kilometer dari Tuapukan. Rosa cukup beruntung karena mendapat bantuan dari JPIT untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan obat. Namun Rosa masih membutuhkan perawatan lanjutan. Selain itu, masih banyak sekali perempuan pengungsi lainnya di Tuapukan yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Rosa tidak takut untuk kembali ke Timor-Leste sebab ada banyak keluarga di sana. Hanya saja dia tidak memiliki uang untuk kembali.

AMELIA DAN MARIANA SOARES: MEMPERJUANGKAN HIDUP BERSAMA

Seperti banyak yang lainnya, Amelia diperintahkan untuk pergi ke Timor Barat dan dijanjikan bantuan perumahan. Dia mengungsi bersama empat anaknya, salah satunya adalah Mariana. Suaminya tewas dalam di Dili, menjadi korban kekerasan setelah Jajak Pendapat. Dalam perjalanan menuju Timor Barat, Amelia terpisah dengan salah satu anaknya yang sampai hari ini tidak diketahui nasibnya.

> *"Saya sedih karena harus berpisah dengan keluarga, termasuk dengan salah seorang anak saya. Dia tinggal di mana saya tidak tahu karena waktu itu perang dan kami lari masing-masing. Apa dia masih hidup atau sudah mati, saya juga tidak tahu."*

Amelia pun harus mendapati bahwa semua janji dari pemerintah adalah bohong belaka. Dia tidak pernah menerima bantuan seperti yang dijanjikan.

"Kami disuruh untuk datang ke Indonesia [dan dibertahukan] jangan takut, sudah ada rumah, padahal tidak ada apa-apa. Kami datang tidak bawa apa-apa. Akhirnya kami harus berjuang untuk bisa hidup."

Sekarang Amelia sudah tua dan sakit-sakitan. Amelia selalu dibantu oleh anaknya Mariana, yang saat ini berusia 30 tahun dalam berbagai hal. Mariana belum menikah dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Dia tinggal bersama ibunya dan delapan anggota keluarga lainnya di rumah yang sangat sederhana. Dialah orang yang berjuang untuk mendapatkan air dari sumur yang digunakan oleh banyak orang. Walaupun Mariana buta huruf, ia adalah perempuan pekerja keras dan sungguh-sungguh dalam bantu ekonomi keluarga. Ia berkebun, bekerja di sawah, dan berternak. Mariana berharap agar pemerintah akan menyediakan keluarganya dengan rumah dan tanah dan sumur lain yang baik.

Mariana, anak Amelia.

JULETA DA COSTA BELO: ANAKNYA DITUDUH BERBUAT KRIMINAL

Ayah Juleta meninggal ketika Juleta berusia dua tahun dan dia hanya ingat bahwa dia bersama tigak adiknya dibesarkan oleh ibunya. Waktu ia dipindahkan ke Timor Barat pada tahun 1999, Juleta terpisah dengan ibunya yang tinggal di Baucau. Pada waktu itu Juleta dijanjikan bahwa dia akan dikembalikan ke Timor Timur dalam dua atau tiga bulan setelah tiba di Timor Barat. Tetapi sampai saat ini, ia masih tinggal di bekas kamp Tuapukan.

> *"Kita mau [bawa] barang-barang, [mereka] juga bilang jangan; di sana itu sudah siap ... tinggal terima kunci [untuk rumah baru] ... Beta [Saya] punya anak ... masih kecil, [umur] satu bulan ... Beta dengan dia yang [datang] dengan kakak ... [Waktu] turun di sini, gelap sekali. Hanya pohon duri yang penuh ... angin lagi, su tengah malam. Kita mau masak bubur [untuk bayi] di mana?"*

Pada tahun 2010, Juleta mendengar bahwa ibunya telah meninggal. Juleta tidak pergi untuk pemakaman ibunya yang meninggal, tapi akhirnya pergi lewat jalan rahasia.

> *"Kami mau pergi juga, tidak bisa karena harus urus paspor sendiri.*
>
> *Saya pernah ke sana, tetapi melewati jalan tikus karena tidak ada paspor. Bagaimana mau urus paspor kalau [saya dalam] rumah saya saja; [saya] masak di situ, makan di situ, tidur di situ, dan uang saja susah. Namun karena rindu, ya, harus lewat jalan tikus."*

Di Tuapukan, Juleta tinggal dalam satu rumah kecil bersama suaminya, delapan anak, satu orang menantu, dan satu orang cucu. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan makanan yang cukup. Hasil kebun mereka tidak pernah cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka masih dapat bertahan dengan mengandalkan penghasilan ojek dari salah satu anaknya. Juleta juga memelihara dua ekor babi dan dua ekor kambing. Anak Juleta yang bekerja sebagai ojek motor suatu kali pernah dituduh sebagai penabrak orang di jalan. Padahal dia bermaksud menolong ketika mendatangi korban tabrak lari. Anaknya ditangkap di rumahnya pada malah hari tanpa disertai surat penangkapan. Anaknya dapat bebas setelah mendapat bantuan dari seorang pastor yang berbicara dengan kepolisian.

Juleta masih berharap bahwa kakak laki-lakinya yang di Timor-Leste akan mengunjungi mereka di Tuapukan. Dia juga berharap pemerintah akan menyediakan tanah, rumah, dan kebutuhan makan keluarganya.

Juleta bersama anak dan cucu.

TERESA FREITAS:
HARUS MENGURUS CUCU

"Di [Timor Timur] orang baku tembak ... Orang datang ambil kami dengan kapal. Mereka lepas kami di pelabuhan [Kupang], kemudian kami dijemput oleh bis [yang] lepas kami di posko [Tuapukan], tapi karena orang marah kami, kami pindah ke tempat lain berteduh di bawah pohon. Waktu itu hutan semua; kami kesusahan air, leher kami kering semua. Kami tidak tahu tempat air di mana. Makanan, piring, dan sendok hilang semua dalam kapal ... Sampai di sini, saya sangat sulit karena saya sudah tua dan harus kerja di kebun orang juga."

Teresa Freitas berusia 75 tahun. Dia berasal dari Kuelicai di Kabupaten Baucau dan hanya berbicara Bahasa Makasai. Dia tinggal bersama satu anak dan satu cucunya. Istri anaknya meninggalkan mereka dan kembali ke orang tuanya .

Mereka tinggal di rumah kecil dengan atap alang-alang yang bocor pada saat hujan. Untungnya tetangga mereka memiliki sumur sehingga mereka mudah mengakses air. Namun Teresa harus bekerja keras di kebun untuk mencukupi kebutuhan makan keluarganya. Sementara itu fisiknya sudah tidak mendukung di untuk bekerja berat. Sampai sekarang Teresa cukup menderita karena harus juga mengurus cucu yang ditinggalkan ibunya.

> *"Yang buat [saya] sangat berpikiran adalah perang. Di sana pun perang buat saya menderita; di sini pun saya menderita ... karena saya sudah tua, saya sendiri kerja, makanya saya pikiran."*

Ketika ditanya mengenai bantuan pemerintah, Teresa menjadi marah.

> *"Sejak kapan? Apa yang telah mereka kasih kepada kami? Kami tinggal saja di sini. Kami hidup sendiri saja. Beras saja kami beli dan kami makan. Kalau tidak ada, kita duduk saja begini."*

Kotak memori Teresa Freitas.

DOMINGAS SOARES: HIDUP DALAM HUTAN, DURI, DAN ALANG-ALANG?

Domingas pernah hidup di hutan ketika pasukan militer Indonesia menyerang desanya, Trilolo, Kabupaten Baucau tahun 1975. Dia tinggal di hutan bersama tiga saudara dan orang tuanya selama kurang lebih enam bulan. Dia mulai bersekolah pada tahun 1979 namun baru belajar bahasa Indonesia pada tahun 1984. Dia pindah ke Dili saat menempuh pendidikan SMA. Pada tahun 1990 ayahnya mengikuti pelatihan militer di Bali dan Surabaya untuk menjadi Hansip.

Dia menikah pada tahun 1992, melahirkan anak pertama pada tahun 1993, dan pindah kembali dari Dili ke orang tuanya di Viqueque. Suaminya adalah pegawai negeri dan bekerja di Kodim. Pada tahun 1999 mereka tinggal di Baucau. Setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan, Domingas bersama suami dan empat anaknya dipindahkan ke Timor Barat. Ia meninggalkan orang tua dan keluarga besarnya.

> *"Empat belas tahun yang lalu, ketika ... terjadi kerusuhan di Dili, Timor Timur, pemerintah menyuruh kami untuk datang ke NTT. Waktu itu saya dan suami tidak ingin datang karena kami tidak punya keluarga di sini. Namun pemerintah bilang, "Pergi saja ... di sana sudah ada rumah yang disiapkan untuk menjadi tempat tinggal.*

Sudah ada kunci rumahnya, jadi tinggal ambil kunci, buka pintu, dan masuk tinggal.

Pertama kali datang, [kami] bertemu dengan hutan duri dan alang-alang ... Saya bingung karena tidak tahu mau tinggal di mana ... Kami buka terpal di depan posko selama tiga bulan. Kemudian minta izin warga lokal untuk potong daun dan bangun rumah sendiri. Daun yang dipotong itu juga dibeli. Saya dan suami yang potong daun untuk bangun rumah. Sebagai orang Baucau kami tidak dapat seng yang disediakan untuk atap seperti ... [orang] dari Viqueque."[68]

Domingas melahirkan anaknya yang kelima di kamp Tuapukan, tapi bayi itu meninggal empat hari kemudian. Setelah itu ia melahirkan dua anak lagi yang sampai sekarang masih hidup. Ibu Domingas pernah mengunjunginya di Tuapukan dan ketika kembali ke Timor-Leste membawa anak sulung Domingas yang sudah putus sekolah sejak SMP.

Domingas tidak memiliki sumur, sehingga kebutuhan air dia penuhi dengan meminta air dari sumur milik penduduk di sana. Untuk keperluan mencuci, dia mencuci di sungai. Selain itu, ia dan keluarganya belum menerima bantuan apapun, meskipun sering dijanjikan.

"Saya masih sedih ... kami di situ mulai dari 1999 sampai 2006. Lalu pemerintah bilang [kami] harus keluar dari kamp ... [Pemerintah] bilang kami harus beli tanah supaya pemerintah [bisa] bangun rumah [buat kami]. Lalu orang yang ada gaji bisa beli [tanah], tapi yang tidak bisa beli tanah, mereka tetap tinggal di kamp. [Bagi mereka] yang bisa beli tanah, pemerintah sudah bangun rumah."

Saat ini, Domingas serta keluarganya tinggal di sebuah rumah kecil tiga kamar berlantai tanah. Suaminya pernah bekerja di Koramil di Camplong, sekitar 20 kilometer dari Tuapukan, tetapi sekarang sudah pensiun dini akibat katarak. Mereka bergantung pada gaji pensiunan, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah keempat anaknya. Domingas berharap pemerintah akan memberikan bantuan untuk pendidikan anak-anaknya yang masih tinggal dengan dia dan suaminya di Tuapukan.

Domingas bersama keluarga.

Temuan dan Rekomendasi

10

Setelah kami mendengarkan pengalaman 60 orang perempuan korban di Indonesia, sekaligus menyimak kekecewaan dan harapan mereka, kami berupaya untuk menyusun pemahaman baru dari cerita mereka. Upaya untuk menelusuri setiap cerita dan membangun pemahaman baru tersebut menggiring kami kepada temuan pola yang kemudian kami rumuskan dalam temuan kunci. Bab ini menjabarkan temuan kunci tersebut, berjumlah 12 temuan, dilanjutkan dengan tawaran mengenai langkah yang patut untuk diambil, yang kami sampaikan di bagian rekomendasi.

Penelitian ini bukanlah penelitian kuantitatif dan tidak menggunakan metode pengumpulan data lewat pemilihan narasumber secara acak. Sebaliknya, para peneliti dan korban diajak mencari kawan senasib, perempuan yang dekat dengan mereka, yang mengalami kekerasan dan impunitas yang sama. Para peneliti menggunakan sebuah panduan dalam mengumpulkan informasi kualitatif, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Narasumber diajak berbagi tentang pengalaman mereka, sejauh mereka siap dan merasa nyaman. Dari proses ini, kami menemukan narasumber yang baru pertama kali bercerita dan sangat bersemangat untuk mengungkapkan semua hal yang dia alami. Namun ada pula narasumber yang bercerita sedikit saja dan tetap menyembunyikan banyak hal di dalam dirinya.

Di tengah keterbatasan yang kami hadapi, kami menemukan bahwa kekerasan yang dialami oleh perempuan melingkupi banyak aspek dan menimbulkan dampak yang kompleks. Secara lebih detail, temuan tersebut diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

TEMUAN KUNCI 1:
Perempuan mengalami kekerasan sistematis selama konflik

Indonesia telah menjadi bagian dalam berbagai upaya internasional terkait penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Dari keikutsertaan dalam Konferensi Beijing 1995, keputusan untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap perempuan dalam konflik (Resolusi 1325 dan turunannya), dan terakhir menandatangani Deklarasi tentang

Komitmen untuk Menghentikan Kekerasan Seksual dalam Konflik pada tahun 2013. Namun, berdasarkan pengalaman kekerasan yang diungkapkan oleh korban yang terlibat dalam penelitian ini, mulai dari korban kekerasan di tahun 1965 hingga saat ini, lebih dari 50% perempuan korban mengalami penyiksaan dan hampir 50% mengalami penahanan sewenang-wenang.

Secara lebih rinci, kami menemukan bahwa sejumlah 29 perempuan mengalami penahanan sewenang-wenang; 34 orang mengalami penyiksaan; 22 orang yang kehilangan suami atau anggota keluarga karena dibunuh atau dihilangkan; 29 orang yang suaminya mengalami penahanan dan 15 orang yang kehilangan harta bendanya. Sejumlah 19 orang mengalami kekerasan seksual dan 4 orang mengalami kekerasan sewaktu hamil.

Kekerasan seksual sangat sulit untuk diungkap, sekalipun para korban sudah berada dalam situasi yang sudah aman. Rasa malu, ketakutan akan stigma dan penghakiman dari keluarga dan masyarakat, kekhawatiran soal kerahasiaan, dan ketidakpastian tentang sistem peradilan pidana, menjadi kendala bagi narasumber untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang mereka alami. Di Aceh, melalui qanun syariah, perempuan yang melaporkan dirinya telah diperkosa akan dikenakan tuduhan berzinah jika tidak memiliki cukup bukti. Norma dan budaya yang berlaku di masyarakat juga sering menempatkan perempuan korban perkosaan sebagai pihak yang bersalah.

Sebelas perempuan dari Aceh yang berpartisipasi dalam penelitian ini mengalami penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi seiring diberlakukannya operasi militer, termasuk selama periode 2002-2005. Tujuh dari mereka mengalami penahanan di luar hukum dan/ atau penyiksaan selama periode 1990-1998 saat militer Indonesia melakukan operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Hal ini menunjukkan adanya kekerasan berkepanjangan terhadap perempuan dalam situasi konflik. Perempuan dijadikan sasaran karena suami, ayah, saudara lelaki atau paman mereka dicurigai sebagai pendukung atau anggota GAM. Salah seorang narasumber juga dituduh sebagai kombatan. Enam perempuan melaporkan adanya kekerasan seksual, termasuk penelanjangan paksa, pelecehan seksual, ancaman pemerkosaan, pemerkosaan, dan penyerangan seksual oleh militer Indonesia. Enam di antaranya juga melaporkan perusakan rumah dan harta bendanya, serta enam orang kehilangan suami atau ayahnya.
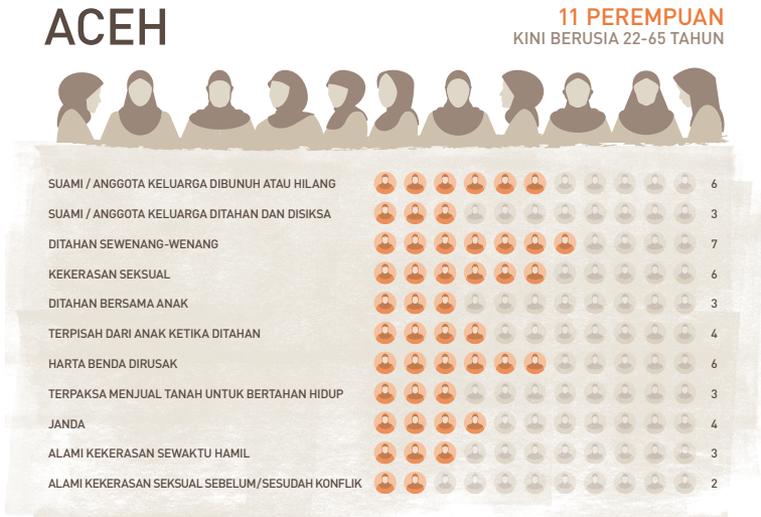
Sebelas perempuan dari Papua menceritakan tentang kekerasan yang terjadi sejak 1960an sampai dengan sekarang. Tiga dari mereka mengalami kekerasan setelah mengikuti upacara penaikan bendera Bintang Kejora. Lima perempuan melaporkan bahwa kampungnya diserang sebagai bagian dari operasi militer Indonesia melawan OPM,

dan tiga orang secara jelas dijadikan sasaran karena afiliasi suami atau dirinya sendiri dengan OPM. Enam orang pernah ditahan di luar hukum dan disiksa. Lima melaporkan bahwa suami atau anggota keluarganya dibunuh atau dihilangkan, tiga melaporkan kekerasan seksual termasuk pemerkosaan, dan tiga di antaranya pernah dicoba dibunuh oleh tentara Indonesia.

Berdasarkan 19 orang korban 65 dari Yogyakarta dan Kupang, 13 orang mengalami penahanan sewenang-wenang. Tiga orang diantaranya bahkan ditahan lebih dari 13 tahun. Mereka juga mengalami penyiksaan karena dianggap terlibat dengan PKI ataupun Gerwani. Delapan dari tiga belas perempuan ini menceritakan bahwa mereka mengalami kekerasan seksual, termasuk penelanjangan paksa dan pelecehan seksual. Empat orang menceritakan kehidupan mereka yang sangat sulit, mengalami diskriminasi dan pemiskinan akibat ditahannya ayah ibu mereka atau kerabat lainnya.

Sementara itu, dari delapan perempuan di Pulau Buru, lima adalah putri dan dua adalah istri dari mantan tahanan politik yang dibuang ke Pulau Buru. Satu orang adalah perempuan kelahiran Buru yang menikah dengan tapol, dan menjadi korban kekerasan berbasis agama pada tahun 1999. Tak satu pun dari perempuan di Pulau Buru ini mengalami penahanan atau penyiksaan secara langsung, tetapi mereka menanggung beban luar biasa untuk bisa bertahan hidup.

8 PEREMPUAN
KINI BERUSIA 53-79 TAHUN

	Jumlah
AYAH DITAHAN	4
SUAMI DITAHAN	3
MELAPORKAN MENGALAMI DISKRIMINASI	6
DISIKSA	4
DITAHAN SEWENANG-WENANG	3

YOGYA

11 PEREMPUAN
UMUR DITAHAN 14-25 · KINI BERUSIA 59-70 TAHUN · LAMA DITAHAN >1-13 TAHUN

	Jumlah
DITAHAN SEWENANG-WENANG	10
MENGALAMI KEKERASAN	10
MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL	4
ANAK PEREMPUAN HILANG	1
PENARI / ARTIS	5
MAHASISWA / GURU	4
ISTRI / ANAK PEREMPUAN DARI ANGGOTA PKI	2
TIDAK PUNYA HARTA BENDA / RUMAH	1
DUKUNGAN MEDIS DARI LPSK	5

BURU

8 PEREMPUAN
KINI BERUSIA 45-78 TAHUN

	Jumlah
AYAH DITAHAN DAN DIKIRIM KE BURU	5
SUAMI DITAHAN DAN DIKIRIM KE BURU	2
DIKIRIM KE BURU	7
MELAPORKAN MENGALAMI DISKRIMINASI	5
DITAHAN SEWENANG-WENANG	0
DISIKSA	0
KEKERASAN SEKSUAL	0

TEMUAN KUNCI 2:
Kapasitas perempuan untuk meraih keadilan semakin lemah

Di Indonesia, perempuan korban semakin sulit untuk dapat meraih keadilan. Impunitas adalah situasi yang dialami semua perempuan korban konflik atau kekerasan lainnya. Dari 60 orang perempuan korban, tak satu pun berhasil membawa kasusnya ke pengadilan. Berbeda halnya dengan Timor-Leste dan Myanmar; enam perempuan korban dari Timor Leste, dan empat dari Myanmar berhasil membawa kasus mereka ke pengadilan, walaupun dengan hasil yang berbeda-beda.

Perempuan korban di Aceh harus menerima kenyataan bahwa dana bantuan dari pemerintah untuk korban konflik sulit diakses. Sulitnya pembuktian dalam perkosaan membuat aparat mengesampingkan kekerasan seksual sebagai kriteria dalam penentuan penerima bantuan. Sementara korban lainnya merasa bahwa hanya mereka yang memiliki hubungan dekat dengan aparatlah yang dapat menerima bantuan dengan mudah. Perempuan korban 1965 dan Papua juga masih jauh dari keadilan karena belum adanya pengakuan dari pemerintah terkait kekerasan di tahun 1965 dan tidak adanya tanggapan baik atas tuntutan yang diungkapkan oleh perempuan korban kekerasan di Papua.

Perempuan korban merasa bahwa upaya mencari keadilan atau penyelesaian hanya akan mendatangkan masalah baru dan penderitaan baru. Ketakutan ini diperkuat oleh kegagalan penegak hukum dan sistem peradilan dalam menyelidiki atau menuntut pelaku. Semakin lama berlangsungnya impunitas, stigma dan diskriminasi, maka kepercayaan diri dan kapasitas perempuan untuk mengartikulasi ketidakadilan yang mereka alami dan advokasi untuk meluruskan sesuatu yang salah, akan semakin lemah.

TEMUAN KUNCI 3:
Perempuan berinisiatif untuk membangun perdamaian di tingkat lokal namun terpinggirkan dalam negosiasi dan proses perdamaian resmi yang diprakarsai pemerintah

Di tengah parahnya dampak konflik terhadap perempuan dan keluarga mereka, perempuan korban berulang kali menyatakan keinginan mereka untuk mewujudkan perdamaian bagi dirinya dan generasi mendatang. Namun, tidak satupun dari semua perempuan korban terlibat dalam proses perdamaian formal yang diinisiasi oleh negara. Semua langkah perdamaian yang dilakukan oleh para narasumber merupakan upaya yang dilakukan mereka bersama kelompok masyarakat sipil dan umumnya bersifat lokal.

Enam dari 27 perempuan korban kasus 1965 dalam penelitian ini telah memberikan kesaksian secara terbuka di hadapan publik dalam acara dengar kesaksian yang digelar oleh masyarakat sipil. Hampir semuanya telah turut berpartisipasi dalam berbagai acara publik baik itu rilis media, dialog di radio atau televisi, maupun peluncuran buku yang terkait dengan pengungkapan kebenaran dan penuntutan untuk pemulihan dan pelayanan bagi korban.

Sebelas perempuan narasumber di Aceh pun ikut terlibat dalam proses dengar kesaksian yang digelar oleh masyarakat sipil di Aceh. Para perempuan korban di Aceh memainkan peran besar dalam berbagai program penanggulangan konflik, pemberian dukungan kemanusian kepada korban, pemantauan pelanggaran HAM dan turut aktif dalam advokasi perdamaian.[70] Namun demikian, tak satupun dari sebelas peserta penelitian ini yang secara spesifik menyebutkan keterlibatan mereka dalam upaya pembangunan perdamaian resmi.

Di Papua, walaupun masyarakat sipil giat mendorong dialog damai antara Papua dan Jakarta, namun partisipasi perempuan masih tetap minim. Dari proses penelitian ini, hanya dua orang perempuan dari Papua yang menyebutkan partisipasinya dalam dengar kesaksian dan perkumpulan korban yang digelar masyarakat sipil dan gereja.

TEMUAN KUNCI 4:
Walaupun perempuan korban mempunyai daya juang dan kreativitas untuk bertahan, masalah ekonomi membuat mereka sulit mengakses keadilan

Berdasarkan cerita narasumber, dari 60 perempuan, delapan diantaranya kehilangan lahan kebun atau sawah mereka; 15 orang kehilangan semua harta benda mereka; 22 orang kehilangan suami atau kerabat laki-laki yang sebelumnya menjadi tempat bergantung dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi; dan 29 orang harus kehilangan suami atau kerabat laki-laki karena ditahan. Sementara itu, 33 orang harus meninggalkan tempat tinggal yang menjadi sumber penghidupan mereka karena mengungsi atau dipindahkan secara paksa.

TEMUAN KUNCI

WALAUPUN PEREMPUAN KORBAN MEMPUNYAI DAYA JUANG DAN KREATIVITAS UNTUK BERTAHAN, MASALAH EKONOMI MEMBUAT MEREKA SULIT MENGAKSES KEADILAN.

DARI 60 PEREMPUAN

MAYORITAS

BERASAL DARI KELUARGA SEDERHANA

33 TERPAKSA MENGUNGSI ATAU DIPINDAH PAKSA

29 ANGGOTA KELUARGA LAKI-LAKINYA DITAHAN

22 PENCARI NAFKAHNYA HILANG

15 HILANG SEMUA HARTA BENDA

8 HILANG KEBUN ATAU SAWAH

Mayoritas dari 60 perempuan ini berasal dari keluarga sederhana, yang umumnya bekerja sebagai petani atau pedagang kecil. Pada saat terjadi krisis, tak ada tabungan yang dapat menjadi pegangan mereka. Kebanyakan dari mereka mengalami pelanggaran hak-hak sipil politik bersamaan dengan pelanggaran hak-hak sosial ekonomi. Kombinasi ini membuat mereka semakin rentan sehingga setelah mengalami kekerasan, waktu dan tenaganya habis sekadar untuk bertahan hidup.

Kehilangan anggota keluarga khususnya suami, ayah ataupun anak laki-laki, harta benda yang rusak atau hilang, minimnya akses pada lahan dan sumber penghidupan, serta tidak adanya akses pada pendidikan dan pekerjaan serta layanan dasar, semuanya berhubungan langsung terhadap kesejahteraan mereka. Tanpa suami, perempuan menjadi orang tua dan pemberi nafkah tunggal bagi keluarganya. Dampak dari kombinasi pelanggaran ini diderita oleh perempuan selama bertahun-tahun, bahkan dekade. Penting untuk dipahami bahwa temuan ini muncul secara konsisten dalam hampir semua cerita. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perempuan korban membutuhkan bantuan spesifik yang menyasar kebutuhan sosial dan ekonomi.

KEHILANGAN ANGGOTA KELUARGA

Banyak dari korban peristiwa 1965 bercerita bahwa ayah mereka ditahan atau dibunuh sehingga berdampak pada kehidupan mereka. Mereka menggambarkan bahwa sejak saat itu mereka harus memikul tanggung jawab di saat masih muda dan harus bekerja keras untuk mendapatkan uang agar dapat menafkahi dan menyekolahkan adik-adik mereka. Sebagian dari mereka terpaksa harus putus sekolah sehingga membatasi peluang kerja mereka di kemudian hari. Salah satu narasumber mengatakan bahwa ia membatalkan pernikahannya karena sibuk membesarkan adik-adiknya. Sering kali perempuan bertanggung jawab membesarkan adik-adik mereka, khususnya ketika ibu mereka masih menyusui atau hamil.

KEHILANGAN TANAH, RUMAH DAN SUMBER HIDUP

Di daerah operasi militer seperti Aceh dan Papua, serta di bekas kamp pengungsi di Tuapukan, perempuan harus kehilangan rumah, harta benda dan sumber penghidupan mereka seperti ternak atau kebun karena dihancurkan atau dicuri oleh militer atau milisi. Dampaknya secara langsung memengaruhi kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Mereka harus memulai lagi semuanya dari nol tanpa modal dan minim sokongan sumber daya. Memulai sesuatu dari awal tanpa modal juga harus dialami oleh para perempuan yang dipindahkan ke Pulau Buru dengan alasan ikut suami.

Satu perempuan di Aceh harus mencari kerja ke Malaysia demi mendapatkan cukup modal untuk memulai kembali pemulihannya dan menyekolahkan anak-anaknya. Para perempuan di Papua bercerita bagaimana mereka harus mengungsi ke pedalaman untuk menghindari kekerasan, kadang harus hidup di hutan sampai bertahun-tahun, sehingga mereka tidak dapat menggarap lahan dan kebun dan harus bertahan hidup dengan makan dedaunan, bunga-bunga dan buah-buahan liar. Sebagai akibatnya, kebun dan ternak terlantar untuk waktu yang lama sehingga menurunkan hasil dan produktivitasnya. Konflik dan adanya pembatasan kebebasan bergerak juga menghambat akses mereka untuk pergi ke pasar.

Kebutuhan ekonomi telah memaksa beberapa perempuan dan keluarganya untuk menjual tanah mereka, yang semakin menambah kerentanan mereka. Di Aceh, tiga perempuan melaporkan bahwa mereka dan keluarganya harus menjual atau menggadaikan tanah mereka untuk bertahan hidup atau untuk membayar tebusan agar dapat keluar dari penjara. Dalam kasus-kasus tersebut, harga tanah menjadi sangat murah karena kebutuhan mendesak dan dianggap terlalu tidak aman untuk bisa produktif secara penuh. Satu perempuan di Yogyakarta melaporkan bahwa karena ayahnya ditangkap, ibunya tidak punya pilihan kecuali menjual tanahnya dan menggunakan uangnya untuk membeli ternak.

Kesulitan ekonomi ini telah menggerus pemahaman perempuan tentang keadilan dan menghambat upaya pemulihan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa ketika ditanya apakah mereka telah mendapat ‘keadilan’, jawaban para perempuan tersebut umumnya negatif. Mereka mengungkapkan suatu konsep tentang keadilan yang tidak sekedar keinginan untuk melihat pelaku dihukum atau mendapat pengakuan dari aparat negara bahwa mereka tidak bersalah, namun juga keinginan agar negara semestinya berperan untuk menghidupi warga negaranya secara adil dan tanpa diskriminasi, agar mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat sebagai manusia. Dalam beberapa kasus, perempuan memasrahkan keadilan kepada Sang Pencipta, karena mereka tidak bisa melihat keadilan dapat dipenuhi dalam kehidupan ini.

STRATEGI UNTUK BERTAHAN

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti besarnya keteguhan, ketahanan dan kekuatan luar biasa dari para perempuan korban di tengah kesulitan yang mereka alami. Terlepas dari luka dan penderitaan yang dialami oleh

60 perempuan ini, entah bagaimana mereka dapat menemukan kekuatan untuk terus berjalan, membuat pengorbanan, mengambil risiko dan bekerja sangat keras. Perempuan-perempuan ini benar-benar penyintas yang tangguh.

Dengan minimnya pendidikan dan modal, banyak perempuan kini berkebun di tanahnya baik untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan, satu-satunya opsi menjadi buruh tani, bekerja di lahan orang lain mulai dari membajak tanah, menanam, membersihkan gulma, memanen, membedal dan menampi. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan harian.

Sebagian dari para perempuan ini mendapatkan penghasilan dari mengajar, mementaskan tarian atau kesenian lainnya, menjadi pengurus jenazah, bidan, atau buruh migran gelap di Malaysia. Satu perempuan di Yogyakarta hidup dari pemasukan sewa rumah yang ia warisi dari orang tuanya.

Banyak perempuan menunjukkan kemampuan berinovasi yang luar biasa dalam industri rumahan dan wirausaha. Sebagai contoh, ada perempuan yang menenun dan membuat tas dari plastik bekas; ada yang membuat wig dari rambut alami; ada yang mengolah tauge untuk dijual; ada yang mengumpulkan kapuk untuk bantal, dan ada pula yang membuat tempe. Perempuan lainnya menggunakan keterampilan menjahit, bordir dan membuat penganan dan kudapan untuk dijual di pasar, warung, atau di sekolah. Salah seorang perempuan hidup hanya dari berjualan pulsa, yang lainnya dari berjualan es krim. Beberapa perempuan lain berhasil mendapatkan modal untuk memulai usaha kecil, mulai dari toko kue, jasa cuci pakaian, atau salon.

TEMUAN KUNCI 5:
Para janda dan perempuan yang ditinggal sendiri akibat konflik menjadi sangat rentan dan membutuhkan bantuan khusus

Dari 60 narasumber dalam penelitian ini, sebelas orang adalah janda dan delapan orang adalah orang tua tunggal. Status janda di sini adalah

perempuan yang kehilangan suami akibat konflik ataupun masalah kesehatan yang muncul bertahun-tahun kemudian akibat dari trauma panjang, sedangkan orang tua atau ibu tunggal adalah perempuan yang membesarkan anaknya sendirian. Mereka termasuk juga korban pemerkosaan dan ditinggalkan suami karena kekerasan seksual yang dialaminya. Status sebagai janda, ibu tunggal dan korban pelanggaran HAM menjadikan mereka sangat rentan dan membutuhkan bantuan khusus.

Para janda terus didera diskriminasi dan stigma, dan sering mengalami penolakan dari keluarga suaminya. Hal ini membuat mereka rentan kehilangan tempat tinggal dan hak waris, serta menghambat akses mereka dalam mendapatkan modal sosial dan ekonomi. Demikian pula, ibu tunggal sering dikucilkan secara sosial dan menempati posisi marginal di komunitasnya. Para janda dan ibu tunggal juga rentan mengalami kemiskinan generasi kedua, yaitu tidak mampu memberikan pendidikan layak kepada anak-anaknya. Kondisi ini membuat mereka terjebak dalam siklus kemiskinan.

Beberapa perempuan harus terpisah dari suami karena lamanya mereka mendekam dalam penjara. Beberapa lainnya ditelantarkan suami karena kekerasan seksual yang mereka alami. Ada juga perempuan korban yang tidak mendapat kesempatan untuk menikah, karena masuk penjara pada saat muda dan kemudian memilih untuk mendukung keluarga yang membutuhkan.

TEMUAN KUNCI 6:
Anak-anak terperangkap dalam siklus kekerasan dan kemiskinan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perempuan korban untuk berjuang demi masa depan mereka

Penelitian ini dengan jelas memperlihatkan efek konflik pada anak-anak.[71] Cerita-cerita dari para perempuan korban mengingatkan kita tentang dampak lintas generasi dari konflik yang memerlukan penanganan dan pengambilan kebijakan serius terkait trauma, dan dampak psikologis dan sosio-ekonomi pada anak. Dari 60 perempuan dalam penelitian ini, 17 orang berusia di bawah 18 tahun ketika mereka mengalami penyiksaan, penahanan, perpindahan paksa, atau penahanan atau pembunuhan orang tuanya. Selanjutnya, satu perempuan dari Aceh bercerita tentang anaknya yang disiksa dan satu dari Papua menceritakan anaknya yang ditembak mati.

Peran perempuan sebagai pengasuh anak-anak di keluarga justru menyebabkan anak-anak mereka harus menyaksikan pelanggaran HAM, atau bahkan mengalaminya secara langsung. Lima perempuan pernah ditahan bersama anak-anaknya dan bercerita bagaimana mereka membawa anak-anak mereka ketika ditahan. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena sedang menyusui atau tidak ada orang lain yang dapat merawat anak mereka. Satu perempuan di Aceh menceritakan bagaimana anaknya mendengar interogasi dan penyiksaan ketika ikut ditahan. Seorang perempuan yang ditahan di Kupang pada tahun 1965 mengenang bagaimana anak-anaknya yang berusia tiga sampai tujuh tahun membawakannya makanan selama ia dipenjara. Anak perempuan seorang tahanan politik di Yogyakarta bercerita bagaimana

ia membawakan makanan kepada ayahnya sebelum ia dikirim ke Pulau Buru.

Di luar itu semua, bagi sebagian perempuan, pengalaman yang paling memilukan adalah ketika dipisahkan dari anak-anaknya ketika mereka ditahan. Anak-anak tinggal bersama ayah, kakek nenek atau kerabat lainnya sementara mereka ditahan, sebagian sampai tiga tahun lamanya. Kepedihan mereka bertambah ketika mereka masih harus menerima penghakiman dan diskriminasi dari masyarakat karena dianggap telah menelantarkan anak-anaknya ketika mereka pada akhirnya dibebaskan. Luka ini diingat oleh seorang penyintas di Aceh yang pernah ditahan dan disiksa selama empat tahun dan meninggalkan anaknya dengan ibunya yang sudah tua.

Tanpa salah satu atau kedua orang tuanya, anak menjadi semakin rentan. Hal ini secara khusus berlaku untuk anak-anak dari ibu tunggal atau janda yang kehilangan tulang punggung keluarganya, sehingga risiko kemiskinan dan putus sekolah mereka meningkat.

Konflik juga telah mengakibatkan hilangnya peluang bagi anak-anak untuk berkembang. Para penyintas perempuan peristiwa kekerasan 1965 terpaksa putus sekolah karena tidak kuat menghadapi diskriminasi. Salah satunya dari mereka menceritakan bahwa orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah dan dia harus ikut membantu mencari nafkah bagi adik-adiknya.

Berdasarkan cerita mereka, sembilan perempuan menyebut tentang stigma dan diskriminasi yang mereka alami ketika anak-anak karena status politik orang tua mereka, atau yang dirasakan oleh anak-anak mereka sendiri sekarang. Bagi penyintas kekejaman 1965, tiadanya pengakuan dari negara tentang penderitaan mereka menyebabkan keluarga-keluarga ini terus menyimpan cerita tentang penahanan dan penyiksaan sebagai rahasia keluarga.

Satu temuan positif adalah bahwa anak-anak para perempuan ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan luar biasa bagi mereka. Mayoritas perempuan mengungkapkan bahwa prioritas pertama mereka adalah memberi pendidikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Walau ini terus menjadi tantangan besar bagi sebagian besar perempuan dalam penelitian ini. Mereka juga bercerita tentang pengorbanan besar yang mereka lakukan untuk mendidik anak-anak mereka dan terus

mengerahkan segala upaya agar anak-anak mereka berhasil. Anak-anak dan cucu-cucu mereka juga terus menjadi inspirasi bagi mereka untuk memperjuangkan perdamaian.

TEMUAN KUNCI 7: *Pemindahan paksa memutuskan sumber penghidupan dan meningkatkan kerentanan perempuan*

Sejumlah 21 penyintas dari 60 perempuan pernah mengalami pemindahan paksa, paling tidak satu kali, dalam masa konflik atau kekerasan yang mereka alami.

Setelah Jajak Pendapat di Timor-Leste diumumkan, ratusan ribu orang Timor diusir paksa ke kamp-kamp pengungsian di Timor Barat. Semua narasumber dari Timor melaporkan bahwa mereka pergi karena pemerintah Indonesia memberitahu mereka bahwa perpindahan tersebut hanya sementara, dan bahwa mereka akan disediakan perumahan dan makanan. Banyak yang mengatakan mereka hanya membawa baju yang mereka pakai. Banyak dari mereka yang terpisah dari kerabatnya yang tinggal dan tidak pernah lagi bertemu keluarganya. Sebagian besar pengungsi berasal dari desa-desa yang pemimpinnya mendukung integrasi dengan Indonesia atau keluarga yang pernah bekerja di pemerintahan Indonesia atau milisi pro-integrasi (baik sukarela maupun dipaksa). Sebelas penyintas kekerasan 1999 yang kini tinggal di Kupang adalah mereka yang dipindah secara paksa ke kamp Tuapukan dengan dalih bahwa mereka akan diberi rumah dan tanah. Mereka kini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan sumber daya dan akses layanan yang sangat terbatas. Hanya satu orang yang melaporkan bahwa ia pernah kembali ke Timor-Leste melalui jalan setapak. Namun sebagian besar tidak memliki paspor dan uang untuk perjalanan ke Timor-Leste.

KUPANG 1999

11 PEREMPUAN
KINI BERUSIA: 30-74 TAHUN

MENGUNGSI PADA TAHUN 1999	11
PERNAH BERKUNJUNG KE TIMOR-LESTE	1
DIJANJIKAN TANAH DAN RUMAH	11
HIDUP SECARA TIDAK LAYAK	11
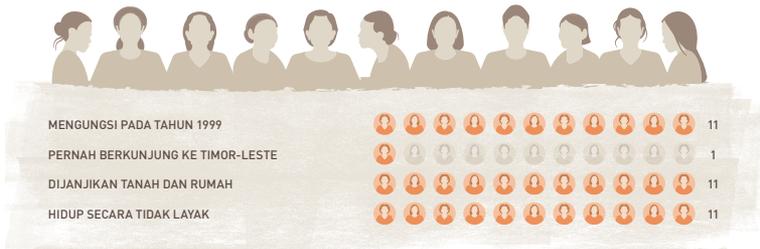
Dua perempuan korban di Aceh mengatakan bahwa mereka dipindahkan semasa konflik. Satu orang dipindahkan agar 'mudah dipantau' oleh militer, dan satunya lagi ditempatkan di rumah yang 'kosong' selama bertahun-tahun agar suaminya, yang dicurigai sebagai anggota GAM, tidak dapat pulang. Di antara para korban kekerasan 1965, delapan dikirim ke Pulau Buru dari Jawa selagi muda untuk ikut ayah dan suami mereka yang ditahan di sana.

Sebagaimana disebutkan pada Temuan Kunci 4, sebagian perempuan dari Aceh dan Papua pernah mengalami 'pemindahan paksa' ketika harus mengungsi ke pedalaman untuk bertahan hidup, kadang hidup bertahun-tahun di hutan dan meninggalkan sumber penghidupan mereka. Perempuan lainnya menyebutkan bahwa pembatasan bergerak yang diberlakukan selama operasi militer, membuat mereka sulit bergerak untuk mengakses sumber-sumber penghidupan mereka dan pasar.

Persoalan tanah dan hak milik juga menjadi sorotan perempuan di Aceh dan para penyintas kekerasan 1965. Di Aceh, tiga perempuan terpaksa menjual atau menggadaikan tanahnya untuk membayar suap agar mereka dibebaskan dari penahanan atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka semasa konflik. Dari korban kekerasan 1965, satu penyintas dari Yogyakarta melaporkan bahwa rumahnya sudah dikuasai orang lain selama ia berada di tahanan selama 13 tahun. Satu perempuan lagi dari Kupang menceritakan bagaimana tanah ayahnya diklaim kerabat laki-laki yang masih menuduh ayahnya sebagai anggota PKI dan mengklaim tanah tersebut karena ia hanya memiliki anak perempuan. Di Pulau Buru, satu penyintas dan suaminya menghadapi sengketa tanah dari anggota masyarakat adat setempat atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya.

TEMUAN KUNCI 8:
Perempuan korban rentan terhadap bentuk kekerasan baru, termasuk kekerasan domestik dan komunal

Kebanyakan perempuan korban dalam penelitian ini tidak mengalami satu peristiwa kekerasan saja, namun mengalami kekerasan dalam sebuah kontinum panjang. Konflik dan pelanggaran HAM telah meningkatkan kerentanan perempuan korban dan membuat mereka menjadi sasaran dari bentuk kekerasan baru, termasuk kekerasan dari konflik pertanahan, konflik keagamaan dan komunal, serta kekerasan domestik. Ketika komunitas dan pemerintah lokal di sekitar mereka tidak mengetahui atau tidak dapat mengapresiasi pengalaman pelanggaran masa lalu mereka, para perempuan ini dapat mengalami kembali penganiayaan atau eksploitasi seperti perempuan miskin lainnya di komunitasnya.

Para perempuan Aceh mengalami kekerasan domestik dari anggota keluarga lelaki (suami dan ayah, dalam dua kasus berbeda) yang juga adalah penyintas penyiksaan. Kurangnya layanan pemulihan trauma yang berkelanjutan bagi perempuan dan laki-laki membuat mereka terperangkap dalam siklus kekerasan. Di Pulau Buru, perempuan yang didatangkan sebagai gadis muda ke pulau penjara tersebut untuk mendampingi ayah mereka yang ditahan, diserang selama konflik keagamaan tahun 1999 yang mendera seluruh Maluku. Para penyerang menyasar keluarga Kristen, yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai dengan tetangga mereka yang Muslim.

TEMUAN KUNCI 9:
Pengakuan atas pengalaman kekerasan perempuan harus diintegrasikan dengan dukungan jangka panjang

Para perempuan mengartikulasikan kebutuhan akan pengakuan atas penderitaan dan pengorbanan mereka, serta komitmen tulus dari masyarakat dan negara untuk menghapus stigma yang masih mereka alami sampai sekarang.

Pengakuan ini harus dilengkapi dengan program jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat sipil, termasuk penyediaan layanan untuk menjawab kebutuhan para perempuan tersebut. Dukungan layanan tersebut mencakup kesehatan, ekonomi, psikososial serta kebutuhan akan kepastian hukum dan keamanan. Memberi pengakuan terhadap penyintas bukanlah akhir dari proses, melainkan awal. Sederhananya, tanpa adanya tindak lanjut melalui dukungan multi-sektor setelah para perempuan ini mengungkapkan kekerasan yang mereka alami, baik dengan bersaksi di pengadilan atau di depan publik, atau bahkan memberikan keterangan kepada peneliti, adalah tidak etis. Hal ini sejalan dengan Rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Etika dan Keamanan untuk Penelitian, Dokumentasi dan Pemantauan Kekerasan Seksual dalam Keadaan Darurat[72] yang menyatakan bahwa, "Penanganan dan dukungan dasar bagi para penyintas harus tersedia secara lokal sebelum memulai segala kegiatan yang mungkin melibatkan orang-orang tersebut dalam mengungkapkan informasi tentang pengalaman kekerasan seksual mereka."

Selain kebutuhan praktis para penyintas yang digambarkan di atas, kelompok penyintas perempuan dalam penelitian ini telah mengidentifikasi lebih banyak kebutuhan strategis. Perempuan di Aceh misalnya, telah bicara tentang transformasi Rumoh Geudong yang saat ini memiliki reputasi buruk menjadi ruang memorial publik dan pendidikan, untuk mengajarkan kepada generasi muda tentang apa yang pernah mereka alami di sana. Mayoritas perempuan menginginkan agar pemerintah mengakui penderitaan yang mereka alami, sekaligus memberi penghargaan kepada kontribusi mereka dalam berbagai perjuangan melawan ketidakadilan. Dalam konteks ini, mereka tidak hanya dianggap sebagai korban, namun juga sebagai kontributor aktif dalam proses perdamaian.

Hingga kini, pemerintah Indonesia masih belum menyampaikan pengakuan resmi kepada para korban. Namun prakarsa masyarakat sipil sudah cukup banyak mengisi kekosongan yang dibiarkan pemerintah yang terus

menyangkal terjadinya pelanggaran massal di masa lalu. Kelompok masyarakat sipil dan lembaga-lembaga HAM menemukan berbagai cara untuk memberi pengakuan kepada korban melalui berbagai upaya pengungkapan kebenaran dan dokumentasi. Namun demikian, bantuan dan dukungan jangka panjang bagi para korban dan keluarganya masih menjadi kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi.

TEMUAN KUNCI 10:
Perempuan korban membutuhkan program khusus untuk menangani trauma, kesehatan reproduksi dan lanjut usia untuk memperkuat jaring sosial yang telah mereka bangun

Kondisi perempuan sering tidak diperhatikan dalam penanganan situasi pascakonflik. Status yang mereka sandang sebagai penyintas kekerasan memiliki masa kadaluarsa dan dengan berlalunya fase penanganan pascakonflik dan rekonstruksi, kebutuhan khusus mereka berkenaan dengan kekerasan yang dialaminya tidak masuk dalam pertimbangan rumusan kebijakan dan perencanaan jangka panjang. Sedikit sekali sumber daya yang diarahkan untuk menanggulangi dampak jangka panjang dari konflik terhadap perempuan. Pejabat pemerintah ingin melupakan masa lalu dengan mengabaikannya.

Perempuan korban hanya memiliki sedikit sumber daya untuk menghadapi kehilangan mereka, baik nyawa anggota keluarganya, keamanan, tanah, sumber penghidupan, atau harta benda. Sementara itu, mereka juga harus terus menghadapi diskriminasi dan pengucilan. Semua ini memperberat jejaring dukungan sosial mereka yang memang sudah lemah karena pengucilan dari lingkungan sekitar akibat status mereka sebagai korban atau anak dari kelompok etnis atau politik yang dijadikan sasaran. Tanah mereka diambil, rumah dikuasai, bahkan keluarga mereka sendiri menolak menampung mereka karena takut atau curiga. Marjinalisasi ini menjadi semakin dalam ketika mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan pembahasan akses bantuan di tingkat desa.

Penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan penyintas kekerasan terkait konflik memiliki kebutuhan jangka panjang yang perlu diartikulasikan dengan jelas dalam forum pengambilan keputusan.

Perempuan penyintas harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada semua tingkatan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan dan ditanggapi.

Layanan kesehatan dasar adalah persoalan spesifik, khususnya perawatan bagi lanjut usia, kesehatan seksual dan reproduksi, dan kesehatan jiwa. Sejumlah 23 perempuan secara khusus menyebutkan, atau jelas terlihat menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental. Sebagian perempuan ini menyebutkan betapa parahnya dampak fisik yang mereka alami pada saat terjadinya peristiwa kekerasan. Perempuan lainnya juga mengeluhkan ganguan kronis yang mereka alami seperti disabilitas, gangguan tidur, dan rasa sakit yang terus menerus. Terkait kesehatan seksual dan reproduksi, dua perempuan melaporkan bahwa mereka mengalami keguguran pada saat peristiwa kekerasan berlangsung, dan satu melaporkan gangguan menstruasi yang terus dialami. Namun tak satu pun menyebutkan aborsi atau penyakit seksual menular, sebagai dampak kekerasan seksual. Ini mungkin menjadi satu aspek yang memerlukan penelitian dan dukungan lebih lanjut.

Dari semua narasumber, 28 orang berusia di atas 60 tahun pada saat penelitian berlangsung. Pada saat laporan ini ditulis, dua orang dari mereka meninggal akibat kondisi kesehatan yang buruk. Memburuknya kesehatan dan semakin menuanya para penyintas ini memperburuk dampak kekerasan yang dialami dan mereka sering kali bercerita bahwa masih memiliki tanggung jawab untuk merawat anak dan cucu. Namun, sampai saat ini tidak ada program kesehatan khusus bagi penyintas pelanggaran HAM lanjut usia yang mereka terima.

Para perempuan juga sering melaporkan bahwa mereka mengalami depresi, gelisah, dan rasa malu. Sebagian perempuan pernah menerima dukungan konseling dari LSM perempuan dan organisasi masyarakat sipil

yang sangat diapresiasi oleh para korban. Hal ini dapat menjadi satu bidang yang membutuhkan dukungan lebih lanjut.

Para perempuan dalam penelitian ini juga menyebutkan dampak sosial dari kekerasan yang mereka alami, yaitu munculnya sikap menyalahkan penyintas dan stigma sosial. Hal ini berpotensi sangat merusak kondisi psikologis para penyintas dan menghasilkan kerusakan lebih lanjut. Ketakutan akan stigma sosial adalah kendala besar bagi pengakuan dan dapat mengisolasi perempuan dari layanan yang paling mereka butuhkan. Sejumlah perempuan melaporkan adanya penolakan dari suaminya setelah mengalami kekerasan seksual serta penolakan dan pengucilan sosial.

Terlepas dari adanya kebutuhan nyata para penyintas, tak ada advokasi nyata untuk kebutuhan mereka yang menyebabkan munculnya kesenjangan dalam pembuatan kebijakan dan penyusunan program. Penelitian ini menunjukkan bahwa akses pada layanan kesehatan yang memadai sangat sulit atau bahkan tidak ada, baik di pedesaan maupun perkotaan, karena tidak dapat diakses atau tidak terjangkau.

Kesehatan dan pendidikan reproduksi masih tetap langka di Indonesia. Bagi sebagian besar kebutuhan kesehatan reproduksi dari korban kekerasan seksual masih diabaikan, bahkan termasuk mereka yang sudah pernah terlibat dalam komisi kebenaran dan pengadilan. Layanan kesehatan mental juga tidak memadai, temasuk dukungan sesama untuk pemulihan trauma. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan korban tidak memiliki kesempatan untuk bicara tentang pelanggaran dan penderitaan yang pernah mereka alami. Akibatnya, trauma mereka seringkali terpendam dan tidak tertangani.

Sejumlah kecil korban dari kekerasan 1965 yang kasusnya telah diinvestigasi oleh Komnas HAM mendapatkan hak untuk bantuan medis dan psiko-sosial dari LPSK. Lima dari 60 perempuan dalam penelitian ini mendapat tanggungan dari LPSK untuk biaya kesehatannya. Sementara itu, para perempuan yang tinggal di kamp Tuapukan di Timor Barat menyampaikan tentang betapa terbatasnya akses pada layanan kesehatan dan kebutuhan dasar air dan sanitasi.

Di Aceh, pemerintah setempat membuat program untuk mendukung para janda konflik melalui program diyat pada tahun 2002, berupa pemberian kompensasi kepada korban oleh pelaku. Namun korban

kekerasan seksual dikecualikan. Para penerima bantuan adalah anggota keluarga mereka yang dibunuh, dihilangkan, atau yang menjadi "cacat" atau menderita kerugian material. Dari sebelas perempuan Aceh dalam penelitian ini, empat perempuan mampu mengkases skema kompensasi ini, itu pun karena kematian suaminya, bukan karena pelanggaran yang mereka sendiri alami. Satu perempuan lainnya dapat mengakses bantuan keuangan dari program reintegrasi veteran.

Satu temuan yang jelas dari penelitian ini adalah bahwa dalam ketiadaan layanan kesehatan mental dan dukungan sosial, perempuan saling mendukung melalui pertemanan dan kelompok sosial yang lebih formal. Contohnya, beberapa perempuan di Papua menyebut dukungan dari sesama aktivis gereja setelah ia mengalami perkosaan. Sampai saat ini di Papua, dengan masih berlangsungnya konflik, dukungan atau program yang menyasar secara khusus terhadap perempuan korban konflik sangat sulit didapatkan oleh para narsumber.

TEMUAN KUNCI 11:
Perempuan korban dan anaknya mengalami diskriminasi terkait hak kewarganegaraan seperti kartu identitas, akta kelahiran dan buku nikah

Puluhan tahun setelah peristiwa kekerasan mereka alami, para perempuan korban masih menghadapi diskriminasi dan peminggiran. Stigma ini melemahkan dukungan sosial yang menjadi andalan banyak orang untuk bertahan, dan telah mengakibatkan diskriminasi yang semakin menjauhkan mereka terhadap layanan pemerintah dan sumber-sumber bantuan. Bahkan anak-anak para penyintas mengalami stigma sosial dan diskriminasi ketika mereka mencari pekerjaan atau sekolah, serta ketika mereka membutuhkan dokumen identitas kewarganegaraan, seperti KTP, akta kelahiran dan akta nikah.

Anak-anak perempuan tahanan politik di Pulau Buru yang menikahi para mantan tahanan politik dalam perkawinan massal yang diselenggarakan militer tahun 1978 menerima buku nikah mereka yang menyatakan bahwa pekerjaan mereka adalah "tahanan G-30-S PKI." Ketika hal ini ditemukan dalam penelitian, para pejabat lokal telah memberikan permintaan maaf dan mengeluarkan buku nikah baru. Di tempat yang sama, beberapa mantan tahanan politik tidak mempunyai KTP, dan membuat mereka kesulitan saat mendaftar program jaminan kesehatan nasional yang baru (BPJS).

TEMUAN KUNCI 12:
Pengabaian situs kekerasan membuat impunitas atas kekerasan terhadap perempuan semakin kuat

Perempuan korban merasakan bahwa impunitas terus hidup di lokasi tempat mereka mengalami pelanggaran. Kesunyian semakin mereka rasakan ketika masyarakat dan otoritas di sekitar mereka tidak memberi pengakuan apapun tentang apa yang terjadi terhadap mereka dan tidak memberikan ruang untuk mengingat tentang hari-hari atau tempat di mana kekerasan tersebut pernah terjadi. Kesunyian kolektif ini memberi pesan kepada para penyintas bahwa apa yang telah terjadi memang patut diterima, bahwa penyintas pantas mengalami apa yang terjadi pada mereka, dan bahwa ini boleh terjadi lagi.

Maka, salah satu langkah penting untuk mendapat keadilan adalah dengan memberi pengakuan atas apa yang terjadi dengan melakukan peringatan, baik peringatan yang berkaitan dengan waktu maupun tempat di mana kekerasan tersebut terjadi.

Di Aceh, para perempuan korban ingin mengubah kesan lokasi-lokasi kekejaman menjadi tempat bermanfaat di mana orang-orang dapat mengingat dan belajar tentang sejarah agar hal tersebut tidak terulang lagi, seperti perpustakaan publik, taman kanak-kanak, museum dan *memorial park*. Contohnya, Rumoh Geudong yang menjadi pusat penyiksaan dalam operasi tahun 1989-1998 dan dikenal karena kekerasan seksualnya. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu narasumber, “Tak satu pun perempuan yang ditahan di Rumoh Geudong tidak mengalami penyiksaan seksual.” Tiga dari sebelas perempuan yang berpartisipasi dalam penelitian ini pernah ditahan dan disiksa di lokasi ini. Situs ini, serta banyak situs lain di Indonesia, kini terlantar dan menjadi saksi bisu kekejaman masa lalu. Namun para peserta penelitian juga ingin mengenang apa yang pernah terjadi dan mengakui kontribusi para perempuan Aceh dalam perjuangan untuk keadilan.

Namun, upaya kelompok penyintas kekerasan 1965 untuk mengorganisasi diri atau memperingati peristiwa penting masih mengundang respon negatif dari penguasa dan kelompok ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa impunitas atas kekerasan di masa lalu masih kuat mencengkram.

Rekomendasi

Setelah menyimak bersama perjuangan perempuan korban yang meliputi periode sangat panjang di Indonesia, kami harus menyimpulkan bahwa impunitas masih membelenggu kehidupan mereka. Impunitas ini membungkam suara perempuan, merawat kekerasan dan ketidakpedulian. Kondisi kehidupan para perempuan korban menjadi bukti bahwa tindakan kita dalam menangani penyelesaian kekerasan di masa lalu masih jauh dari retorika kita sendiri.

Membebaskan perempuan dari impunitas menuntut kita untuk melakukan langkah yang serius dalam menjamin akses perempuan terhadap keadilan, mendukung para korban untuk membangun kembali kehidupan mereka setelah konflik, dan memberikan pengakuan atas kekerasan yang mereka alami dan dampaknya. Pendekatan kita harus bersifat transformatif dan dirancang dalam jangka panjang, memiliki pandangan jauh ke depan dan mampu mengubah struktur ketimpangan yang mendasari kekerasan yang dialami perempuan dalam konflik. Kita harus menangani pelanggaran hak-hak sipil dan politik, sekaligus pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi. Terakhir, segala bentuk intervensi harus memastikan adanya partisipasi korban. Mereka harus terlibat secara aktif dalam identifikasi dan advokasi kebutuhan dan prioritas mereka sendiri, dan pencarian untuk solusi menghadapi tantangan. Pemberdayaan perempuan korban harus dilihat sebagai bagian dari mandat Konstitusi untuk menjamin peran serta perempuan korban menjadi warga aktif dalam kehidupan bernegara.

Rekomendasi yang terkait dengan temuan kunci penelitian ini dapat dilihat di bawah ini:

TEMUAN KUNCI 1
Perempuan mengalami kekerasan sistematis selama konflik

TEMUAN KUNCI 2
Perempuan menghadapi keadilan yang melemah

TEMUAN KUNCI 4
Walaupun perempuan korban mempunyai daya juang dan kreatifitas untuk bertahan, masalah ekonomi membuat mereka sulit mengakses keadilan

TEMUAN KUNCI 9
Pengakuan atas pengalaman kekerasan perempuan harus diintegrasikan dengan dukungan jangka panjang

TEMUAN KUNCI 10
Perempuan korban membutuhkan program khusus untuk menangani trauma, kesehatan reproduksi dan lanjut usia untuk memperkuat jaring sosial yang telah mereka bangun

PEMERINTAH
harus kembali menegaskan komitmennya untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan selama dan setelah konflik, dan mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap perempuan.

1. Menuntaskan penyelesaian secara efektif terhadap tujuh perkara yang sudah diinvestigasi oleh Komnas HAM hingga ada putusan akhir pengadilan dan memberikan reparasi pada korban, dengan perhatian khusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan.

2. Meningkatkan efektifitas mekanisme perlindungan saksi dan korban dalam seluruh proses penanganan perkara pelanggaran berat HAM masa lalu, termasuk dengan menguatkan mandat dan kapasitas LPSK, mendukung pembentukan dana abadi untuk pemulihan

korban pelanggaran HAM, yang dikelola bersama dan didasarkan atas kerjasama strategis dengan organisasi-organisasi pendamping korban, dengan perhatian khusus pada perempuan korban.

3. Berdasarkan inisiatif dan kewenangan Presiden, membentuk mekanisme pengungkapan kebenaran yang efektif dan partisipatif yang mencakup pelanggaran-pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam kurun waktu 1965-2005, dengan mandat yang secara spesifik memperhatikan kekerasan terhadap perempuan, sebagai landasan bagi proses rekonsiliasi sosial dalam masyarakat.

4. Memenuhi hak-hak korban pelanggaran berat HAM atas kebenaran, keadilan, reparasi dan jaminan ketidakberulangan, termasuk upaya khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses korban pada pelayanan, melalui dukungan konkrit dari pemerintah daerah maupun kementrian terkait.

5. Mendorong peran mekanisme ASEAN untuk HAM (AICHR) dan komisi untuk perempuan dan anak (ACWC) untuk menentang impunitas atas kekerasan terhadap perempuan selama konflik di semua negara-negara ASEAN, berdasarkan standar HAM yang berlaku.

KOMNAS PEREMPUAN

bersama mitra kerjanya menggagas pendekatan inovatif untuk mendukung akses korban pada keadilan dan menegakkan hak-hak perempuan korban. Secara khusus, membentuk sebuah mekanisme khusus untuk mendokumentasi situasi dan mengadvokasi tuntutan perempuan korban di wilayah-wilayah pascakonflik dan konflik, termasuk Aceh, Papua, kasus kekerasan 1965.

KOMNAS HAM BERSAMA KOMNAS PEREMPUAN

melakukan penyelidikan khusus tentang kasus pelanggaran HAM berat dengan fokus kekerasan terhadap perempuan, termasuk di sini kasus kekerasan 1965, Aceh, Papua, serta kasus-kasus lainnya. Penyelidikan ini seharusnya menghasilkan laporan untuk mekanisme nasional untuk pengungkapan kebenaran (sesuai dengan rekomendasi terhadap Pemerintah, poin c) maupun rekomendasi kepada Kejaksaan Agung

untuk pengadilan HAM.

MASYARAKAT SIPIL DAN GERAKAN PEREMPUAN

1. Mengelola program-program inovatif untuk memperkuat akses perempuan korban terhadap keadilan dalam situasi konflik dan pascakonflik, mendukung kegiatan belajar dan berjejaring, serta kegiatan sosial dan ekonomi untuk perempuan korban. Memberi bantuan hukum dalam isu perlindungan terhadap diskriminasi dan hak atas tanah, untuk mendukung akses terhadap keadilan bagi kasus pelanggaran berat HAM.

2. Membangun “rumah belajar” sebagai wadah bagi perempuan korban untuk mengakses informasi dan layanan, dan juga untuk berbagi dan mendokumentasikan pelanggaran HAM, melakukan pelatihan, advokasi, dan penelitian tentang permasalahan yang mereka hadapi. Juga, membantu para perempuan korban mengakses program ekonomi, termasuk upaya inovatif untuk menciptakan lapangan kerja, akses pada pelatihan keterampilan dan program mikro-kredit jangka panjang.

TEMUAN KUNCI 3

Perempuan berinisiatif untuk membangun perdamaian di tingkat lokal namun terpinggirkan dalam negosiasi dan proses perdamaian resmi yang diprakarsai pemerintah

KOMNAS PEREMPUAN BERSAMA MENTERI NEGARA UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN MASYARAKAT SIPIL

mendukung program pembedayaan perempuan korban untuk mengambil peran kepemimpinan dalam membangun perdamaian, dengan perhatian khusus untuk Papua, termasuk memastikan terjadinya dialog Papua-Jakarta yang melibatkan partisipasi yang berarti dari perempuan korban.

PEMERINTAH ACEH DAN PAPUA
menggunakan kewenangan Otonomi Khusus untuk mengakui dan memperkuat peran perempuan dalam mendorong dan merawat perdamaian. Pemerintahan Papua, harus segera mengesahkan dan mengimplementasikan draft Perdasus untuk pemulihan perempuan korban. Di Aceh, gerakan perempuan dan DPRA mempelajari ulang gagasan masyarakat sipil untuk program pemulihan dan pemberdayaan perempuan korban.

TEMUAN KUNCI 5
Para janda dan perempuan yang ditinggal sendiri akibat konflik menjadi sangat rentan dan membutuhkan bantuan khusus

TEMUAN KUNCI 6
Anak-anak terperangkap dalam siklus kekerasan dan kemiskinan. Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi perempuan korban untuk berjuang demi masa depan mereka

PEMERINTAH
meninjau dan mengubah undang-undang dan peraturan yang secara substansi atau dalam pelaksanaannya mendiskriminasi perempuan kepala rumah tangga dan mendorong perubahan perilaku di masyarakat untuk menghapuskan stigma terhadap mereka.

PEMERINTAH BERSAMA MASYARAKAT SIPIL
memastikan bahwa perempuan kepala keluarga memiliki akses terhadap bantuan hukum untuk melindungi hak-hak sosial ekonomi dan hak sipil-politik mereka.

JARINGAN MASYARAKAT ADAT DAN LEMBAGA ADAT
mendorong transformasi hukum adat untuk memastikan peneguhan hak-hak perempuan kepala keluarga termasuk hak atas tanah dan rumah, hak atas warisan, dan hak-hak lainnya.

PEMERINTAH DI WILAYAH PASCAKONFLIK, KHUSUSNYA ACEH DAN PAPUA
menyediakan layanan khusus untuk anak-anak korban seperti beasiswa

sampai tingkat perguruan tinggi, pelatihan keterampilan, kesehatan dan dukungan psikososial.

MASYARAKAT SIPIL DAN AKADEMISI
melakukan penelitian tentang dampak kekerasan terkait konflik terhadap generasi penerus, termasuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan mobilitas sosial bagi anak-anak korban, misalnya dalam mengakses layanan, mengakses lapangan pekerjaan dll.

TEMUAN KUNCI 7
Pemindahan paksa memutuskan sumber penghidupan dan meningkatkan kerentanan perempuan

PEMERINTAH
menghibahkan tanah beserta sertifikat kepada perempuan pengungsi yang telah memilih untuk menetap di wilayah baru, khususnya bagi para pengungsi perempuan Timor-Timur yang masih berada di kamp-kamp di Timor-Barat. Kepastian atas kepemilikan tanah dan rumah akan memungkinkan mereka untuk membangun masa depan untuk keluarga mereka.

PEMERINTAH
harus menjamin adanya bantuan kemanusiaan dan perlindungan untuk pengungsi perempuan dalam situasi darurat. Harus ada upaya serius untuk memfasilitasi pemulangan secara sukarela, aman dan bermartabat pada saat konflik telah usai, termasuk para keluarga dari Desa Savanajaya, Pulau Buru, yang melarikan diri keluar pada saat terjadi konflik antaragama pada tahun 1999.

MASYARAKAT SIPIL
perlu mengembangkan pendampingan untuk memperkuat keterampilan mata pencaharian dan sumber daya perempuan korban yang tinggal di pengungsian, termasuk dengan menggunakan teknologi tepat-guna dan teknologi informasi. Perhatian khusus perlu diberikan kepada pengungsi perempuan yang sudah lanjut usia dan hidup tanpa anggota keluarganya.

TEMUAN KUNCI 8
Perempuan korban rentan terhadap bentuk kekerasan baru, termasuk kekerasan domestik dan komunal

TEMUAN KUNCI 11
Perempuan korban dan anaknya mengalami diskriminasi terkait hak kewarganegaraan seperti kartu identitas, akta kelahiran dan buku nikah

PEMERINTAH
menjamin rehabilitasi jangka panjang bagi perempuan korban melalui layanan dan dukungan sosial ekonomi.

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
melakukan pendidikan masyarakat dalam rangka mengatasi diskriminasi terhadap perempuan korban, khususnya korban kekerasan seksual. Pendekatan harus dilakukan terhadap anggota keluarga korban, termasuk suami dan mertua untuk mengubah sikap yang menyalahkan korban. Juga, lembaga agama yang berpengaruh dalam masyarakat untuk menghapus diskriminasi dan melindungi perempuan korban dari kekerasan baru.

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
termasuk lembaga pemberi layanan, mengintegrasikan pelayanan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dengan dukungan bagi perempuan korban konflik. Perempuan korban konflik dapat menjadi bagian dari jaringan dukungan sebaya, ataupun mentor bagi korban kekerasan yang baru.

PEMERINTAH
harus segera menghentikan praktek diskriminatif dalam mengeluarkan surat-surat identitas seperti KTP, akta perkawinan, atau akta kelahiran sebagai bagian dari upaya memulihkan kepercayaan korban terhadap negara. Serta memudahkan proses untuk menerbitkan ulang dokumen untuk perempuan korban dan keluarga mereka yang kehilangan surat-surat selama konflik.

TEMUAN KUNCI 12
Pengabaian situs kekerasan membuat impunitas atas kekerasan terhadap perempuan semakin kuat

KOMNAS PEREMPUAN
dan jaringannya mendukung peringatan atas peristiwa atau situs yang mempunyai arti penting dalam sejarah perempuan korban. Hal ini penting untuk mendidik warga tentang kekejaman masa lalu dan mencegah berulangnya kekerasan. Inisiatif ini dapat didorong oleh masyarakat sipil, tetapi pada akhirnya negara memiliki tugas untuk merawat ingatan tentang kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam konflik. Perempuan korban harus terlibat penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan.

KOMNAS PEREMPUAN
terus mendorong pengakuan negara seperti permintaan maaf resmi, jaminan untuk tak mengulang dan serta pengakuan publik tentang pengorbanan dan kontribusi perempuan korban. Pengakuan ini adalah bagian penting dari membangun masa depan yang lebih baik.

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
mengakui peran khusus perempuan korban dalam mengingat kejahatan sistematis terhadap perempuan dan mendukung upaya untuk menghadirkan masa depan yang bebas dari kekerasan. Juga mendukung upaya untuk belajar tentang memorialisasi dari situs-situs lain antarwilayah maupun di luar negeri.

Catatan Akhir

[1] Panel Khusus untuk Kejahatan Serius (Pengadilan Distrik Dili), Timor-Leste, The Prosecutor v Joao Franca da Silva alias Johni Franca, Judgement, Kasus No. 04a/2001, 5 Desember 2002.

[2] Bandingkan dengan 7 dari 51 perempuan Timor-Leste dan 3 dari 29 perempuan Myanmar yang bisa mengakses pengadilan. Lihat Surviving on Their Own dan Enduring Impunity: Women Surviving Atrocities without Justice, (Jakarta: AJAR, 2015).

[3] Komisi HAM PBB, Promotion and Protection of Human Rights: Impunity, Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity, E/CN.4/2005/102 (8 Februari 2005) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement Sekalipun bukan standar hukum formal, prinsip-prinsip ini sudah digunakan secara meluas sebagai referensi dan sudah diperkuat oleh Mahkamah Pidana Internasional, badan-badan perjanjian HAM, dan komisi-komisi penyelidikan.

[4] Impunity Principles, E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005) 7.

[5] Lima tahun kemudian, pada tahun 2000, Dewan Keamanan PBB menegaskan pentingnya memperjuangkan keadilan bagi perempuan pemerkosaan untuk memperkuat upaya-upaya mempromosikan perdamaian dan keamanan, dinyatakan "... the responsibility of all States to put an end to impunity and to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, and war crimes, including those relating to sexual and other violence against women and girls..." Dokumen Dewan Keamanan PBB S/RES/ 1325 (2000.) Resolusi-resolusi untuk menindaklanjuti itu meliputi UNSCR 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), dan 1983 (2011).

[6] UN Doc E/1993/22/Annex III, paragraf 5 dan 7, dikutip dari Steiner, Henry J. dan Philip Alston. International Human rights In Context: Law, Politics, Morals. Edisi Kedua. (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 238.

[7] Lihat pengertian dan mekanisme keadilan transisi, https://www.ictj.org/about/transitional-justice.

[8] Peradilan yang saat ini berlangsung adalah Dewan Luar Biasa di Pengadilan Kamboja yang mencari kejahatan-kejahatan kemanusiaan atas pernikahan paksa serta pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam pernikahan paksa. 'Transformative Reparations for Sexual and Gender-Based Violence at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia: Reflections, Recommendations and Next Steps, Report of the Workshop', 28 November 2014, Australian Human Rights Centre and the Asian International Justice Initiative, UNSW, hlm.8. Pada tahun 1948, sebuah pengadilan Belanda di

Batavia (kini Jakarta) memutuskan bahwa pasukan Jepang bersalah atas tindakan pemerkosaan sebagai sebuah kejahatan perang. Lihat Kelly Askin, War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunal," Martinus Nijhoff Publishers, 1997, hlm.85

[9] International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS, Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto (Jakarta: ICTJ, 2012).

[10] Lihat Deklarasi Nairobe tentang Hak Perempuan dan Perempuan Anak untuk Mendapatkan Penyelesaian dan Reparasi, dapat diakses di https://www.fidh.org/IMG/pdf/NAIROBI_DECLARATIONeng.pdf.

[11] Dewan Keamanan PBB, UN Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences on Intersections between Culture and Violence against Women, 17 Januari 2007, A/HRC/4/34, http://www.refworld.org/docid/461e2c602.html pada 30 Agustus 2015.

[12] Lihat Naila Kabeer, diambil dari Bibliografi Kerja mengenai Pengarusutamaan Gender, Jenewa, 1997, http://www.un.org/womenwatch/daw/news/gender.htm pada 18 September 2015.

[13] Galuh Wandita, dkk., Melepas Belenggu Impunitas: Sebuah Panduan untuk Pemahaman dan Aksi bagi Perempuan Penyintas (Jakarta: AJAR, 2015)

[14] Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas, (Jakarta: KKPK, 2014).

[15] Keputusan Presiden No. 18 tahun 2014, untuk mengimplementasikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung penelitian dan program-program bagi perempuan dan anak-anak yang terkena dampak konflik, sekalipun implementasi dari keputusan ini masih harus dipantau.

[16] Saskia E. Wieringa, "The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism", Journal of Women's History, 15.1 (2003), hlm. 70-91.

[17]Josepha Sukartiningsih, "Ketika perempuan menjadi tapol [When women became political prisoners]," tulisan akademis yang tidak dipublikasikan, tidak ada tanggal.

[18] Komisi Pencari Kebenaran, dipimpin oleh Mayor Jendral Sumarmo pada tahun 1965, memberikan hasil di angka 78.500 –yang diperdebatkan oleh beberapa anggota Komisi itu sendiri. Setahun kemudian, KOPKAMTIB (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) melakukan sebuah survei yang menghasilkan angka satu juta orang terbunuh. Lihat kutipan di Annie Pohlman, "Women and the Indonesian Killings of 1965-1966: Gender Variables and Possible Directions for Research," http://coombs.anu.edu.au/ASAA/conference/proceedings/asaa-2004-procl, diperoleh pada tanggal 18 Januari 2006.

[19] Lihat Saskia E. Wieringa, op. cit., hlm. 70-91.

[20] Lihat Laporan Pemantauan HAM Perempuan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kejahatan terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berbasis Gender: Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007), hlm. 12-4.

[21] Human Rights Watch, Indonesia: The War in Aceh (August 2001), hlm. 8

[22] Ibid, hlm. 23.

[23] Komnas Perempuan, Sebagai Korban Juga Survivor: Pengalaman dan Suara Perempuan Pengungsi Aceh tentang Kekerasan dan Diskriminasi (April 2006), http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/02/Sebagai-Korban-juga-Survivor.pdf

[24] Galuh Wandita, "In New York, Papua I can't breathe", http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/12/in-new-york-papua-i-can-t-breathe.html.

[25] Benedict Anderson dan Ruth McVey. A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Ithaca, (New York: Cornell University Southeast Asia Program, 1971), hlm. 46-53.
[26] John Roosa. Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia, (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2006), hlm. 54.
[27] Baskara T. Wardaya SJ, ed. The Grand Scenario: The 1965 Tragedy in the Eyes of a Catholic dalam Baskara T. Wardaya SJ, (ed.), Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence. (Clayton: Monash Univeristy Publishing, 2013).
[28] "Studi Kasus 17: Kekerasan terhadap Tahanan Politik di Kantor CPM Yogyakarta", Narasi Kasus Pelanggaran HAM 1965-2005, Database KKPK, dikutip dalam "Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan demi Memutus Rantai Impunitas", KKPK, Jakarta (2014), hlm. 75.
[29] Antonius Sumarwan SJ, "Menyeberangi Sungai Air Mata: Kisah Tragis Tapol 65 dan Upaya Rekonsiliasi"
[30]John Roosa, Ayu Ratih & Hilmar Farid (ed.), Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65, ELSAM, Volunteers for Humanity, (Jakarta: ISSI, 2004).
[31] Sejak tanggal 26 Oktober 1965, Pangdam Kodim VII/Diponegoro menyatakan bahwa seluruh daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dinyatakan dalam keadaan perang dan jam malam diberlakukan setiap hari mulai pukul 17.30 hingga pukul 05.30 keesokan harinya. Status serupa juga diberlakukan lebih dulu di Jakarta. Keputusan ini disahkan oleh Presiden melalui Keputusan No. 140/KOTI/1965.
[32] Gantyo Koespradono. KICK ANDY: Menonton dengan Hati. Edisi Pertama. (Yogyakarta: Bentang, 2008), hlm. 269-271.
[33] Laporan Tahunan Amnesti Internasional, 1968-1969, hlm. 9.
[34] Ibid.
[35] Laporan Tahunan Amnesti Internasional, 1969-1970, hlm. 8.
[36] Lihat Pramoedya Ananta Toer, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu (Jakarta: Lentera, 1995). Lihat juga Hersri Setiawan, Diburu di Pulau Buru (Yogyakarta: Galang Press, 2006).
[37] Juklak Kopkamtib [Pedoman Pelaksanaan Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Umum] KOPKAM/10/1968 (I) dalam Komnas Perempuan, Gender-Based Crimes Against Humanity: Listening to the Voices of Women Survivors of 1965 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007), hlm.102
[38] Lihat KKPK, op. cit., hlm. 156.
[39] Ibid.
[40] Testimoni Hartini dalam wawancara individual pada tanggal 18 November 2014.
[41] Wawancara peneliti dengan Wasimun, Sekretaris Desa Savanajaya pada tanggal 30 September 2013.
[42] Kesaksian Suhartini, anak tertua Ngabinem, tanggal 27 September 2013.
[43] Lihat Mery Kolimon, Liliya Wetangterah (eds), op. cit.
[44] Steven G. Farram, "Revolution, religion and magic; The PKI in West Timor, 1924-1966," Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 158 (1), 2002, hlm. 32.
[45] Ibid, hlm. 38.
[46] Ibid, hlm. 39.
[47] El Tari, Memori Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1958-1972, Jilid I, 263 sebagaimana dikutip dalam Farram, 2003, hlm. 307.
[48] G. F. Brookes, "The Influences of Some Primal Religious Experiences on the Beliefs and Practices of Atoni Christians and their Challenge to the Protestant Evangelical Church of Timor"

(M. Th. dissertation, Melbourne College of Divinity, 1980), hlm. 85.
[49] Nela Loy Bhoga, Martha Bire, dan Golda Sooai, “Peristiwa 1965 dan Aktivis Perempuan di Kota Kupang,” dalam Mery Kolimon, Liliya Wetangterah (eds.), op.cit., hlm. 198.
[50] Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 1981 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G. 30 S/PKI; Keputusan Presiden No. 16 tahun 1990 mengenai Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.
[51] Pada tahun 1977, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah 415.00 atau sekitar $2,410 untuk satu juta rupiah. Pada Mei 2015, nilai ini akan setara dengan $9,720.
[52] Lihat buku kedua dari Laporan Tahun KKPK, op. cit.
[53] J. Betrand, Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 145-146.
[54] International Crisis Group, ‘Indonesia: Ending Repression in Irian Jaya’, Report No. 23, 20 September 2001, hlm. 3.
[55] Lihat laporan ICTJ, Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi (Jakarta: ICTJ, 2012), hlm. 7-9.
[56] Benjamin Reilly, ‘Internal Conflict and Regional Security in Asia and the Pacific’ in Pacific Review, Vol. 14, No. 1, Februari 2002, hlm. 118.
[57] ICG Asia Briefing Paper, 9 April 2003, hlm. 5.
[58] Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Bisa dilihat di: http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/5275/kp0881999.htm.
[59] Lihat International Center for Transitional Justice (ICTJ) dan KontraS, Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto (Jakarta: ICTJ, 2012), hlm. 2 dan 20.
[60] Lihat misalnya, Human Rights Watch, Aceh Under Martial Law: Inside the Secret War, December 2003, hlm. 18-37.
[61] CAVR, Chega! (Jakarta: KPG, 2013). Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak, 7.8.2.1., Anak-anak sebagai TBO dan keikutsertaan dalam operasi.
[62] Chega!, Bagian 7.8: Pelanggaran Hak Anak, 7.8.4., Pemindahan Anak-anak ke Indonesia.
[63] Ibid.
[64] Chega! Bab 7.3., para. 485.
[65] Karen Campbell-Nelson, dkk., Perempuan Yang Dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat, (Kupang: JKPIT & PIKUL, 2002).
[66] Chega! Bab 7.3. para 495; Perempuan Yang Dibawa/h Laki-laki Yang Kalah.
[67] “Yang Terjebak di Tapal Batas” di TEMPO interaktif http://tempointeraktif.com/khusus/selusur/65tahun/page18.php
[68] Waktu itu, yang mengatur bantuan seng untuk atap rumah pengungsi adalah pemimpin dari Viqueque.
[69] Lihat Asia Justice and Rights, “Merentang Juang: Suara Perempuan Pejuang Penyintas Kekerasan,” Jakarta, 2013.
[70] Di antara berbagai upaya perdamaian tersebut, terdapat satu orang perempuan GAM yang terlibat dalam proses perdamaian yang diinisiasi oleh pemerintah.
[71] Berdasarkan Konvensi Hak Anak tahun 1989. Definisi anak pada pasal 1 adalah, “Untuk tujuan Konvensi ini, pengertian anak adalah setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun, kecuali jika ada ketentuan lain yang berlaku untuk anak, tergantung mana yang lebih dulu terpenuhi.”
[72] Dokumen mengenai etika ini dapat diakses di http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf